

KAJIAN PENINGKATAN KAPASITAS DESA DAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN SETIAP DESA

BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON

LAPORAN
AKHIR

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Cirebon dituntut harus mampu antara lain mengetahui potensi-potensi ekonomi yang dimiliki, melalui pemetaan potensi yang dimiliki, identifikasi sektor-sektor unggulan serta merencanakan infrastruktur ekonomi yang dimiliki sebagai dasar untuk menggerakkan roda perekonomian khususnya, dan pembangunan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu kajian ini secara spesifik ditujukan untuk mendeskripsikan berbagai ragam potensi daerah yang secara ekonomis diasumsikan dapat menjadi sektor andalan Kabupaten Cirebon dalam kerangka untuk menciptakan struktur ekonomi daerah yang lebih mapan di masa yang akan datang. Pola penggunaan dan pemanfaatan perumusan kebijakan daerah dengan berbasis pada karakter lokal menjadi karakter dasar penelitian ini dengan mencoba membuat taksonomi per daerah kelurahan/desa yang akan ditampilkan sebagai bahan evaluasi untuk membentuk karakteristik potensi ekonomi berbasis desa.

Kegiatan Kajian Peningkatan Kapasitas Desa dan Pengembangan Produk Unggulan Setiap Desa ini difokuskan pada upaya untuk mengamati berbagai potensi ekonomi yang seharusnya didorong dan dikembangkan di Kabupaten Cirebon, khususnya terkait dengan potensi setiap desa yang tersebar di 40 kecamatan. Peran kebijakan pembangunan di daerah yang integralistik menjadi acuan utama untuk melihat sejauh mana potensi tersebut dapat dikembangkan melalui integrasi program dan cakupan program dalam naungan kebijakan pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten Cirebon. Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan program berbasis potensi produk unggulan desa di Kabupaten Cirebon.

Cirebon, November 2019

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud & Tujuan
- 1.4. Manfaat
- 1.5. Ruang Lingkup
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- 2.1. Desa
- 2.2. Potensi Desa
- 2.3. Pembangunan Desa
- 2.4. Pembangunan Ekonomi
- 2.5. Pertumbuhan Ekonomi
- 2.6. Kelembagaan dan Peran Kelembagaan
- 2.7. Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Produk Unggulan Desa
- 2.8. Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Tipologi Desa
- 2.9. Konsep Produk Unggulan Daerah
- 2.10. Pengembangan PUD Model Inkubator
- 2.11. Pengembangan PUD Model Klaster
- 2.12. Pengembangan PUD Model OVOP
- 2.13. Pengembangan PUD Model Kompetensi Inti
- 2.14. Gambaran Analisis Produk Unggulan Desa
- 2.15. Indeks Desa Membangun
- 2.16. Hasil Penelitian sebelumnya
- 2.17. Kerangka Pemikiran

BAB III. PENDEKATAN DAN METODOLOGI PENELITIAN

- 3.1. Pendekatan metoda penelitian
- 3.2. Teknik pengumpulan data
- 3.3. Metode analisis data
- 3.4. Tahapan Pelaksanaan
- 3.5. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan
- 3.6. Jadwal Penugasan Tenaga Ahli
- 3.7. Jadwal Pelaksanaan

BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI STUDI

- 4.1. Kabupaten Cirebon

- 4.2. Kecamatan Plumbon
- 4.3. Kecamatan Kedawung
- 4.4. Kecamatan Sumber
- 4.5. Kecamatan Depok
- 4.6. Kecamatan Sumber
- 4.7. Kecamatan Weru
- 4.8. Kecamatan Klangeran
- 4.9. Kecamatan Arjawinangun
- 4.10. Kecamatan Lemah Abang
- 4.11. Kecamatan Sedong
- 4.12. Kecamatan Mundu
- 4.13. Kecamatan Suranenggala
- 4.14. Kecamatan Jamblang
- 4.15. Kecamatan Tengah Tani
- 4.16. Kecamatan Beber
- 4.17. Kecamatan Susukan
- 4.18. Kecamatan Karangwareng
- 4.19. Kecamatan Dukupuntang
- 4.20. Kecamatan Pangenan
- 4.21. Kecamatan Gegesik Kulon
- 4.22. Kecamatan Astanajapura
- 4.23. Kecamatan Pabedilan
- 4.24. Kecamatan Karangsembung
- 4.25. Kecamatan Plered
- 4.26. Kecamatan Gempol
- 4.27. Kecamatan Waled
- 4.28. Kecamatan Palimanan
- 4.29. Kecamatan Talun
- 4.30. Kecamatan Pabauran
- 4.31. Kecamatan Greged
- 4.32. Kecamatan Kapetakan
- 4.33. Kecamatan Ciledug
- 4.34. Kecamatan Susukan
- 4.35. Kecamatan Gebang
- 4.36. Kecamatan Ciwaringin
- 4.37. Kecamatan Babakan
- 4.38. Kecamatan Kaliwedi
- 4.39. Kecamatan Pasaleman
- 4.40. Kecamatan Losari
- 4.41. Kecamatan Panguragan
- 4.42. Kecamatan Gunungjati

BAB V. ANALISA KAJIAN PRODUK

- 5.1. Pendahuluan
- 5.2. Proses pemilihan sektor atau komoditas
- 5.3. Analisa Proguldes Inkubator
- 5.4. Analisa Proguldes Klaster
- 5.5. Analisa Proguldes OVOP
- 5.6. Analisa Proguldes Model Analisa Inti

BAB VI. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA

- 6.1. Gambaran hasil analisis produk unggulan desa
- 6.2. Upaya peningkatan peran Pemerintah Desa dan Kapasitas Desa
- 6.3. Penguatan peran Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan

BAB VII. ANALISIS ANGGARAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA

- 7.1. APBD Kabupaten Cirebon dan SKPD terkait produk unggulan desa
- 7.2. APBDesa, Dana Desa, dan Indeks Desa Mandiri
- 7.3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

BAB VIII. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA

- 8.1. Arah Kebijakan
- 8.2. Program aksi dan Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Desa

BAB IX. MATRIKS HASIL KAJIAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA

- 9.1. Kondisi Produk Unggulan Setiap Desa di Kabupaten Cirebon
- 9.2. Kelompok Produk Unggulan Desa
- 9.3. Jenis Pengelolaan Produk Unggulan Desa
- 9.4. Jangka Waktu Wirausaha
- 9.5. Jenis Produk atau Jasa Unggulan Desa
- 9.6. Matriks penjabaran rincian jenis produk unggulan desa

BAB X. PENUTUP

- 10.1. Kesimpulan
- 10.2. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2. Kerangka Berfikir

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan

Gambar 5.2. Pusat Oleh-oleh di Desa Wisata

Gambar 5.3. Pusat Furniture

Gambar 6.1. Jabatan Responden di Pemerintah Desa

Gambar 6.2. Lama masa tugas responden di pemerintah desa

Gambar 6.3. Aliran hubungan antara kelembagaan dengan Proguldes

Gambar 9.1. Sektor Produk Unggulan Desa

Gambar 9.2. Jenis Pengelolaan Proguldes

Gambar 9.3. Jangka Waktu Berwirausaha

DAFTAR TABEL

Tabel 7.1. Pagu Dana Desa Kecamatan Arjawinangun

Tabel 7.41. Pagu Dana Desa Kecamatan Weru

Tabel 9.1. Produk Unggulan Desa: Minuman

Tabel 9.4. Perbup pendukung Proguldes Makanan

Tabel 9.12. Status IDM dan Pengelolaan dengan BUMDes

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan desa memasuki babak baru untuk penataan dan pembangunan wilayahnya (Yansen 2014) dengan membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di desa (Faozi 2015). UU 6/2014 oleh banyak pihak dianggap sangat fenomenal, tonggak baru bagi sebuah negara dengan sistem pembangunan *bottom-up* yang sebelumnya pembangunan menganut sistem *up-bottom* (Azhar 2015) yang akan menjadikan kedudukan desa lebih diakui (Ismadani 2015), sekaligus memberikan payung hukum yang kuat terhadap eksistensi desa (Risadi 2015).

Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 desa sekarang menjadi subjek pemerintahan, yaitu dari sebelumnya sekedar objek pembangunan sekarang menjadi subjek pembangunan (Hoesada 2014). Desa tidak lagi sebatas menjadi objek pembangunan, namun desa bisa menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan. Undang-undang tersebut menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Eko 2014).

Lebih jauh, Muqowam dalam Eko (2014) mengemukakan bahwa UU Desa ini hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik,

berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya, yang dikenal sebagai Catur Sakti Desa.

Undang-undang desa tersebut diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan alat untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Undang-Undang Desa tersebut memberikan kesempatan bagi desa dan alat andalan bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan. Desa akan layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, menjadi pondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Pembangunan sarana prasarana desa dan dusun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara (Hoesada, 2014). Desa telah mendapatkan dana miliaran rupiah. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro, 2014).

Memperhatikan adanya harapan dan tantangan yang terjadi di desa ada dua pendekatan yang lazim digunakan untuk mengkaji kapasitas desa, pertama fokus pada peningkatan kapasitas desa dalam perspektif Ilmu Administrasi Negara penekanan pembahasan kajian pada aspek kelembagaan dan sumberdaya manusia desa terutama sumber daya aparatur desa (Wahyudi, 2016). Kedua, fokus pada peningkatan kapasitas desa dalam perspektif BUMDesa untuk pengembangan produk unggulan desa sehingga diharapkan Visi Undang-Undang Desa terwujud. Adapun lokus kajian ini adalah Empat Puluh (40) kecamatan dan seratus dua puluh (120) desa di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019.

Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuat perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Desa diberikan kewenangan yang besar dan alokasi anggaran yang cukup besar terutama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Diantara tujuan pengaturan Desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah :

- a. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- b. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- c. Mencegah arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota, dengan merencanakan dan melaksanakan kegiatan di desa yang dapat meningkatkan *skill*/keterampilan usaha penduduk desa mengelola potensi yang dimiliki oleh desa yang dapat menciptakan lapangan kerja yang baru dan memajukan perekonomian di desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sumber pendapatan Desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa;
 - 1) Hasil Usaha Desa (BUMDesa Tanah Kas Desa)
 - 2) Hasil Aset (Pasar Desa, tempat wisata desa)
 - 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong
 - 4) Lain-lain PAD (Hasil pungutan desa)
- b. Pendapatan Transfer
 - 1) Dana Desa dari APBN
 - 2) Alokasi Dana Desa

3) Bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten

4) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten

5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

c. Pendapatan Lain-lain

1) Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak mengikat
(berupa uang)

2) Lain-lain Pendapatan yang sah

Hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga/Desa lain dan bantuan perusahaan yang ada di desa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini Pemerintah telah mengeluarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Sesuai ketentuan Pasal 30 A Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a). Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus);
- b). Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6 % (enam per seratus); dan c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10 % (sepuluh per seratus), dari anggaran Transfer ke Daerah. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa. Dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN disebutkan bahwa “Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.”

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 diantaranya bahwa

kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019 untuk membiayai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa terutama pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang difokuskan pada kebijakan Satu Desa Satu Produk Unggulan yang diputuskan dalam musyawarah desa. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, terutama bidang kegiatan, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung dan sarana olahraga Desa. Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

Sampai saat ini di Kabupaten Cirebon masih sedikit desa yang telah mengembangkan dan menetapkan potensi yang dimilikinya untuk menjadi produk unggulan desa yang berbeda dengan desa lainnya. Beberapa hal yang menjadikan produk unggulan desa penting atau urgen untuk dikembangkan yaitu:

- a. Daerah/wilayah/desa perlu mengetahui sektor atau komoditi yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dengan cepat, baik karena mempunyai potensi sumber daya alamnya maupun karena sektor atau komoditas tersebut memiliki *competitive advantage* (keunggulan kompetitif) untuk dikembangkan.
- b. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk yang dihasilkan oleh komunitas masyarakat desa.
- c. Memberikan implikasi keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) terhadap sektor atau komoditas lainnya.
- d. Memperluas penyerapan tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran.

- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa dengan menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Adapun maksud Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari :

1. Indeks Ketahanan Sosial. Terdiri dari dimensi modal sosial (memiliki solidaritas sosial, toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial); kesehatan (pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, jaminan kesehatan); Dimensi pendidikan (akses ke pendidikan dasar dan menengah, PNF dan ke pengetahuan); Dimensi Permukiman (akses ke air bersih/air minum layak, sanitasi, listrik, informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi. Terdiri atas dimensi ekonomi yang meliputi keragaman produksi masyarakat desa, Tersedia pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah)
3. Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Terdiri dari dimensi ekologi meliputi kualitas lingkungan, potensi rawan bencana dan tanggap bencana Status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa

Status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi dalam 5 status Desa yakni:

- a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada; Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
- b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Sembada; Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
- c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya; Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
- d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-Madya; Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
- e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama. Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang ditetapkan tanggal 24 Agustus 2018 antara lain disebutkan di Kabupaten Cirebon desa tertinggal 41 desa, mayoritas merupakan desa berkembang yaitu sebanyak 322 desa, desa maju sebanyak 47 desa dan 1 desa berklasifikasi desa mandiri. Sedangkan berdasarkan pemutakhiran IDM yang tertuang dalam Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Cirebon tahun 2019, IDM di Kabupaten Cirebon sudah mengalami peningkatan. Desa berklasifikasi Desa Mandiri berjumlah 2 desa, desa berklasifikasi Desa Maju menjadi 87 desa, Desa Berkembang sebanyak 311 desa, dan desa berklasifikasi Desa Tertinggal sejumlah 12 desa.

Sejak tahun 2018 telah dilakukan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan oleh Pendamping Lokal Desa dan pendamping desa dengan berpedoman kepada SOP-IDM yang diterbitkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Salah satu isi pertanyaan kuesioner IDM dalam pemutakhiran IDM tahun 2018 dan 2019 adalah produk unggulan desa di masing-masing desa. Jadi, ada atau tidak adanya produk unggulan desa di masing-masing desa mempengaruhi skor di dimensi ekonomi.

Berdasarkan penjelasan dan paparan di atas, dan meningkatnya anggaran yang dikelola oleh Desa dalam APBDesa dari berbagai sumber terutama dana desa dari APBN (minimal desa mengelola APBDesa sebesar 1,4 Milyar) maka dalam rangka meningkatkan kapasitas dan status Kemajuan dan Kemandirian Desa dari

desa tertinggal menjadi desa maju dan desa mandiri serta mengelola potensi yang dimiliki oleh desa secara optimal yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan maka perlu adanya Kegiatan Kajian Peningkatan Kapasitas Desa dan Pengembangan Produk Unggulan setiap Desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi kajian ini secara substansial maupun operasional adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Desa dan Kelurahan Sejahtera;
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019;
18. Rancangan Akhir Raperda RPJM Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, 9 September 2019.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Produk Unggulan Desa dan Pengembangan Produk setiap Desa adalah:

- a. Melakukan identifikasi, melakukan kajian potensi, sehingga masing-masing desa mengetahui sektor atau komoditas yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan, baik karena mempunyai potensi sumber daya alam maupun karena sektor atau komoditas tersebut memiliki keunggulan kompetitif untuk dikembangkan.
- b. Melakukan analisis dan kajian serta rekomendasi teknis mengenai sektor atau komoditas yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dapat meningkat nilai tambahnya dan mempunyai daya saing produk yang dihasilkan sebagai produk unggulan desa.
- c. Melakukan panduan teknis pengembangan sektor atau komoditas yang mempunyai potensi besar sebagai produk unggulan desa sebagai bahan acuan

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDesa

- d. Menginventarisir dan memberdayakan peran berbagai pihak yang terkait terutama SKPD terkait, dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran produk unggulan desa.
- e. Meningkatkan kapasitas Desa dalam hal kualitas perencanaan pembangunan desa yang sudah mengakomodir produk unggulan desa dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes serta dokumen penganggaran dalam APBDesa, sebagai salah satu upaya memperluas penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran desa.

1.4. MANFAAT

Hasil kajian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon pada umum dan khususnya pada Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan memanfaatkan kemampuan desa atas semua sumber daya yang dimiliki oleh desa berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal yang dibungkus dengan kerjasama dengan berbagai pihak serta adanya inovasi dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Sehingga secara nyata akan memberi kesempatan kerja lebih produktif dan pada akhirnya akan mendatangkan investasi di desa karena produk potensial yang dimiliki desa hasilnya adalah pendapatan masyarakat dan pemerintah desa meningkat karena produk unggulan desa memiliki daya saing tinggi yang mampu mendorong produk unggulan desa masuk ke pasar yang lebih luas.

1.5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Sebagaimana dikemukakan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dalam kegiatan Penyusunan Kajian Produk Unggulan Desa dan Pengembangan Produk Unggulan Setiap Desa di Kabupaten Cirebon adalah:

- a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi data profil desa dan monografi desa dari desa yang akan dijadikan objek kajian;
- b. Melakukan identifikasi, melakukan kajian potensi, sehingga dapat diketahui sektor atau komoditas dari masing-masing desa yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan baik karena mempunyai potensi sumber daya alam maupun karena sektor atau komoditas tersebut memiliki keunggulan kompetitif untuk dikembangkan;
- c. Melakukan Tahap Pemilihan Komoditas sebagai Produk Unggulan Desa sesuai standar teknis dan data yang tersedia;
- d. Melakukan analisis dan kajian serta rekomendasi teknis mengenai sektor atau komoditas yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dapat meningkat nilai tambahnya dan mempunyai daya saing produk yang dihasilkan sebagai produk unggulan desa;
- e. Melakukan rekomendasi teknis pengembangan sektor atau komoditas yang mempunyai potensi besar sebagai produk unggulan desa sebagai bahan acuan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dalam RPJMDes, RKPDDes dan APBDDesa;
- f. Menginventarisir dan memberdayakan peran berbagai pihak yang terkait terutama SKPD terkait, dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran produk unggulan desa;

- g. Meningkatkan kapasitas Desa dalam hal kualitas perencanaan pembangunan desa yang sudah mengakomodir produk unggulan desa dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes serta dokumen penganggaran dalam APBDDesa, sebagai salah satu upaya memperluas penyerapan tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran di desa;
- h. Menyusun matriks hasil kajian pengembangan produk unggulan setiap desa di Kabupaten Cirebon yang dijadikan objek kajian;
- i. Menyusun laporan akhir dan executive summary penyusunan kajian produk unggulan desa dan pengembangan produk unggulan setiap desa di Kabupaten Cirebon.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Pendahuluan memuat: Bab Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pendekatan dan Metodologi Penelitian termasuk didalamnya terdapat Rencana Kerja Pelaksanaan Penelitian oleh penyedia jasa dilengkapi dengan jadwal personil dan kerangka laporan yang telah disempurnakan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak/SPK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan, setelah dilakukan pembahasan bersama Tim Supervisi Daerah.

Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan memuat Bab Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pendekatan dan Metodologi Penelitian, Gambaran Umum Lokasi Studi, Analisis Kajian Produk Unggulan Desa

Laporan Antara harus diserahkan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak SPK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan, setelah dilakukan pembahasan bersama Tim Supervisi Daerah.

Laporan Akhir memuat:

Bab I: Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum yang terkait, maksud dan tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan

Bab II: Tinjauan Pustaka memuat kajian/tinjauan pustaka mengenai kapasitas desa dan produk unggulan desa, hasil penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran

Bab III: Pendekatan dan Metodologi penelitian yang memuat pendekatan metoda penelitian, metode/teknik pengumpulan data, dan metode analisis

Bab IV: Gambaran Umum Lokasi Studi memuat data kependudukan, kondisi geografis, kondisi sarana dan prasarana di desa, data profil desa, status kemajuan dan kemandirian desa yang dikaji

Bab V: Analisis Kajian Produk Unggulan Desa memuat proses tahap pemilihan sektor atau komoditas yang menjadi produk unggulan desa sesuai standar melalui FGD, analisis produk unggulan

Bab VI: Penguatan Kelembagaan Pengembangan Produk Unggulan Desa memuat gambaran hasil analisis produk unggulan desa, upaya peningkatan peran pemerintah desa dan kapasitas desa dalam hal kualitas perencanaan pembangunan desa yang sudah mengakomodir produk unggulan desa dalam dokumen RPJMDesa dan RKPDesa serta dokumen penganggaran dalam APBDesa, penguatan peran perangkat daerah, swasta/dunia usaha, lembaga keuangan/perbankan dan Masyarakat dalam Program Pengembangan Produk Unggulan Desa di Kabupaten Cirebon.

Bab VII: Analisis Anggaran Pengembangan Produk Unggulan Desa dari APBD Kabupaten melalui SKPD terkait, dari APBDesa melalui perencanaan dan penggunaan dana desa dari APBN sesuai ketentuan Kemendes Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa dan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Bab VIII: Berisi tentang arah kebijakan, program aksi dan kegiatan dalam upaya pengembangan produk unggulan desa di Kabupaten Cirebon

Bab IX: Matriks hasil kajian pengembangan produk unggulan setiap desa di Kabupaten Cirebon yang dijadikan obyek kajian

Bab X: Penutup memuat kesimpulan dan rekomendasi yang memuat rekomendasi teknis pengembangan sektor atau komoditas yang mempunyai potensi besar sebagai produk unggulan desa sebagai bahan acuan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa dalam RPJMDes, RKPDes dan APBDesa dan peran SKPD teknis untuk mendukung pengembangan produk unggulan desa.

Lampiran

Album Peta Potensi Produk Unggulan desa dari desa yang dijadikan objek kajian

Laporan Akhir harus diserahkan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SPK diterbitkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) buku laporan akhir. Laporan Akhir merupakan hasil akhir rumusan/keepakatan sektoral dan daerah serta merupakan penyempurnaan dari Draft Laporan Akhir yang telah dibahas bersama dengan pemangku kepentingan terkait dan menampung masukan dari berbagai pihak terutama pejabat PPHP.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. DESA

Sejarah panjang pengaturan tentang desa yang telah dimulai sejak tahun 1948, yang momentumnya pada era reformasi dan puncaknya pada tahun 2014 (Hoesada 2014), tidak lain dalam rangka untuk mencari bentuk dan format ideal yang bisa menempatkan posisi desa sebagai suatu daerah yang memiliki sifat istimewa, heterogen, kejelasan status serta kepastian hukumnya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Faozi, 2015). Regulasi atas pengelolaan desa mulai UndangUndang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UndangUndang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Penjelasan UU 6/2014).

Berikut ini pengertian Desa menurut beberapa sumber.

1. Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2. Menurut R. Bintarto (1989); Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.
4. Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999; Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten
5. Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

2.2. POTENSI DESA

Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa.

Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Potensi Fisik, Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa berupa: i). Lahan, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial cocok bagi tanaman padi, jagung, dan kacang, jenis tanah berkapur cocok bagi tanaman jati dan tebu. Pada lahan juga dimungkinkan terjadi eksploitasi bahan tambang seperti batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, batu marmer, dan sebagainya. ii). Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral. iii). Air, pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata air.

berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari. iv). Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah. Pada ketinggian tertentu, suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Seperti perkebunan buah, tempat rekreasi, dan tempat peristirahatan sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa. v). Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa. vi). Ternak berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk. vii). Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.

2. Potensi Nonfisik, Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri. Adapun potensi desa non fisik tersebut antara lain: i. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang

tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan dalam membangun pedesaan. ii. Lembaga dan Organisasi Sosial, lembaga atau organisasi sosial merupakan suatu badan perkumpulan yang membantu masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari, seperti: a) Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain b) Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompok pencapir, penyuluhan, simulasi dan lain-lain. c) Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA. d) Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa. iii. Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa. Contoh: kepala desa, kepala dusun, kepala adat, dan lain-lain. Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Sedangkan Berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga: 1. wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat di daerah berpotensi subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis 2. wilayah desa berpotensi sedang, terdapat di daerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis 3. wilayah desa berpotensi rendah, terdapat di daerah pertanian

tidak subur, topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan.

2.3. PEMBANGUNAN DI DESA

Desa memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni,

Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

2.4. PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi daerah merupakan fungsi dari potensi sumberdaya alam, tenaga kerja dan sumberdaya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan

pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas. Sebelum mengetahui makna pembangunan ekonomi daerah terlebih dahulu harus mengetahui pengertian daerah. Pengertian ditinjau dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian, yaitu (Arsyad, 2002) :

- a. Daerah homogen adalah suatu daerah dimana kegiatan ekonomi terjadi diberbagai pelosok ruang dan terdapat sifat-sifat yang sama, baik dari segi pendapatan per kapitanya, sosial budayanya, geografinya, dan sebagainya.
- b. Daerah nodal adalah suatu daerah sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.
- c. Daerah perencanaan atau daerah administrasi adalah suatu daerah sebagai suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya.

Sementara itu, beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan daerah dari suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai, yaitu (Todaro, 2000):

1. Ketahanan (*Sustenance*) : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*) : Pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. *Freedom from servitude* : Kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Oleh karena itu, kebijakan ekonomi dalam era otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di

daerah dan di lain pihak, terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal guna mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi daerah di daerahnya dalam rangka membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Rasyid, 2002).

Indikator pembangunan ekonomi diperlukan untuk mengukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Manfaat utama dari indikator tersebut adalah agar dapat digunakan untuk memperbandingkan tingkat kemajuan pembangunan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah atau negara dan mengetahui corak pembangunan setiap wilayah atau negara. Indikator-indikator dapat dibedakan menjadi 3 yaitu (Arsyad, 2010).

a. Indikator moneter

- a. Pendapatan Per Kapita, merupakan indikator yang paling sering digunakan sebagai tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Pendapatan per kapita merupakan indikator atas kinerja perekonomian secara keseluruhan. Pendapatan per kapita adalah indikator moneter atas setiap kegiatan ekonomi penduduk suatu negara.

Indikator Kesejahteraan Ekonomi Bersih, indikator ini merupakan penyempurna metode perhitungan GNP dalam upaya untuk memperoleh suatu indikator pembangunan ekonomi yang lebih baik yaitu dengan mengenal konsep *Net Economic Welfare* (NEW). Penyempurnaan metode perhitungan GNP dilakukan dengan dua cara yaitu dengan koreksi positif dan negatif. Koreksi positif ini mengharuskan untuk memperhatikan waktu senggang dan perkembangan sektor ekonomi informal, sedangkan koreksi negatif berkaitan dengan masalah

kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan disektor produktif.

b. Indikator *Non-Moneter*

a. Indikator Sosial, indikator ini digunakan untuk mengelompokkan berbagai studi mengenai metode untuk membandingkan tingkat kesejahteraan suatu negara kedalam tiga kelompok yaitu kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan di beberapa negara dengan memperbaiki metode yang digunakan dalam perhitungan pendapatan konvensional, dan kelompok yang membandingkan tingkat kesejahteraan setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter seperti jumlah kendaraan bermotor, tingkat elektrifikasi, konsumsi minyak, jumlah penduduk yang bersekolah, dan sebagainya.

b. Indeks kualitas hidup, dalam indikator ini ada tiga indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini yaitu indeks harapan hidup, indeks kematian bayi, dan indeks melek huruf.

c. Indikator Campuran

a. Indikator susenas inti merupakan mengembangkan suatu indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana dan fertilitas, ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, akses ke media massa.

b. Indeks pembangunan manusia, yang diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendapatan riil per kapita berdasarkan disparitas daya beli.

Pengertian ekonomi basis di suatu wilayah tidak bersifat statis melainkan dinamis. Artinya pada tahun tertentu mungkin saja sektor tersebut merupakan sektor basis, namun pada tahun berikutnya belum tentu sektor tersebut secara otomatis menjadi sektor basis. Sektor basis bisa mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah :

1. perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi,
2. perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah,
3. perkembangan teknologi, dan
4. adanya pengembangan prasarana ekonomi dan sosial.

Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah :

1. adanya perubahan permintaan di luar daerah, dan
2. kehabisan cadangan sumberdaya.

Menurut Glasson (1978) semakin banyak sektor basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke wilayah tersebut menambah permintaan terhadap barang dan jasa didalamnya dan menimbulkan kenaikan volume sektor non basis. Dengan kata lain sektor basis berhubungan langsung dengan permintaan dari luar, sedangkan sektor non basis berhubungan secara tidak langsung, yaitu melalui sektor basis terlebih dahulu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sektor basis merupakan penggerak utama dalam perekonomian suatu wilayah.

Analisis basis dan non basis pada umumnya didasarkan atas nilai tambah atau lapangan kerja. Penggabungan lapangan kerja basis dan lapangan kerja non basis merupakan total lapangan kerja yang tersedia untuk wilayah tersebut. Demikian pula penjumlahan pendapatan sektor basis dan pendapatan sektor non basis (Tarigan, 2005).

Menurut Richardson (2001), konsep ekonomi basis pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah terjadi karena ada efek pengganda dari pembelanjaan kembali pendapatan yang diperoleh melalui penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah dan dipasarkan keluar wilayah.

Pembangunan ekonomi merupakan kemampuan ekonomi nasional, dimana keadaan ekonomi yang mula-mula relatif statis selama jangka waktu cukup lama, untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5-7% atau lebih per tahun. Menurut Todaro dan Smith (2003) keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia, dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Pembangunan daerah pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan daerah yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antara pembangunan sektoral, dan kaitannya dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif menuju

tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Secara mendasar dalam perencanaan pembangunan pada dasarnya terdapat tiga aspek perencanaan, yaitu makro, sektoral dan regional, yang ketiganya tersusun dalam satu kesatuan (Kartasasmita, 1996). Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar baru, dan transformasi pengetahuan (Adisasmita, 2005).

2.5. PERTUMBUHAN EKONOMI

Menurut Boediono (1999) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses tersebut, karena proses mengandung unsur dinamis. Para teoritis ilmu ekonomi pembangunan hingga sekarang, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para teoritis tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang immaterial seperti kenikmatan, kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tenteram yang dirasakan masyarakat luas.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan unsur penting dan utama dalam menciptakan daerah yang mandiri yang dicita-citakan melalui kebijakan desentralisasi.

Pembangunan ekonomi daerah dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang

perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerahnya.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya finansial dan bahkan sumberdaya kelembagaan. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Menurut Sudarsono (2001), dinamika keunggulan daerah di masa mendatang ditandai dengan mampu tidaknya daerah dalam meraih peluang menghadapi kompetisi pasar bebas baik di tingkat regional maupun global. Beberapa langkah dan strategi yang perlu dilakukan agar daerah mampu berkompetisi antara lain :

1. Birokrasi pemerintah perlu melakukan reorientasi peran dan tanggungjawabnya yakni hanya bersifat mengarah dan membina bukan menentukan (*steering than rowing*). Sehingga peran dan tanggungjawab pemerintah daerah hanya berkisar pada bidang-bidang dimana sektor swasta atau pihak ketiga lainnya tidak memungkinkan untuk melakukan tugas tersebut, misalnya dalam situasi terjadinya kegagalan pasar (*market failure*).

2. Birokrasi Pemda harus dapat berkiprah secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima untuk meraih investasi dalam dan luar negeri
3. Membentuk sistem dan jaringan kerja (*networking*) dengan lembaga/asosiasi bisnis dan atase perdagangan luar negeri, khususnya dalam mendukung pemasaran produk ekspor.
4. Mengembangkan lembaga R & D (*research and development*) terhadap jenis produksi unggulan untuk menjamin kualitas produk, kestabilan harga, kebutuhan pasar (*demand*) dan jaminan kontinuitas ketersediaannya (*delivery/supply*)
5. Memfasilitasi lembaga keuangan agar bersedia memberikan modal usaha bagi industri skala kecil dan menengah pada berbagai sektor unggulan daerah, sehingga mereka dapat menjamin dan mempertahankan keberlangsungan usahanya.
6. Berperan mentransportasikan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di berbagai sektor unggulan produk daerah, agar proses produksi dapat mencapai efektifitas, efisiensi, dan ekonomis.
7. Mendorong agar para produsen mengembangkan jenis-jenis produk unggulan yang bersifat komplementer baik intern maupun antar region, memiliki nilai tambah (*value added*) dan menghasilkan manfaat ganda (*multiple effect*) baik secara *backwardlinkage* dan *forward linkage* terhadap berbagai sektor, dengan demikian dapat memperkuat posisi daerah dari pengaruh fluktuasi ekonomi.

8. Memposisikan birokrasi pemerintah daerah cukup berperan sebagai katalisator, stimulator, dan regulator agar mekanisme pasar dapat bekerja secara sehat.
9. Memprioritaskan program pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka kemudahan aksesibilitas usaha di bidang industri meliputi sarana transportasi, komunikasi, energi, lokasi industri, sarana dan prasarana pelayanan umum yang baik serta situasi lingkungan yang sehat dan aman.

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi wilayah/masyarakat/daerah mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi/identifikasi potensi ekonomi daerah adalah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan daerah pada tiap-tiap sub sektor.

Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkai produk pesaing di pasar domestik dan /atau menembus pasar ekspor (Sudarsono, 2001).

Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Depdagri, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 050.05/2910/III/BANDA tanggal 7 Desember 1999, ditentukan kriteria komoditas unggulan sebagai berikut :

- a. Mempunyai kandungan lokal yang menonjol dan inovatif di sektor pertanian, industri, dan jasa.
- b. Mempunyai daya saing tinggi di pasaran, baik ciri, kualitas maupun harga yang kompetitif serta jangkauan pemasaran yang luas, baik di dalam negeri maupun global
- c. Mempunyai ciri khas daerah karena melibatkan masyarakat banyak (tenaga kerja setempat)
- d. Mempunyai jaminan dan kandungan bahan baku yang cukup banyak, stabil, dan berkelanjutan.
- e. Difokuskan pada produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi, baik dalam kemasan maupun pengolahannya
- f. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan SDM masyarakat
- g. Ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan, berkelanjutan serta tidak merusak budaya setempat.

Pembangunan daerah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu set variabel-variabel seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga, dan imbalan bagi faktor dalam daerah dibatasi secara jelas. Laju pertumbuhan daerah-daerah dapat diukur menurut output atau tingkat pendapatan yang berbeda-beda, dan beberapa daerah mengalami kemunduran jangka panjang.

Menurut models *Export-Base*, pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh eksploitasi kemanfaatan alamiah dan pertumbuhan basis ekspor daerah yang bersangkutan yang juga dipengaruhi oleh tingkat permintaan eksternal dari daerah-daerah lain. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan ekspor akan

mengakibatkan berkembangnya kegiatan-kegiatan penduduk setempat, perpindahan modal dan tenaga kerja, keuntungan-keuntungan eksternal, dan pertumbuhan regional lebih lanjut. Dengan demikian untuk meningkatkan pertumbuhan suatu daerah memerlukan strategi pembangunan yang harus sesuai dengan keuntungan lokasi yang dimilikinya dan tidak harus sama dengan strategi pembangunan pada tingkat nasional.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonominya meningkat atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangannya baru terjadi jika jumlah barang dan jasa secara fisik yang dihasilkan perekonomian tersebut bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan pendapatan masyarakat secara keseluruhan sebagai cerminan kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang tercipta di suatu wilayah. Teori-teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang (Sadono Sukirno, 2006) antara lain :

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, Malthus, dan John Stuart Mill. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka asumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapatan per kapita dengan jumlah penduduk

disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan per kapita sama dengan produksi marginal. Pada keadaan ini pendapatan per kapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1954) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi :

1. Perkonomian bersifat tertutup.
2. Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan.
3. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*).
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proposional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Output Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ($Y = C + I$). Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$g = K = n$$

Dimana :

g = Growth (tingkat pertumbuhan output)

K = Capital (tingkat pertumbuhan modal)

n = Tingkat pertumbuhan angkatan kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

c. Teori Pertumbuhan Neo-klasik

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Robert M. Solow (1970) dan T.W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam

modelnya. Selain itu, SolowSwan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara modal (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja. Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu, akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan teknik, sehingga produktivitas modal meningkat. Dalam model tersebut, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu. Teori neo-klasik sebagai penerus dari teori klasik menganjurkan agar kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar sempurna. Dalam keadaan pasar sempurna, perekonomian bisa tumbuh maksimal. Sama seperti dalam ekonomi model klasik, kebijakan yang perlu ditempuh adalah meniadakan hambatan dalam perdagangan, termasuk perpindahan orang, barang, dan modal. Harus dijamin kelancaran arus barang, modal, dan tenaga kerja, dan perlunya penyebaran informasi pasar. Harus diusahakan terciptanya prasarana perhubungan yang baik dan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik. Analisis lanjutan dari paham neoklasik menunjukkan bahwa untuk terciptanya suatu pertumbuhan yang mantap (*steady growth*), diperlukan suatu

tingkat keamanan (*saving*) yang tinggi dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali.

d. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya. Didorong oleh adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari inovasi tersebut, maka para pengusaha akan meminjam modal dan mengadakan investasi. Investasi ini akan mempertinggi kegiatan ekonomi suatu negara. Kenaikan tersebut selanjutnya juga akan mendorong pengusaha-pengusaha lain untuk menghasilkan lebih banyak lagi sehingga produksi agregat akan bertambah. Selanjutnya Schumpeter menyatakan bahwa jika tingkat kemajuan suatu perekonomian semakin tinggi maka keinginan untuk melakukan inovasi semakin berkurang, hal ini disebabkan karena masyarakat telah merasa tercukupi kebutuhannya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan semakin lambat jalannya dan pada akhirnya tercapai tingkat keadaan tidak berkembang (*stationary state*). Namun keadaan tidak berkembang yang dimaksud di sini berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi. Sedangkan dalam pandangan klasik, keadaan tidak berkembang terjadi

pada waktu perekonomian berada pada kondisi tingkat pendapatan masyarakat sangat rendah.

2.6. KELEMBAGAAN DAN PERAN KELEMBAGAAN

Menurut Mubyarto (1989), yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya kelembagaan mempunyai dua pengertian yaitu : kelembagaan sebagai suatu aturan main (*rule of the game*) dalam interaksi personal dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki (Hayami dan Kikuchi, 1987). Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-hak serta tanggung jawabnya. Kelembagaan sebagai organisasi biasanya merujuk pada lembaga-lembaga formal seperti departemen dalam pemerintah, koperasi, bank dan sebagainya. Suatu kelembagaan (*institution*) baik sebagai suatu aturan main maupun sebagai suatu organisasi, dicirikan oleh adanya tiga komponen utama (Pakpahan dalam Nasution, 2002) yaitu :

- a. Batas kewenangan (*jurisdictional boundary*). Batas kewenangan merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, faktor produksi, barang dan jasa. Dalam suatu organisasi, batas kewenangan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut.

- b. Hak Kepemilikan (*Property right*). Konsep *property right* selalu mengandung makna sosial yang berimplikasi ekonomi. Konsep *property right* atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*) dari semua masyarakat peserta yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau *consensus* yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat sekarang. Pengertian diatas mengandung dua implikasi yakni, hak seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (*ownership*) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya.
- c. Aturan representasi (*Rule of representation*). Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap *performance* akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini bentuk partisipasi ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi tersebut. Terkait dengan komunitas perdesaan, maka terdapat beberapa unit-unit sosial (kelompok, kelembagaan dan organisasi) yang merupakan aset untuk dapat dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal dapat dilakukan dengan sistem jejaring kerjasama yang setara dan saling menguntungkan.

Menurut Sumarti, dkk (2008), kelembagaan di perdesaan dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu : pertama, lembaga formal seperti pemerintah desa,

BPD, KUD, dan lain-lain. Kedua, kelembagaan tradisional atau lokal. Kelembagaan ini merupakan kelembagaan yang tumbuh dari dalam komunitas itu sendiri yang sering memberikan “asuransi terselubung” bagi kelangsungan hidup komunitas tersebut. Kelembagaan tersebut biasanya berwujud nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan dan cara-cara hidup yang telah lama hidup dalam komunitas seperti kebiasaan tolong-menolong, gotong-royong, simpan pinjam, arisan, lumbung paceklik dan lain sebagainya. Keberadaan lembaga di perdesaan memiliki fungsi yang mampu memberikan “*energi sosial*” yang merupakan kekuatan internal masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah mereka sendiri. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumberdaya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi desa guna menunjang pembangunan desa. Dengan adanya kelembagaan petani dan ekonomi desa sangat terbantu dalam hal mengatur silang hubungan antar pemilik input dalam menghasilkan output ekonomi desa dan dalam mengatur distribusi dari output tersebut.

2.7. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN PRODUK UNGGULAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk menghasilkan produk unggulan desa untuk semua tingkat klasifikasi desa menggunakan pertimbangan berikut ini;

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi usaha pertanian untuk

ketahanan pangan; usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Program dan kegiatannya meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Pembangunan sarana olahraga Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama. Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

2.8. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DESA

Dalam hal tipologi desa sebagai pertimbangan prioritas penggunaan dana desa. Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - i. pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - ii. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - i. penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- ii. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

- i. perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- ii. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

2.9. KONSEP PRODUK UNGGULAN DAERAH

2.9.1. Pengertian Produk Unggulan Daerah

Produk Unggulan Daerah (PUD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Produk Unggulan Daerah bahwa produk unggulan daerah merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Sedangkan yang disebut pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.

Model pengembangan PUD jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui:

1. Peningkatan kualitas daya tarik PUD;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur;
3. Peningkatan promosi dan investasi PUD;
4. Peningkatan kerjasama;
5. Peningkatan peran serta masyarakat; dan

6. Peningkatan perlindungan terhadap PUD.

Mengacu urgensi identifikasi produk-produk unggulan di daerah terkait penerapan otonomi daerah dan relevansinya dengan penyerapan basis ekonomi lokal untuk bisa memacu PAD serta penyerapan tenaga kerja maka kajian tentang produk unggulan menjadi kian menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Selain itu, pengembangan produk unggulan daerah juga relevan dengan tuntutan era global karena saat ini nilai keunggulan komparatif sudah tak lagi relevan sebab yang terpenting justru komitmen memacu keunggulan kompetitif.

Produk Unggulan Daerah menurut Kementerian Koperasi dan UKM adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan SDA dan SDM lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan. Sehingga memiliki keunggulan kompetitif dan siap menghadapi persaingan global. Sedangkan Prof.Dr.Ir. Soemarno, MS, Produk Unggulan atau Komoditi Unggulan merupakan hasil usaha masyarakat pedesaan dengan kriteria:

- a. Mempunyai daya saing tinggi dipasaran (unik, kualitas bagus, harga murah)
- b. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial dapat dikembangkan
- c. Mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat pedesaan
- d. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia
- e. Layak didukung oleh modal bantuan atau kredit.

Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan

investasinya. Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing sehingga mampu untuk menangkai produk pesaing di pasar domestik dan /atau menembus pasar ekspor (Sudarsono, 2001).

Kriteria produk unggul menurut Unkris Satya Wacana Salatiga, adalah komoditi yang memenuhi persyaratan kecukupan sumberdaya lokal, keterkaitan komoditas, posisi bersaing dan potensi bersaing. Dari kriteria ini memunculkan pengelompokan komoditas berikut:

1. Komoditas potensial adalah komoditas daerah yang memiliki potensi untuk berkembang karena keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif terjadi misalnya karena kecukupan ketersediaan sumberdaya, seperti bahan baku lokal, keterampilan sumberdaya lokal, teknologi produksi lokal serta sarana dan prasarana lokal lainnya.
2. Komoditas andalan adalah komoditas potensial yang dipandang dapat dipersandingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Efisiensi usaha itu tercermin dari efisiensi produksi, produktivitas pekerja, profitabilitas dan lain-lain.
3. Komoditas unggulan adalah komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif, karena telah memenangkan persaingan dengan produk sejenis di daerah lain. Keunggulan kompetitif demikian dapat terjadi karena efisiensi produksinya yang tinggi akibat posisi tawarnya yang tinggi baik terhadap pemasok, pembeli, serta daya saingnya yang tinggi terhadap pesaing, pendatang baru maupun barang substitusi.

2.9.2. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah dan Komoditas Unggulan Daerah

Menurut Sudarsono (2001), dinamika keunggulan daerah di masa mendatang ditandai dengan mampu tidaknya daerah dalam meraih peluang menghadapi kompetisi pasar bebas baik di tingkat regional maupun global. Beberapa langkah dan strategi yang perlu dilakukan agar daerah mampu berkompetisi antara lain:

1. Birokrasi pemerintah perlu melakukan reorientasi peran dan tanggungjawabnya yakni hanya bersifat mengarah dan membina bukan menentukan (*steering than rowing*). Sehingga peran dan tanggungjawab pemerintah daerah hanya berkisar pada bidang-bidang dimana sektor swasta atau pihak ketiga lainnya tidak memungkinkan untuk melakukan tugas tersebut, misalnya dalam situasi terjadinya kegagalan pasar
2. Birokrasi Pemda harus dapat berkiprah secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan prima untuk meraih investasi dalam dan luar negeri
3. Membentuk system dan jaringan kerja dengan lembaga/asosiasi bisnis dan atase perdagangan luar negeri, khususnya dalam mendukung pemasaran produk ekspor.
4. Mengembangkan lembaga Litbang (penelitian dan pengembangan) terhadap jenis produksi unggulan untuk menjamin kualitas produk, kestabilan harga, kebutuhan pasar dan jaminan kontinuitas ketersediaannya

5. Memfasilitasi lembaga keuangan agar bersedia memberikan modal usaha bagi industri skala kecil dan menengah pada berbagai sektor unggulan daerah, sehingga mereka dapat menjamin dan mempertahankan keberlangsungan usahanya
6. Berperan mentransportasikan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di berbagai sektor unggulan produk daerah, agar proses produksi dapat mencapai efektifitas, efisiensi, dan ekonomis
7. Mendorong agar para produsen mengembangkan jenis-jenis produk unggulan yang bersifat komplementer baik intern maupun antar region, memiliki nilai tambah dan menghasilkan manfaat ganda baik secara backward linkage dan forward linkage terhadap berbagai sektor, dengan demikian dapat memperkuat posisi daerah dari pengaruh fluktuasi ekonomi
8. Memposisikan birokrasi pemerintah daerah cukup berperan sebagai katalisator, stimulator, dan regulator agar mekanisme pasar dapat bekerja secara sehat
9. Memprioritaskan program pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam rangka kemudahan aksesibilitas usaha di bidang industri meliputi sarana transportasi, komunikasi, energi, lokasi industri, sarana dan prasarana pelayanan umum yang baik serta situasi lingkungan yang sehat dan aman.

Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah dapat dilakukan antara lain dengan model;

1. Inkubator,

2. Klaster,
3. One Village One Product/Ovop, dan
4. Kompetensi inti.

2.10. PENGEMBANGAN PUD MODEL INKUBATOR

2.10.1. Pengembangan PUD berbasis Model Inkubator

Menurut Harley (2010:4) Inkubator Bisnis dapat diartikan sebagai perwujudan proses sistematis dalam organisasi untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan yang baru yang diajukan oleh anggota dengan memberikan berbagai macam layanan komperhensif dan terpadu, yaitu:

1. *Incubator space*, ruang inkubator misal berupa kantor, manufaktur, laboratorium, atau penjualan yang tersedia secara fleksibel, terjangkau dan bersifat sementara.
2. *Common space*, ruang bersama yaitu fasilitas yang diberikan kepada anggota seperti ruang pertemuan, lobi resepsi, dan kantin.
3. *Common Services*, layanan bersama, seperti dukungan kesekretariatan dan penggunaan peralatan kantor secara bersama-sama.
4. *Hands-on Counseling*, konsultasi intensif berupa bantuan konseling secara intens dan akses bantuan khusus.
5. *Hands-on Funding*, Bantuan dalam mencari dan memperoleh pembiayaan bisnis atau bahkan menyediakan beberapa tingkat pembiayaan untuk klien.

2.10.2. Pengertian Inkubasi Bisnis

Inkubasi Bisnis merupakan tuntutan dari the new economy global, yang terjadi karena adanya perubahan yang cepat dan signifikan di bidang teknologi, telekomunikasi, dan digitalisasi; adanya deregulasi dan globalisasi. Perubahan

tersebut memaksa adanya perubahan pada setiap pelakunya mulai dari skala negara, perusahaan/organisasi, dan individu. Inkubasi Bisnis adalah proses pembinaan bagi usaha kecil dan atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh inkubator bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi.

Sedangkan inkubator bisnis adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu. (Juknis Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nomor: 81.3/Kep/M.KUKM /VIII/2002).

Konsep inkubasi bisnis lahir diantara masa ekonomi kapitalisme klasik dan neoklasikal. Kapitalisme klasik menurut Adam Smith (1776) merupakan sistem ekonomi dengan karakteristik kepemilikan atas sumberdaya secara individual untuk menciptakan laba bagi dirinya sendiri. Teori ini memiliki kecenderungan individualistik tanpa memperhatikan relasi dan integrasi. Sedangkan neoklasik memandang bahwa pasar terdiri dari banyak pembeli dan penjual yang saling berintegrasi sehingga menciptakan rumusan penawaran sama dengan permintaan atau "equilibrium". Teori ini memandang individu sebagai bagian dari sistem ekonomi pasar yang senantiasa harus melakukan pengembangan dan perubahan guna memenuhi penawaran atau permintaan.

Pada era *the new economy* yaitu suatu era ekonomi yang terdiri dari banyak fenomena yang saling berinteraksi dan ber-relasi dalam mewujudkan tujuan,

maka salah satu wujud dari inkubasi bisnis adalah SOHO (*Small Office Home Office*). Merupakan sebuah konsep bisnis kontemporer yang lahir karena adanya perkembangan di bidang teknologi, telekomunikasi, dan digitalisasi, yang dapat memberikan kemudahan bagi para pengambil keputusan dari mana saja. Selain itu kehadiran dan keberadaan inkubator bisnis dalam new economy mampu membantu menciptakan mekanisme pasar yang persuasif dan kondusif, karena berbisnis melalui proses inkubasi yang pada gilirannya menjadikan persaingan sebagai sebuah kemutlakan.

2.11. PENGEMBANGAN PUD MODEL KLASSTER

2.11.1. Pengembangan PUD Berbasis Klaster

Pendekatan klaster model Porter merupakan pengembangan dari *industrial district* atau kawasan industri yang dikembangkan oleh Alfred Marshall pada 1920 (Desrochers dan Sautet, 2004). Berbeda dengan Marshall yang hanya fokus pada perusahaan-perusahaan sejenis, klaster model Porter tidak membatasi hanya pada satu industri, tetapi lebih luas lagi. *Diamond Cluster Model*, meliputi industri-industri terkait, serta perusahaan-perusahaan yang lain yang mempunyai keterkaitan dalam teknologi, input yang sama. Dengan bekerja sama dalam satu klaster, maka perusahaan-perusahaan atau industri-industri terkait akan memperoleh manfaat sinergi dan efisiensi yang tinggi dibandingkan dengan mereka bekerja sendirisendiri. Menurut Porter (2000) klaster dapat terbentuk pada kota, kawasan regional, bahkan dalam suatu negara.

Porter menganalisis klaster industri dengan pendekatan diamond model. Adapun elemen dari diamond model tersebut terdiri dari:

1. Faktor Input

Faktor input dalam analisis Porter adalah variabel-variabel yang sudah ada dan dimiliki oleh suatu klaster industri seperti sumber daya manusia (*human resource*), modal (*capital resource*), infrastruktur fisik (*physical infrastructure*), infrastruktur informasi (*information infrastructure*), infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi (*scientific and technological infrastructure*), infrastruktur administrasi (*administrative infrastructure*), serta sumber daya alam. Semakin tinggi kualitas faktor input ini, maka semakin besar peluang industri untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.

2. Kondisi Permintaan

Kondisi permintaan menurut diamond model dikaitkan dengan *sophisticated and demanding local customer*. Semakin maju suatu masyarakat dan semakin *demanding* pelanggan dalam negeri, maka industri akan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas produk atau melakukan inovasi guna memenuhi keinginan pelanggan lokal yang tinggi. Namun dengan adanya globalisasi, kondisi permintaan tidak hanya berasal dari lokal tetapi juga bersumber dari luar negeri.

3. Industri Pendukung dan Terkait

Adanya industri pendukung dan terkait akan meningkatkan efisiensi dan sinergi dalam klaster. Sinergi dan efisiensi dapat tercipta terutama dalam biaya transaksi, berbagi teknologi, informasi maupun keterampilan tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh industri atau perusahaan lainnya. Manfaat lain industri pendukung dan terkait adalah akan terciptanya daya saing dan produktivitas yang meningkat.

4. Strategi Perusahaan dan Pesaing

Strategi perusahaan dan pesaing dalam *diamond model* juga penting karena kondisi ini akan memotivasi perusahaan atau industri untuk selalu meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dan selalu mencari inovasi baru. Dengan adanya persaingan yang sehat, perusahaan akan selalu mencari strategi baru yang cocok dan berupaya untuk selalu meningkatkan efisiensi.

Dalam menganalisis klaster, terdapat 3 dimensi pengukuran, yaitu:

1. Keterkaitan (*Linkage*)

Mencakup inovasi, tenaga kerja, dan input. Hal ini menentukan apa yang akan terbentuk adalah klaster mata rantai nilai (*value chains clusters*), klaster berbasis tenaga kerja (*labor-based clusters*), ataukah klaster inovasi (*innovation clusters*).

2. Geografi (*Geography*)

Terkonsentrasi di suatu wilayah (*localized*) atau menyebar antar wilayah (*non localized*).

3. Waktu (*Time*)

Kondisi eksisting (yaitu dimana klaster memang sudah memiliki peran yang signifikan dan memiliki keterkaitan yang tinggi), penurunan (eksisting klaster yang mengalami penurunan peran), peningkatan (klaster yang menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan), atau potensial (klaster yang memiliki potensi mengalami peningkatan atau keberuntungan di masa mendatang)

2.11.2. Manfaat Klaster

Penargetan program pengembangan industri dengan klaster diyakini Porter akan memberikan manfaat yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun manfaat-manfaat klaster tersebut adalah sebagai berikut (Porter, 2000):

1. Klaster Mampu Memperkuat Perekonomian Lokal

Konsentrasi industri pada sebuah lokasi tertentu dapat berdampak pada penghematan biaya bagi perusahaan dalam klaster. Penghematan biaya tersebut dikenal sebagai *lokalization economies*. Penghematan tersebut dapat bersumber dari bertambahnya ketersediaan *specialized input suppliers* dan jasa; penambahan tenaga kerja terlatih dan terspesialisasi; investasi infrastruktur publik yang dilakukan demi kebutuhan industri tertentu; pasar keuangan yang terkait erat dengan industri; dan meningkatnya kecenderungan transfer informasi dan teknologi antarperusahaan.

2. Klaster Mampu Memfasilitasi Reorganisasi Industri

Transisi organisasi industri dari perusahaan besar yang memproduksi secara massal ke perusahaan kecil yang memfokuskan pada *speciality production* telah terdokumentasi dengan baik. Perubahan struktur industri ini terjadi berkat meningkatnya kompetisi global dan timbulnya teknologi produksi baru (misal: komputerisasi produksi). Klaster merupakan lokasi industri yang menarik bagi perusahaan kecil yang terspesialisasi dan terkomputerisasi dalam produksi. Spesialisasi produk dan pengadopsian teknologi produksi terbaru lebih menonjol dan mudah untuk dilakukan bagi perusahaan di dalam klaster industri tersebut. Kedekatan antara perusahaan yang terspesialisasi dengan *input suppliers* produksi dan pasar produk dapat meningkatkan aliran

barang melalui sistem produksi. Kesiapan akan akses terhadap pasar produk dan input juga memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Maka, konsentrasi spasial dari perusahaan-perusahaan tersebut mampu menyediakan kumpulan tenaga kerja terlatih yang diperlukan oleh teknologi produksi yang terkomputerisasi.

3. Klaster Meningkatkan *Networking* Antar Perusahaan

Networking merupakan kerjasama antarperusahaan untuk mengambil manfaat kerjasama, mengembangkan pasar produk baru, mengintegrasikan aktivitas, atau menghimpun sumber daya dan pengetahuan. Kerjasama ini secara alamiah akan sering terjadi antaranggota klaster. Survei terhadap manufacturing networks menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki networking yang kuat mendapatkan manfaat dari kolaborasi dan transfer informasi mengenai pemasaran, pengembangan produk baru, dan peningkatan teknologi. Perusahaan-perusahaan tersebut juga mengalami peningkatan daya saing dan profitabilitas melalui kerjasama dan kolaborasi antar perusahaan.

4. Klaster Memungkinkan Penitikberatan pada Sumber Daya Publik

Penargetan pembangunan industri melalui klaster memungkinkan suatu kawasan untuk menggunakan sumber daya pembangunan ekonomi yang dimiliki secara terbatas dengan lebih efisien. Pertama, klaster industri memungkinkan suatu kawasan untuk lebih memfokuskan pada sistem rekrutmen, pemeliharaan dan ekspansi, serta program pengembangan usaha kecil daripada menyediakan

program bantuan bagi berbagai jenis industri yang berbeda. Upaya pembangunan terencana seperti ini memberikan identifikasi yang lebih jelas terhadap kebutuhan industri yang lebih spesifik dan memungkinkan (dengan anggaran pengeluaran tertentu) penyediaan program yang lebih sedikit, namun lebih bernilai. Kedua, karena keterkaitan antarperusahaan dalam klaster, program-program yang mendukung usaha tertentu akan memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang relatif lebih besar kepada perekonomian daerah tersebut. Total penyerapan tenaga kerja dan pendapatan dari membentuk (atau mempertahankan) anggota klaster akan melebihi total penyerapan tenaga kerja dan pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang besarnya sama namun tidak tergabung dalam klaster.

5. Klaster Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi

Dengan adanya klaster maka efisiensi akan tercipta dalam perekonomian. Perusahaan-perusahaan akan mendapat akses untuk mendapatkan input tertentu, jasa-jasa, tenaga kerja, informasi, karena sudah tersedia dalam klaster. Demikian juga dengan koordinasi antara perusahaan dalam klaster akan terjalin lebih baik dan mudah. Best practises dalam klaster akan lebih cepat ditularkan sehingga maksimum efisiensi akan didapat oleh banyak perusahaan.

6. Klaster Mendorong dan Mempermudah Inovasi

Adanya klaster akan meningkatkan kemampuan anggota-anggota dalam klaster untuk melihat peluang-peluang untuk melakukan berbagai inovasi. Kemudahan dalam melakukan eksperimen dengan

menggunakan sumber daya yang ada dalam klaster juga merupakan manfaat lain dari klaster.

Dari penjelasan Porter di atas perkembangan klaster dapat dikelompokkan kedalam empat jenis, yaitu:



Sumber: Munir & Fitanto, 2005

Gambar 2.1. Tahapan Klaster

2.12. PENGEMBANGAN PUD MODEL OVOP

2.12.1. Pengertian *One Village One Product* (OVOP)

One Village One product (OVOP) atau satu desa satu produk adalah pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Satu desa sebagaimana dimaksud dapat diperluas menjadi kecamatan, kabupaten/kota, maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis.

One Village One Product Movement (Gerakan OVOP) pertama kali dicetuskan oleh Morihiko Hiramatsu saat menjabat sebagai Gubernur Prefektur Oita di timur laut Pulau Kyushu. Masa jabatannya di Oita selama

6 periode (1979-2003) benar-benar digunakan untuk mengentaskan kemiskinan warganya dengan menerapkan konsepsi pembangunan wilayah hasil buah pikirannya itu.

2.12.2. Tujuan OVOP

Untuk menggali dan mempromosikan produk inovatif dan kreatif lokal, dari sumber daya, yang bersifat unik khas daerah, bernilai tambah tinggi, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, memiliki image dan daya saing yang tinggi. Tujuan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Pendekatan OVOP adalah:

1. Mengembangkan produk unggulan daerah yang memiliki potensi pemasaran lokal maupun internasional.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta nilai tambah produk, agar dapat bersaing dengan produk dari luar negeri (impor)
3. Khusus kegiatan OVOP yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam mengembangkan OVOP harus melalui Koperasi dan UKM, serta Meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

2.12.3. Kriteria OVOP

Ada lima kriteria produk unggulan desa akan menjadi OVOP yaitu:

1. Produk unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah
2. Unik khas budaya dan keaslian lokal
3. Berpotensi pasar domestik dan ekspor

4. Bermutu dan berpenampilan baik
5. Diproduksi secara kontinyu dan konsisten

2.12.4. Lingkup Produk OVOP

Agar produk dapat masuk dalam lingkup produk OVOP maka harus memperhatikan enam hal berikut ini

1. Produk makanan olahan berbasis hasil pertanian dan perkebunan.
2. Produk aneka minuman dari hasil pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.
3. Produk hasil tenun atau konveksi khas masyarakat lokal.
4. Produk kebutuhan rumah tangga termasuk produk dekoratif atau interior
5. Produk barang seni dan kerajinan termasuk produk cinderamata.
6. Produk herbal dan minyak atsiri khas masyarakat lokal.

2.12.5. Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan OVOP

Konsep *One Village One Product* (OVOP) adalah suatu gerakan revitalisasi daerah, untuk mengembangkan potensi asli daerah supaya mampu bersaing di tingkat global. OVOP akan disesuaikan dengan kompetensi daerah, di mana akan dipilih produk unggulan yang unik dan khas di daerah tersebut untuk menjadi produk kelas global. Konsep OVOP dalam pelaksanaannya mempunyai tiga prinsip yang harus dimiliki oleh

daerah-daerah maupun negara yang akan menerapkan konsep ovop untuk mengembangkan produk-produk unggulan lokal yang dimiliki oleh daerah maupun negaranya, prinsip tersebut diantaranya:

1. Pikiran secara global, kegiatan secara lokal semakin lokal berarti semakin global. Maksudnya, komoditas yang bersifat lokal ternyata bisa menjadi komoditas yang internasional. Biasanya orang menilai bahwa komoditas lokal tidak mempunyai sifat universal, dan komoditas internasional mempunyai sifat kosmopolitan. Pada nyatanya bukan demikian. Sebaliknya, makin tinggi keaslian dan kekhasan lokal suatu daerah, semakin tinggi pula nilai dan perhatian secara internasional terhadap daerah tersebut. Namun, komoditas lokal itu sendiri harus dipatenkan dan mutunya harus ditingkatkan setinggi mungkin. Dengan usaha ini, komoditas lokal baru bisa mendapat penilaian dunia dan dapat dipasarkan dipasar secara global.
2. Usaha mandiri dengan inisiatif dan kreativitas, pada umumnya, suatu gerakan yang dicanangkan dari tingkat atas sulit dijalankan dan berkelanjutan. Jika memakai uang atau dana swadaya, terpaksa usaha tersebut harus bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya. Apa yang akan dilaksanakan oleh daerah masing-masing diserahkan kepada daerah-daerah tersebut. Penerapan OVOP pada umumnya berdasarkan inisiatif masyarakat lokal, oleh sebab itu banyak yang tidak berhasil. Namun yang penting adalah keinginan yang berdasarkan inisiatif masyarakat. "satu desa satu produk" merupakan sebuah istilah. Namun secara implementasi satu desa diperkenankan

menghasilkan tiga produk, ataupun dapat pula dua desa satu produk. Sedangkan fungsi pemerintah, hanya berfungsi sebagai pembantu secara tidak langsung atau sebagai fasilitator.

3. Perkembangan sumber daya manusia (SDM), artinya suatu daerah yang berhasil, akan selalu mempunyai "*local leader*" yang bagus. Jika daerah ingin membuat sesuatu yang bagus dalam skala besar atau nasional, dapat memanfaatkan penanaman modal besar dari luar daerah. Namun, ada pula daerah yang tidak mengikuti cara ini. Daerah tersebut, berusaha memperhatikan sekaligus meningkatkan keaslian dan kekhasan lokal. Masyarakat bergerak dengan inisiatif dan kreativitas mereka sendiri, dengan pertanggungjawaban sendiri. Dengan cara ini, OVOP dapat berjalan dan berkelanjutan. Pemodal besar berkepentingan untuk mencapai hasil dengan cepat, namun mereka juga akan cepat lari jika tidak berhasil. dengan pertanggungjawaban sendiri. Dengan cara ini, OVOP dapat berjalan dan berkelanjutan. Pemodal besar berkepentingan untuk mencapai hasil dengan cepat, namun mereka juga akan cepat lari jika tidak berhasil.

2.13. PENGEMBANGAN PUD MODEL KOMPETENSI INTI

2.13.1. Pengertian Kompetensi Inti

Menurut departemen perindustrian, kompetensi inti adalah suatu kumpulan yang terintegrasi dari serangkaian keahlian dan teknologi yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi

keberhasilan bersaing suatu bisnis. Dalam perspektif ekonomi regional, kompetensi inti adalah kemampuan suatu daerah untuk menarik investasi dari luar daerah itu, baik investasi asing maupun investasi dalam negeri serta memfasilitasi perekonomian yang menghasilkan nilai tambah.

Suatu komoditas unggulan atau suatu industri unggulan tidak akan dikatakan memiliki kompetensi inti jika pengembangannya bersifat tradisional. Dalam arti bahwa sifat tradisional ini menggunakan teknologi dan keahlian yang sederhana, sehingga mudah dicontoh oleh pihak lain dalam pengembangannya serta memiliki nilai tambah yang rendah.

2.13.2. Konsep SAKA-SAKTI (Satu Kabupaten-Satu Kompetensi Inti)

Model konseptual Saka-Sakti yang dikembangkan oleh Professor Martani Huseini (1999), merupakan keterkaitan antara rantai nilai dari komoditas unggulan yang dibentuk dari 3 (tiga) komponen utama yaitu pembelajaran kolektif (*collective learning*), kompetensi (*competency*) dan sumber daya (*reseources: tangible maupun intangible*). Ketiga komponen utama ini dipengaruhi oleh social capacity yang terbentuk dari sembilan faktor yang dikembangkan oleh Choo and Moon yaitu: politisi dan birokrat, tenaga kerja, manajer dan insinyur profesional, wirausahawan, lingkungan bisnis, sumber daya, permintaan domestik, industri terkait dan pendukung, dan peluang eksternal.

2.14. GAMBARAN ANALISIS PRODUK UNGGULAN DESA

Untuk mempermudah pemahaman hubungan antara kuatnya kelembagaan Pemerintah Desa dan Produk Unggulan Desa dengan Klasifikasi

Indeks Desa Mandiri akan digunakan aliran pengembangan yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal berikut ini.



Sumber: Andriati, 2018.

Gambar 2.2. Aliran Hubungan Antara kelembagaan dengan Proguldes

Gambar aliran di atas memperlihatkan terjadi hubungan antara kelembagaan di Pemerintah Desa dengan Produk Unggulan Desa yang akan dikembangkan sehingga klasifikasi desa meningkat. Pada Gambar di atas diberikan contoh Desa A dan B berklasifikasi Desa Sangat Tertinggal mempunyai Komoditas Unggulan yang dihasilkan di Pusat Produksi Desa sehingga meningkat menjadi berklasifikasi Desa Tertinggal. Sedangkan Desa C dan D akan meningkatkan klasifikasi desa dari Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang yang telah mempunyai Pusat Produksi Desa kemudian mengembangkan Pusat Distribusi bersama Pemerintah Desa menjadi berklasifikasi Desa Berkembang. Untuk menjadi desa berklasifikasi Desa Maju, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten perlu mengembangkan Pusat Kegiatan Kawasan. Tahap berikutnya jika direncanakan mencapai Desa Mandiri diperlukan kerjasama harmonis antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan Pemangku Kepentingan Lainnya (stakeholders) untuk membentuk Pusat Kegiatan Kabupaten. Terbentuknya Pusat

Kegiatan Kabupaten akan memacu kecepatan mengalirnya komoditas unggulan desa dan datangnya investasi-investasi dari luar Desa hasilnya klasifikasi desa akan menjadi Desa Mandiri dan menjadi daerah maju sebagai pusat konsentrasi ekonomi dan mendorong menjadi pusat kegiatan ekonomi lainnya.

2.15. INDEKS DESA MEMBANGUN

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan *ambang batas* sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal: $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal: $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

2.16. HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA

Hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 digunakan untuk menjadikan kajian ini lebih berkelanjutan berupa:

Kesimpulan dari Kajian Produk Unggulan Desa dan Pengembangan Produk Unggulan Desa tahun 2018 di Kabupaten Cirebon adalah:

1. Kajian produk unggulan desa terdiri dari 80 jenis komoditas/produk/jenis usaha (KPJU) yang tersebar di 80 desa di 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon.
2. Daerah studi meliputi 40 kecamatan dan 80 desa di Kabupaten Cirebon. Ditinjau dari tingkat Indeks Desa Membangun (IDM) meliputi 10 desa (12,50%) termasuk Desa Maju, 61 desa (76,25%) termasuk Tertinggal, dan 9 desa (11,25%) termasuk kategori Berkembang.
3. Berdasarkan pengelompokan jenis usaha dalam perhitungan PDRB yakni dibagi dalam 17 kelompok maka dikemukakan bahwa KPJU di daerah studi termasuk dalam kelompok :

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan termasuk dalam Kelompok Lapangan Usaha Primer, terdiri dari 15 unit usaha (18,75%);
- Pertambangan dan Penggalian termasuk dalam Kelompok Lapangan Usaha Primer, terdiri dari 2 unit usaha (2,50%);
- Industri Pengolahan termasuk dalam Kelompok Lapangan Usaha Sekunder, terdiri dari 60 unit usaha (75,00%);
- Jasa lainnya termasuk dalam Kelompok Lapangan Usaha Tersier, terdiri dari 3 unit usaha (3,75%).

d. Berdasarkan hasil analisis *Indeks Location Quotient* (LQ) dapat dihasilkan sektor basis dan non basis sebagai berikut :

- KPJU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, termasuk sektor basis dengan rata-rata LQ : 1,856922;
- KPJU Pertambangan dan Penggalian, termasuk sektor non basis dengan rata-rata LQ : 0,843842;
- KPJU Industri Pengolahan, termasuk sektor non basis dengan rata-rata LQ : 0,496276. LQ sektor industri pengolahan meskipun tidak termasuk sektor non basis, namun dari tahun 2014 hingga tahun 2016 menunjukkan trend yang meningkat meskipun tahun 2017 mengalami sedikit penurunan. Meskipun termasuk non basis tidak bisa diabaikan begitu saja, karena bisa jadi dengan adanya bantuan dari sektor basis maka dapat membantu pengembangan sektor non basis menjadi sektor basis baru.
- KPJU Jasa lainnya, termasuk sektor basis dengan rata-rata LQ:

0,4545442;

- e. Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen diketahui tingkat pertumbuhan masing-masing KPJU sebagai berikut :
- KPJU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan KPJU Jasa lainnya termasuk ke dalam “sektor maju dan tumbuh pesat”;
 - KPJU Pertambangan dan Penggalian, termasuk dalam “sektor relatif tertinggal”;
 - KPJU Industri Pengolahan, termasuk dalam “Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat”.
- f. Berdasarkan hasil analisis Shift Share dihasilkan bahwa sektor industri pengolahan dengan nilai D 7.225,06. Sektor tersebut adalah sektor dengan pertumbuhannya cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam memacu pertumbuhan PDRB Kabupaten Cirebon.
- g. Berdasarkan hasil analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) menunjukkan perbandingan berpasangan untuk kriteria tenaga kerja, kapasitas produksi, investasi, nilai produksi, bahan baku. Untuk perbandingan dengan kriteria yang sama akan bernilai 1 karena keduanya sama penting. Untuk kriteria kapasitas produksi dengan kriteria tenaga kerja bernilai 5 artinya bahwa kriteria kapasitas produksi sangat penting dari kriteria tenaga kerja. Kriteria tenaga kerja dengan kriteria modal (investasi) bernilai 3 artinya bahwa kriteria tenaga kerja lebih penting dari kriteria investasi. Kriteria tenaga kerja dengan kriteria bahan baku bernilai 3 artinya bahwa kriteria tenaga kerja lebih penting dari kriteria bahan baku. Kriteria kapasitas produksi dengan kriteria modal (investasi) bernilai 3 artinya bahwa kriteria kapasitas produksi lebih penting dari

kriteria modal (investasi). Kriteria modal (investasi) dengan kriteria nilai produksi bernilai 3 artinya bahwa kriteria modal (investasi) lebih penting dari kriteria nilai produksi. Kriteria nilai produksi dengan kriteria bahan baku bernilai 3 artinya bahwa kriteria nilai produksi lebih penting dari kriteria bahan baku. Kriteria tenaga kerja dengan kriteria nilai produksi bernilai 2 artinya kriteria tenaga kerja sedikit lebih penting kriteria nilai produksi. Kriteria kapasitas produksi dengan kriteria nilai produksi bernilai 2 artinya kriteria kapasitas produksi sedikit lebih penting kriteria nilai produksi.

- h. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang sesuai Pengembangan Produk Unggulan Desa Kelompok Usaha Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan adalah Diversifikasi Strategi. Hal ini memberikan gambaran bahwa perlu adanya evaluasi strategi dalam pengembangan produk unggulan desa kelompok usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Atas dasar evaluasi yang telah dilakukan maka lebih lanjut dapat disusun beberapa alternatif program pengembangan produk unggulan desa kelompok usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.
- i. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang sesuai Pengembangan Produk Unggulan Desa Kelompok Usaha Pertambangan dan Galian adalah Ubah Strategi. Hal ini memberikan gambaran bahwa perlu adanya evaluasi strategi dalam pengembangan produk unggulan desa kelompok usaha pertambangan dan galian. Atas dasar evaluasi yang telah dilakukan maka lebih lanjut dapat dilakukan perubahan strategi program pengembangan produk unggulan desa kelompok usaha

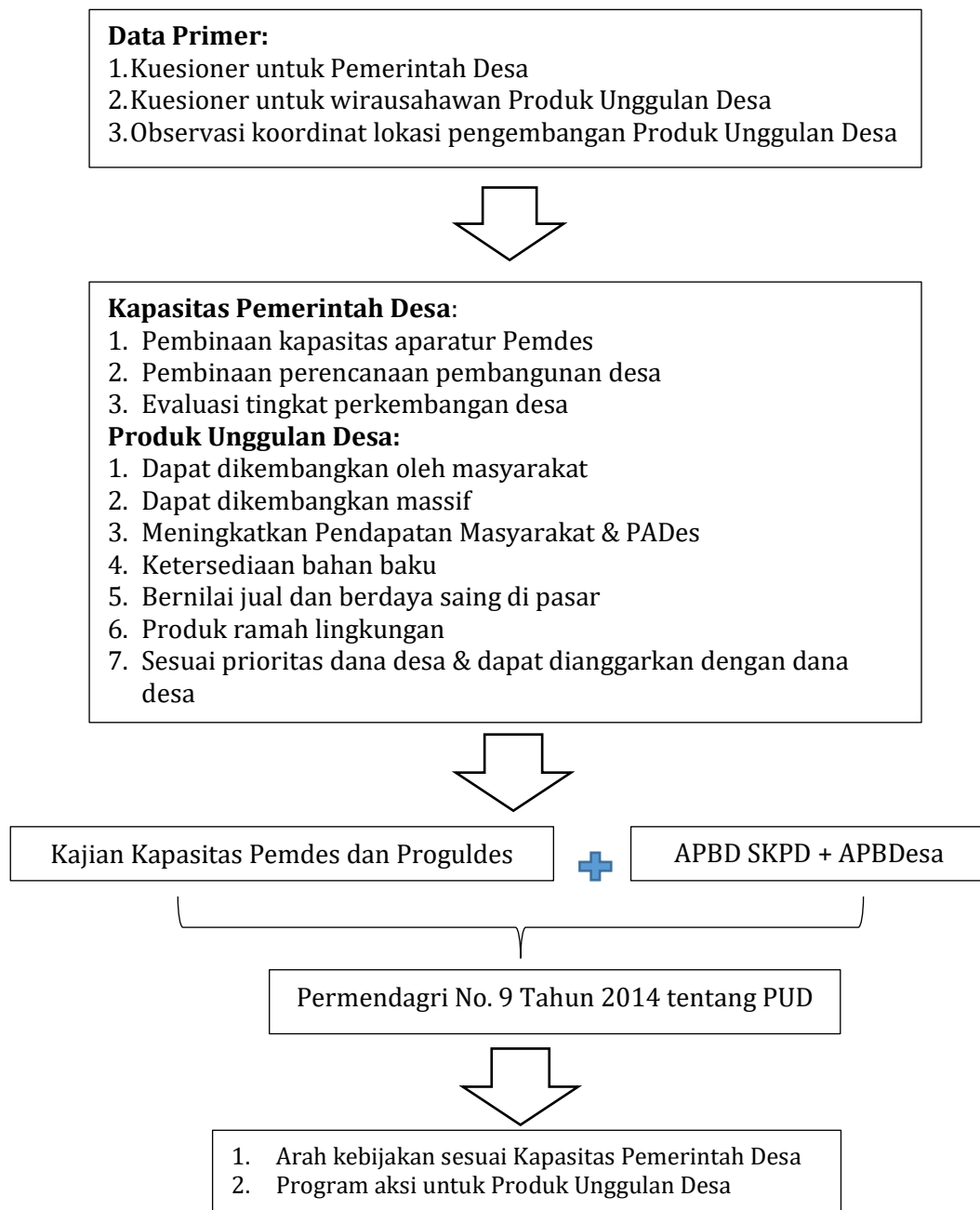
pertambangan dan galian sejalan dengan penurunan sumberdaya bahan galian dan perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pertambangan.

- j. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang sesuai Pengembangan Produk Unggulan Desa Kelompok Industri Pengolahan adalah Strategi Progresif. Hal ini memberikan gambaran bahwa yang dibutuhkan saat ini yakni penguatan dalam pengembangan produk unggulan desa kelompok industri pengolahan. Penguatan yang dapat dilakukan yakni dalam bentuk kontinuitas program dan dukungan penganggaran.
- k. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang sesuai Pengembangan Produk Unggulan Desa Kelompok Usaha Jasa Lainnya dalam hal ini pariwisata (ekowisata) adalah Strategi Progresif. Hal ini memberikan gambaran bahwa yang dibutuhkan saat ini yakni penguatan dalam pengembangan ini pariwisata (ekowisata). Penguatan yang dapat dilakukan yakni dalam bentuk kontinuitas program dan dukungan penganggaran.

2.17. KERANGKA PEMIKIRAN

Kegiatan Kajian Peningkatan Kapasitas Desa Dan Pengembangan Produk Unggulan Setiap Desa ini difokuskan pada upaya untuk mengamati berbagai potensi ekonomi yang seharusnya didorong dan dikembangkan di Kabupaten Cirebon, khususnya terkait dengan potensi 120 desa yang tersebar di 40 kecamatan. Peran kebijakan pembangunan di daerah yang integralistik menjadi acuan utama untuk melihat sejauh mana potensi tersebut dapat dikembangkan

melalui integrasi program dan cakupan program dalam naungan kebijakan pembangunan ekonomi di daerah Kabupaten Cirebon.



Gambar 2.3. Kerangka Berfikir

Dalam rangka upaya pembangunan ekonomi daerah, inventarisasi potensi wilayah/masyarakat/daerah mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu

langkah inventarisasi/identifikasi potensi ekonomi daerah adalah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan daerah pada tiap-tiap sub sektor. Produk unggulan daerah menggambarkan kemampuan daerah menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya.

BAB III

PENDEKATAN DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. PENDEKATAN METODA PENELITIAN

Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuat perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Desa diberikan kewenangan yang besar dan alokasi anggaran yang cukup besar terutama dari APBN. Diantara tujuan pengaturan Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah:

1. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
2. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
3. Mencegah arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota, dengan merencanakan dan melaksanakan kegiatan di desa yang dapat meningkatkan skill/keterampilan usaha penduduk desa mengelola potensi yang dimiliki oleh desa yang dapat menciptakan lapangan kerja yang baru dan memajukan perekonomian di desa.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sumber pendapatan desa terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

- 1) Hasil usaha Desa (BUMDesa Tanah Kas Desa).
- 2) Hasil aset (Pasar Desa, tempat wisata desa).
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong.

4) Lain-lain PAD (Hasil pungutan desa).

b. Pendapatan Transfer

- 1) Dana Desa dari APBN.
- 2) Alokasi Dana Desa.
- 3) Bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten.
- 4) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.
- 5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.

c. Pendapatan Lain-lain

- 1) Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang Tidak mengikat (berupa uang).
- 2) Lain-lain Pendapatan yang sah

Hasil kerjasama dengan Pihak Ketiga/Desa lain dan bantuan perusahaan yang ada di desa. Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini Pemerintah telah mengeluarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Sesuai ketentuan Pasal 30 A Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengalokasian anggaran

Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap, yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2015 paling sedikit sebesar 3% (tiga per seratus);
- b. Tahun Anggaran 2016 paling sedikit sebesar 6 % (enam per seratus);
dan
- c. Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya sebesar 10 % (sepuluh per seratus), dari anggaran Transfer ke Daerah.

Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa. Dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN disebutkan bahwa “Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang diperoleh dari penelitian dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui survei secara langsung ditambah dengan kuesioner dan wawancara dari beberapa sumber yang berkaitan langsung dengan kegiatan ini. Data primer ini diperoleh melalui wawancara yang akan dilakukan kepada aparaturnya pemerintah desa dan pelaku ekonomi desa dan masyarakat

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen yang telah ada.

Data sekunder yang dibutuhkan pada kegiatan ini diantaranya sebagai berikut:

- RPJMDesa 2013-2017
- RPJMDesa 2017-2022
- APBDesa setiap tahun
- Materi MUSRENBANDES

3.2.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam kajian ini dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

- 1) ***Desk study***, meliputi : studi literature, dan kajian sejenis terdahulu, serta regulasi dan kebijakan terkait dengan Peningkatan Kapasitas Desa dan Pengembangan Produk Unggulan Desa.

- 2) **Observasi**, melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap Peningkatan Kapasitas Desa dan Pengembangan Produk Unggulan Desa di 121 Desa.
- 3) **Wawancara**, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung yang dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan tujuan pekerjaan ini. Wawancara akan dilakukan terhadap para Aparatur Pemerintah Desa dan Pelaku/Pengelola Produk Unggulan Desa.
- 4) **Kuesioner**, Yaitu menyebarkan daftar pertanyaan sesuai dengan topik studi kepada para responden.

Mengacu pada materi laporan pendahuluan yang telah disusun, tim akan melakukan pengumpulan data sekunder dan primer. Data sekunder yang dikumpulkan pada tahap ini adalah data sekunder yang belum diperoleh pada tahapan sebelumnya. Sedangkan data primer diperoleh dari observasi ditambah dengan wawancara dan kuesioner berdasarkan pedoman yang telah disusun.

3.2.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan adalah untuk menyusun kajian peningkatan kapasitas desa dan pengembangan produk unggulan desa akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian bertujuan menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis data yang ada secara mendalam. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan metode

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka-angka yang diolah dengan metode statistik (Sutedi, 2011).

Metode pengumpulan data primer pada kegiatan ini adalah metode survey observasi lapangan, pengumpulan data dan wawancara, Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi literature terhadap dokumen-dokumen hasil penelitian sebelumnya dan berbagai regulasi yang diperlukan dalam kegiatan ini.

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini maka data penelitian yang akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

3.2.3. METODE PENARIKAN SAMPEL

Responden dalam kajian ini dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kelompok pertama, aparatur pemerintah desa sebanyak 120 aparatur pemerintah desa dari 120 desa terpilih dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon. Kelompok kedua, pelaku atau produsen Produk Unggulan Desa sebanyak 120 wirausahawan di 120 desa terpilih dari 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019. Pemilihan desa dengan pertimbangan desa yang menjadi kajian pada tahun 2019 belum pernah dilakukan kajian pada tahun 2018.

3.3. METODE ANALISIS DATA

Penelitian ini merupakan non-eksperimental yang sifatnya deskriptif kualitatif dan kuantitatif dimana data yang telah dikumpulkan akan diolah melalui beberapa tahapan berikut ini.

a. Analisis Kapasitas Pemerintah Desa

Untuk menganalisis Kapasitas Pemerintah Desa digunakan tiga indikator yaitu:

1. Pembinaan kapasitas aparatur pemerintah desa
2. Pembinaan perencanaan pembangunan desa
3. Evaluasi tingkat perkembangan desa

b. Analisis Produk Unggulan Desa

Untuk menganalisis Produk Unggulan Desa digunakan tujuh indikator yaitu:

1. Dapat dikembangkan oleh masyarakat
2. Dapat dikembangkan massif
3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa
4. Ketersediaan bahan baku
5. Bernilai jual dan berdaya saing di pasar
6. Produk ramah lingkungan
7. Sesuai prioritas dana desa dan dapat dianggarkan dengan dana desa

c. Analisis keterkaitan

Untuk mendapat hubungan kajian antara Kapasitas Pemerintah Desa dan Produk Unggulan Desa digunakan regulasi pemerintah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Produk Unggulan Daerah dapat dianalisis melalui model 1. Inkubator, 2. Klaster, 3. OVOP, dan 4. Kompetensi Inti.

3.4. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan perlu direncanakan urutan pelaksanaannya, agar pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis, efektif dan efisien. Berdasarkan strategi yang telah disusun, maka pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan Kegiatan

Tahapan persiapan adalah tahap paling awal yang dilakukan sebagai penyusunan langkah untuk melakukan pekerjaan secara menyeluruh. Pada tahap ini dilakukan koordinasi dan pembahasan kerangka acuan kerja serta mobilisasi personil sehingga dapat mengarahkan tugas dan pemahaman bagi keseluruhan personil serta kesiapan bagi personil yang bertugas sebagai tenaga pendukung. Hal ini dimaksudkan agar para personil dapat bekerja secara efisien dan efektif sesuai waktu yang telah ditentukan. Selain itu, pada tahap ini juga akan melakukan identifikasi data (primer maupun sekunder), pengumpulan data awal dan persiapan untuk proses analisis yang akan dilakukan melalui penyusunan metodologi dan pendekatan yang terkait serta penyiapan instrumen observasi lapangan (izin penelitian, kuesioner, panduan wawancara, dsb). Sasaran yang akan dicapai dari tahap persiapan ini adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan dasar, berupa penentuan bentuk metode yang akan dikembangkan dan digunakan
- b. Persiapan teknis berupa persiapan bentuk format dan alat penggalian data
- c. Interpretasi data awal hasil pengumpulan data dari berbagai literatur yang terkait

- d. Penyusunan perencanaan pelaksanaan kegiatan secara umum, sebagai dasar bagi pelaksanaan tahap-tahap kegiatan.

2) Penyusunan Laporan Antara

Setelah tahapan persiapan dilakukan, tim konsultan akan melakukan pemungutan hasil dari tahapan persiapan, meliputi: pemantauan metodologi yang digunakan, rencana/jadwal pelaksanaan pekerjaan, penyiapan instrumen observasi lapangan (kuesioner), dan melakukan studi literatur terkait substansi pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil kajian sejenis sebelumnya, serta pengurusan perizinan survei, Instrumen Kuesioner disusun disesuaikan dengan sumber informasinya, terdiri dari: (a) Kuesioner kepada Pelaku PAS; dan (b) Pengelola PAS. Materi-materi yang telah disusun dan disiapkan tersebut ituangkan ke dalam Laporan pendahuluan. Adapun Laporan pendahuluan minimal memuat :

- a) Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi latar belakang kegiatan, maksud kegiatan, tujuan kegiatan, ruang lingkup kegiatan, sasaran kegiatan, masukan kegiatan dan keluaran kegiatan,
- b) Metodologi penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan,
- c) Metodologi survei yang akan digunakan dalam melaksanakan pekerjaan dan rencana sasaran responden,
- d) Jadwal penugasan personil,
- e) Jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Laporan pendahuluan sebanyak 5 (lima) buku laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPK diterbitkan.

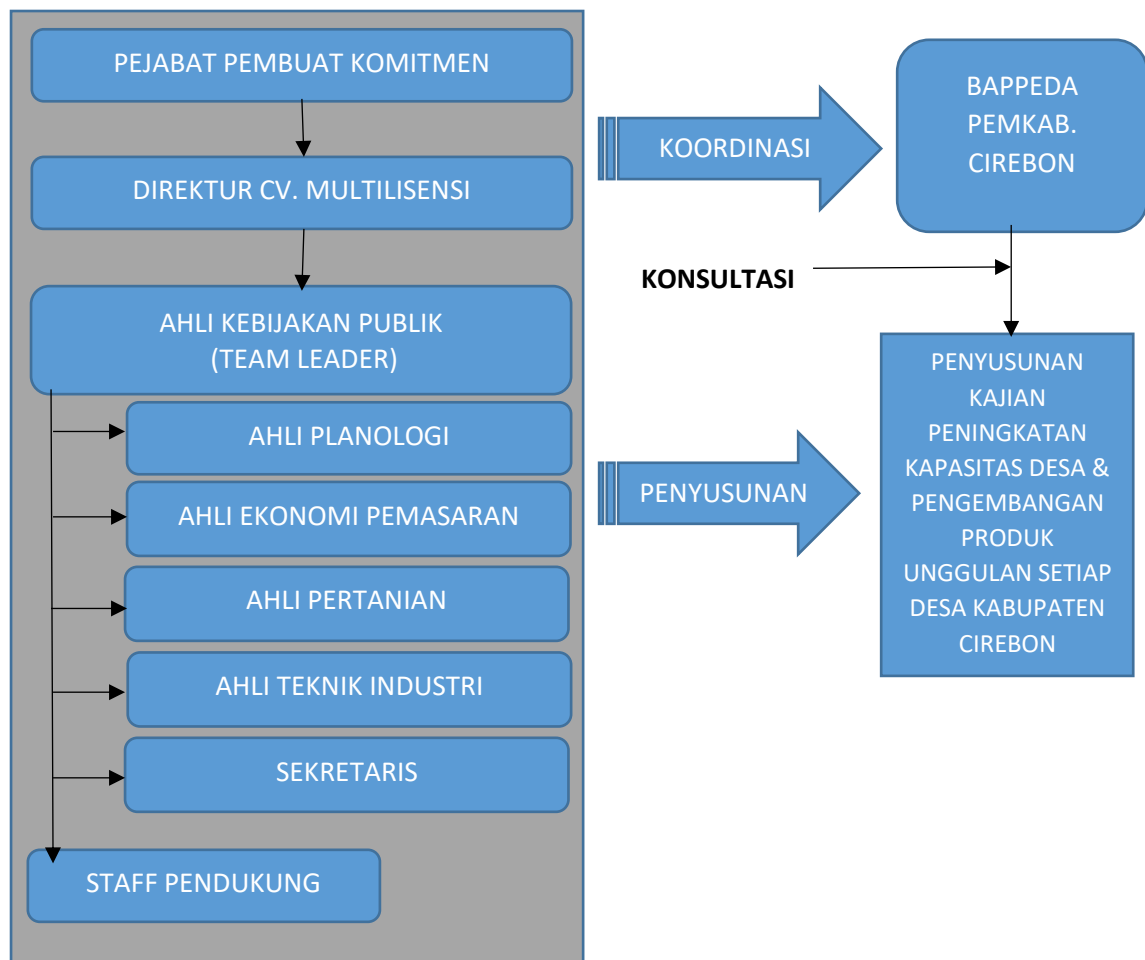
3) Penyusunan Laporan Akhir

Hasil analisa data akan dituangkan ke dalam laporan akhir Sebelum laporan tersebut diserahkan ke pengguna jasa, terlebih dahulu dilakukan presentasi dihadapan pihak pengguna jasa dan pihak terkait. Berdasarkan masukan dan saran tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan. Laporan pendahuluan disampaikan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan disertai dengan 10 (sepuluh) DVD laporan pendahuluan yang diserahkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SPK diterbitkan. Laporan Pendahuluan memuat laporan final pelaksanaan pekerjaan yang meliputi :

- 1 Materi dalam laporan pendahuluan.
- 2 Hasil analisis data.
- 3 Rekomendasi-rekomendasi.

3.5. ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Tujuan dari pembentukan organisasi pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperjelas garis instruksi dan garis koordinasi, antara instansi Pemberi Tugas dengan Tim Konsultan (Pelaksana Tugas) maupun Tim Teknis/Tim Pengarah yang akan terlibat dalam pekerjaan ini. Organisasi pelaksanaan pekerjaan ini, secara diagramatis ditunjukkan pada Gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan

Penugasan masing-masing personil dalam kegiatan ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

POSISI	STATUS TENAGA AHLI	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	LINGKUP KEAHLIAN	URAIAN PEKERJAAN	MASA PENUGASAN (BULAN)
TENAGA AHLI (PERSONAL INTI)					
Team Leader/Ahli Kebijakan Publik	Tenaga Ahli Lokal dari CV. Multi Lisensi	1	Ahli Kebijakan Publik	- Memimpin dan mengkoordinasikan tim peneliti - Bertanggungjawab pada seluruh rangkaian pekerjaan - Menentukan kebutuhan data dan membuat kuesioner bersama dari sudut pandang kebijakan publik - Menganalisa dan penyusunan laporan dari sudut pandang kebijakan publik - Presentasi pekerjaan	3 OB

POSISI	STATUS TENAGA AHLI	JUMLAH PERSONIL (ORANG)	LINGKUP KEAHLIAN	URAIAN PEKERJAAN	MASA PENUGASAN (BULAN)
Anggota Tim/Tenaga Ahli Planologi	Tenaga Ahli Lokal dari CV Multi Lisensi	1	Ahli Planologi	- Menyusun desain analisis dari perencanaan wilayah - Membantu pembuat kuesioner - Melakukan supervisi terhadap pengambilan data - Menganalisa penyusunan kajian dari perspektif perencanaan wilayah - Penyusunan laporan dan presentasi pekerjaan	3 OB
Anggota Tim/Tenaga Ahli Pemasaran	Tenaga Ahli Lokal dari CV Multi Lisensi	1	Ahli Lingkungan	- Mampu melakukan analisis potensi desa yang menjadi produk unggulan desa, mengembangkan jaringan - Mampu menyusun kajian peningkatan kapasitas desa dan pengembangan produk unggulan desa	1 OB
TENAGA PENDUKUNG (PERSONIL LAINNYA)					
Surveyor	Tenaga Pendukung	5	Survei	- Melakukan survei sesuai dengan cakupan wilayah dan kuisisioner yang sudah disusun oleh Tim Ahli - Melakukan survei tepat pada waktu yang ditentukan	9 OB
Administrasi	Tenaga Pendukung	1	Administrasi	- Melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi pekerjaan dan membantu tim dalam pengumpulan data dan informasi, analisis data dan penyusunan laporan	4

3.6. JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

Tenaga Ahli yang dilibatkan dalam pekerjaan ini diatur dalam penugasannya sesuai dengan kebutuhan khusus untuk koordinasi tim dan seluruh personil secara penuh dalam waktu selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender. Jadwal Penugasan tenaga ahli secara rinci adalah sebagai berikut:

Jadwal Penugasan Tenaga Ahli

NO.	POSISI	MASUKAN PERSONIL (BULAN)			ORANG BULAN
		1	2	3	
1	Team Leader/Kebijakan Publik				3

NO.	POSISI	MASUKAN PERSONIL (BULAN)			ORANG BULAN
		1	2	3	
2	Anggota Tim/Tenaga Ahli Planologi				3
3	Anggota Tim/Tenaga Ahli Pemasaran				1
4	Anggota Tim/Tenaga Ahli Pertanian				1
5	Anggota Tim/Tenaga Ahli Teknik Industri				1
3	Surveyor				9
4	Administrasi				3

3.7. JADWAL PELAKSANAAN

Pekerjaan Kajian Peningkatan Kapasitas Desa dan Pengembangan Produk Unggulan setiap desa di Kabupaten Cirebon adalah selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender. Jadwal pelaksanaan pekerjaan (*work plan*) yang akan dilaksanakan selengkapnya disajikan berikut ini:

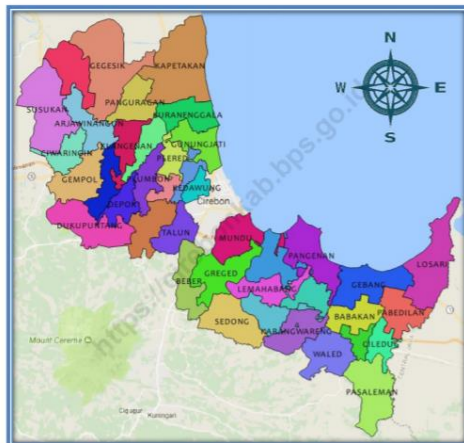
No	Uraian	Bulan I				Bulan II				Bulan III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan												
2.	Ekspose Rencana kegiatan dari penyedia jasa kepada Pengguna jasa (PPK dan SKPD terkait)												
3.	Tinjauan Pustaka												
4.	Pengumpulan data primer + sekunder												
5.	Analisis hasil pengumpulan data												
6.	FGD Penyusunan Laporan												
7.	Pelaporan												
	• Pendahuluan												
	• Antara												
	• Final												

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI STUDI

4.1. KABUPATEN CIREBON

PETA WILAYAH KABUPATEN CIREBON

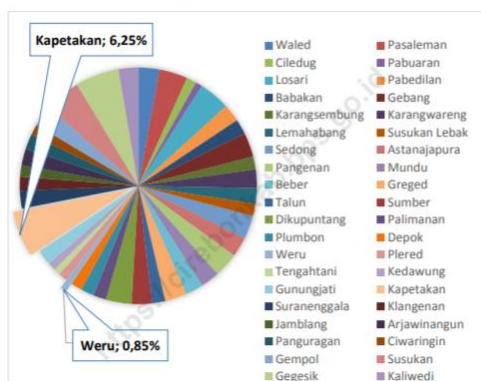


Secara astronomis, Kabupaten Cirebon berada pada posisi antara $108^{\circ} 40' - 108^{\circ} 48'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 30' - 7^{\circ} 00'$ Lintang Selatan.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Cirebon memiliki batas-batas:

Utara – Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa; Selatan – Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka; Barat – Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu; Timur – Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Cirebon, adalah berupa daratan seluas $1.070,29 \text{ km}^2$

Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Kabupaten Cirebon (km^2), 2018



Tahun 2018, wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dengan 424 Desa/Kelurahan. Luas wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapetakan ($66,89 \text{ km}^2$) diikuti Kecamatan Gegesik ($63,83 \text{ km}^2$), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah

Kecamatan Weru ($9,15 \text{ km}^2$). Letak daratan Kabupaten Cirebon memanjang dari

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kantor Kecamatan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2018

Kecamatan Sub-district	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Waled	17	1	18
2 Pacaleman	17	1	18
3 Ciledug	18	1	19
4 Pabuaran	19	1	20
5 Losari	18	2	20
6 Pabedilan	20	3	23
7 Babakan	19	1	20
8 Gebang	13	3	16
9 Karangsembung	17	1	18
10 Karangwarung	15	1	16
11 Lemahabang	17	2	19
12 Susukan Labak	18	-	18
13 Sedong	11	5	16
14 Astanajapura	18	1	19
15 Pangenan	15	1	16
16 Mundu	14	4	18
17 Beber	12	3	15
18 Greged	16	-	16
19 Talun	12	5	17
20 Sumber	20	2	22
21 Okupuntang	9	3	12
22 Palimanan	12	2	14
23 Plumbon	15	5	20
24 Depok	11	3	14
25 Weru	12	3	15
26 Plered	14	4	18
27 Tengahtani	14	3	17
28 Kedawung	11	2	13
29 Gunungjati	17	5	22
30 Kapetakan	16	1	17
31 Suranenggala	16	1	17
32 Klangeran	12	6	18
33 Jambalang	13	3	16
34 Arjawinangun	21	2	23
35 Panguragan	12	1	13
36 Cwaringin	16	2	18
37 Gempol	15	2	17
38 Susukan	19	1	20
39 Gegesik	16	1	17
40 Kaliwedi	14	2	16
Jumlah/Total	611	90	701

Barat Laut ke Tenggara. Dilihat dari permukaan tanah/daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah dataran rendah umumnya terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, yaitu Kecamatan Gegesik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klangeran, Gunungjati, Tengah Tani, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan,

Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok dan Kecamatan Pabedilan. Sedangkan sebagian lagi termasuk pada daerah dataran tinggi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil daerah di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 sebanyak 12.962 orang yang terdiri dari Golongan I 108 orang, Golongan II 1.407 orang, Golongan III 5.649 orang dan Golongan IV 5.798 orang.

Penduduk Kabupaten Cirebon berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2018 sebanyak 2.162.576 jiwa yang terdiri atas 1.095.984 jiwa penduduk laki-laki (50,68%) dan 1.066.592 jiwa penduduk perempuan (49,32%). Data penduduk Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 62.277 jiwa (2,97 %) dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebesar 2.100.299 jiwa. Sedangkan pada tahun 2018 per

Desember jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebesar 2.162.576 jiwa. Pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2017-2018 adalah Kecamatan Pabedilan sebanyak 8,31 %. Sedangkan pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Beber hanya sebesar 0,07 %.

Jumlah penduduk di daerah penyangga atau berbatasan langsung dengan Kota Cirebon, yaitu di Kecamatan Kedawung, Gunungjati, Talun, dan Mundu Sebanyak jiwa 273.229 atau 12,63 % dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Cirebon tinggal hampir merata di wilayah Kabupaten Cirebon dan tidak bertumpu pada daerah penyangga kota Cirebon seperti yang terjadi pada daerah penyangga Ibu Kota Jakarta. Tiga kecamatan di Kabupaten Cirebon yang memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu: Kecamatan Weru (7.281 jiwa/Km), Kecamatan Kedawung (6.052 Jiwa/Km²), Kecamatan Gunungjati (3.811 jiwa/Km²).

Wilayah Kabupaten Cirebon memiliki lahan yang dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian. Karakteristik lahan pertanian inilah yang sangat menentukan naik turunnya produksi hasil pertanian dan juga keragamannya.

Pada tahun 2018 di Kabupaten Cirebon luas tanam padi sebesar 92.196 Ha dan luas panen padi sebesar 91.247 Ha. Dengan Produksi sebesar 672.882 ton Gabah Kering Panen Luas panen komoditi palawija seperti Jagung pada tahun 2018 sebesar 5.383 Ha dengan produksi sebesar 39.969 ton. Untuk Ubi Jalar luas panen sebesar 274 Ha dengan produksi sebesar 6.145 ton. Kedelai luas panen sebesar 704 ha dengan produksi sebesar 803 ton. Pada tahun 2018, produksi buahbuahan terbesar adalah mangga yaitu sebesar 554.914 kwintal, diikuti pisang sebesar

116.550 kwintal. Sementara itu produksi sayur sayuran di Kabupaten Cirebon di dominasi oleh bawang merah, disusul oleh cabai besar yaitu sebesar 356.472 kwintal dan 61.609 kwintal.

Pada tahun 2018, luas panen tebu di Kabupaten Cirebon sebesar 4.082,99 ha dengan produksi sebanyak 19.262,60 ton. Sedangkan perkebunan kelapa muda dengan luas tanaman sebesar 747,08 ha menghasilkan 349,94 ton. Jenis ternak yang diusahakan di Kabupaten Cirebon berupa ternak besar, kecil dan unggas. Pada tahun 2018 jumlah ternak sapi potong sebesar 4.277 ekor, sapi perah 138 ekor, kerbau 3.518 ekor, kuda 133 ekor, kambing 17.168 ekor, domba 289.692 ekor dan kelinci 6.160 ekor. Unggas yang dipelihara adalah jenis ayam buras, ayam ras dan itik. Jumlah ayam buras tahun 2018 sebanyak 1.294.466 ekor, ayam ras petelur/pedaging 2.584.157 ekor, itik/itik manila 768.682 ekor. Pada tahun 2018, produksi daging ternak di Kabupaten Cirebon terbesar adalah ayam ras pedaging yaitu 19.681.369 kg, disusul oleh daging domba sebesar 3.867.659 kg, dan daging sapi potong 3.830.055 kg.

Jumlah unit usaha industri unggulan yang ada di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 ada sebanyak 5.209 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 92.404 orang ini lebih banyak bila dibandingkan tahun sebelumnya. Usaha terbanyak yang ada di Kabupaten Cirebon adalah industry meubel/kerajinan rotan dan paling banyak menyerap tenaga kerja.

Secara keseluruhan dari hasil rekapitulasi bulan Juni 2019 oleh BAPPELITBANGDA atas 412 desa di Kabupaten Cirebon adalah: Desa Tertinggal berjumlah dua belas (12) desa (2,91%), Desa Berkembang berjumlah 311 desa (75.49%), Desa Maju ada 87 desa (21,12%), dan Desa Mandiri ada 2 desa (0.49%).

Sedangkan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 tentang status kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut: Desa Sangat Tertinggal 1 desa (0,24%), Desa Tertinggal 43 desa (10,44%), Desa Berkembang 320 desa (77,67%), Desa Maju 47 desa (11,41%), dan Desa Mandiri 1 desa (0,24%).

4.2. KECAMATAN PLUMBON



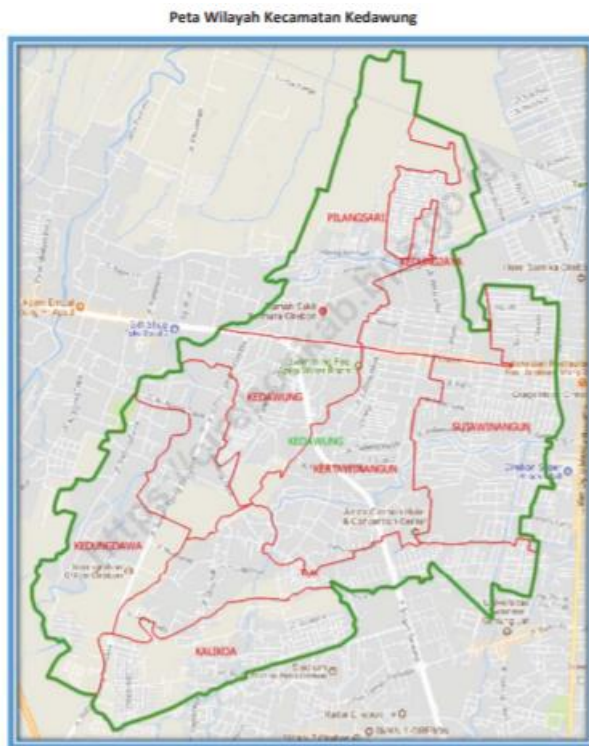
Lokasi studi di Kecamatan Plumbon dilaksanakan di dua desa yaitu Bodesari dan Gombang. Desa Bodesari memiliki 1 Kantor Desa, 22,70 Ha Tanah Bengkok, 8,30 Ha Tanah Kas Desa sedangkan Desa Gombang memiliki 1 Kantor Desa, 22,25 Ha Tanah Bengkok, dan 1 Ha Tanah Kas Desa.

Desa Bodesari dan Gombang berklasifikasi Desa Swadaya. Desa Kebarepan memiliki 1 Kepala Desa, 1 Sekdes, 5 Kasi, 3 Kadus, 10 LINMAS, dan 5 Pos Kamling. Desa Pesanggerahan memiliki 1 Kepala Desa, 1 Sekdes, 5 Kasi, 2 Kadus, 10 LINMAS, dan 5 Pos Kamling.

Luas wilayah Kebarepan 1,39 Km² dengan jumlah penduduk 2393 dan Pesanggerahan 1,36 Km² dengan total jumlah penduduk 25.505 orang pada tahun 2018. Pelanggan listrik di Kabarepan 1548 dan Pesanggrahan 1387 pelanggan.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	BODESARI	0.7771	0.6667	0.4667	0.6451	BERKEMBANG	-
	GOMBANG	0.72	0.6333	0.8	0.64380952	BERKEMBANG	-
2019	BODESARI	0,8114	0,6500	0,8000	0.6867	MAJU	1,112,927,000
	GOMBANG	0,8114	0,5500	0,5333	0.6856	BERKEMBANG	1,098,485,000

4.3. KECAMATAN KEDAWUNG



Lokasi studi di Kecamatan Kedawung dilaksanakan di lima desa yaitu: Kalikoa, Pilangsari, Kedungdawa, Kedawung, dan Sutawinangun.

Luas wilayah Kalikoa 1,07 Km², Kedungdawa 1,03 Km², Kedawung 0,90 Km², Pilangsari 1,64 Km², dan Sutawinangun 1,29 Km². Jumlah penduduk Kecamatan Kedawung

18.555 orang.

Kalikoa mempunyai 1 Kantor Desa, 29 Ha Tanah Bengkok, dan 1,5 Ha Tanah Kas Desa. Kedungdawa 1 Kantor Desa, 6 Ha Tanah Bengkok, Kedawung 1 Kantor Desa, 4 Ha Tanah Bengkok, Pilangsari 1 Kantor Desa, 11 Ha Tanah Bengkok, dan Sutawinangun 1 Kantor Desa dengan 4,8 Ha Tanah Bengkok.

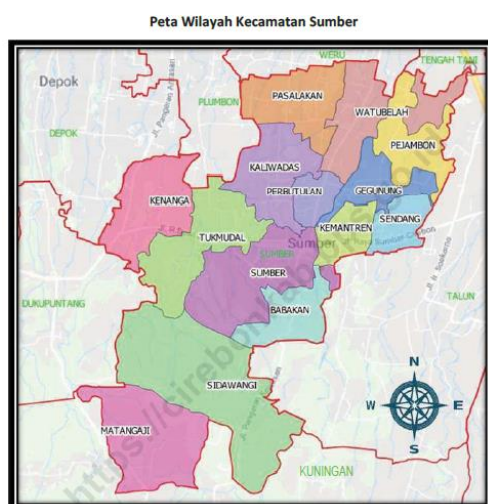
Dari lima Desa, 4 Desa berklasifikasi Swadaya dan 1 Desa berklasifikasi Swakarsa yaitu Desa Sutawinangun.

Kalikoa mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, 10 Linmas, dan 4 Pos Kamling. , Kedungdawa mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 2 Kadus, 10 Linmas, dan 13 Pos Kamling. Kedawung mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, 11

Linmas, dan 14 Pos Kamling., Pilangsari mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 2 Kadus, 2 Linmas, dan 5 Pos Kamling., dan Sutawinangun mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, 20 Linmas, dan 11 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	KEDUNGDAWA	0.7429	0.55	0.5333	0.6397	BERKEMBANG	-
	KALIKOA	0.7657	0.65	0.5333	0.6395	BERKEMBANG	-
	KEDAWUNG	0.6114	0.6333	0.6	0.6149	BERKEMBANG	-
	SUTAWINANGUN	0.7134	0.5167	0.4	0.6376	BERKEMBANG	-
	PILANGSARI	0.7657	0.8	0.5333	0.6368	BERKEMBANG	-
2019	KEDUNGDAWA	0.4000	0.6167	0.8171	0.6802	BERKEMBANG	924,574,000
	KALIKOA	0.8400	0.6500	0.4667	0.68	BERKEMBANG	908,448,000
	KEDAWUNG	0.8800	0.7333	0.4667	0.6795	BERKEMBANG	1,058,300,000
	SUTAWINANGUN	0.9029	0.6667	0.4667	0.6795	BERKEMBANG	1,015,693,000
	PILANGSARI	0.8971	0.7000	0.4667	0.6792	BERKEMBANG	1,008,470,000

4.4. KECAMATAN SUMBER



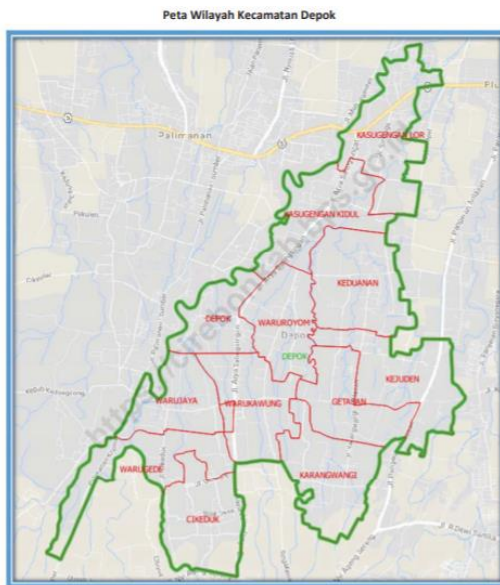
Lokasi studi dilakukan di satu desa yaitu Sidawangi.

Sidawangi mempunyai luas wilayah 1.28 Km². Sidawangi mempunyai 1 Kantor Desa, 23.8 Ha Tanah Bengkok, dan 2,9 Ha Tanah Kas Desa, Sidawangi berklasifikasi desa Swadaya.

Sidawangi mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 4 Kadus, dan 10 LINMAS. Sidawangi mempunyai total area 1.28 Km² dengan jumlah penduduk 27,231 orang.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	SIDAWANGI	0.7657	0.6167	0.7333	0.0000	BERKEMBANG	-
2019	SIDAWANGI	0.7257	0.5833	0.5333	0.6956	BERKEMBANG	1,102,654,000

4.5. KECAMATAN DEPOK



Lokasi studi dilaksanakan di tiga desa yaitu Kasugengan Kidul, Kasugengan Lor, dan Keduanan.

Kasugengan Kidul mempunyai luas wilayah 1.28 Km², Kasugengan Lor 1,57 Km, dan Depok 0,75 Km².

Kasugengan Kidul mempunyai 1 Kantor

Desa, 23.8 Ha Tanah Bengkok, dan 2,9 Ha Tanah Kas Desa, Kasugengan Lor mempunyai 1 Kantor Desa, 24.0 Ha Tanah Bengkok, dan Keduanan mempunyai 1 Kantor Desa, dan 11 Ha Tanah Bengkok. Kasugengan Kidul, Kasugengan Lor, dan Keduanan ketiga berklasifikasi desa Swadaya.

Jumlah Perusahaan yang terdaftar di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Tahun 2018

Nama Perusahaan	Bidang Perusahaan
[1]	[2]
1. Jati Sentosa	Industri Meubel Kayu
2. CV. Dwi Nusanindo	Industri Meubel Rotan
3. UD Stambul jaya	Perdagangan Kayu
4. Golden	Industri Rotan
5. CV. Sampurna	Perdagangan Ekspor Impor
6. PT. Ridho Bangun Sejahtera	Developer Perumahan
7. CV. Smart Indobeat Internasional	Perdagangan
8. PT. Surabaja Indah	Industri Pengolahan Makanan
9. CV. Satori Rattan Indonesia	Industri Rotan
10. CV. Dewi Karissa	Industri Tutup Galon
11. Agung Jaya	Perdagangan Meubel Kayu
12. CV. Jati Lestari	Perdagangan dan Jasa Transportasi
13. Putra Mandiri	Industri Batu Alam
14. Ayuning Jati	Industri Meubel Kayu
15. Hutomo	Perdagangan Kayu Log
16. PD. Yusup Sejati	Perdagangan dan Jasa
17. Asri Rotan	Industri Rotan

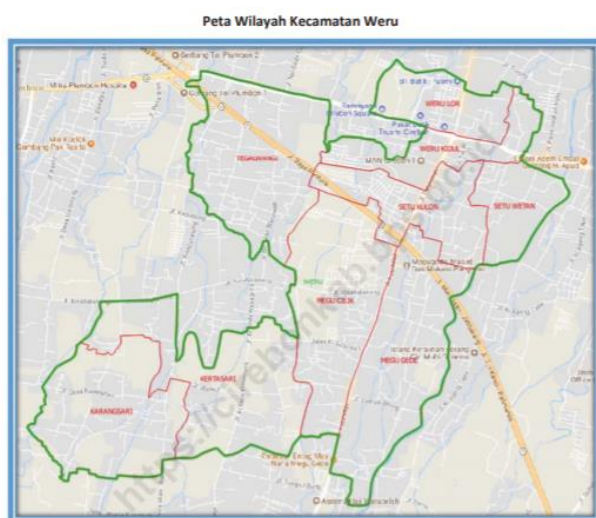
Sumber : Source : Kecamatan Depok

Kasugengan Kidul mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 4 Kadus, dan 10 LINMAS, Kasugengan Lor mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 2 Kadus, dan 10 LINMAS, dan Keduanan mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 2 Kadus, dan 10 LINMAS.

Kasugengan Kidul mempunyai total area 1.28 Km² dengan jumlah penduduk 19.642 orang, ada 222 orang bekerja pada industri pengolahan, 171 sebagai pegawai pemerintah, Kasugengan Lor luas 1.57 Km², 7813 penduduk dimana ada 39 orang bekerja pada industri pengolahan, 27 bekerja pada konstruksi, 1620 perdagangan dan jasa, dan 139 sebagai pegawai pemerintah dan Keduanan 0.74 Km² dengan 3179 penduduk dimana 123 bekerja pada sektor Pertanian, Kehutanan dan perkebunan.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	KASUGENGAN KIDUL	0.868571	0.6	0.3333	0.6014	BERKEMBANG	-
	KASUGENGAN LOR	0.817143	0.7667	0.4	0.6013	BERKEMBANG	-
	KEDUANAN	0.8171	0.5667	0.6667	0.601	BERKEMBANG	-
2019	KASUGENGAN KIDUL	0.6686	0.5833	0.6667	0.6379	BERKEMBANG	1,111,676,000
	KASUGENGAN LOR	0.7314	0.6	0.6667	0.6379	BERKEMBANG	1,036,450,000
	KEDUANAN	0.7771	0.4833	0.6667	0.6370	BERKEMBANG	986,573,000

4.6. KECAMATAN WERU



Lokasi studi pada Kecamatan Weru dilaksanakan di tiga desa yaitu Kertasari, Setu Kulon, dan Weru Kidul

Kertasari mempunyai luas 1.351 Km², berpenduduk 6926 orang, dengan 1 Kantor Desa, 14,12 Ha

Tanah Bengkok dan 1,57 Ha Tanah Kas Desa, Weru Kidul 0,519 Km², berpenduduk 20.495 orang, mempunyai 1 Kantor Desa dan 17,78 Ha Tanah

bengkok, dan Desa Setu Kulon mempunyai luas wiayah 0,727 km², mempunyai 1 Kantor Desa, tanah bengkok 23,05 Ha dan tanah kas desa 30 Ha.

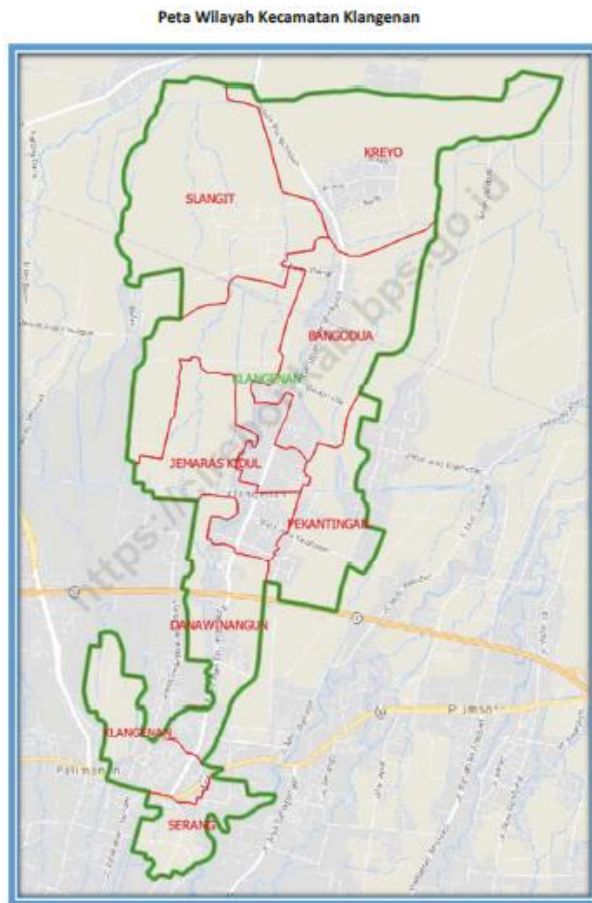
Desa Kertasari, Setu Kulon dan Weru Kidul ketiganya berklasifikasi desa Swasembada. Kertasari mempunyai 1 Kades, 2 Sekdes, 5 Kasi, 2 Kadus, 3 LINMAS, dan 14 Pos Kamling dan Karangsari mempunyai 1 Kades, 2 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 11 LINMAS, dan 8 Pos Kamling.

Desa Kertasari mempunyai 44 Ha sawah, dan 91,1 Ha bukan sawah sedangkan Karangsari mempunyai 46 Ha sawah dan 67,3 Ha bukan sawah.

Pada tahun 2018, sarana perdagangan di Kecamatan Weru tercatat ada 3 pasar, 17 mini market, 12 rumah makan, 162 warung makan, dan 403 warung kelontong. PADes Desa Kertasari mempunyai PADes Rp. 60.000.000, Weru Kidul PADes Rp. 90.000.000, dan PADes Desa Setu Kulon Rp. 75.000.000.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	KERTASARI	0.7657	0.8333	0.2000	0.6414	BERKEMBANG	-
	SETU KULON	0.7829	0.5833	0.6667	0.6402	BERKEMBANG	-
	WERU KIDUL	0.7314	0.6833	0.5333	0.64	BERKEMBANG	-
2019	KERTASARI	0.8629	0.6333	0.6000	0.6829	BERKEMBANG	1,156,694,000
	SETU KULON	0.8343	0.6500	0.6667	0.6821	MAJU	1,083,088,000
	WERU KIDUL	0.8343	0.7000	0.5333	0.6811	BERKEMBANG	1,007,986,000

4.7. KECAMATAN KLANGENAN



Lokasi studi pada Kecamatan Klagenan dilaksanakan pada empat desa yaitu Jemaras Kidul, Jemaras Lor, Slangit, dan Pekantingan.

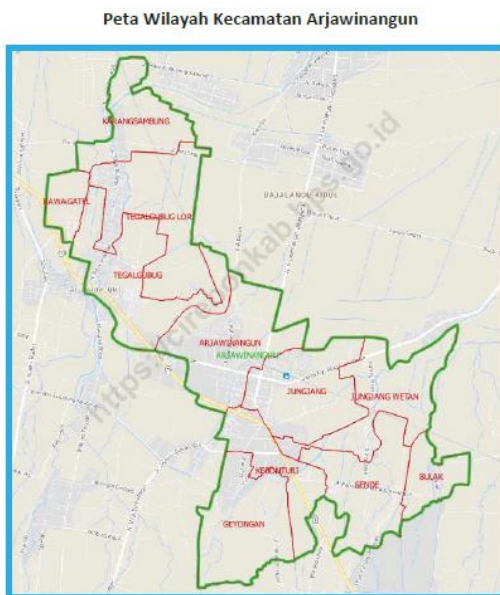
Jemaras Kidul mempunyai luas 2,29 Km², ada 1 Kantor Desa, 22,148 Ha Tanah Bengkok, Jemaras Lor luasnya 2,19 Km², 1 Kantor Desa Slangit luasnya 3,36 Km², 1 Kantor Desa dan 31,25 Ha Tanah Benkok, dan Pekantingan luas 1,86 Km² dan 1 Kantor Desa.

Jemaras Kidul Jemaras Lor, Slangit, dan Pekantingan semuanya termasuk Desa Swakarsa. Populasi Desa Jemaras Kidul 5209, Jemaras Lor (6244), Slangit 4986, dan Pekantingan 5334 sehingga jumlah penduduk Kecamatan Klagenan adalah 16.824 orang.

Jemaras Kidul mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS, dan 6 Pos Kamling, Jemaras Lor mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS, dan 6 Pos Kamling, Slangit mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS, dan 6 Pos Kamling, dan Pekantingan mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS, dan 6 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	DANAWINANGUN	0.7429	0.6000	0.6667	0.6289	BERKEMBANG	-
	PEKANTINGAN	0.6571	0.5361	0.6667	0.6287	BERKEMBANG	-
	JEMARAS LOR	0.6343	0.5667	0.6667	0.6287	BERKEMBANG	-
2019	DANAWINANGUN	0.8000	0.6500	0.6667	0.666	BERKEMBANG	1,167,191
	PEKANTINGAN	0.7429	0.6167	0.6667	0.6648	BERKEMBANG	1,086,734
	JEMARAS LOR	0.7600	0.617	0.6000	0.6652	BERKEMBANG	1,138,604

4.8. KECAMATAN ARJAWINANGUN



Lokasi studi pada Kecamatan Arjawinangun dilaksanakan pada dua desa yaitu Tegalubug dan Kebonturi.

Tegalubug luasnya 2,5 Km² dan Kebonturi luasnya 1,7 Km². Tegalubug mempunyai 1 Kantor Desa, 31,500 Ha Tanah bengkok, dan 57,811 Tanah Kas Desa dan Kebonturi 1 Kantor Desa, 25,500

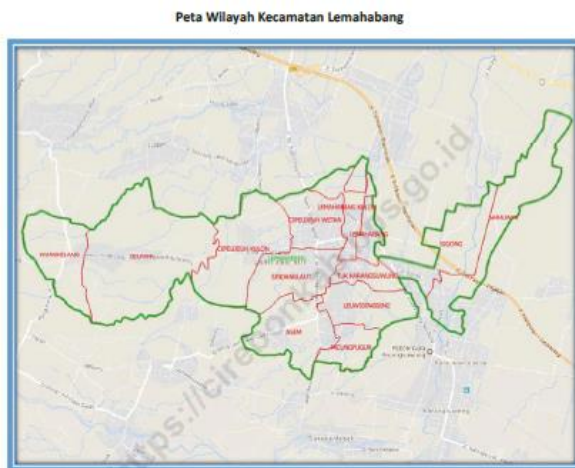
Ha Tanah bengkok, dan 25,257 Tanah Kas.

Tegalubug berklasifikasi Desa Swadaya yang mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 3 Kasi, 5 Kadus, 10 Linmas, dan 10 Pos Kamling dan Kebonturi berklasifikasi Desa mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 3 Kasi, 4 Kadus, 11 Linmas, dan 8 Pos Kamling Swakarsa.

Populasi Tegalubug adalah 12110 dan Kebonturi 4526 orang, total jumlah penduduk Kecamatan Arjawinangun adalah 21.767 orang.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	TEGALGUBUG	0.7657	0.7123	0.6667	0.6253	MAJU	-
	KEBONTURI	0.8285	0.6833	0.6667	0.6238	MAJU	-
2019	TEGALGUBUG	0,8514	0,7667	0,6667	0.6632	MAJU	1,071,017,000
	KEBONTURI	0,8686	0,7667	0,6667	0.6627	MAJU	963,918,000

4.9. KECAMATAN LEMAHABANG



Lokasi studi di Kecamatan Lemahabang dilaksanakan pada empat desa yaitu Leuwidingding, Picungpugur, Sindanglaut, dan Asem.

Luas area Leuwidingding 1,31 Km² populasi 2974 orang, Picungpugur 0,74 Km² populasi 1561 orang,

Sindanglaut 1,47 Km² populasi 3964 orang, dan Asem 1,91 Km² populasi 2888 orang sehingga populasi totalnya adalah 17.303 orang.

Semua desa mempunyai 1 Kantor,, Leuwidingding dengan 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS dan 11 Pos Kamling, Picungpugur dengan 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS dan 11 Pos Kamling, Sindanglaut dengan 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS dan 11 Pos Kamling, dan Asem dengan 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 3 Kadus, 10 LINMAS dan 5 Pos Kamling.

Empat desa yaitu Leuwidingding, Picungpugur, Sindanglaut, dan Asem semuanya berkegiatan di Pertanian, Leuwidingding 54 teknis, 7 setengah teknis, Picungpugur 58 setengah teknis, Sindanglaut 70 setengah teknis, dan Asem mempunyai 137 setengah teknis.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	PICUNGPUGUR	0.6457	0.5	10	0.6041	BERKEMBANG	-
	LEUWIDINGDING	0.7314	0.5333	0.8	0.6883	BERKEMBANG	-
	ASEM	0.6857	0.55	0.667	0.6342	BERKEMBANG	-
	SINDANGLAUT	0.7656	0.65	0.6	0.6719	BERKEMBANG	-
2019	PICUNGPUGUR	0.766	0.533	0.667	0.6652	MAJU	850,515,000
	LEUWIDINGDING	0.76	0.6833	0.6667	0.7071	BERKEMBANG	886,872,000
	ASEM	0.783	0.667	0.667	0.7054	BERKEMBANG	890,585,000

	SINDANGLAUT	0.7886	0.65	0.6	0.6795	BERKEMBANG	930,615,000
--	-------------	--------	------	-----	--------	------------	-------------

4.10.KECAMATAN SEDONG



Lokasi studi di Kecamatan Sedong dilaksanakan pada lima desa yaitu Panambangan, Panongan, Karangwuni, Sedongkidul, dan Windujaya.

Luas wilayah Panambangan 2.92 Km2 dengan populasi 3804 orang,

Panongan 2.60 Km2 dengan populasi 4474 orang, Karangwuni 5.33 Km2 dengan populasi 4691 orang, Sedongkidul 4.01 Km2 dengan populasi 4307 orang, dan Windujaya 2.41 Km2 dengan populasi 3568 orang dengan populasi total 12.936 orang.

Panambangan mempunyai 1 Kantor Desa, 21.50 Ha Tanah Bengkok, 19.50 Km2 Tanah Kas Desa, Panongan mempunyai 1 Kantor Desa, 21.50 Ha Tanah Bengkok, 19.50 Km2 Tanah Kas Desa, Karangwuni mempunyai 1 Kantor Desa, 21.50 Ha Tanah Bengkok, 19.50 Km2 Tanah Kas Desa, Sedongkidul mempunyai 1 Kantor Desa, 21.50 Ha Tanah Bengkok, 19.50 Km2 Tanah Kas Desa, dan Windujaya mempunyai 1 Kantor Desa, 23.50 Ha Tanah Bengkok, 31.50 Km2 Tanah Kas Desa.

Kelima desa yaitu Panambangan, Panongan, Karangwuni, Sedongkidul, dan Windujaya semua berklasifikasi desa Swakarsa. Panambangan memiliki 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, 11 LINMAS, dan 10 Pos Kamling, Panongan memiliki 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, 11 LINMAS, dan 10 Pos Kamling, Karangwuni

memiliki 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, 11 LINMAS, dan 10 Pos Kamling, Sedongkidul memiliki 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, 11 LINMAS, dan 10 Pos Kamling, dan Windujaya memiliki 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, 11 LINMAS, dan 10 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Karangwuni	0.7657	0.5667	0.5333	0.6219	BERKEMBANG	-
	Panambangan	0.7371	0.45	0.7333	0.6402	BERKEMBANG	-
	Panongan	0.7371	0.5167	0.6667	0.6402	BERKEMBANG	-
	Sedong Kidul	0.7829	0.5	0.5333	0.6054	BERKEMBANG	-
	Windujaya	0.7714	0.6167	0.6667	0.6849	BERKEMBANG	-
2019	Karangwuni	0.8286	0.5500	0.7333	0.7040	BERKEMBANG	1,117,568,000
	Panambangan	0.777	0.683	0.533	0.6644	BERKEMBANG	1,114,266,000
	Panongan	0.7829	0.6667	0.6	0.6832	BERKEMBANG	1,052,377,000
	Sedong Kidul	0.8571	0.65	0.5333	0.6802	BERKEMBANG	1,114,186,000
	Windujaya	0.7714	0.5667	0.6667	0.6606	BERKEMBANG	1,002,850,000

4.11.KECAMATAN MUNDU



Lokasi studi di Kecamatan Mundu dilaksanakan di tiga desa yaitu Mundupesisir, Citemu, dan Sinarancang.

Luas wilayah Mundupesisir 1,55 Km2 dengan jumlah penduduk 22.918 orang, Citemu 1,17 Km2

dengan jumlah penduduk 3815 orang, dan Sinarancang 2,07 Km2 dengan jumlah penduduk 2.752 orang.

Setiap desa Mundupesisir, Citemu, dan Sinarancang mempunyai 1 Kantor Desa dan semuanya berklasifikasi desa Swakarsa.

Mundupesisir mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi dan Kasi, 4 Kadus, 11 LINMAS, dan 4 Pos Kamling , Citemu mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi dan Kasi, 4 Kadus, 11 LINMAS, dan 4 Pos Kamling, dan Sinarancang mempunyai 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi dan Kasi, 4 Kadus, 11 LINMAS, dan 4 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Citemu	0.6057	0.5333	0.6667	0.6019	BERKEMBANG	-
	Mundu pesisir	0.7943	0.7833	0.4667	0.6814	BERKEMBANG	-
	Sinarancang	0.6629	0.6	0.6	0.621	BERKEMBANG	-
2019	Citemu	0.7143	0.5000	0.7333	0.6492	BERKEMBANG	965,273,000
	Mundu pesisir	0.8171	0.7667	0.5333	0.7057	BERKEMBANG	1,130,656,000
	Sinarancang	0.7143	0.500	0.6000	0.6048	BERKEMBANG	1,042,343,000

4.12.KECAMATAN SURANENGALA



Lokasi studi di Kecamatan Suranenggala dilaksanakan pada lima desa yaitu Purwawinangun, Karangreja, Keraton, Suranenggala Lor, dan Muara.

Luas wilayah Purwawinangun 1,88 Km² dengan populasi 13.931 orang. Karangreja 1,40

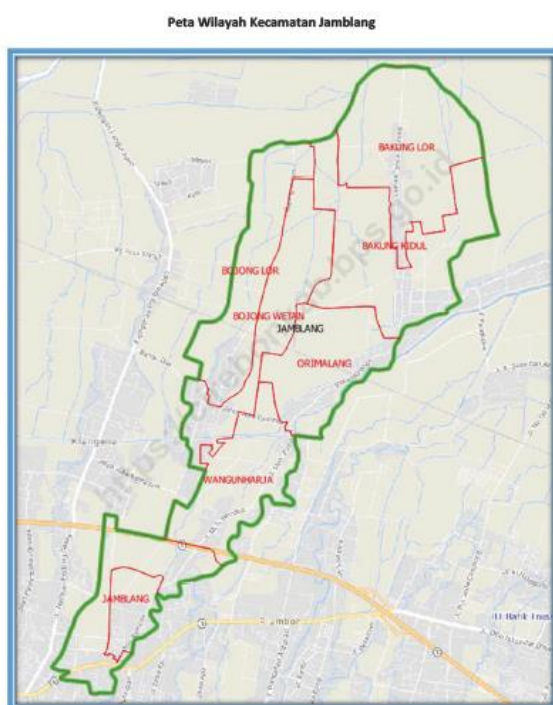
Km² dengan populasi 4096 orang, Keraton 1,25 Km² dengan populasi 4194 orang, Suranenggala Lor 2,78 Km² dengan populasi 430 orang, dan Muara 5,33 Km² dengan populasi 3929 orang.

Setiap desa yaitu Purwawinangun, Karangreja, Keraton, Suranenggala Lor, dan Muara mempunyai satu Kantor Desa. Purwawinangun dikelola oleh 1 Kades, 1

Sekdes, 5 Kasi, 8 Kadus, 13 LINMAS, dan 34 Pos Kamling, Karangreja dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 8 Kadus, 13 LINMAS, dan 6 Pos Kamling, Keraton dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 8 Kadus, 13 LINMAS, dan 6 Pos Kamling, Suranenggala Lor dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 8 Kadus, 13 LINMAS, dan 6 Pos Kamling, dan Muara dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 8 Kadus, 13 LINMAS, dan 6 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Karangreja	0,5829	0,7667	0,8667	0,6721	BERKEMBANG	-
	Keraton	0,6629	0,6500	0,8667	0,7043	BERKEMBANG	-
	Muara	0,6686	0,5333	0,8667	0,6006	BERKEMBANG	-
	Suranenggala Lor	0,6400	0,05500	0,8667	0,6189	BERKEMBANG	-
2019	Karangreja	0,7029	0,6500	0,6667	0,6732	BERKEMBANG	926,827,000
	Keraton	0,6914	0,6333	0,6667	0,6638	BERKEMBANG	981,003,000
	Muara	0,6686	0,5000	0,7333	0,6340	BERKEMBANG	1,072,207,000
	Suranenggala Lor	0,7543	0,4667	0,6667	0,6292	BERKEMBANG	974,733,000

4.13.KECAMATAN JAMBLANG



Lokasi studi di Kecamatan Jamblang dilaksanakan pada lima desa yaitu Jamblang, Wangunharja, Orimalang, Bakung Lor, dan Sitiwinangun.

Luas wilayah Kecamatan Jamblang 1,33 Km² dengan populasi total 12.609 orang, Wangunharja 2,04 Km² dengan populasi 3627 orang, Orimalang 2,02 Km² dengan populasi

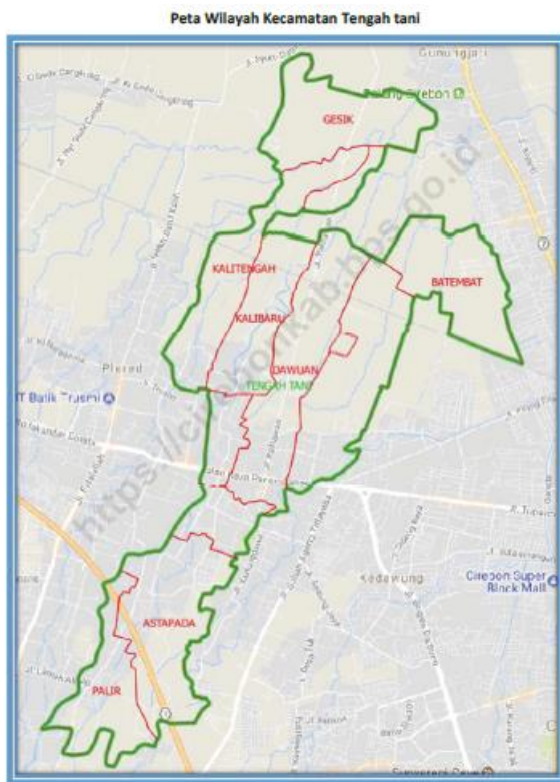
3451 orang, Bakung Lor 2,95 Km2 dengan populasi 6477 orang, dan Sitiwinangun 0,65 Km2 dengan populasi 4721 orang.

Setiap desa yaitu Jamblang, Wangunharja, Orimalang, Bakung Lor, dan Sitiwinangun mempunyai 1 Kantor Desa dan semua berklasifikasi desa Swadaya.

Jamblang dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, dan 5 Kadus, Wangunharja dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, dan 5 Kadus, Orimalang dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, dan 5 Kadus, Bakung Lor dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, dan 5 Kadus, dan Sitiwinangun dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, dan 5 Kadus.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Bakung Lor	0,7143	0,0,7143	0,5333	0,6325	BERKEMBANG	-
	Jamblang	0,7829	0,0,7829	0,4667	0,6054	BERKEMBANG	-
	Orimalang	0,6971	0,0,6971	0,5333	0,6213	BERKEMBANG	-
	Sitiwinangun	0,7543	0,0,7543	0,5333	0,6292	BERKEMBANG	-
	Wangunharja	0,7543	0,0,7543	0,5333	0,6292	BERKEMBANG	-
2019	Bakung Lor	6,971	6,500	6,000	6,490	BERKEMBANG	1,048,781,000
	Jamblang	6,800	6,667	5,333	6,267	BERKEMBANG	1,004,141,000
	Orimalang	7,143	6,333	5,333	6,270	BERKEMBANG	1,062,076,000
	Sitiwinangun	7,714	6,000	5,333	6,349	BERKEMBANG	979,461,000
	Wangunharja	7,429	6,333	5,333	6,365	BERKEMBANG	1,090,387,000

4.14.KECAMATAN TENGAHTANI



Lokasi studi di Kecamatan Tengah Tani dilaksanakan pada lima desa yaitu Gesik, Dawuan, Kemlaka Gede, Battembat, dan Kalibaru.

Luas wilayah Gesik 1,19 Km2 dengan populasi 8944 orang, Dawuan 1,18 Km2 dengan populasi 11519 orang, Kemlaka Gede 1,11 Km2 dengan populasi 7245 orang, Battembat 1,09 Km2 dengan populasi 7433 orang, dan Kalibaru 1,06 Km2 dengan

populasi 5959 orang dan total populasi Kecamatan Tengah Tani adalah 13.069 orang.

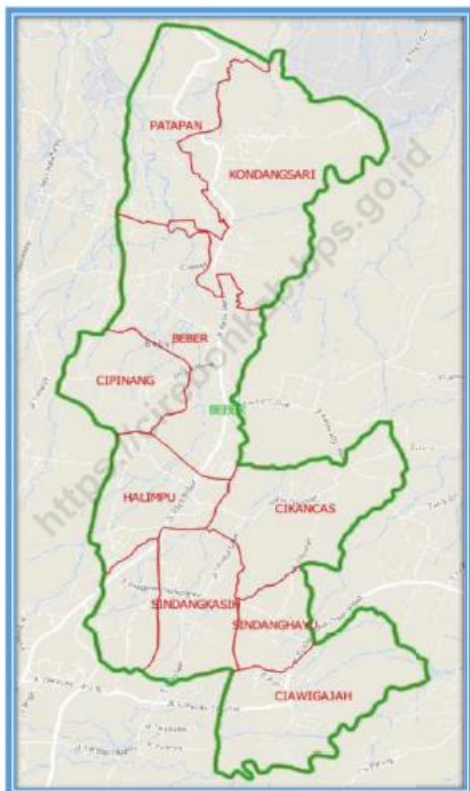
Setiap desa Gesik, Dawuan, Kemlaka Gede, Battembat, dan Kalibaru masing-masing mempunyai 1 Kantor Desa dan semua berklasifikasi desa Swakarsa.

Setiap desa dikelola di Gesik dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 2 Kadus, 8 LINMAS, dan 6 Pos Kamling, Dawuan dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 2 Kadus, 8 LINMAS, dan 6 Pos Kamling, Kemlaka Gede dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 2 Kadus, 8 LINMAS, dan 6 Pos Kamling, Battembat dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 2 Kadus, 8 LINMAS, dan 6 Pos Kamling, dan Kalibaru dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 2 Kadus, 9 LINMAS, dan 6 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Battembat	0.6514	0.5500	0.6000	0.6005	BERKEMBANG	-
	Dawuan	0.6229	0.5333	0.7333	0.6298	BERKEMBANG	-
	Gesik	0.6514	0.6333	0.800	0.6949	BERKEMBANG	-
	Kalibaru	0.5829	0.4333	0.7333	0.5832	TERTINGGAL	-
	Kemlakagede	0.7771	0.3833	0.4667	0.5424	TERTINGGAL	-
2019	Battembat	0.7543	0.6167	0.6	0.657	BERKEMBANG	904,657,000
	Dawuan	0.7657	0.6333	0.5333	0.6441	BERKEMBANG	957,160,000
	Gesik	0.8057	0.6833	0.6	0.6963	BERKEMBANG	1,013,990,000
	Kalibaru	0.8	0.5167	0.7333	0.6833	BERKEMBANG	1,142,751,000
	Kemlakagede	0.8286	0.6833	0.6	0.704	BERKEMBANG	1,145,234,000

4.15.KECAMATAN BEBER

Peta Wilayah Kecamatan Beber



Lokasi studi di Kecamatan Beber dilaksanakan pada tiga desa yaitu Patapan, Cikancas, dan Ciawi Gajah.

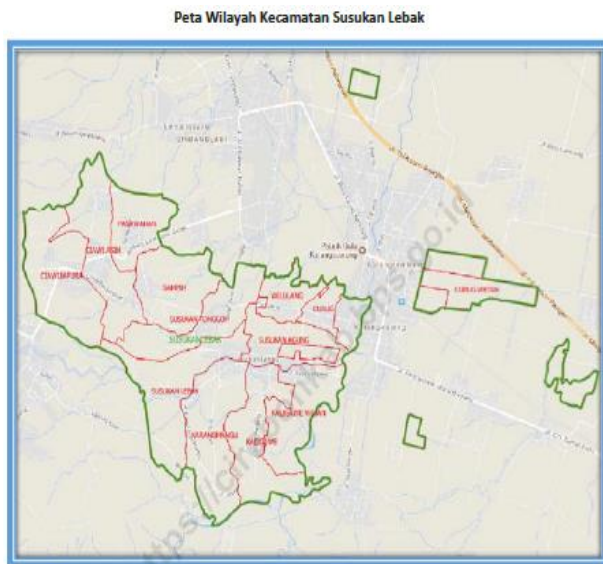
Luas wilayah Patapan 2.66 Km² dengan populasi 3009 orang, Cikancas 2.87 Km² dengan populasi 3492 orang, dan Ciawi Gajah 3.16 Km² dengan populasi 6867 orang dan total populasi Kecamatan Beber adalah 12.566 orang.

Setiap desa yaitu Patapan, Cikancas, dan

Ciawi Gajah mempunyai 1 Kantor Desa. Patapan dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, dan 10 LINMAS, Cikancas dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, dan 10 LINMAS, dan Ciawi Gajah dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, dan 10 LINMAS.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Ciawigajah	0.7371	0.55	0.8667	0.7179	MAJU	-
	Cikancas	0.64	0.5667	0.6667	0.6244	BERKEMBANG	-
	Patapan	0.6686	0.6167	0.6	0.6284	BERKEMBANG	-
2019	Ciawigajah	0.8343	0.5500	0.8667	0.7503	MAJU	1,116,647,000
	Cikancas	0.7829	0.4833	0.8667	0.7110	MAJU	1,045,453,000
	Patapan	0.7714	0.6667	0.6667	0.7016	BERKEMBANG	972,073,000

4.16.KECAMATAN SUSUKAN LEBAK



Lokasi studi di Kecamatan Susukan Lebak dilaksanakan pada lima desa yaitu Curug, Curug Wetan, Wilulang, Susukan Tonggoh, dan Ciawi Asih.

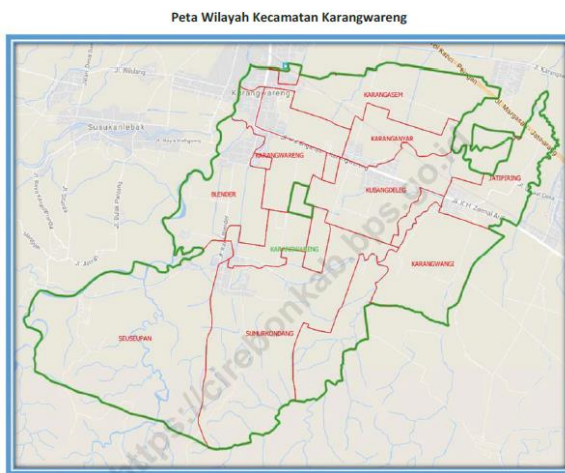
Luas wilayah Curug 1,14 Km², Curug Wetan 1,32 Km², Wilulang

0,58 Km², Susukan Tonggoh 1,20 Km², dan Ciawi Asih 1,83 Km². Total populasi Kecamatan Susukan Lebak adalah 12.991 orang.

Setiap desa di Curug, Curug Wetan, Wilulang, Susukan Tonggoh, dan Ciawi Asih mempunyai 1 Kantor Desa. Semua desa Curug, Curug Wetan, Wilulang, Susukan Tonggoh, dan Ciawi Asih berklasifikasi desa Swadaya. Curug dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 2 Kadus, 10 LINMAS, dan 1 Pos Kamling, Curug Wetan dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 2 Kadus, 10 LINMAS, dan 1 Pos Kamling, Wilulang dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 2 Kadus, 10 LINMAS, dan 1 Pos Kamling,, Susukan Tonggoh dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 2 Kadus, 10 LINMAS, dan 1 Pos Kamling,, dan Ciawi Asih dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 2 Kadus, 10 LINMAS, dan 1 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Ciawi Asih	0.6514	0.6333	0.6000	0.6283	BERKEMBANG	-
	Curug	0.7371	0.4667	0.6667	0.6235	BERKEMBANG	-
	Curug Wetan	0.6571	0.5833	0.6000	0.6135	BERKEMBANG	-
	Susukan Tonggoh	0.6400	0.6500	0.6667	0.6522	BERKEMBANG	-
	Wilulang	0.6000	0.5167	0.9333	0.6833	BERKEMBANG	-
2019	Ciawi Asih	0.7029	0.6000	0.6000	0.6343	BERKEMBANG	962,721,000
	Curug	0.7657	0.6167	0.6667	0.6830	BERKEMBANG	945,955,000
	Curug Wetan	0.7714	0.5500	0.6667	0.6627	BERKEMBANG	903,828,000
	Susukan Tonggoh	0.7314	0.5667	0.6667	0.6549	BERKEMBANG	905,913,000
	Wilulang	0.7771	0.6333	0.6667	0.6924	BERKEMBANG	820,207,000

4.17.KECAMATAN KARANGWARENG



Lokasi studi di Kecamatan Karangwareng dilaksanakan pada empat desa yaitu Karangwangi, Sumurkondang, Karangwareng, dan Karangasem.

Luas wilayah Karangwangi 2,12 Km², Sumurkondang 5,01 Km²,

Karangwareng 1,46 Km², dan Karangasem 2,27 Km² dan total populasinya adalah 9.837 orang.

Karangwangi, Sumurkondang, Karangwareng, dan Karangasem masing-masing mempunyai 1 Kantor Desa dimana keempat desa tersebut berklasifikasi desa Swadaya.

Karangwangi dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, 12 LINMAS, dan 9 Pos Kamling, Sumurkondang dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, 12 LINMAS, dan 9 Pos Kamling, Karangwareng dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi,

3 Kadus, 12 LINMAS, dan 9 Pos Kamling, dan Karangasem dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, 12 LINMAS, dan 5 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Karangasem	0,7429	0,5667	0,6000	0,6365	BERKEMBANG	-
	Karangwangi	0,7371	0,6333	0,6000	0,6568	BERKEMBANG	-
	Karangwareng	0,7086	0,6500	0,6667	0,6751	BERKEMBANG	-
	Sumurkondang	0,6629	0,4833	0,6667	0,6043	BERKEMBANG	-
2019	Karangasem	0,8067	0,4670	0,6670	0,6463	BERKEMBANG	1,019,615,000
	Karangwangi	0,8571	0,7167	0,5333	0,7024	BERKEMBANG	1,026,680,000
	Karangwareng	0,7486	0,6000	0,6000	0,6495	BERKEMBANG	956,124,000
	Sumurkondang	0,6743	0,5833	0,6000	0,6192	BERKEMBANG	1,001,085,000

4.18.KECAMATAN DUKUPUNTANG



Lokasi studi di Kecamatan Dukupuntang dilaksanakan pada empat desa yaitu Bobos, Cikalahang, Kendongdong Kidul, dan Sindang Jawa

Luas wilayah Bobos 0,92 Km², Cikalahang 2,66 Km², Kendongdong Kidul 7,22 Km², dan

Sindang Jawa 2,12 Km² dengan total populasi 20.429 orang.

Desa Bobos, Cikalahang, Kendongdong Kidul, dan Sindang Jawa masing-masing memilik 1 Kantor Desa dimana keempat desa tersebut berklasifikasi desa Swadaya.

Desa Bobos dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 3 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS, dan 12 Pos Kamling, Cikalahang dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 3 Kasi, 4

Kadus, 10 LINMAS, dan 12 Pos Kamling, Kendongdong Kidul dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 3 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS, dan 12 Pos Kamling, dan Sindang Jawa dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 3 Kasi, 2 Kadus, 10 LINMAS, dan 6 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Bobos	0.7429	0.8667	0.5333	0.7143	BERKEMBANG	-
	Girinata	0.7143	0.6000	0.8000	0.7084	BERKEMBANG	-
	Kedongdong Kidul	0.6971	0.55	0.6667	0.6379	BERKEMBANG	-
	Sindangjawa	0.8171	0.7833	0.6667	0.7557	MAJU	-
2019	Bobos	0.84	0.8667	0.5333	0.7300	MAJU	999,147,000
	Girinata	0.8457	0.7667	0.4667	0.693	BERKEMBANG	1,242,924,000
	Kedongdong Kidul	0.7771	0.5333	0.6	0.6368	BERKEMBANG	1,097,351,000
	Sindangjawa	0.8857	0.7333	0.6667	0.7619	MAJU	1,054,254,000

4.19.KECAMATAN PANGENAN



Lokasi studi di Kecamatan Pangenan dilaksanakan pada tiga desa yaitu Pengarengan, Ender, dan Astanamukti.

Luas wilayah Pengarengan 8,38 Km² mempunyai populasi 1506 orang, Ender 3,18 Km², mempunyai populasi 2161 orang, dan Astanamukti 2,55 Km², mempunyai

populasi 1149 orang, dengan total populasi Kecamatan Pangenan 14.283 orang.

Ketiga desa yaitu Pengarengan, Ender, dan Astanamukti memiliki masing-masing 1 Kantor Desa dan ketiga desa tersebut berklasifikasi desa Swadaya.

Pengarengan dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, dan 4 Kaduse, Ender dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, dan 4 Kaduse, dan Astanamukti dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, dan 4 Kaduse.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Astanamukti	0.6914	0.6167	0.5333	0.6138	BERKEMBANG	-
	Ender	0.7429	0.7000	0.6000	0.6810	BERKEMBANG	-
2019	Astanamukti	0.7600	0.6670	0.8670	0.7644	MAJU	942,162,000
	Ender	0.8343	0.4667	0.6000	0.6337	BERKEMBANG	1,023,878,000

4.20.KECAMATAN GEGESIK



Lokasi studi di Kecamatan Gegesik Kidul dilaksanakan pada tiga desa yaitu Gegesik Kidul, Kedung Dalem dan Jagapura.

Luas wilayah Gegesik Kidul 4,95 Km², Kedung Dalem 3,08 Km² dan Jagapura Kidul 4,97 Km² dengan

total populasi Kecamatan Gegesik 23.814 orang.

Masing-masing Desa Gegesik Kidul, Kedung Dalem dan Jagapura memiliki 1 Kantor Desa yang ketiganya berklasifikasi desa Swasembada. Gegesik Kidul dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 5 Kadus, dan 10 LINMAS, Kedung Dalem dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 5 Kadus, dan 10 LINMAS dan Jagapura dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 5 Kadus, dan 10 LINMAS.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Gegesik Kidul	0.8057	0.8000	0.6000	0.7352	MAJU	-
	Jagapura Kidul	0.5429	0.45	0.6	0.531	TERTINGGAL	-
	Kedungdalem	0.7429	0.6000	0.6	0.6476	BERKEMBANG	-
2019	Gegesik Kidul	0.8629	0.8333	0.6667	0.7876	MAJU	1,114,813,000
	Jagapura Kidul	0.8000	0.4667	0.6667	0.6444	BERKEMBANG	1,433,075,000
	Kedungdalem	0.6743	0.5000	0.6667	0.6137	BERKEMBANG	1,112,785,000

4.21.KECAMATAN ASTANAJAPURA



Lokasi studi Kecamatan Astanajapura dilaksanakan pada dua desa yaitu Buntet, Mertapada Kulon, dan Mertapada Wetan.

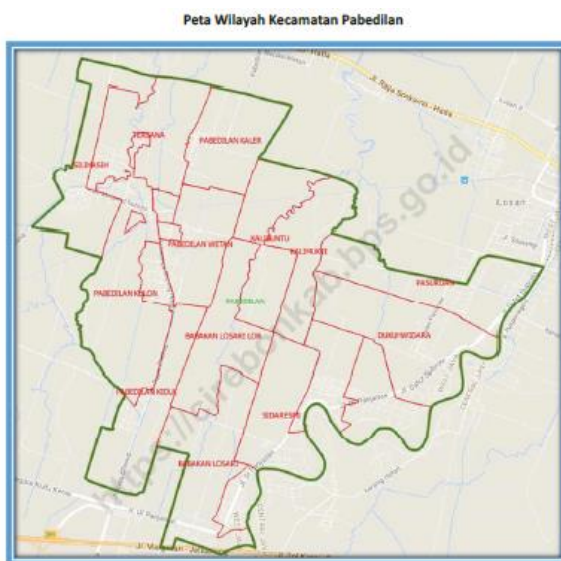
Luas wilayah Buntet 2,68 Km², Mertapada Kulon 1,14 Km², dan Mertapada Wetan 2,14 Km² dengan total populasi Kecamatan Astanajapura 23.042

orang.

Masing-masing desa yaitu Buntet, Mertapada Kulon, dan Mertapada Wetan memiliki 1 Kantor Desa dimana ketiganya berklasifikasi desa Swasembada. Buntet dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 10 LINMAS, dan 15 Pos Kamling, Mertapada Kulon dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 32 LINMAS, dan 8 Pos Kamling, dan Mertapada Wetan dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 56 LINMAS, dan 6 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Buntet	0.7086	0.5000	0.8000	0.6695	BERKEMBANG	-
	Mertapada Kulon	0.7314	0.6167	0.6000	0.6494	BERKEMBANG	-
	Mertapada Wetan	0.6686	0.8000	0.8000	0.7562	MAJU	-
2019	Buntet	0.7371	0.5500	0.8000	0.6957	BERKEMBANG	1,080,869,000
	Mertapada Kulon	0.7943	0.6833	0.6000	0.6925	BERKEMBANG	933,703,000
	Mertapada Wetan	0.7086	0.75	0.8667	0.7751	MAJU	984,360,000

4.22.KECAMATAN PABEDILAN



Lokasi studi di Kecamatan Pabedilan dilaksanakan pada dua desa yaitu Pabedilan Wetan dan Babakan Losari.

Luas wilayah Pabedilan Wetan 1.38 Km² dan Babakan Losari 1,98 Km² dengan total populasi Kecamatan Pabedilan 19.126 orang.

Masing-masing desa Pabedilan Wetan dan Babakan Losari memiliki 1 Kantor Desa dimana keduanya berklasifikasi desa Swakarsa.

Pabedilan Wetan dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 7 Kasi, 5 Kadus, 10 LINMAS, dan 4 Pos Kamling dan Babakan Losari dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 7 Kasi, 5 Kadus, 11 LINMAS, dan 4 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Babakan Losari	0.7429	0.5167	0.8	0.6865	BERKEMBANG	-
	Pabedilan Wetan	0.7143	0.5667	0.5333	0.6048	BERKEMBANG	-
2019	Babakan Losari	0.8114	0.8667	0.7167	0.7059	BERKEMBANG	983,965,000
	Pabedilan Wetan	0.7200	0.6667	0.7000	0.6956	BERKEMBANG	1,019,974,000

4.23.KECAMATAN KARANGSEMBUNG



Lokasi studi di Kecamatan Karangsembung dilaksanakan pada satu desa yaitu Karangmalang.

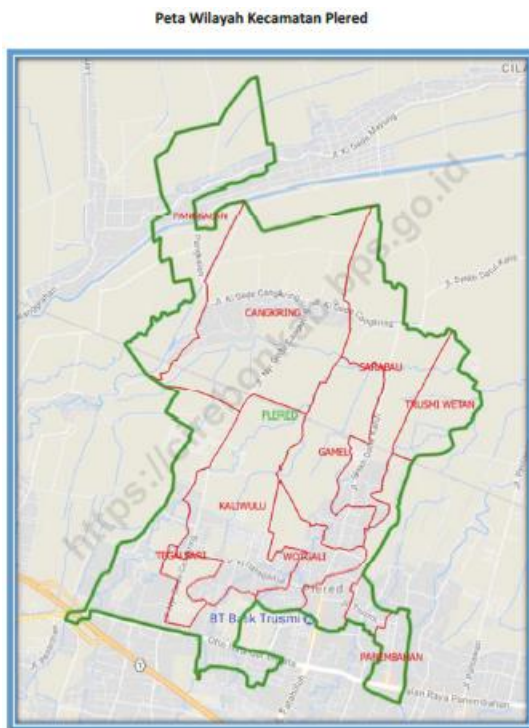
Luas desa Karangmalang 2.09 Km² dengan total populasi Kecamatan Karangsembung 12.404 orang yang

memiliki 1 Kantor Desa dan berklasifikasi desa Swadaya.

Desa Karangmalang dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 5 Kadus, 11 LINMAS, dan 9 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Karangmalang	0.85	0.63	0.33	0.6	BERKEMBANG	-
2019	Karangmalang	0.7500	0.5000	0.6600	0.6400	BERKEMBANG	1,091,144,000

4.24.KECAMATAN PLERED



Lokasi studi di Kecamatan Plered dilaksanakan pada tiga desa yaitu Trusmi Wetan, Cangkring, dan Pangkalan.

Luas desa Trusmi Wetan 0,54 Km2 berpenduduk 2766 orang, Cangkring 1,59 Km2, berpenduduk 5422 orang dan Pangkalan 1,58 Km2, berpenduduk 4916 orang dengan total populasi

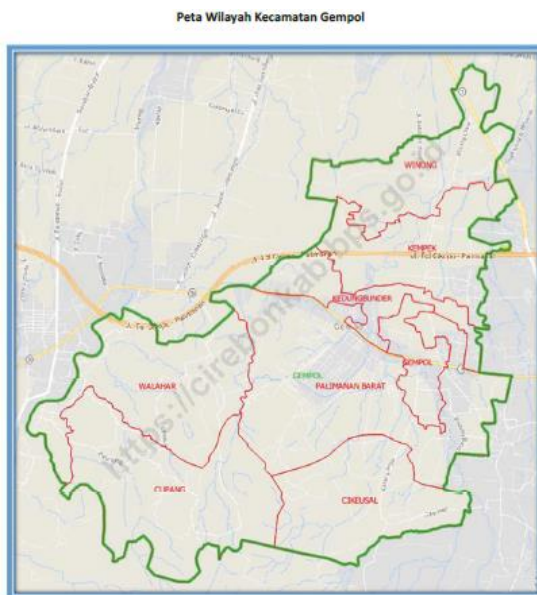
Kecamatan Plered 16.644 orang.

Masing-masing desa Trusmi Wetan, Cangkring, dan Pangkalan memiliki 1 Kantor Desa dimana ketiga berklasifikasi desa Swadaya.

Trusmi Wetan dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 2 Kadus, 12 LINMAS, dan 10 Pos Kamling, Cangkring dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 2 Kadus, 12 LINMAS, dan 10 Pos Kamling, dan Pangkalan dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 12 LINMAS, dan 10 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Cangkring	0.748571	0.750000	0.533333	0.67730159	BERKEMBANG	-
	Gamel	0.731429	0.600000	0.600000	0.64380952	BERKEMBANG	-
	Panembahan	0.857143	0.616667	0.666667	0.71349206	MAJU	-
	Pangkalan	0.754286	0.583333	0.600000	0.64587302	BERKEMBANG	-
	Sarabau	0.771429	0.600000	0.600000	0.64380952	BERKEMBANG	-
	Tegalsari	0.845714	0.850000	0.600000	0.7652381	MAJU	-
	Trusmi Wetan	0.731429	0.683333	0.533333	0.64936508	BERKEMBANG	-
	Wotgali	0.788571	0.533333	0.600000	0.64063492	BERKEMBANG	-
2019	Cangkring	0.8457	0.6500	0.6667	0.7208	Maju	983,076,000
	Gamel	0.7943	0.5833	0.6000	0.6592	Berkembang	982,114,000
	Panembahan	0.8686	0.7667	0.6667	0.7673	Maju	900,057,000
	Pangkalan	0.8457	0.6500	0.6667	0.7208	Maju	871,039,000
	Sarabau	0.7486	0.4333	0.6000	0.5940	Tertinggal	993,179,000
	Tegalsari	0.8971	0.8500	0.6000	0.7824	Maju	1,068,063,000
	Trusmi Wetan	0.7600	0.6833	0.6000	0.6811	Berkembang	940,460,000
	Wotgali	0.7543	0.5000	0.6667	0.6403	Berkembang	988,982,000

4.25. KECAMATAN GEMPOL



Lokasi studi di Kecamatan Gempol dilaksanakan pada tiga desa yaitu Palimanan Barat, Kempek, dan Gempol.

Luas desa Palimanan Barat 10,33 Km² berpenduduk 12.509 orang, Kempek 2,69 Km², berpenduduk 4862 orang,, dan Gempol 1,15 Km², berpenduduk 3248 orang dengan total populasi

Kecamatan Gempol 14.742 orang.

Masing-masing desa yaitu Palimanan Barat, Kempek, dan Gempol memiliki 1 Kantor Desa dimana ketiga berklasifikasi desa Swadaya.

Palimanan Barat dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 6 Kadus, 10 LINMAS, dan 10 Pos Kamling, Kempek dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 6 Kadus, 10

LINMAS, dan 10 Pos Kamling, dan Gempol dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 6 Kadus, 10 LINMAS, dan 9 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Gempol	0.7029	0,500	0,600	0.601	BERKEMBANG	-
	Kempek	0.7086	0.6167	0.8667	0.7306	MAJU	-
	Palimanan Barat	0.7657	0.4333	0,600	0.5997	BERKEMBANG	-
2019	Gempol	0.8514	0.5000	0.8000	0.7171	Maju	949,814,000
	Kempek	0.7586	0.5000	0.8667	0.7051	Berkembang	1,058,579,000
	Palimanan Barat	0.7600	0.5500	0.5333	0.6144	Berkembang	1,526,194,000

4.26. KECAMATAN WALED



Lokasi studi di Kecamatan Waled dilaksanakan pada tiga desa yaitu Gunungsari, Karangsari, dan Ambit.

Luas desa Gunungsari 2,16 Km² berpenduduk 2988 orang, Karangsari 1,56 Km² berpenduduk 3512 orang, dan Ambit 1.87 Km² berpenduduk

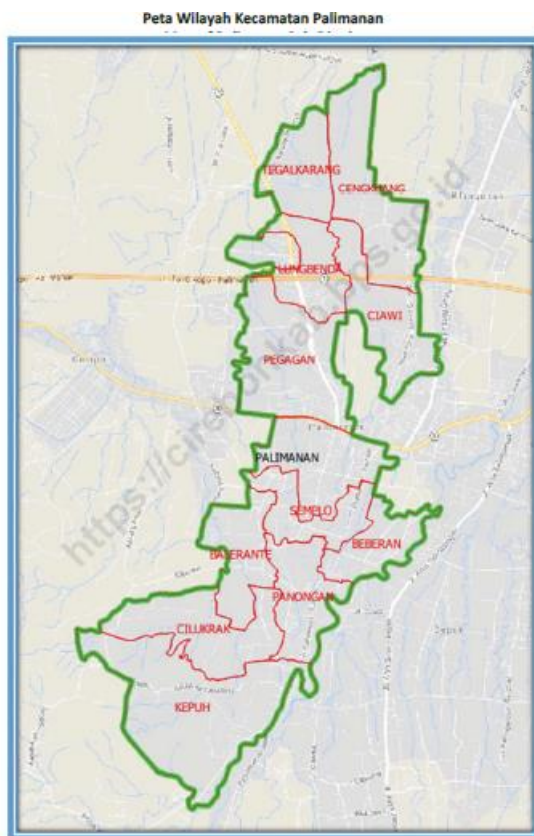
5764 orang dengan total populasi Kecamatan Waled 17.284 orang.

Masing-masing desa yaitu Gunungsari, Karangsari, dan Ambit memiliki 1 Kantor Desa dimana ketiganya berklasifikasi desa Swakarsa.

Desa Gunungsari dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS, dan 4 Pos Kamling, Karangsari dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS, dan 4 Pos Kamling, dan Ambit dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS, dan 4 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Ambit	0.6914	0.5333	0.6	0.6083	BERKEMBANG	-
	Gunungsari	0.7029	0.5667	0.8	0.6898	BERKEMBANG	-
	Karangsari	0.7029	0.4667	0.6667	0.6121	BERKEMBANG	-
2019	Ambit	0.743	0.533	0.6	0.6254	BERKEMBANG	1,153,308,000
	Gunungsari	0.617	0.483	0.733	0.6113	BERKEMBANG	997,632,000
	Karangsari	0.731	0.45	0.667	0.616	BERKEMBANG	997,973,000

4.27. KECAMATAN PALIMANAN



Lokasi studi di Kecamatan Palimanan dilaksanakan pada tiga desa yaitu Pegagan, Kepuh, dan Lungbenda.

Luas desa Pegagan 2,71 Km2 berpenduduk 10217 orang, Kepuh 3,06 Km2 berpenduduk 5857 orang dan Lungbenda 0,97 Km2 berpenduduk 4243 orang dengan total populasi Kecamatan Palimanan 19.571 orang.

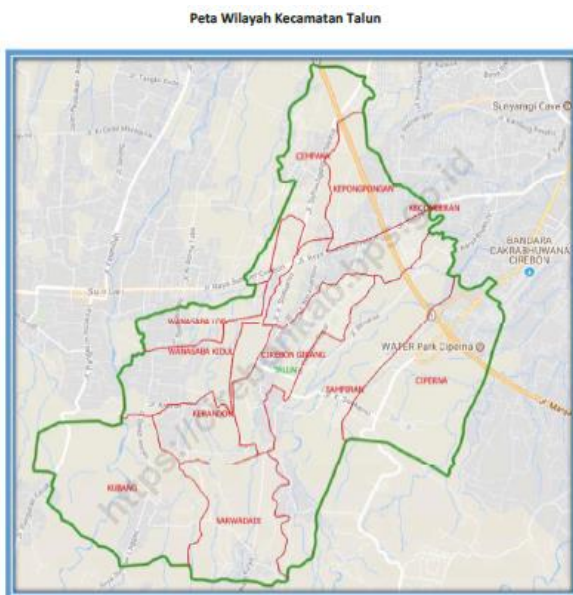
Setiap desa yaitu Pegagan, Kepuh, dan Lungbenda memiliki 1 Kantor Desa

dimana ketiga desa berklasifikasi desa Swasembada.

Pegagan dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 4 Kadus, 11 LINMAS, dan 2 Pos Kamling, Kepuh dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 4 Kadus, 11 LINMAS, dan 2 Pos Kamling, dan Lungbenda dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS, dan 4 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Kepuh	0.7657	0.5833	0.4667	0.6052	BERKEMBANG	-
	Lungbenda	0.7943	0.6333	0.5333	0.6537	BERKEMBANG	-
	Palimanan Timur	0.7657	0.5833	0.4667	0.6052	BERKEMBANG	-
	Pegagan	0.7944	0.6332	0.5334	0.6537	BERKEMBANG	-
2019	Kepuh	0.9200	0.6667	0.3333	0.6400	BERKEMBANG	1,076,801,000
	Lungbenda	0.7943	0.7333	0.5333	0.687	BERKEMBANG	960,607,000
	Palimanan Timur	0.8971	0.6500	0.4667	0.6713	BERKEMBANG	963,222,000
	Pegagan	0.7486	0.7000	0.6000	0.6829	BERKEMBANG	1,194,007,000

4.28. KECAMATAN TALUN



Lokasi studi di Kecamatan Talun dilaksanakan pada dua desa yaitu Kerdon dan Cirebon Girang.

Luas desa Kerdon 1,31 Km² berpenduduk 3337 orang dan Cirebon Girang 1,69 Km² berpenduduk 10242 orang dengan total populasi Kecamatan Talun

19.958 orang.

Desa Kerdon dan Cirebon Girang memiliki masing-masing 1 Kantor Desa. Desa Kerdon berklasifikasi Desa Berkembang sedangkan Cirebon Girang berklasifikasi desa Maju.

Desa Kerdon dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, 10 LINMAS dan 5 Pos Kamling Cirebon Girang dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, 10 LINMAS dan 5 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Cirebon Girang	0,7829	0,5167	0,6000	0,6332	BERKEMBANG	-
	Kerandon	0,6743	0,6333	0,6667	0,6581	BERKEMBANG	-
	Kubang	0,6000	0,5500	0,6667	0,6322	BERKEMBANG	-
2019	Cirebon Girang	0.8571	0.6833	0.6667	0.7357	MAJU	1,233,946,000
	Kerandon	0.7829	0.5000	0.6000	0.6276	BERKEMBANG	965,094,000
	Kubang	0.7943	0.5500	0.6000	0.6481	BERKEMBANG	954,790,000

4.29. KECAMATAN PABUARAN



Lokasi studi di Kecamatan Pabuaran dilaksanakan pada tiga desa yaitu Hulubanteng, Jatirenggang, Pabuaran Kidul, dan Sukadana.

Luas desa Hulubanteng Lor 0.97 Km² berpenduduk 3620 orang, Jatirenggang 2,11 Km² berpenduduk 3383 orang, dan

Sukadana 1.32 Km² berpenduduk 4681 orang dengan total populasi Kecamatan Pabuaran 11.923 orang.

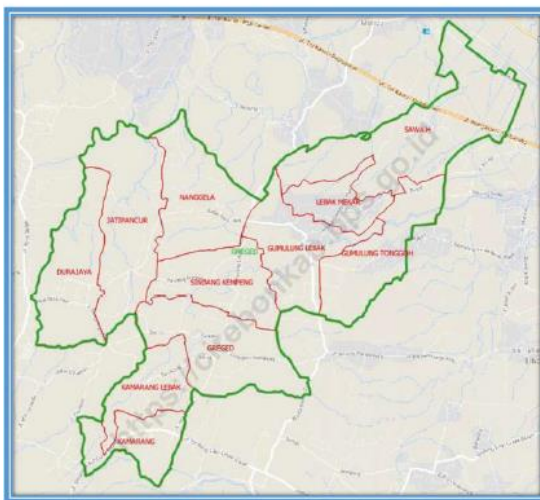
Masing-masing desa yaitu Hulubanteng Lor, Jatirenggang, Pabuaran Kidul, dan Sukadana memiliki 1 Kantor Desa dimana ketiga desa berklasifikasi desa Swasembada.

Desa Hulubanteng Lor dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi 3 Kadus, 10 LINMAS, dan 8 Pos Kamling, Jatirenggang dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi 3 Kadus, 10 LINMAS, dan 8 Pos Kamling dan Sukadana dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi 3 Kadus, 10 LINMAS, dan 8 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Hulubanteng	0.6686	0.6	0.6667	0.6451	BERKEMBANG	-
	Jatirenggang	0.6743	0.5333	0.8667	0.6914	BERKEMBANG	-
	Pabuaran Kidul	0.8343	0.75	0.8667	0.7503	MAJU	-
	Sukadana	0.8114	0.6167	0.6667	0.6983	BERKEMBANG	-
2019	Hulubanteng	0.76	0.55	0.6667	0.6589	BERKEMBANG	1,078,321,000
	Jatirenggang	0.68	0.65	0.6	0.6433	BERKEMBANG	1,019,586,000
	Pabuaran Kidul	0.84	0.7167	0.6667	0.7411	MAJU	950,056,000
	Sukadana	0.8229	0.6	0.6667	0.6965	BERKEMBANG	1,021,368,000

4.30. KECAMATAN GREGED

Peta Wilayah Kecamatan Greged



Lokasi studi di Kecamatan Greged dilaksanakan pada tiga desa yaitu Jatipancur, Durajaya, dan Greged.

Luas desa Jatipancur 3.2 Km2 berpenduduk 4614 orang, Durajaya 3.048 Km2 berpenduduk 4620 orang, dan Greged 3571 Km2 berpenduduk

5019 orang dengan total populasi Kecamatan Greged 16.567 orang.

Ketiga desa yaitu Jatipancur, Durajaya, dan Greged memiliki 1 Kantor Desa.

Desa Jatipancur dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 2 Kadus, 10 LINMAS dan 1 Pos kamling, Durajaya dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 2 Kadus, 11 LINMAS dan 1 Pos kamling, dan Greged dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 2 Kadus, 10 LINMAS dan 10 Pos kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Durajaya	0.7371	0.5333	0.6667	0.6457	BERKEMBANG	-
	Greged	0.6571	0.5167	0.6667	0.6135	BERKEMBANG	-
	Jatipancur	0.7029	0.4833	0.6667	0.6176	BERKEMBANG	-
2019	Durajaya	0.7714	0.7500	0.6667	0.7294	MAJU	964,551,000
	Greged	0.7371	0.5500	0.6667	0.6513	BERKEMBANG	1,081,449,000
	Jatipancur	0.7257	0.5500	0.6667	0.6475	BERKEMBANG	1,033,792,000

4.31. KECAMATAN KAPETAKAN



Lokasi studi di Kecamatan Kapetakan dilaksanakan pada tiga desa yaitu Bungko, Pegagan, dan Pegagan Kidul.

Luas desa Bungko 12.7990 Km² berpenduduk 4730 orang, Pegagan Lor 5,7290 Km², berpenduduk 9166 orang,, dan Pegagan Kidul 8,8100 Km² berpenduduk 5870 orang dengan total

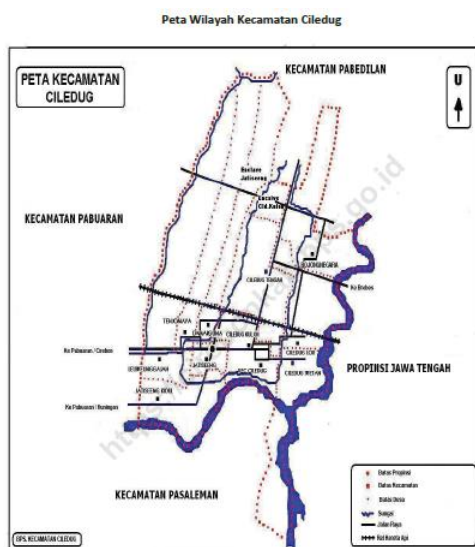
populasi Kecamatan Kapetakan 16.824 orang.

Desa di Bungko, Pegagan Lor, dan Pegagan Kidul masing-masing memiliki 1 Kantor Desa dimana ketiga berklasifikasi desa Swasembada.

Desa Bungko dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 5 Kadus, 10 LINMAS, dan 10 Pos Kamling, Pegagan Lor dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 5 Kadus, 10 LINMAS, dan 10 Pos Kamling, dan Pegagan Kidul dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 5 Kadus, 10 LINMAS, dan 10 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Bungko	0.7029	0.5667	0.6	0.6232	BERKEMBANG	-
	Pegagan Kidul	0.6514	0.5833	0.6667	0.6338	BERKEMBANG	-
	Pegagan Lor	0.7086	0.7667	0.6667	0.714	MAJU	-
2019	Bungko	0.7029	0.5667	0.6	0.6232	BERKEMBANG	1,281,339,000
	Pegagan Kidul	0.7486	0.6333	0.6667	0.6829	BERKEMBANG	1,234,219,000
	Pegagan Lor	0.7829	0.7167	0.6667	0.7221	MAJU	1,224,619,000

4.32. KECAMATAN CILEDUG



Lokasi studi di Kecamatan Ciledug dilaksanakan pada empat desa yaitu Tenjomaya, Ciledug Lor, Ciledug Wetan, dan Damarguna.

Luas desa Tenjomaya 1,52 Km² berpenduduk 4279 orang, Ciledug Wetan 138 Km² berpenduduk 3510 orang dan

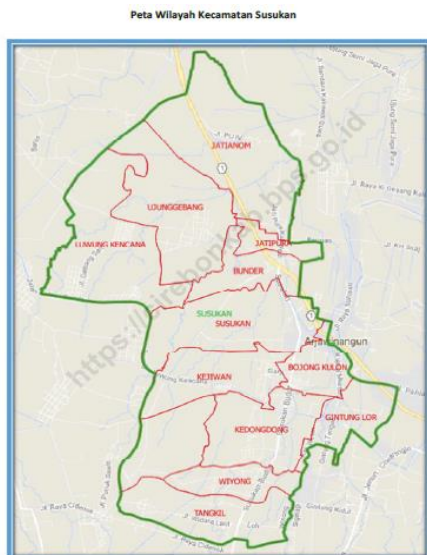
Damarguna 1,14 Km² berpenduduk 5960 orang dengan total populasi Kecamatan Ciledug 14.908 orang.

Masing-masing desa yaitu Tenjomaya, Ciledug Wetan, dan Damarguna memiliki 1 Kantor Desa dimana ketiga desa berklasifikasi desa Swasembada.

Desa Tenjomaya dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 4 Kadus, dan 10 LINMAS, Ciledug Wetan dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 4 Kadus, dan 10 LINMAS, dan Damarguna dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 4 Kadus, dan 10 LINMAS.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Ciledug Lor	0.7886	0.5833	0.8000	0.7240	MAJU	-
	Ciledug Wetan	0.7143	0.4667	0.7333	0.6381	BERKEMBANG	-
	Damarguna	0.6686	0.5667	0.6667	0.6340	BERKEMBANG	-
	Tenjomaya	0.6457	0.5667	0.6667	0.6263	BERKEMBANG	-
2019	Ciledug Lor	0.7371	0.6833	0.8000	0.7401	MAJU	994,875,000
	Ciledug Wetan	0.7430	0.5330	0.7330	0.6697	BERKEMBANG	1,059,096,000
	Damarguna	0.7543	0.5667	0.6667	0.6626	BERKEMBANG	1,106,632,000
	Tenjomaya	0.8114	0.4667	0.8000	0.6927	BERKEMBANG	1,052,645,000

4.33. KECAMATAN SUSUKAN



Lokasi studi di Kecamatan Susukan dilaksanakan pada tiga desa yaitu Susukan, Kejiwan, dan Luwung Kencana.

Luas desa Susukan 9,38 Km² berpenduduk 6069 orang, Kejiwan 3,00 Km² berpenduduk 5041, dan Luwung Kencana 6,40 Km² berpenduduk 4575 orang dengan total populasi

Kecamatan Susukan 23.027 orang.

Masing-masing desa yaitu Susukan, Kejiwan, dan Luwung Kencana mempunyai 1 Kantor Desa dimana ketiganya termasuk desa Swasembada.

Susukan dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 6 Kadus, dan 16 LINMAS, Kejiwan dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 6 Kadus, dan 16 LINMAS, dan Luwung Kencana dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 6 Kadus, dan 16 LINMAS.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Kejiwan	0.72	0.6167	0.6	0.6456	BERKEMBANG	-
	Luwung Kencana	0.6343	0.5000	0.6667	0.6003	BERKEMBANG	-
	Susukan	0.7371	0.85	0.6	0.72905	MAJU	-
2019	Kejiwan	0.7886	0.6500	0.6667	0.7017	BERKEMBANG	1,076,302,000
	Luwung Kencana	0.7314	0.5000	0.6667	0.6327	BERKEMBANG	1,112,751,000
	Susukan	0.8000	0.8167	0.6000	0.7389	MAJU	1,180,329,000

4.34. KECAMATAN GEBANG

Peta Wilayah Kecamatan Gebang
Map of Gebang Sub-District



Lokasi studi di Kecamatan Gebang dilaksanakan pada satu desa yaitu Gebang Kulon berpenduduk 5940 orang dengan total populasi Kecamatan Gebang 21.497 orang.

Luas desa Gebang Kulon 3,5 Km2 dengan

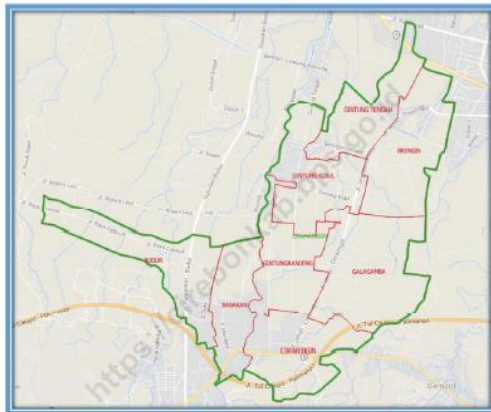
1 Kantor Desa yang termasuk desa Swasembada.

Desa Gebang Kulon dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 6 Kadus, dan 14 LINMAS.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Gebang Kulon	0,7143	0,5167	0,6667	0,6325	BERKEMBANG	-
2019	Gebang Kulon	0.8743	0.6500	0.6667	0.7303	MAJU	1,177,831,000

4.35. KECAMATAN CIWARINGIN

Peta Wilayah Kecamatan Ciwaringin
Map of Ciwaringin Sub-District



Lokasi studi di Kecamatan Ciwaringin dilaksanakan pada dua desa yaitu Gintung Ranjeng dan Bringin.

Luas desa Gintung Ranjeng 1.85 Km² berpenduduk 4141 orang dan Bringin 2.62 Km² berpenduduk 4486 orang dengan total

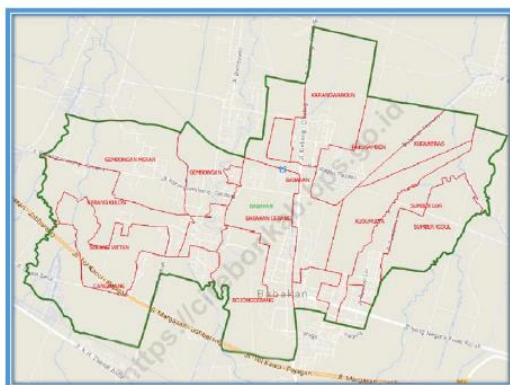
populasi Kecamatan Ciwaringin 12.392 orang. Kedua desa yaitu Gintung Ranjeng dan Bringin masing-masing memiliki 1 Kantor Desa.

Desa Gintung Ranjeng dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS, dan 3 Pos Kamling dan Bringin dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS, dan 3 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Bringin	0.7029	0.53333	0.6100	0.6121	BERKEMBANG	-
	Gintunranjeng	0.6971	0.53333	0.6000	0.6102	BERKEMBANG	-
2019	Bringin	0.7086	0.5667	0.8000	0.6917	Berkembang	933,220,000
	Gintunranjeng	0.7371	0.6333	0.5333	0.6346	Berkembang	1,023,149,000

4.36. KECAMATAN BABAKAN

Peta Wilayah Kecamatan Babakan
Map of Babakan Sub-District



Lokasi studi di Kecamatan Babakan dilaksanakan pada dua desa yaitu Babakan dan Sumber Lor.

Luas desa Babakan 1,4 Km² berpenduduk 3690 orang dan Sumber Lor 1,2 Km²

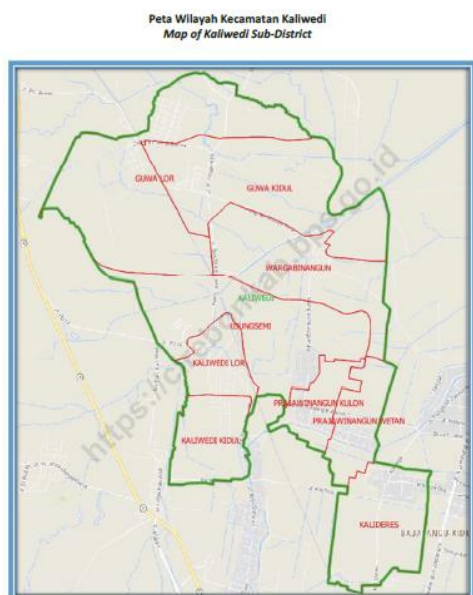
berpenduduk 3918 orang dengan total populasi Kecamatan Babakan 23.646 orang.

Kedua desa yaitu Babakan dan Sumber Lor masing-masing memiliki 1 Kantor Desa dimana kedua desa berklasifikasi desa Swasembada.

Desa Babakan dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS, dan 10 pos kamling dan Sumber Lor dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 4 Kadus, 10 LINMAS, dan 10 pos kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Babakan	0.6914	0.7667	0.6	0.686	BERKEMBANG	-
	Sumber Lor	0.714	0.483	0.667	0.6214	BERKEMBANG	-
2019	Babakan	0.6743	0.7667	0.6000	0.6803	BERKEMBANG	984,716,000
	Sumber Lor	0.8229	0.6667	0.5333	0.6743	BERKEMBANG	1,032,984,000

4.37. KECAMATAN KALIWEDI



Lokasi studi di Kecamatan Kaliwedi dilaksanakan pada satu desa yaitu Wargabinangun.

Luas desa Wirabangun 1,59 Km2 dengan 1 Kantor Desa. Desa Wargabinangun berklasifikasi desa Swadaya.

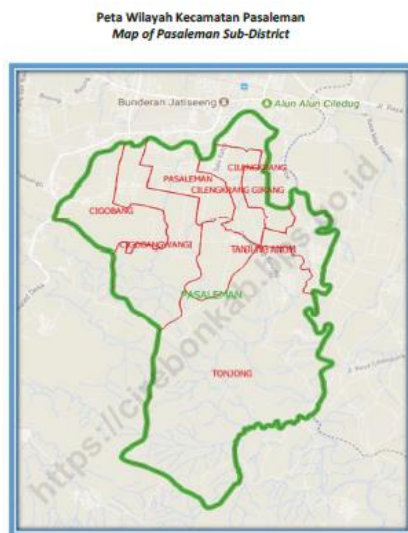
Desa Wargabinangun dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi, 4 Kadus, 6 LINMAS, dan 6 Pos

Kamling.

Jumlah penduduk desa Wargabinangun sebanyak 4072 orang dengan total populasi Kecamatan Kaliwedi 13.919 orang.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Wargabinangun	0.6914	0.5333	0.6667	0.6305	BERKEMBANG	-
2019	Wargabinangun	0.8114	0.6000	0.6667	0.6927	BERKEMBANG	986,672,000

4.38. KECAMATAN PASALEMAN



Lokasi studi di Kecamatan Pasaleman dilaksanakan pada satu desa yaitu Cigobang.

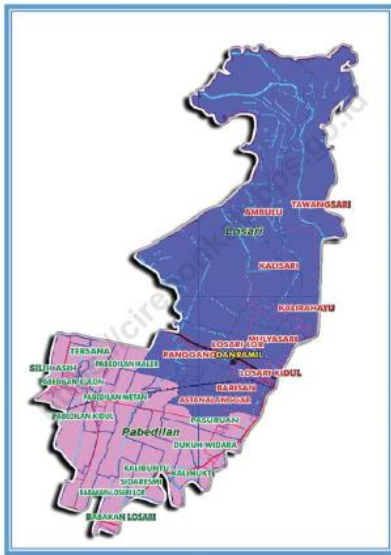
Luas desa Cigobang 4.8 Km2 dengan penduduk 4286 orang. Desa Cigobang mempunyai 1 Kantor Desa dimana berklasifikasi desa Swadaya.

Desa Cigobang dikelola 1 Kades, 1 Sekdes, 5 Kasi,
5 Kadus, 10 LINMAS, 12 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Cigobang	0.7371	0.5667	0.8	0.7013	BERKEMBANG	-
2019	Cigobang	0.8057	0.5167	0.8000	0.7075	MAJU	1,058,946,000

4.39. KECAMATAN LOSARI

Peta Wilayah Kecamatan Losari
Map of Losari Sub-District



Lokasi studi di Kecamatan Losari dilaksanakan pada satu desa yaitu Kalisari.

Luas desa Kalisari 4.44 Km² yang memiliki 1 Kantor Desa. Desa Kalisari berklasifikasi desa Swasembada.

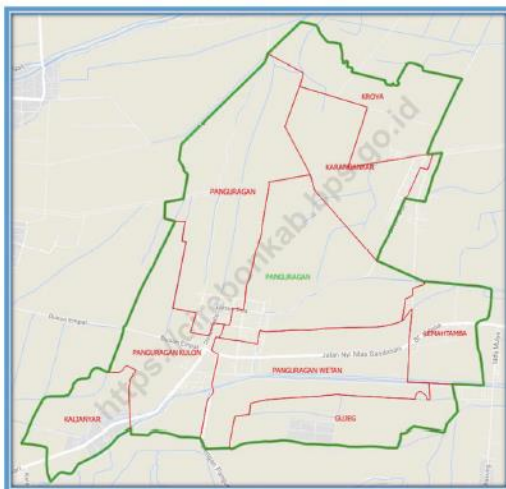
Desa Kalisari dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 6 Kadus, 12 LINMAS, dan 6 pos kamling.

Desa Kalisari jumlah penduduk sebesar 8299 orang dengan total populasi Kecamatan Losari 19.602 orang.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Kalisari	0.6857	0.4833	0.6667	0.6119	BERKEMBANG	-
2019	Kalisari	0.7829	0.6333	0.6667	0.6943	BERKEMBANG	1,297,079,000

4.40. KECAMATAN PANGURAGAN

Peta Wilayah Kecamatan Panguragan
Map of Panguragan Sub-District



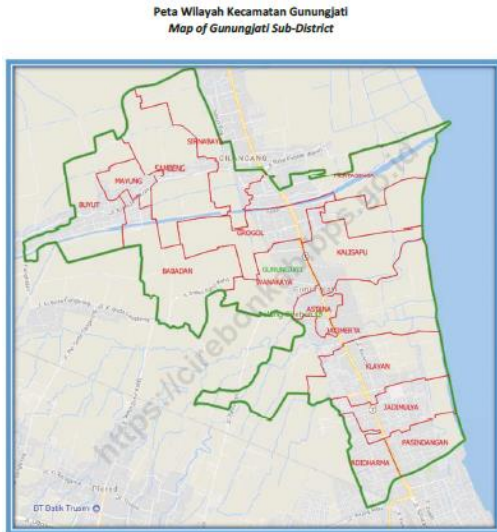
Lokasi studi di Kecamatan Panguragan dilaksanakan pada satu desa yaitu Kalianyar.

Desa Kalianyar mempunyai luas 1,67 Km² berpenduduk 4408 orang dengan total populasi Kecamatan Panguragan 14.392 orang dan memiliki 1 Kantor Desa.

Desa Kalianyar berklasifikasi desa Swakarsa yang dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 3 Kasi, 7 Kadus, 11 LINMAS dan 6 Pos Kamling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Kalianyar	0.8229	0.6667	0.6	0.6965	BERKEMBANG	
2019	Kalianyar	0.7143	0.65	0.6667	0.677	BERKEMBANG	1,024,465,000

4.41. KECAMATAN GUNUNGJATI



Lokasi studi di Kecamatan Gunungjati dilaksanakan pada dua desa yaitu Jatimerta dan Grogol.

Luas desa Jatimerta 2.97 Km² dan Grogol 1.91 Km² dengan total populasi Kecamatan Gunungjati 25.096 orang.

Kedua desa Jatimerta dan Grogol masing-masing memiliki 1 Kantor Desa kedua berklasifikasi desa Swasembada.

Desa Jatimerta dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 3 Kadus, 8 LINMAS, dan 12 Pos Kampling dan Grogol dikelola oleh 1 Kades, 1 Sekdes, 6 Kasi, 4 Kadus, 6 LINMAS, dan 6 Pos Kampling.

Tahun	Desa	IKS	IKE	IKL	Nilai IDM	Status IDM	Dana Desa
2017	Grogol	0.7771	0.5500	0.6000	0.6240	BERKEMBANG	-
	Jatimerta	0.6971	0.7000	0.5333	0.6435	BERKEMBANG	-
2019	Grogol	0.6971	0.7667	0.6	0.6879	BERKEMBANG	878,359,000
	Jatimerta	0.8571	0.6333	0.7333	0.7413	MAJU	932,605,000

BAB V

ANALISA KAJIAN PRODUK UNGGULAN DESA

5.1. PENDAHULUAN

Telah banyak kajian atau penelitian berkaitan dengan produk unggulan atau sektor unggulan daerah ataupun desa melalui berbagai pendekatan menggunakan analisis *Location Quotients* (LQ), *Shift-Share*, maupun analisis SWOT. Menurut hemat peneliti dari CV. MultiLisensi fokus saat ini tidak lagi menemukan apa produk unggulan yang ditemukan di desa tetapi akan lebih baik diarahkan membentuk kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola produk unggulan desa agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan berbentuk kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga.

Peranan produk unggulan sangat krusial karena merupakan produk yang mampu memberi kontribusi terbesar terhadap perolehan penerimaan daerah, terutama jika dilihat kontribusinya terhadap PAD-PDRB. Hal ini terlihat dari besarnya peranan produk unggulan terhadap total perekonomian (Darmawansyah, 2003). Mengacu pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada halaman 2, dinyatakan bahwa sampai saat ini di Kabupaten Cirebon masih sedikit desa yang telah mengembangkan dan menetapkan potensi yang dimilikinya untuk menjadi produk unggulan desa yang berbeda dengan desa lainnya.

Beberapa hal yang menjadikan produk unggulan desa penting atau urgen untuk dikembangkan yaitu:

- a. Daerah/wilayah/desa perlu mengetahui sektor atau komoditi yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan dengan cepat, baik karena mempunyai potensi SDA maupun karena sektor atau komoditas tersebut memiliki competitive advantage (keunggulan bersaing) untuk dikembangkan.
- b. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk yang dihasilkan oleh komunitas masyarakat desa.
- c. Memberikan implikasi keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) terhadap sektor atau komoditas lainnya.
- d. Memperluas penyerapan tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Untuk menjawab lima hal *urgent* di Kabupaten Cirebon maka tahapan analisis adalah pertama menggunakan regulasi pemerintah yaitu Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Produk Unggulan Daerah yang menyarankan melakukan kajian dengan empat model yaitu: 1. Inkubator, 2. Klaster, 3. One Village One Product/OVOP dan 4. Kompetensi inti. Tahap kedua menggunakan teori-teori terkait keempat model yang dikembangkan oleh para ahli misal Michael Porter dari Harvard Business School.

5.2. PROSES PEMILIHAN SEKTOR ATAU KOMODITAS

Berdasarkan standar teknis yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada halaman 5 tertulis ada Sembilan Standar Teknis pemilihan komoditas sebagai produk unggulan desa yaitu:

- a. Ketersediaan bahan baku

Hasil survey memperlihatkan bahwa 78% responden menyatakan bahan baku berasal dari desa setempat bahkan dapat mendorong terciptanya kerjasamanya dengan desa lain karena 73% responden menyatakan bahan bakunya berupa bahan mentah yang dihasilkan di desa tersebut. *Multiplier effect* dan *specialization effect* dapat terlihat dari 46% bahan baku disediakan oleh pemasok tetap dari desa tersebut bukan disediakan oleh produsen.

b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil survey, hanya 46% responden yang melakukan kerjasama SDM dengan pihak lain dan hanya 0.42% responden yang menganggap keterampilan SDM menjadi bagian penting jika produk dikembangkan secara besar-besaran. Untuk kesiapan bersaing di pasar lokal dan regional 43% responden telah melakukan kerjasama dalam bentuk tenaga terampil.

c. Pasar Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Sekitar 24% responden menjual produk dalam bentuk perdagangan dan diperdagangkan melalui non-internet (65%). Artinya secara jangka panjang, kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu terus mendorong memperluas pasar melalui perdagangan digital.

d. Pasar Domestik dan ekspor

Berdasarkan hasil survey 85% responden memasarkan produknya di pasar desa, di pasar kecamatan, dan di pasar kabupaten. Padahal 87% responden menyatakan produk yang dihasilkan adalah produk ramah lingkungan yang sangat diminati pasar ekspor walaupun baru 45% responden yang menyatakan memiliki sertifikat ramah lingkungan.

e. Keterlibatan masyarakat dan UMKM

Responden pada survey saat ini hanya ada empat responden yang mengelola produk unggulan desa melalui UMKM, dominan atau 99 wirausahawan produk unggulan desa di 120 desa mengelola bisnisnya secara perorangan. Padahal 85% responden menyatakan produk yang dikembangkan dapat mensejahterakan masyarakat.

f. Kesesuaian dengan regulasi

Sangat dominannya pengelolaan produk unggulan desa secara perorangan menimbulkan dugaan tidak menariknya menjadi anggota BUMDes, hal ini terbukti sekitar 42% responden tidak tertarik bekerjasama dengan BUMDes ketika produk unggulan desa akan dikembangkan secara besar-besaran. Sampai Tahun Anggaran 2019, hanya 64% responden dari aparaturnya Pemerintah Desa yang telah mengkomodifikasi Produk Unggulan Desa dalam APBDes tahun anggaran ini, tahun anggaran depan dan direncanakan pada tahun anggaran depan. Artinya Camat perlu terus mengingatkan pentingnya Produk Unggulan Desa dimasukkan dalam APBDes.

g. Aspek Lingkungan

87% responden menyatakan produk unggulan desa yang dihasilkan adalah produk ramah lingkungan dan 73% responden menyatakan bahan baku produk unggulan desa yang diproduksi termasuk bahan baku ramah lingkungan demikian juga energi yang digunakan termasuk ramah lingkungan menurut 70% responden.

h. Lamanya masyarakat dalam melakukan usaha tersebut

Hasil survey memperlihatkan lebih dari separuh (55%) wirausaha produk unggulan desa di 120 desa menjalankan bisnis antara 1 sampai 10 tahun, sedangkan yang menjalankan antara 11 sampai 20 tahun sebanyak 21%, antara 21 – 30 tahun ada 15% dan antara ada yang sangat berpengalaman menjalankan bisnis antara 40 hingga 80 tahun sebanyak 5%.

5.3. ANALISA PRODUK UNGGULAN DESA MODEL INKUBATOR

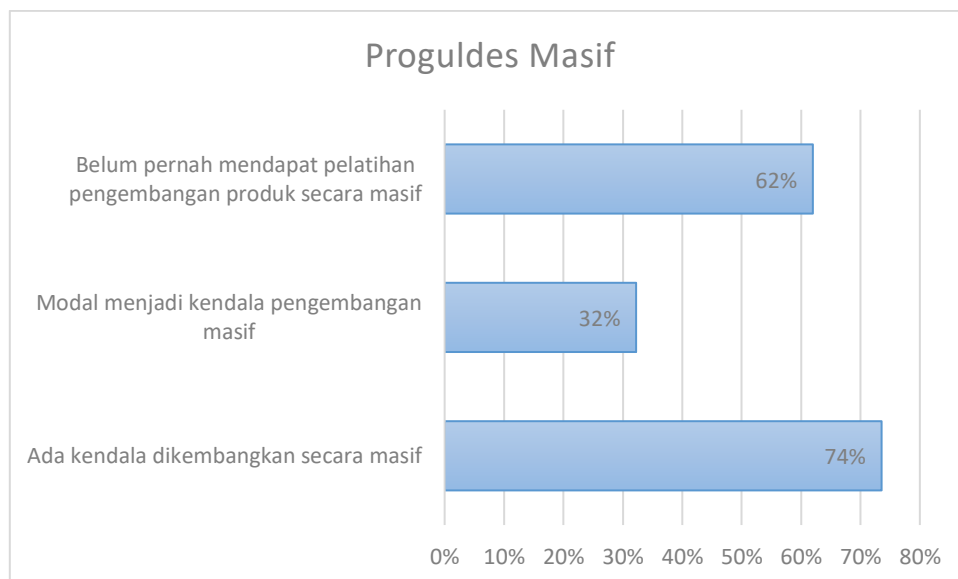
Melalui pendekatan yang dikembangkan oleh Harley (2010) untuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan yang baru yang diajukan oleh anggota dengan memberikan berbagai macam layanan komperhensif dan terpadu, yaitu: 1. *Incubator space*, 2. *Common space*, 3. *Common Services*, 4. *Hands-on Counseling*, dan 5. *Hands-on Funding*. Dari lima alat ukur yang dikembangkan oleh Harley digunakan tiga yang paling relevan seperti analisa di bawah ini.

1. *Incubator space*

Pada Kelompok indikator “Produk dapat dikembangkan oleh Masyarakat” berdasarkan data yang masuk sejumlah 65% dari 120 responden, terinformasikan bahwa 43% akan memperluas tempat usaha, 6% akan membuka cabang, 17% ingin meningkatkan keahlian, dan 2% menjawab lainnya. Artinya para pelaku usaha di desa-desa lokasi studi mempunyai keyakinan produk yang digeluti mereka mempunyai potensi besar untuk dikembangkan hal ini didukung oleh ada 57% responden yang meyakini produk dapat dikembangkan oleh masyarakat, walaupun 44% menyatakan kurang bahan baku, 26% kurang keahlian, dan 17% mengalami kekurangan modal.

Pada kelompok indikator “Bernilai jual dan berdaya saing di pasar lokal dan regional” terinformasikan 43% responden menjalin kerjasama dengan tenaga terampil namun juga sebanyak 36% responden tidak menjalin kerjasama dengan tenaga terampil. Masih pada kelompok indikator ini, ada 64% responden yang menjalankan bisnis tanpa menggunakan internet. Artinya pelaku-pelaku bisnis di desa perlu terus didorong untuk menggunakan teknologi agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan merekrut tenaga terampil agar produknya mempunyai daya saing lebih tinggi karena 86% responden menyatakan produk yang dihasilkan ramah lingkungan dan 72% responden menyatakan bahan baku termasuk ramah lingkungan.

2. *Hands-on Counseling*



Pada kelompok indikator “Produk dapat dikembangkan secara massif” hasil survey memperlihatkan 74% responden menyatakan adanya kendala dalam

mengembangkan produk secara besar-besaran atau massif. Sementara itu menurut responden 62% menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan bagaimana menghasilkan produk secara massif.

Pada kelompok indikator “Produk ramah lingkungan” terinformasikan 55% responden menyatakan “Tidak” dan “Tidak Tahu” produk yang dihasilkan mempunyai sertifikat ramah lingkungan dan 58% responden menyatakan belum pernah mendapat pelatihan tentang produk ramah lingkungan.

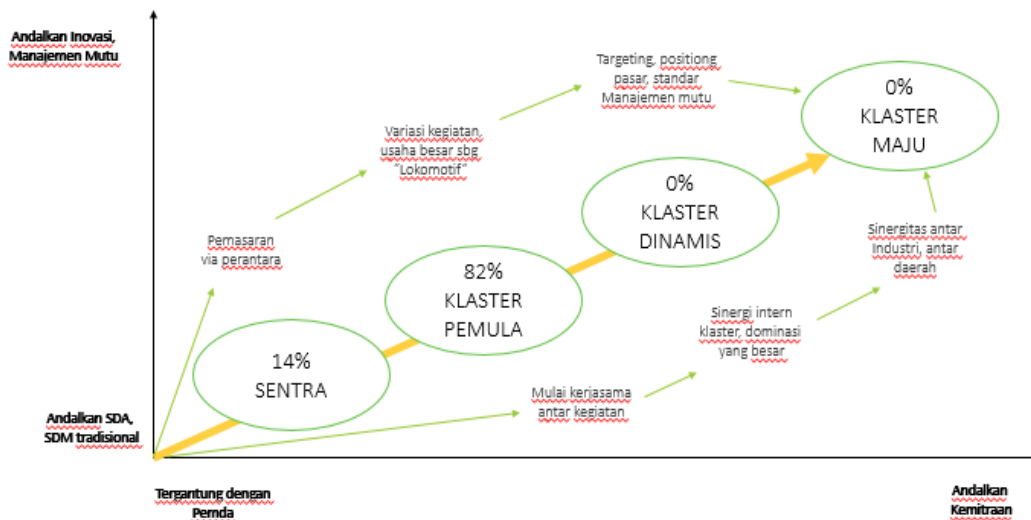
3. Hands-on Funding

Keinginan adanya bantuan modal muncul di dua kelompok indikator “Produk dapat dikembangkan masyarakat” dan “produk dapat dikembangkan secara massif”. Untuk indikator pertama ada 17% responden menyatakan kurang modal dan menjadi 32% responden yang menyatakan kurang modal jika produknya dikembangkan secara besar-besaran. Hal ini didukung dengan hasil survey, jika akan mengembangkan produk secara besar-besaran pelaku bisnis lebih memilih ke Bank (27%) dibanding meminjam ke BUMDes (4%).

5.3. ANALISA PROGULDES KLASSTER

Untuk mengetahui keunggulan bersaing di Kabupaten Cirebon digunakan analisa klaster digunakan empat perkembangan klaster. Hasil perhitungan daya saing dari survey menghasilkan empat perkembangan klaster di Kabupaten Cirebon 2019 sebagai berikut:

Klaster Kabupaten Cirebon 2019

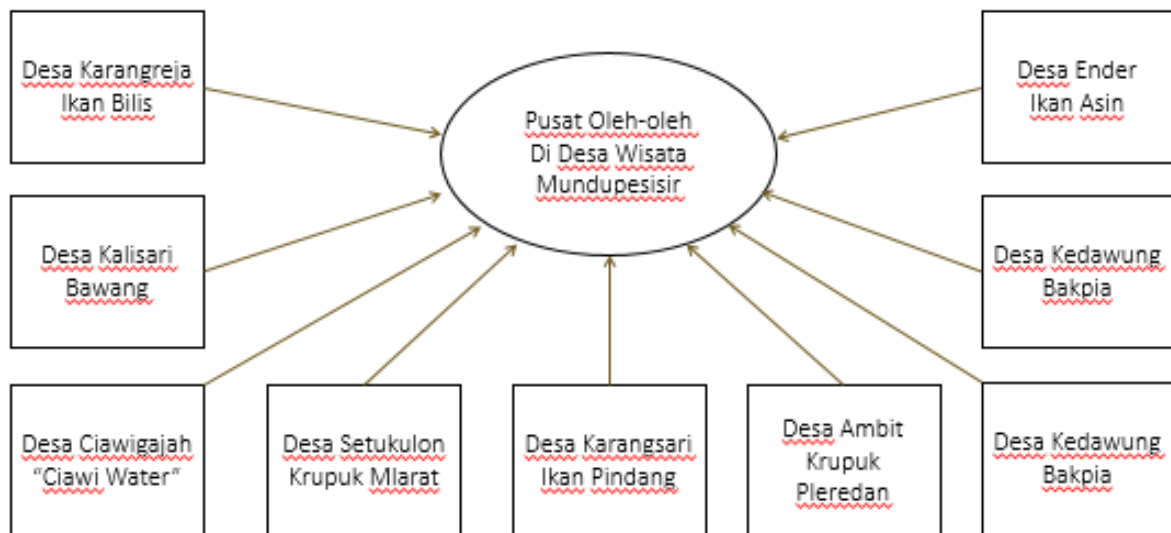


Gambar 5.1. Hasil Penghitungan Survey Posisi Klaster Produk Unggulan Desa di Kabupaten Cirebon Tahun 2019

Setelah mencermati Visi dan Misi Bupati 2019-2024 kami berkeyakinan akan terjadi peningkatan posisi klaster menjadi semakin tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini karena adanya Misi ke 4 pada Isu Strategis “Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi” dimana Arah Kebijakan ke dua yaitu “Peningkatan Kemitraan Strategis dengan Sektor Swasta untuk mendukung ekonomi lokal” dan Arah Kebijakan ke lima yaitu “Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal yang dapat memicu pengembangan wilayah dan memberikan dampak kemajuan pada daerah sekitarnya”. Diperkuat dengan Isu Strategis “Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan” pada Arah Kebijakan ke enam yaitu “Pengembangan Ekonomi Desa yang menitikberatkan pada pemanfaatan potensi desa, peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja serta kesejahteraan warga”.

5.4. ANALISA PROGULDES OVOP

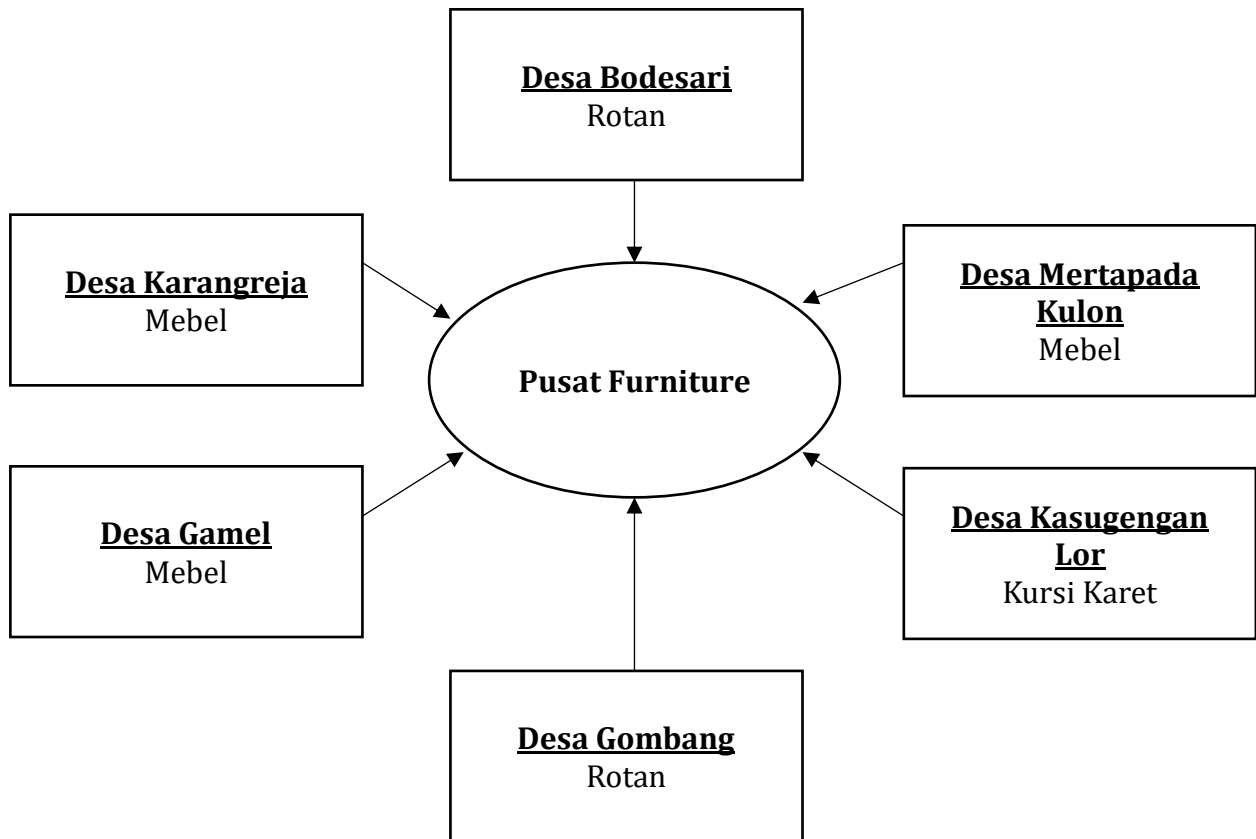
Model OVOP digunakan untuk mencermati adanya keterkaitan antara produk khas suatu desa yang mempunyai keterkaitan dengan produk khas desa lain sehingga kedepannya dapat dikembangkan pola kerjasama yang saling terkait satu sama lain.



Gambar 5.2. Pusat Oleh-oleh di Desa Wisata

Dari skema di atas Desa Wisata Mundupesisir mempunyai keterkaitan (linkage) ke belakang dimana beberapa desa dengan berbagai sektor makanan khas menyumbang input untuk desa wisata sebagai output dalam bentuk makanan khas Kabupaten Cirebon.

Skema di bawah ini contoh pengembangan OVOP untuk Pusat Furniture pada berbagai desa yang mempunyai keterkaitan ke belakang dimana beberapa desa dengan berbagai sektor penghasil furniture dapat saling bekerjasama menyumbang input untuk Pusat Furniture yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



Gambar 5.3. Pusat Furniture

5.5. ANALISA PROGULDES MODEL KOMPETENSI INTI

Suatu komoditas unggulan atau suatu industri unggulan tidak akan dikatakan memiliki kompetensi inti jika pengembangannya bersifat tradisional. Dalam arti bahwa sifat tradisional ini menggunakan teknologi dan keahlian yang sederhana, sehingga mudah dicontoh oleh pihak lain dalam pengembangannya serta memiliki nilai tambah yang rendah.

Melalui Model Kompetensi Inti ditemukan bahwa Produk Unggulan Desa di Kabupaten Cirebon tidak memiliki kompetensi inti hal ini terlihat 63% responden menyatakan memproduksi produk dengan cara tradisional, 18% menggunakan kombinasi manual dan teknologi sederhana dan hanya 1% yang menyatakan menggunakan teknologi tinggi.

BAB VI

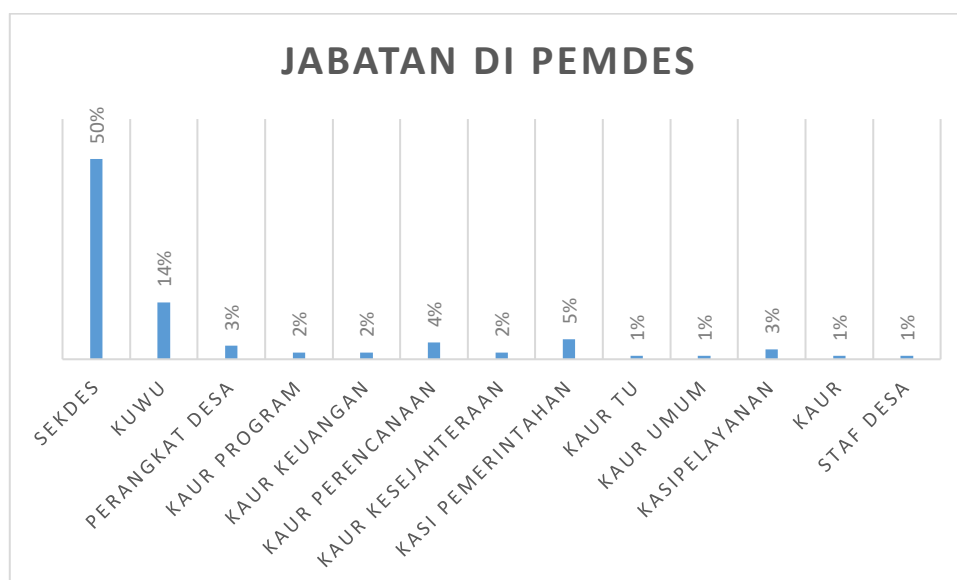
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA

6.1. KAJIAN PENINGKATAN KAPASITAS DESA

Kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa untuk memajukan dan memandirikan desa harus terus menerus ditingkatkan agar produk unggulan desa yang telah teridentifikasi dapat berkembang dan membawa kesejahteraan masyarakat.

6.1.1. Jabatan di Pemerintah Desa

Responden survey pada seratus dua puluh desa pada empat puluh kecamatan di Kabupaten Cirebon terlihat pada grafik di bawah ini.

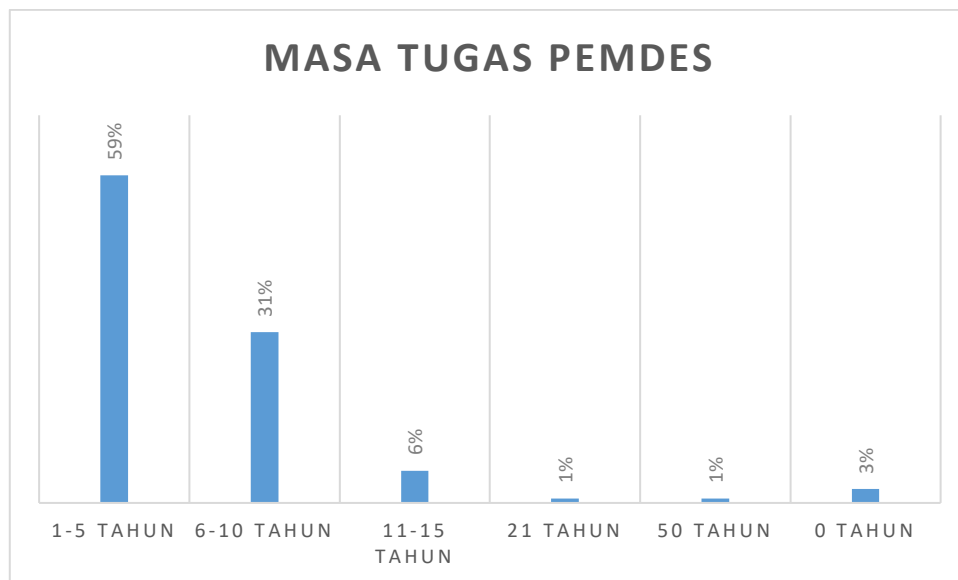


Gambar 6.1. Jabatan Responden di Pemerintah Desa

Perangkat desa yang mengisi survey 50% adalah Sekretaris Desa atau Sekdes, kemudia Kepala Desa atau Kuwu (14%), Kasi Pemerintahan ada 5%, Kasi

Perencanaan 4%, Kasi Pelayanan, 3%, dan Kasi Program, Kasi Keuangan, Kasi Kesejahteraan masing-masing 2%, dan hanya ada 1% pengisi survey dari Kasi TU, Kasi Umum, Kasi, dan Staf Desa.

6.1.2. Masa Tugas Perangkat Desa



Gambar 6.2. Lama Masa Tugas Responden di Pemerintah Desa Kab. Cirebon

Hasil survey memperlihatkan masa tugas terbesar responden antara 1 hingga 5 tahun yaitu 59%, diikuti masa tugas 6 sampai 10 tahun sebesar 31%, 11 sampai 15 Tahun ada 6%, ada 1% masing-masing bermasa kerja 21 tahun dan 50 tahun, dan 3% tidak menuliskan masa kerja.

6.2. UPAYA PENINGKATAN PERAN PEMERINTAH DESA DAN KAPASITAS DESA

Era otonomi daerah yang dititikberatkan pada pembangunan Kabupaten dan Kota membawa konsekuensi dan tantangan cukup berat bagi pengelola administratif pemerintahan, baik pada tahap implementasi maupun pada tahap pengendalian program program pembangunan. Tantangan yang dihadapi dalam

pelaksanaan otonomi daerah dapat diatasi jika daerah memiliki kemampuan dalam menggalang berbagai potensi yang dimilikinya yang didukung oleh kemampuan aparat (SDM) dan kelembagaan, untuk menambah perbesaran sumber-sumber penerimaan daerah (Darmawansyah, 2003).

Undang-undang (UU) desa diharapkan akan mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrument untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. UU desa ini memberikan kesempatan bagi desa dan senjata bagi rakyat desa untuk melancarkan perubahan. Desa akan layak sebagai tempat kehidupan dan penghidupan, menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Periode 2019-2024 dimana Visinya adalah Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman.

Menurut analisi yang dilakukan, Misi IV yaitu Maju paling relevan dengan kajian ini, yaitu Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

6.4. PENGUATAN PERAN PERANGKAT DESA DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Untuk mengetahui seberapa kuat peran perangkat desa dan pemangku kepentingan digunakan survey yang terdiri dari tiga kelompok yaitu:

6.4.1. Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Untuk sub-bagian Pengetahuan: Hasil survey memperlihatkan 23% aparatur pemerintah desa mengetahui lingkup pekerjaan, 50% cukup mengetahui, dan terdapat 12% kurang mengetahui lingkup pekerjaan mereka.

Untuk sub-bagian Sikap: hasil survey memperlihatkan 57% aparatur pemdes menganggap penting administrasi desa namun 42% aparatur pemdes merasa kurang mendapat dukungan masyarakat.

Untuk sub-keterampilan: hasil survey memperlihatkan 19% aparatur pemdes sangat terampil sebagai aparatur pemdes, 66% cukup terampil sebagai aparatur pemdes, 12% kurang terampil dan masih ada (1.79%) yang tidak terampil mungkin karena 10% aparatur pemdes 10% menyatakan belum pernah mendapat pelatihan.

Dalam hal penggunaan computer aparatur pemdes sangat dapat diandalkan karena 96% menyatakan sangat terampil dan cukup terampil menggunakan computer. Sehingga 92% aparatur menyatakan sangat terampil dan cukup terampil menyusun Perdes, 96% menyatakan sangat terampil dan cukup terampil menyusun APBDes, dan 90% menyatakan sangat terampil dan cukup terampil menyusun Perwu.

6.4.2. Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa

Untuk sub-kelompok pengetahuan: 95% aparatur pemdes sangat mampu dan cukup mampu tahapan dan jadwal perencanaan pembangunan desa. 2% menyatakan aparatur pemdes menyatakan belum pernah mendapat pelatihan penyusunan pemb, desa dan masih ada (1%) aparatur pemdes menyatakan belum

pernah mendapat pelatihan penyusunan pembangunan desa dari Camat/Tim pembina. 75% aparatur pemdes pernah mengikuti bursa inovasi desa.

37% aparatur pemdes menyatakan APBDes telah mengakomodir Proguldes namun 26% aparatur pemdes menyatakan merencanakan Proguldes masuk dalam APBDes tahun anggaran depan. 30% aparatur pemdes menyatakan Proguldes dimasukan dalam APBDes masih sebatas wacana.

Terkait produksi, permodalan, dan pemasaran, 47% aparatur menyatakan telah melakukan pelatihan pengembangan produk, 13% melakukan bantuan permodalan, dan 9% melakukan bantuan pemasaran dan promosi.

Untuk sub-bagian sikap: 99% aparatur pemdes menganggap sangat penting dan cukup penting perencanaan pembangunan desa dan 99% aparatur pemdes menyatakan sangat didukung dan cukup didukung oleh masyarakat untuk melaksanakan perencanaan pembangunan desa terbukti 91% antara 100%-75% masyarakat hadir saat Musrenbangdes namun hanya 20% yang menyatakan sangat mengakomodir hasil musrenbangdes dalam RKPDesa yang terakomodir menjadi Proguldes.

Hasil survey juga memperlihatkan 96% aparatur pemdes sangat dapat dan cukup dapat melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan desa terbukti hanya 4% aparatur menyatakan belum pernah mendapat pelatihan.

6.4.3. Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa

Untuk sub kelompok pengetahuan: 16% aparatur pemdes kurang mengetahui arti kemajuan dan kemandirian desa melalui IDM, masih 23% aparatur pemdes yang kurang dan tidak mengetahui arti Skor IDM dan 23%

menyatakan akan mengadakan pelatihan evaluasi tingkat perkembangan desa pada tahun depan.

Untuk sub kelompok sikap: 15% aparatur pemdes kurang dan tidak mengakomodir skor IDM dalam merencanakan pembangunan desa dan 9% aparatur pemdes kurang dan tidak menggunakan alat evaluasi untuk meningkatkan perkembangan perencanaan pembangunan desa.

Untuk sub kelompok keterampilan: 86% aparatur pemdes sangat dan cukup mampu menyusun laporan penyelenggaraan pemdes terbukti hanya 15% menyatakan belum pernah menerima pelatihan penyusunan laporan penyelenggaraan pemdes.

94% aparatur pemdes sangat terampil dan cukup terampil mengoperasikan komputer untuk penyusunan laporan dan 92% menyatakan sangat mampu dan cukup mampu menyusun laporan tepat waktu.

BAB VII

ANALISIS ANGGARAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA

7.1. APBD KABUPATEN CIREBON DAN SKPD TERKAIT PRODUK UNGGULAN DESA

Realisasi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018 sebesar Rp 3.683.068,27 juta, yang terdiri dari bagian pendapatan asli daerah Rp 584.810,84 juta atau 15,88 persen, dana perimbangan Rp 2.070.427,93 juta atau 56,21 persen dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 1.027.829,50 juta atau 27,91 persen.

Realisasi pendapatan pemerintah daerah memberi dampak pada realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Realisasi belanja pemerintah daerah tahun anggaran 2018 tercatat Rp 3.681.465,06 juta yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 2.099.753,33 juta atau 57,04 persen dan belanja langsung Rp 1.581.711,73 juta atau 42,96 persen. Realisasi belanja pemerintah daerah pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,32 persen dibandingkan tahun 2017.

Realisasi pembiayaan neto pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2018 sebesar Rp 298.454,88 juta, dengan penerimaan pembiayaan daerah Rp 323.853,19 juta sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 25.398,31 juta. Dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp 300.058,08 juta.

Pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 Anggaran Kajian Peningkatan Kapasitas Desa dan Pengembangan Produk Unggulan Desa adalah

sebesar Rp. 290.000.000,00 dan mengalami sedikit peningkatan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar Rp. 300.000.000 keduanya pada SKPD Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Perencanaan.

APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah teranggarkan kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen BUMDes dengan total anggaran Rp. 858.270.700,00. Selain itu ada kegiatan berjudul Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Sumber Daya Desa senilai Rp. 70.564.900,00. Pelatihan berikutnya adalah Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan Desa sebesar Rp. 258.000.000,00, berikutnya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa senilai Rp. 284.350.000,00. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dianggarkan sebesar Rp. 200.200.000,00. Penelitian dan Pengembangan Teknologi tepat guna perdesaan sebesar Rp. 283.400.000,00. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa total anggarannya adalah Rp.205.333.636,00. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan senilai Rp.2.862.981.150,00.

7.2. INDEKS DESA MANDIRI, APBDesa DAN DANA DESA

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu

kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Hasil rekapitulasi Indeks Desa Mandiri Kabupaten Cirebon Tahun 2019 untuk 412 desa adalah sebagai berikut:

1. Desa Tertinggal ada 12 desa (2,91%)
2. Desa Berkembang ada 311 desa (75,49%)
3. Desa Maju sejumlah 87 desa (21,12%)
4. Desa Mandiri sejumlah 2 desa (0,49%)

Telah terjadi peningkatan secara jumlah dibanding Tahun 2017 yaitu:

1. Desa Tertinggal ada 37 desa (8,98%)

2. Desa Berkembang sejumlah 329 desa (79.85%)
3. Desa Maju ada 46 desa (11.17%)
4. Desa Mandiri 0 desa (0%)

Kabupaten Cirebon telah berhasil melahirkan desa yang mempunyai Klasifikasi Desa Mandiri sebanyak 2 desa. Keberhasilan ini perlu diapresiasi banyak pihak dalam bentuk dukungan replikasi keberhasilan untuk diterapkan di banyak desa.

APB Desa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. a. Pendapatan Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berkenaan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Oleh karena itu dalam pedoman penyusunan APB Desa harus memuat hal-hal yang harus diperhatikan, yang meliputi: (1) Kepastian pendapatannya, termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer; dan (2) Dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya. b. Belanja Belanja Desa harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Pedoman penyusunan APB Desa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta

output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat. c. Pembiayaan Desa Pedoman penyusunan APB Desa harus menguraikan secara rinci hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi pembiayaan, yang meliputi: (1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari SiLPA dan pencairan kembali dana cadangan; dan (2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa, Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan

dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

Tahap Review Rancangan APB Desa dilakukan melalui tiga tahapan yaitu;

a. Bupati berkewajiban mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- 1) termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 2) termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Desa. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- 1) bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 2) kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 3) masyarakat Desa melalui BPD berhak mengajukan keberatan kepada kepala Desa apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- 4) BPD dapat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati tanggapan Desa terhadap ketidaksetujuan bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menerima ketidaksetujuan bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa dinyatakan Desa menolak ketidaksetujuan bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka kepala Desa mengajukan keberatan kepada bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu diputar oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa. Untuk itu, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh produk-produk unggulan yang dapat dibiayai Dana Desa.

Salah satu mandat Undang-Undang Desa adalah bahwa Desa harus berdikari di bidang ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Keberdikarian Desa di bidang ekonomi akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat kerjasama antar Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMDesa yang

berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa.

3. Desa-desanya yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desanya yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasilo industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

Berikut ini adalah pagu dana desa pada 40 kecamatan dan 120 desa yang dikaji pada tahun 2019

Tabel 7.1. Pagu Dana Desa Kecamatan Arjawinangun

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	ARJAWINANGUN	Kebonturi	Maju	963,918,000
2.		Tegalgubug	Maju	1,071,017,000
Jumlah				2,034,935,000

Tabel 7.2. Pagu Dana Desa Kecamatan Astanajapura

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	ASTANAJAPURA	Buntet	Berkembang	1,080,869,000
2.		Mertapada Kulon	Berkembang	933,703,000
3.		Mertapada Wetan	Maju	984,360,000
Jumlah				2,998,932,000

Tabel 7.3. Pagu Dana Desa Kecamatan Babakan

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	BABAKAN	Babakan	Berkembang	984,716,000
2.		Sumber Lor	Berkembang	1,032,984,000
Jumlah				2,017,700,000

Tabel 7.4. Pagu Dana Desa Kecamatan Beber

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	BEBER	Ciawigajah	Maju	1,116,647,000
2.		Cikancas	Berkembang	1,045,453,000
3.		Patapan	Berkembang	972,073,000
Jumlah				3,134,173,000

Tabel 7.5. Pagu Dana Desa Kecamatan Ciledug

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	CILEDUG	Ciledug Lor	Maju	994,875,000

2.		Ciledug Wetan	Berkembang	1,059,096,000
3.		Damarguna	Berkembang	1,106,632,000
4.		Tenjomaya	Berkembang	1,052,645,000
Jumlah				4,213,248,000

Tabel 7.6. Pagu Dana Desa Kecamatan Ciwaringin

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	CIWARINGIN	Bringin	Berkembang	933,220,000
2.		Gintungranjeng	Berkembang	1,023,149,000
Jumlah				1,956,369,000

Tabel 7.7. Pagu Dana Desa Kecamatan Depok

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	DEPOK	Kasugengan Kidul	Berkembang	1,111,676,000
2.		Kasugengan Lor	Berkembang	1,036,450,000
3.		Keduanan	Berkembang	986,573,000
4.		Tanjung Anom	Berkembang	1,193,709,000
Jumlah				4,328,408,000

Tabel 7.8. Pagu Dana Desa Kecamatan Dukupuntang

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	DUKUPUNTANG	Bobos	Maju	999,147,000
2.		Kedongdong Kidul	Berkembang	1,097,351,000
3.		Sindangjawa	Maju	1,054,254,000
Jumlah			3,150,752,000	

Tabel 7.9. Pagu Dana Desa Kecamatan Gebang

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1	GEBANG	Gebang Kulon	Berkembang	1,177,831,000
Jumlah				1,177,831,000

Tabel 7.10. Pagu Dana Desa Kecamatan

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	GEGESIK	Gegesik Kidul	Maju	1,114,813,000
2.		Jagapura Kidul	Tertinggal	1,433,075,000
3.		Kedungdalem	Berkembang	1,112,785,000
Jumlah				3,660,673,000

Tabel 7.11. Pagu Dana Desa Kecamatan Gempol

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	GEMPOL	Gempol	Berkembang	949,814,000
2.		Kempek	Maju	1,058,579,000
3.		Palimanan Barat	Berkembang	1,526,194,000
Jumlah				3,534,587,000

Tabel 7.12. Pagu Dana Desa Kecamatan Greged

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	GREGED	Durajaya	Berkembang	964,551,000
2.		Greged	Berkembang	1,081,449,000
3.		Jatipancur	Berkembang	1,033,792,000
Jumlah				3,079,792,000

Tabel 7.13. Pagu Dana Desa Kecamatan Gunungjati

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	GUNUNG JATI	Grogol	Berkembang	878,359,000
2.		Jatimerta	Berkembang	932,605,000
Jumlah				1,810,964,000

Tabel 7.14. Pagu Dana Desa Kecamatan Jamblang

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	JAMBLANG	Bakung Lor	Berkembang	1,048,781,000
2.		Jamblang	Berkembang	1,004,141,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
3.		Orimalang	Berkembang	1,062,076,000
4.		Sitiwinangun	Berkembang	979,461,000
5.		Wangunharja	Berkembang	1,090,387,000
Jumlah				5,184,846,000

Tabel 7.15. Pagu Dana Desa Kecamatan Kaliwedi

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	KALIWEDI	Wargabinangun	Berkembang	986,672,000
Jumlah				986,672,000

Tabel 7.16. Pagu Dana Desa Kecamatan Kapetakan

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	KAPETAKAN	Bungko	Berkembang	1,281,339,000
2.		Pegagan Kidul	Berkembang	1,234,219,000
3.		Pegagan Lor	Maju	1,224,619,000
Jumlah				3,740,177,000

Tabel 7.17. Pagu Dana Desa Kecamatan Karangsembung

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	KARANGSEMBUNG	Karangmalang	Berkembang	1,091,144,000
Jumlah				1,091,144,000

Tabel 7.18. Pagu Dana Desa Kecamatan Karawareng

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	KARANGWARENG	Karangasem	Berkembang	1,019,615,000
2.		Karangwangi	Berkembang	1,026,680,000
3.		Karangwareng	Berkembang	956,124,000
4.		Sumurkondang	Berkembang	1,001,085,000
Jumlah				4,003,504,000

Tabel 7.19. Pagu Dana Desa Kecamatan Kedawung

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	KEDAWUNG	Kalikoa	Berkembang	924,574,000
2.		Kedawung	Berkembang	908,448,000
3.		Kedungdawa	Berkembang	1,058,300,000
4.		Pilangsari	Berkembang	1,015,693,000
5.		Sutawinangun	Tertinggal	1,008,470,000
Jumlah				4,915,485,000

Tabel 7.20. Pagu Dana Desa Kecamatan Klangenan

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	KLANGENAN	Danawinangun	Berkembang	1,167,191,000
2.		Jemaras Lor	Berkembang	1,138,604,000
3.		Pekantingan	Berkembang	1,086,734,000
Jumlah				3,392,529,000

Tabel 7.21. Pagu Dana Desa Kecamatan Lemahabang

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	LEMAHABANG	Asem	Berkembang	890,585,000
2.		Leuwidingding	Berkembang	886,872,000
3.		Picungpugur	Maju	850,515,000
4.		Sindanglaut	Berkembang	930,615,000
Jumlah				3,558,587,000

Tabel 7.22. Pagu Dana Desa Kecamatan Losari

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	LOSARI	Kalisari	Berkembang	1,297,079,000
Jumlah				1,297,079,000

Tabel 7.23. Pagu Dana Desa Kecamatan Mundu

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	MUNDU	Citemu	Berkembang	965,273,000
2.		Mundu pesisir	Berkembang	1,130,656,000
3.		Sinarancang	Berkembang	1,042,343,000
Jumlah				3,138,272,000

Tabel 7.24. Pagu Dana Desa Kecamatan Pabedilan

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	PABEDILAN	Babakan Losari	Berkembang	983,965,000
2.		Pabedilan Wetan	Berkembang	1,019,974,000
Jumlah				2,003,939,000

Tabel 7.25. Pagu Dana Desa Kecamatan Pabuaran

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	PABUARAN	Hulubanteng	Berkembang	1,078,321,000
2.		Jatirenggang	Berkembang	1,019,586,000
3.		Pabuaran Kidul	Mandiri	950,056,000
4.		Sukadana	Berkembang	1,021,368,000
Jumlah				4,069,331,000

Tabel 7.26. Pagu Dana Desa Kecamatan Palimanan

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	PALIMANAN	Kepuh	Berkembang	1,076,801,000
2.		Lungbenda	Berkembang	960,607,000
3.		Palimanan Timur	Berkembang	963,222,000
4.		Pegagan	Berkembang	1,194,007,000
Jumlah				4,194,637,000

Tabel 7.27. Pagu Dana Desa Kecamatan Pangenan

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	PANGENAN	Astanamukti	Berkembang	942,162,000
2.		Ender	Berkembang	1,023,878,000
Jumlah				1,966,040,000

Tabel 7.28. Pagu Dana Desa Kecamatan Panguragan

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	PANGURAGAN	Kalianyar	Berkembang	1,024,465,000
Jumlah				1,024,465,000

Tabel 7.29. Pagu Dana Desa Kecamatan Pasaleman

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	PASALEMAN	Cigobang	Berkembang	1,058,946,000
Jumlah				1,058,946,000

Tabel 7.30. Pagu Dana Desa Kecamatan Plered

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	PLERED	Cangkring	Berkembang	983,076,000
2.		Gamel	Berkembang	982,114,000
3.		Panembahan	Maju	900,057,000
4.		Pangkalan	Berkembang	871,039,000
5.		Sarabau	Berkembang	993,179,000
6.		Tegalsari	Maju	1,068,063,000
7.		Trusmi Wetan	Berkembang	940,460,000
8.		Wotgali	Berkembang	988,982,000
Jumlah				7,726,970,000

Tabel 7.31. Pagu Dana Desa Kecamatan Plumbon

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	PLUMBON	Bodesari	Berkembang	1,112,927,000
2.		Gombang	Maju	1,098,485,000
Jumlah				2,211,412,000

Tabel 7.32. Pagu Dana Desa Kecamatan Sedong

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	SEDONG	Karangwuni	Berkembang	1,117,568,000
2.		Panambangan	Berkembang	1,114,266,000
3.		Panongan	Berkembang	1,052,377,000
4.		Sedong Kidul	Berkembang	1,114,186,000
5.		Windujaya	Berkembang	1,002,850,000
Jumlah				5,401,247,000

Tabel 7.33. Pagu Dana Desa Kecamatan Sumber

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	SUMBER	Sidawangi	Berkembang	1,102,654,000
Jumlah				1,102,654,000

Tabel 7.34. Pagu Dana Desa Kecamatan Suranenggala

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	SURANENGGALA	Karangreja	Berkembang	926,827,000
2.		Keraton	Berkembang	981,003,000
3.		Muara	Berkembang	1,072,207,000
4.		Suranenggala Lor	Berkembang	974,733,000
Jumlah				3,954,770,000

Tabel 7.35. Pagu Dana Desa Kecamatan Susukan

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	SUSUKAN	Kejiwan	Berkembang	1,076,302,000
2.		Luwung Kencana	Berkembang	1,112,751,000
3.		Susukan	Maju	1,180,329,000
Jumlah				3,369,382,000

Tabel 7.36. Pagu Dana Desa Kecamatan Susukan Lebak

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	SUSUKAN LEBAK	Ciawi Asih	Berkembang	962,721,000
2.		Curug	Berkembang	945,955,000
3.		Curug Wetan	Berkembang	903,828,000
4.		Susukan Tonggoh	Berkembang	905,913,000
5.		Wilulang	Berkembang	820,207,000
Jumlah				4,538,624,000

Tabel 7.37. Pagu Dana Desa Kecamatan Talun

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	TALUN	Cirebon Girang	Berkembang	1,233,946,000
2.		Kerandon	Berkembang	965,094,000
3.		Kubang	Berkembang	954,790,000
Jumlah				3,153,830,000

Tabel 7.39. Pagu Dana Desa Kecamatan Tengah Tani

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	TENGAH TANI	Battembat	Berkembang	904,657,000
2.		Dawuan	Berkembang	957,160,000
3.		Gesik	Berkembang	1,013,990,000
4.		Kalibaru	Tertinggal	1,142,751,000
5.		Kemlakagede	Tertinggal	1,145,234,000
Jumlah				5,163,792,000

Tabel 7.40. Pagu Dana Desa Kecamatan Waled

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	WALED	Ambit	Berkembang	1,153,308,000
2.		Gunungsari	Berkembang	997,632,000
3.		Karangsari	Berkembang	997,973,000
Jumlah				3,148,913,000

Tabel 7.41. Pagu Dana Desa Kecamatan Weru

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM	Pagu Dana Desa Per-Desa
1.	WERU	Kertasari	Berkembang	1,156,694,000
2.		Setu Kulon	Berkembang	1,083,088,000
3.		Weru Kidul	Berkembang	1,007,986,000
Jumlah				3,247,768,000

7.3. PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kasi Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa yang terdiri dari a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan b. laporan realisasi kegiatan pada semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Kepala Desa

menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa adalah: a. Sekretaris Desa; b. Kasi dan Kasi; dan c. Kasi keuangan.

Pengelolaan keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. Pertanggungjawaban dilakukan dengan Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

BAB VIII

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA

8.1. ARAH KEBIJAKAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintah Kerja mengamanahkan bahwa Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Desa dan Keluarga Sejahtera mengamanahkan bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi desa, Pemerintah Desa dan masyarakat wajib mengelola potensi sumber daya yang ada di desa untuk dipilih oleh setiap desa dan dijadikan produk unggulan desa yang akan dikembangkan lebih lanjut dimana dibutuhkan sumber daya manusia dari aparat pemerintah desa dan masyarakat desa yang terampil, professional, kreatif dan terdidik baik dari pendidikan informal, pendidikan formal maupun non formal.

Untuk percepatan pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi lokal, pemerintah desa bersama masyarakat diberikan dalam bentuk penyiapan prasarana dan sarana, pelatihan Pengurus BUMDesa, peningkatan kompetensi pelaku usaha mikro/pengelola lembaga ekonomi, promosi produk, pendampingan usaha, pemagangan dan/atau bantuan teknis lainnya melalui

SKPD dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan dukungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perdagangan dan Industri, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pengelolaan potensi sumber daya desa dalam rangka pengembangan ekonomi desa dapat dibiayai melalui dana desa dari APBN atau pendapatan asli desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 digunakan sebagai acuan penganggaran pemerintah desa dalam bentuk RKPDesa. Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain: a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan; b. pelatihan teknologi tepat guna; c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa; d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (live skill) bagi masyarakat Desa; dan e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri, antara lain: a. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran

dan meubeler); b. penguasaan bahasa asing; c. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

8.2. PROGRAM AKSI DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA

Dalam rangka pengembangan ekonomi desa, Pemerintah Desa dengan kesepakatan musyawarah desa memilih produk unggulan desa yang dimiliki dan akan dikembangkan dan diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa Bersama dengan prioritas sebagai berikut:

- a. pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik desa baik jalan, irigasi, air bersih, embung desa, lumbung desa, pasar desa dan lain-lain yang dapat berimplikasi atau berpengaruh kepada peningkatan ekonomi masyarakat desa;
- b. pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan produksi, pengolahan hasil produksi usaha pertanian bagi petani;
- c. pelatihan dan bimbingan teknis keterampilan usaha/ wirausaha bagi masyarakat/penduduk miskin dan purna karya;
- d. pengembangan usaha BUMDes;
- e. pembangunan dan atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- f. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi;
- g. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa.

Dalam rangka pengembangan ekonomi dan pengelolaan potensi desa untuk mencapai nilai ekonomi berdaya saing dimana pelaksanaannya melibatkan BUM

Desa dan/atau kerjasama antar-Desa yang berada dalam satu kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa, maka Desa dapat melakukan kerjasama yang disepakati melalui Musyawarah Desa dalam bentuk kerjasama antar desa atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Untuk pelaksanaan kerja antara desa diatur dengan Peraturan Bersama Kuwu melalui kesepakatan Musyawarah antar-Desa kemudian dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah antar-Desa.

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa dalam bentuk:

- a. kerjasama atas prakarsa Desa; dan
- b. kerjasama atas prakarsa Pihak Ketiga.

Kerjasama antar desa dan kerjasama dengan pihak ketiga yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa paling sedikit memuat delapan hal yaitu:

- a. ruang lingkung kerjasama;
- b. bidang kerjasama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;

- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

8.3. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwewenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa. Pemerintah Kabupaten mensikapi kondisi ideal tersebut dengan meluncurkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019.

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penggunaan Dana Desa harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan Desa yaitu: peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan pembangunan Desa. Karenanya, penggunaan Dana Desa Tahun 2019 diprioritaskan pengembangan

usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembiayaan kegiatan padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi warga miskin.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 yang terkait langsung melalui:

1. Produk Unggulan Desa adalah Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan dalam hal
 - i. Usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif;
 - j. Pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian;
 - k. Pemasaran;
 - l. Desa Wisata;
 - m. Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya

BAB IX

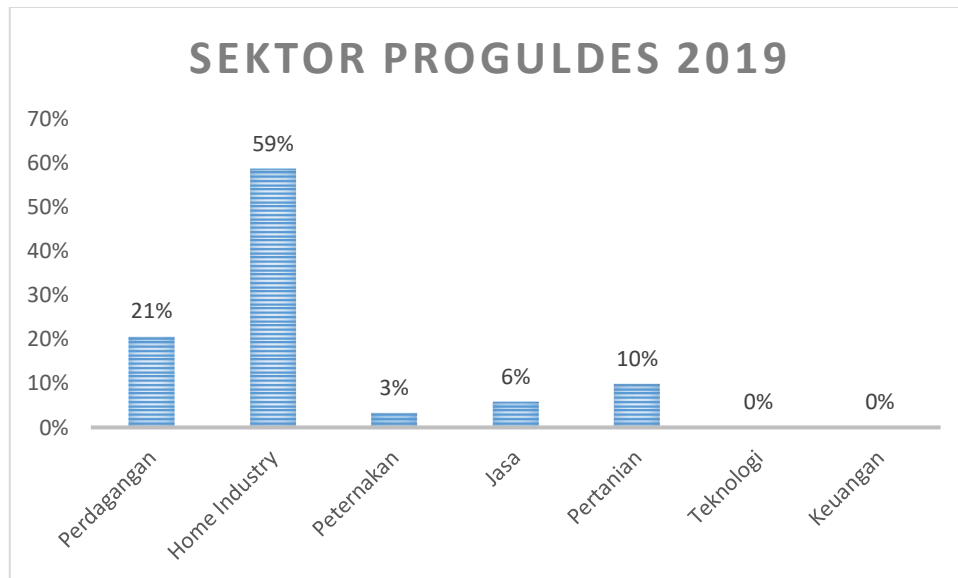
MATRIKS HASIL KAJIAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA

9.1. KONDISI PRODUK UNGGULAN DESA DI KABUPATEN CIREBON

Untuk menghasilkan pengembangan produk unggulan desa, Pemerintah Desa dan masyarakat harus mengelola potensi sumber daya yang ada di desa untuk dipilih oleh setiap desa dan dijadikan produk unggulan desa yang akan dikembangkan lebih lanjut dimana dibutuhkan sumber daya manusia dari aparat pemerintah desa dan masyarakat desa yang terampil, profesional, kreatif dan terdidik baik dari pendidikan informal, pendidikan formal maupun non formal.

9.2. SEKTOR PRODUK UNGGULAN DESA

Dari hasil survey data primer terkelompokan produk andalan desa di empat puluh kecamatan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 bahwa terbesar adalah “Home Industry, 59%”, “Perdagangan, 21%”, “Pertanian, 10%”, “Jasa, 6%”, dan “Pternakan, 3%, tidak ada satupun produk unggulan desa terkait dengan “Teknologi” dan “Keuangan”.

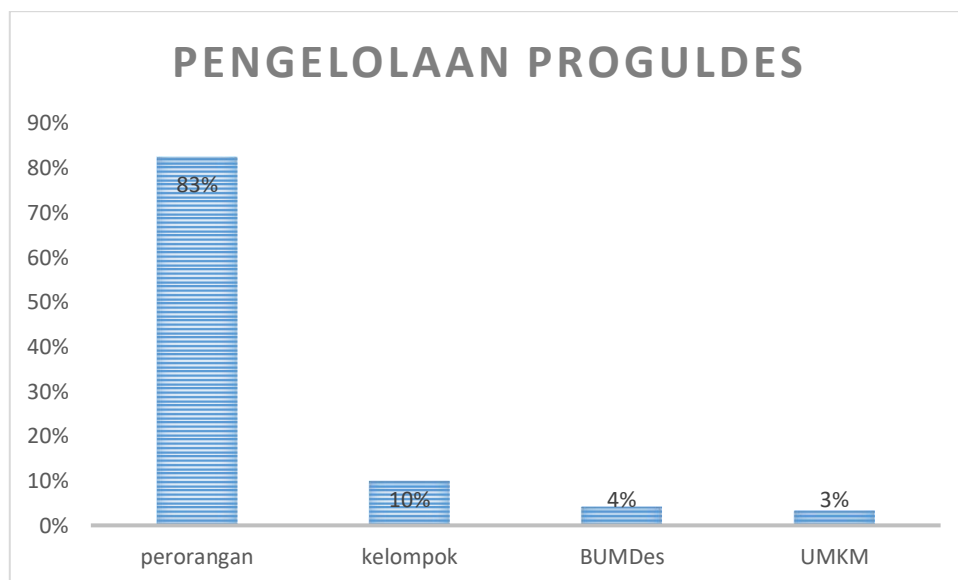


Sumber: hasil survey 2019

Gambar 9.1. Sektor Produk Unggulan Desa

9.3. JENIS PENGELOLAAN

Hasil survey memperlihatkan bahwa 83% pengelolaan produk unggulan desa pada 120 desa di 40 kecamatan di Kabupaten Cirebon dilakukan secara perorangan. Jenis pengelolaan kelompok sebanyak 10% bahkan lebih besar dibanding gabungan jenis pengelolaan BUMDes (4%) dan UMKM (3%).

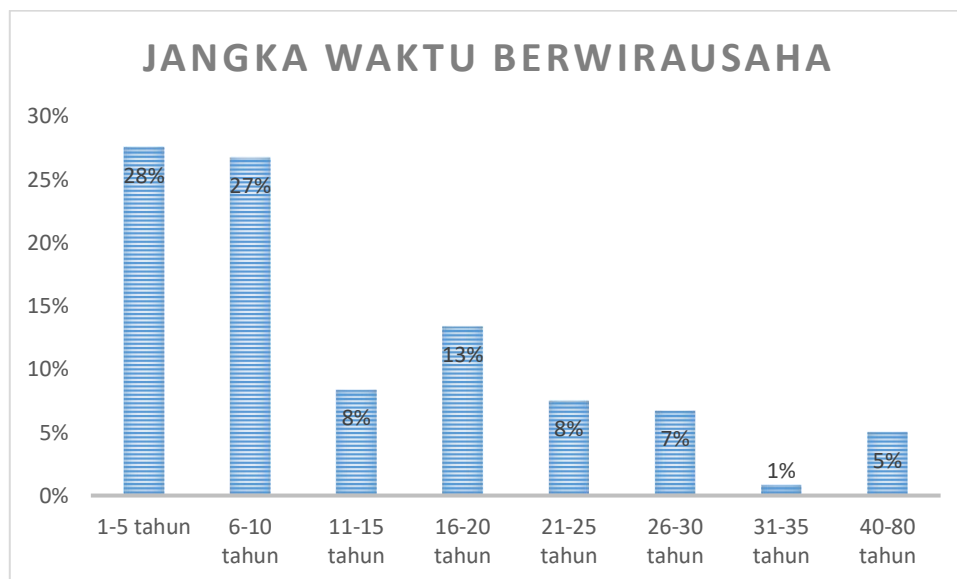


Sumber: hasil survey 2019

Gambar 9.2. Jenis Pengelolaan Proguldes

9.4. JANGKA WAKTU BERWIRAUSAHA

Hasil survey memperlihatkan lebih dari separuh (55%) wirausaha produk unggulan desa di 120 desa menjalankan bisnis antara 1 sampai 10 tahun, sedangkan yang menjalankan antara 11 sampai 20 tahun sebanyak 21%, antara 21 – 30 tahun ada 15% dan antara ada yang sangat berpengalaman menjalankan bisnis antara 40 hingga 80 tahun sebanyak 5%.



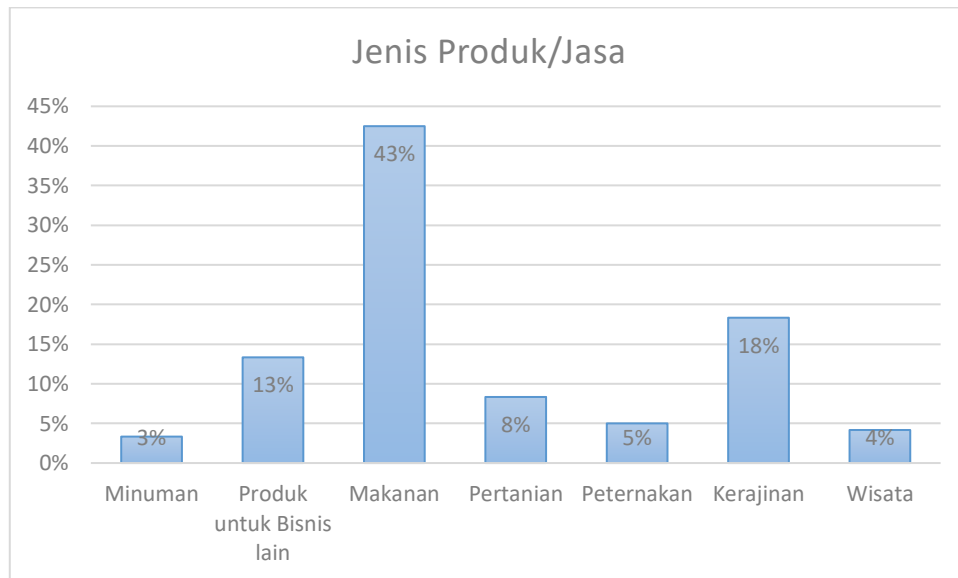
Sumber: hasil survey 2019

Gambar 9.3. Jangka Waktu Berwirausaha

9.5. JENIS PRODUK ATAU JASA UNGGULAN PER DESA

Hasil survey pada 120 desa di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 memperlihatkan jenis produk yang paling banyak dihasilkan (43%) adalah “Makanan”, berikutnya adalah “Kerajinan, sebesar 18%”, kemudian beragam

produk sebesar 13%, “Pertanian, 8%”, “Pternakan, 5%”, “Wisata religi dan alam, 4%”, dan “Produksi Minuman, 3%”.



Sumber: hasil survey 2019

Gambar 9.4. Jenis Proguldes

9.5. Produk Unggul setiap Desa

Untuk mengetahui Produk Unggulan setiap Desa di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019, telah dilakukan survey pada 120 desa pada 40 kecamatan. Penentuan lokasi 120 desa dengan pertimbangan belum dilakukan pada penelitian tahun 2018.

Indikator-indikator untuk mengetahui potensi yang ada pada 120 desa digunakan tujuh indikator yaitu:

1. Produk dapat dikembangkan oleh masyarakat
2. Produk dapat dikembangkan secara massif (besar-besaran)
3. Produk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan PADesa

4. Ketersediaan bahan baku
5. Bernilai jual dan berdaya saing di pasar
6. Produk ramah lingkungan, dan
7. Produk yang dikembangkan sesuai dengan prioritas dana desa dan dapat dianggarkan dengan dana desa.

9.5.1. Produk dapat dikembangkan oleh masyarakat

Hasil survey memperlihatkan 71% responden menyatakan produk yang dikembangkan mempunyai prospek lebih baik pada tahun depan. Hal ini didukung 84% responden menyatakan punya rencana mengembangkan usaha dimasa yang akan datang dalam bentuk memperluas tempat usaha yang dijawab oleh 43% responden dan 17% responden akan meningkatkan keahlian berproduksi. Untuk produsen yang pesimis untuk mengembangkan produknya adalah karena kurangnya bahan baku (44%) yang cukup lebih tinggi dibanding kekurangan modal (17%).

9.5.2. Produk dapat dikembangkan secara massif (besar-besaran)

Untuk dapat dikembangkan secara besar-besaran dari 74% responden menyatakan ada kendala pada permodalan (33%). Untuk mengembangkan secara besar-besaran, produsen lebih memilih meminjam modal dari bank (30%) dibanding meminjam ke BUMDes (4%) atau meminta bantuan dana dari Pemerintah Desa (3%). Wirausaha produk unggulan desa tidak tertarik meminjam ke BUMDes atau dana desa kemungkinan mereka sungkan karena hanya 38% responden yang menyatakan produknya mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADesa).

9.5.3. Produk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan PADesa

Menurut 85% responden, produk yang dikembangkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan 53% responden menyatakan produknya dapat meningkatkan PADesa. 43% responden menyatakan memberi upah di bawah upah minimal kabupaten.

9.5.4. Ketersediaan bahan baku di desa

78% responden menyatakan bahan baku tersedia untuk produk yang dikembangkan menjadi produk andalan desa dan dipasok oleh pemasok tetap sebanyak 46% responden. Pasokan bahan baku dalam bentuk bahan mentah menurut 73% responden. Menurut 41% responden bahan baku berasal dari desa mereka.

9.5.5. Produk bernilai jual dan berdaya saing di pasar lokal & regional

60% responden menyatakan tidak bekerjasama dengan berbagai pihak agar produknya bernilai jual tinggi dan berdaya saing tinggi di pasar lokal dan regional, walaupun menyatakan kerjasama adalah bentuk kerjasama perdagangan (24%) responden. Responden yang melakukan kerjasama dalam bentuk tenaga terampil ada 43%. Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat perlu mendorong wirausahawan produk unggulan desa untuk dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena lebih dari separuh responden (65%) memasarkan produknya dengan non-internet.

9.5.6. Produk ramah lingkungan

Produk yang dihasilkan oleh para wirausahawan 87% dinyatakan oleh responden termasuk produk ramah lingkungan walaupun 50% responden menyatakan belum mempunyai sertifikat ramah lingkungan atau mempunyai AMDAL dan 60% responden menyatakan tidak pernah mendapat pelatihan mengembangkan produk ramah lingkungan. 70% responden meyakini bahan baku produk termasuk ramah lingkungan dan 63% responden menyatakan pengolahan atau pemrosesan produk tidak mencemari lingkungan karena 70% responden menyatakan menggunakan energi ramah lingkungan.

9.5.7. Produk unggulan sesuai prioritas penggunaan dana desa dan dapat dianggarkan dari dana desa

Hampir separuh responden (48%) menyatakan produk yang dihasilkan tidak selaras atau tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa dan 74% responden menyatakan produk yang dikembangkan tidak dibantu oleh pemerintah desa dalam permodalan. 67% responden menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan pengelolaan usaha dari Pemerintah Desa.

9.6. Matriks rinci produk unggulan desa pada setiap desa

Matriks-matriks di bawah ini adalah penjabaran rinci atas aktivitas, jenis pengelolaan, dan produk unggulan yang dikembangkan dari seratus dua puluh desa di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019.

Tabel 9.1. Produk Unggulan Desa: Minuman

Produk/ Jasa	Desa	Kecamatan	Aktivitas	Pengelolaan	Produk Unggulan
Minuman	Ciawiasih	Susukan Lebak	Perdagangan	BUMDes	Air Baku
	Ciawigajah	Beber	Lain-lain	BUMDes	Air Cup "Ciawi Water"

	Sindangjawa	Dukupuntang	Lain-lain	Perorangan	Wedang Jahe Kemasan
	palimanan timur	palimanan	Home Industry	Kelompok	kemasan jahe merah

Tabel 9.2. Perbup Pendukung Industri Air Minum

Regulasi	Kegiatan	Usaha Ekonomi Produktif	Penanggung Jawab
Perbup No.62/2018	Pengembangan Usaha BUMDesa	1. Industry Air Minum; 2. Industry Pariwisata Desa; 3. Produk Unggulan Lainnya yang Sesuai Dengan Kewenangan Desa dan Diputuskan dalam Musyawarah Desa.	1. Kasi Perekonomian 2. Dinas Perdagangan dan Industri 3. Dinas Pariwisata

Tabel 9.3. Produk Unggulan Desa: Makanan

Produk/ Jasa	Desa	Kecamatan	Aktivitas	Pengelolaan	Produk Unggulan
Makanan	Ender	Pangenan	Home Industry	Perorangan	Ikan Asin
	Kendodongkidul	Dukupuntang	Home Industry	Peorangan	Singkong & Rengginang
	Cakring	Plered	Home Industry	Perorangan	Tape Ketan
	Trusmi Wetan	Plered	Home Industry	Peorangan	Krupuk Sisir
	Pangkalan	Plered	Home Industry	Peorangan	Krupuk
	Tegalsari	Plered	Home Industry	Kelompok	Telur Asin
	Gesik	Tengah Tani	Home Industry	Perorangan	Krupuk
	Kalibaru	Tengah Tani	Home Industry	Perorangan	Tahu
	Battembat	Tengah Tani	Home Industry	Perorangan	Tongseng & Krupuk Kulit
	Kemlaka Gede	Tengah Tani	Home Industry	Perorangan	Tahu
	Dawuan	Tengah Tani	Home Industry	Perorangan	Empal Gentong
	Pilang Sari	Kedawung	Perdagangan	Perorangan	Tempe Tahu

Produk/ Jasa	Desa	Kecamatan	Aktivitas	Pengelolaan	Produk Unggulan
	Kedawung	Kedawung	Perdagangan	Perorangan	Bakpia
	Kubang	Talun	Home Industry	Perorangan	Kue Sumpia
	Weru Kidul	Weru	Home Industry	Perorangan	Donat, Pisang
	Setu Kulon	Weru	Home Industry	Perorangan	Krupuk Mlarat
	Karangasem	Karang Wareng	Home Industry	Perorangan	Makanan Olahan
	Karang Wangi	Karang Wareng	Home Industry	Perorangan	Makanan Olahan
	Hulu Banteng	Pabuaran	Pertanian	Perorangan	Jagung Manis
	Pabuaran Kidul	Pabuaran	Home Industry	Perorangan	Tahu
	Jatirenggang	Pabuaran	Pertanian	Perorangan	Jagung Manis
	Sukadana	Pabuaran	Home Industry	Perorangan	Tape Sampe
	Tenjomaya	Ciledug	Home Industry	Perorangan	Kue Rendang
	Damarguna	Ciledug	Home Industry	Perorangan	Krupuk Kentang Aci
	Ciledug Wetan	Ciledug	Home Industry	Perorangan	Krupuk Baso
	Ambit	Waled	Home Industry	Perorangan	Krupuk Pleredan
	Karangsari	Waled	Home Industry	Perorangan	Ikan Pindang
	Gunungsari	Waled	Home Industry	Perorangan	Ikan Pindang
	Sumber Lor	Babakan	Pertanian	Perorangan	Jagung Manis
	Babakan	Babakan	Perdagangan	Perorangan	Soto Ayam
	Babakan Losari	Pabedilan	Pertanian	Perorangan	Jagung Manis
	Pabedilan Wetan	Pabedilan	Home Industry	Perorangan	Rengginang
	Karangwuni	Sedong	Perdagangan	Perorangan	Leupeut
	Panambangan	Sedong	Perdagangan	Perorangan	Opak
	Pamongan	Sedong	Perdagangan	Perorangan	Jamur Krispi
	Sindanglaut	Lemahabang	Perdagangan	Perorangan	Tempe
	Asem	Lemahabang	Home Industry	Perorangan	Roti
	Leuwidingoing	Lemahabang	Perdagangan	Perorangan	Tape Ketan
	Picung Pugur	Lemahabang	Perdagangan	Perorangan	Tape Ketan
	Kempek	Gempol	Home Industry	Perorangan	Tempe
	Wangunharja	Jamblang	Home Industry	Perorangan	Olahan Pindang
	Orimalang	Jamblang	Home Industry	Perorangan	Krupuk
	Bangkulor	Jamblang	Home Industry	Perorangan	Tape Ketan

Produk/ Jasa	Desa	Kecamatan	Aktivitas	Pengelolaan	Produk Unggulan
	Gintung Rajeng	Ciwaringin	Perdagangan	Perorangan	Emping Melinjo
	Jatimerta	Gunungjati	Perdagangan	Perorangan	Emping Melinjo, Krupuk Kulit Ikan
	Kebonturi	Arjawinangun	Perdagangan	Kelompok	Makanan Dari Buah
	Keduanan	Depok	Home Industry	Perorangan	Rengginang
	Pekantingan	Klangenan	Home Industry	Perorangan	Roti
	Danawinangun	Klangenan	Home Industry	Perorangan	Tahu
	Pegagan	Palimanan	Home Industry	Perorangan	Kecap Lombok
	Sidawangi	Sumber	Perdagangan	Perorangan	Otak-Otak

Tabel 9.4. Perbup Pendukung Proguldes Makanan

Regulasi	Kegiatan	Usaha Ekonomi Produktif	Penanggung Jawab
Perbup No.62/2018	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Tepung Tapioka; 2. Kerupuk; 3. Keripik Jamur; 4. Keripik Jagung; 5. Ikan Asin; 6. Abon Sapi; 7. Susu Sapi; 8. Kopi; 9. Coklat; 10. Karet; Dan 11. Pengolahan Hasil Pertanian Lainnya Yang Sesuai Dengan Kewenangan Desa Dan Diputuskan Dalam Musyawarah Desa.	1. Kasi Perekonomian 2. Dinas Perdagangan Dan Industri 3. Dinas Pertanian 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Peternakan

Tabel 9.5. Produk Unggulan Desa: Pertanian

Produk/ Jasa	Desa	Kecamatan	Aktivitas	Pengelolaan	Produk Unggulan
Pertanian	Karangmalang	Karang Sembung	Pertanian	Kelompok	Percontohan Buah Naga

	Wilulang	Susukan Lebak	Pertanian	Bumdes	Gabah
	Sarabau	Plered	Home Industry	Perorangan	Pertanian Padi
	Tanjung Anom	Pasaleman	Pertanian	Perorangan	Tebu
	Cigobang	Pasaleman	Pertanian	Kelompok	Kayu Putih
	Windujaya	Sedong	Pertanian	Kelompok	Buah Naga
	Luangkencana	Susukan	Pertanian	Perorangan	Jamur Merang
	Palimanan Barat	Gempol	Home Industry	Umkm	Rosela
	Gempol	Gempol	Home Industry	Kelompok	Jamur
	Bringin	Ciwaringin	Pertanian	Perorangan	Budi Daya Jamur

Tabel 9.6. Produk Unggulan Desa: Peternakan

Produk/ Jasa	Desa	Kecamatan	Aktivitas	Pengelolaan	Produk Unggulan
Peternakan	Suranenggala Lor	Suranenggala	Home Industry	Perorangan	Grejag, Udang, Ikan
	Mertapada Wetan	Astanajapura	Peternakan	Perorangan	Ayam,bebek,lele
	Sumur kondang	Karang wareng	Peternakan	Perorangan	peternakan domba
	Sedong Kidul	Sedong	Peternakan	Kelompok	kambing
	Luangkencana	susukan	Pertanian	Perorangan	jamur merang
	lungbendo	palimanan	Peternakan	Kelompok	lele sangkuriang

Tabel 9.7. Produk Unggulan Desa: Kerajinan

Produk/ Jasa	Desa	Kecamatan	Aktivitas	Pengelolaan	Produk Unggulan
Kerajinan	Patapan	Beber	Home Industry	Peorangan	Sapu Ijuk
	Sinarancang	Mundu	Home Industry	Perorangan	Pembuatan Cobek
	Astanamukti	Pangenan	Home Industry	Perorangan	Gerabah
	Wotgali	Plered	Home Industry	Perorangan	Mebel
	Gamel	Plered	Home Industry	Perorangan	Mebel

Produk/ Jasa	Desa	Kecamatan	Aktivitas	Pengelolaan	Produk Unggulan
	Panembahan	Plered	Home Industry	Perorangan	Kerajinan Batik
	Kedungdawa	Kedawung	Perdagangan	Umkm	Mainan Anak/Bonea
	Mertapada Kulon	Astanajapura	Perdagangan	Perorangan	Mebeler
	Sutawinangun	Kedawung	Perdagangan	Perorangan	Pot Tanaman Hias
	Kalikoa	Kedawung	Perdagangan	Perorangan	Wajan
	Ciledug Lor	Ciledug	Home Industry	Perorangan	Gerabah
	Bodesari	Plumbon	Home Industry	Perorangan	Rotan
	Gombang	Plumbon	Home Industry	Perorangan	Rotan
	Susukan	Susukan	Jasa	Perorangan	Konveksi
	Kejiwan	Susukan	Home Industry	Perorangan	Mainan Anak
	Jamblang	Jamblang	Perdagangan	Perorangan	Mainan Anak
	Sitiwinangun	Jamblang	Home Industry	Perorangan	Gerabah
	Gegesik Kidul	Gegesik Kidul	Home Industry	Perorangan	Kedok Tari Topeng & Hiasan Dinding
	Pegagan Kidul	Kapetakan	Home Industry	Perorangan	Pembuatan Kusén
	Jagapura Kidul	Gegesik Kidul	Home Industry	Perorangan	Pande Besi
	Kasugengan Lor	Depok	Perdagangan	Perorangan	Kursi Karet
	Jemaras Lor	Klangenan	Perdagangan	Perorangan	Mainan Kapal

Tabel. 9.8. Perbup Pendukung Proguldes Kerajinan dan Industri Kecil

Regulasi	Kegiatan	Usaha Ekonomi Produktif	Penanggungjawab
Perbup No.62/2018	Pengelolaan Usaha Jasa Dan Industri Kecil	1. Meubelair Kayu dan Rotan, 2. Alat-Alat Rumah Tangga, 3. Pakaian Jadi/Konveksi Kerajinan Tangan; 4. Kain Tenun; 5. Kain Batik;	8. Kasi Perekonomian 9. Dinas Perdagangan Dan Industri 10. Dinas Tenaga Kerja

		6. Bengkel Kendaraan Bermotor; 7. Pedagang di Pasar; 8. Pedagang Pengepul; 9. Pengelolaan Jasa Dan Industri Kecil Lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Desa dan Diputuskan dalam Musyawarah Desa.	
--	--	---	--

Tabel 9.9. Produk Unggulan Desa: Wisata

Produk/ Jasa	Desa	Kecamatan	Aktivitas	Pengelolaan	Produk
Wisata	Susukantonggoh	Susukan Lebak	Jasa	Bumdes	Bumi Perkemahan
	Mundupesisir	Mundu	Jasa	Kelompok	Wisata Mangrove
	Kerandon	Talun	Jasa	Kelompok	Wisata Religi
	Cirebon Girang	Talun	Jasa	Bumdes	Wisata Religi
	Karang Wareng	Karang Wareng	Jasa	Kelompok	Sumur Keramat

Tabel 9.10. Produk Unggulan Desa Lainnya

Produk/ Jasa	Desa	Kecamatan	Aktivitas	Pengelolaan	Produk
Lainnya	Cikancas	Beber	Home Industry	Perorangan	Peti Kayu Buah
	Curug	Susukan Lebak	Home Industry	Perorangan	Bata Merah
	Curug Wetan	Susukan Lebak	Home Industry	Perorangan	Bata Merah
	Citemu	Mundu	Home Industry	Perorangan	Alat Tangkap Rajungan
	Sinarancang	Mundu	Home Industry	Perorangan	Pembuatan Cobek

	Sutawinangun	Kedawung	Perdagangan	Perorangan	Pot Tanaman Hias
	Kalikoa	Kedawung	Perdagangan	Perorangan	Wajan
	Kertasari	Weru	Perdagangan	UMKM	Net, Bola
	Tegalgubug	Arjawinangun	Home Industry	Perorangan	Kelambu
	Kedungdalem	Gegesik Kidul	Home Industry	Perorangan	Anyaman Tikar Adem
	Pegagan Kidul	Kapetakan	Home Industry	Perorangan	Pembuatan Kusen
	Jagapura Kidul	Gegesik Kidul	Home Industry	Perorangan	Pande Besi
	Grogol	Gunungjati	Perdagangan	Perorangan	Kupasan Daging Rajungan
	Kepuh	Palimanan	Home Industry	Perorangan	Batu Alam
	Kajagungan Kidul	Depok	Perdagangan	Perorangan	Batu Bata
	Wargabinangun	Kaliwedi	Jasa	Umkm	Sampah

9.7. IDM DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019

Tabel di bawah ini adalah menampilkan kaitan Klasifikasi IDM dengan jumlah Pagu Dana Desa pada setiap desa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2018.

Tabel 9.11. Klasifikasi IDM di 122 Desa Tahun 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	IDM
1	ARJAWINANGUN	Kebonturi	Maju
2		Tegalgubug	Maju
3	ASTANAJAPURA	Buntet	Berkembang
4		Mertapada Kulon	Berkembang
5		Mertapada Wetan	Maju
6	BABAKAN	Babakan	Berkembang
7		Sumber Lor	Berkembang
8	BEBER	Ciawigajah	Maju
9		Cikancas	Berkembang
10		Patapan	Berkembang
11	CILEDUG	Ciledug Lor	Maju
12		Ciledug Wetan	Berkembang

13		Damarguna	Berkembang
14		Tenjomaya	Berkembang
15	CIWARINGIN	Bringin	Berkembang
16		Gintungranjeng	Berkembang
17	DEPOK	Kasugengan Kidul	Berkembang
18		Kasugengan Lor	Berkembang
19		Keduanan	Berkembang
20		Tanjung Anom	Berkembang
21	DUKUPUNTANG	Bobos	Maju
22		Kedongdong Kidul	Berkembang
23		Sindangjawa	Maju
24	GEBANG	Gebang Kulon	Berkembang
25	GEGESIK	Gegesik Kidul	Maju
26		Jagapura Kidul	Tertinggal
27		Kedungdalem	Berkembang
28	GEMPOL	Gempol	Berkembang
29		Kempek	Maju
30		Palimanan Barat	Berkembang
31	GREGED	Durajaya	Berkembang
32		Greged	Berkembang
33		Jatipancur	Berkembang
34	GUNUNG JATI	Grogol	Berkembang
35		Jatimerta	Berkembang
36	JAMBLANG	Bakung Lor	Berkembang
37		Jamblang	Berkembang
38		Orimalang	Berkembang
39		Sitiwinangun	Berkembang
40		Wangunharja	Berkembang
41	KALIWEDI	Wargabinangun	Berkembang
42	KAPETAKAN	Bungko	Berkembang
43		Pegagan Kidul	Berkembang
44		Pegagan Lor	Maju
45	KARANGSEMBUNG	Karangmalang	Berkembang
46	KARANGWARENG	Karangasem	Berkembang
47		Karangwangi	Berkembang
48		Karangwareng	Berkembang
49		Sumurkondang	Berkembang
50	KEDAWUNG	Kalikoa	Berkembang
51		Kedawung	Berkembang
52		Kedungdawa	Berkembang
53		Pilangsari	Berkembang
54		Sutawinangun	Tertinggal
55	KLANGENAN	Danawinangun	Berkembang

56		Jemaras Lor	Berkembang
57		Pekantingan	Berkembang
58	LEMAHABANG	Asem	Berkembang
59		Leuwidingding	Berkembang
60		Picungpugur	Maju
61		Sindanglaut	Berkembang
62	LOSARI	Kalisari	Berkembang
63	MUNDU	Citemu	Berkembang
64		Mundu pesisir	Berkembang
65		Sinarancang	Berkembang
66	PABEDILAN	Babakan Losari	Berkembang
67		Pabedilan Wetan	Berkembang
68	PABUARAN	Hulubanteng	Berkembang
69		Jatirenggang	Berkembang
70		Pabuaran Kidul	Mandiri
71		Sukadana	Berkembang
72	PALIMANAN	Kepuh	Berkembang
73		Lungbenda	Berkembang
74		Palimanan Timur	Berkembang
75		Pegagan	Berkembang
76	PANGENAN	Astanamukti	Berkembang
77		Ender	Berkembang
78	PANGURAGAN	Kalianyar	Berkembang
79	PASALEMAN	Cigobang	Berkembang
80	PLERED	Cangkring	Berkembang
81		Gamel	Berkembang
82		Panembahan	Maju
83		Pangkalan	Berkembang
84		Sarabau	Berkembang
85		Tegalsari	Maju
86		Trusmi Wetan	Berkembang
87		Wotgali	Berkembang
88	PLUMBON	Bodesari	Berkembang
89		Gombang	Maju
90	SEDONG	Karangwuni	Berkembang
91		Panambangan	Berkembang
92		Panongan	Berkembang
93		Sedong Kidul	Berkembang
94		Windujaya	Berkembang
95	SUMBER	Sidawangi	Berkembang
96	SURANENGALA	Karangreja	Berkembang
97		Keraton	Berkembang
98		Muara	Berkembang

99		Suranenggala Lor	Berkembang
100	SUSUKAN	Kejiwan	Berkembang
101		Luwung Kencana	Berkembang
102		Susukan	Maju
103	SUSUKAN LEBAK	Ciawi Asih	Berkembang
104		Curug	Berkembang
105		Curug Wetan	Berkembang
106		Susukan Tonggoh	Berkembang
107		Wilulang	Berkembang
108	TALUN	Cirebon Girang	Berkembang
109		Kerandon	Berkembang
110		Kubang	Berkembang
111	TENGAH TANI	Battembat	Berkembang
112		Dawuan	Berkembang
113		Gesik	Berkembang
114		Kalibaru	Tertinggal
115		Kemlakagede	Tertinggal
116	WALED	Ambit	Berkembang
117		Gunungsari	Berkembang
118		Karangsari	Berkembang
119	WERU	Kertasari	Berkembang
120		Setu Kulon	Berkembang
121		Weru Kidul	Berkembang

9.8. PAGU DANA DESA PRODUK UNGGULAN DESA DIKELOLA BUMDes dan UMKM

Melalui Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 telah dilakukan penetapan rincian dana desa setiap desa dengan berbagai kriteria yang telah disepakati. Dua tabel di bawah ini adalah desa-desa yang mempunyai produk unggulan desa yang dikelola BUMDes dan UMKM yang dipercaya oleh beberapa kajian akan lebih meningkatkan kondisi kemajuan kesejahteraan suatu desa sebagai contoh Desa Ciawigajah dan Desa Cirebon Girang masing-masing mempunyai status Maju pada IDM 2019 padahal kedua desa tersebut cukup jauh

dari akses masyarakat luar Kabupaten Cirebon misal jalan tol. Bisa diartikan jika produk unggulan desa dikelola dengan lebih baik misalnya dengan BUMDes.

Tabel 9.12. Status IDM dan Pengelolaan dengan BUMDes

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI IDM 2019	STATUS IDM 2019	PAGU DANA DESA 2019	PRODUK UNGGULAN DESA BUMDES
SUSUKANLEBAK	SUSUKAN TONGGOH	0.6549	BERKEMBANG	962.721.000	Bumi Perkemahan
SUSUKANLEBAK	WILULANG	0.6924	BERKEMBANG	905.913.000	Gabah
SUSUKANLEBAK	CIAWIASIH	0.6343	BERKEMBANG	820.207.000	Air Baku
BEBER	CIAWIGAJAH	0.7503	MAJU	1.116.647.000	Air Cup "Ciawi Water"
TALUN	CIREBON GIRANG	0.7357	MAJU	1.233.946.000	Wisata Religi

Beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten Cirebon dilewati oleh jalan tol misal Kecamatan Gempol Desa Paliman Barat yang produk unggulan desa adalah mainan anak atau boneka dengan status IDM berkembang akan dapat meningkat statusnya jika dikelola dengan model BUMDes karena produknya dapat dijual di Rest Area.

Tabel 9.13. Status IDM dan Pengelolaan dengan UMKM

NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NILAI IDM 2019	STATUS IDM 2019	PAGU DANA DESA UMKM	PRODUK UNGGULAN DESA UMKM
WERU	KERTASARI	0.6987	BERKEMBANG	1.156.694.000	Net, Bola
KEDAWUNG	KEDUNGDAWA	0.6113	BERKEMBANG	1.058.300.000	Sampah
KALIWEDI	WARGABINANGUN	0.6927	BERKEMBANG	986.672.000	Rosela
GEMPOL	PALIMANAN BARAT	0.6144	BERKEMBANG	1.526.194.000	Mainan Anak/Bonea

9.9. PRODUK UNGGULAN DESA DAN AKSES PASAR

Berkembangnya infrastruktur nasional dengan banyak dibangunnya jalan tol akan memberikan dampak positif untuk perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lokal. Tabel di bawah ini adalah berbagai kecamatan yang dilewati infrastruktur nasional seperti jalan tol, jalur Kereta Api, dan jalur Pantura. Dari 40 kecamatan ada 24 kecamatan dimana kecamatannya dapat diakses melalui infrastruktur nasional sehingga pengembangan produk unggulan desa dapat lebih dikembangkan lagi.

Tabel 9.14. Kecamatan dan Infrastruktur Nasional

NO.	KECAMATAN	INFRASTRUKTUR
1.	Plumbon	Jalan toll
2.	Kedawung	Jalan toll
3.	Weru	Jalan toll dan jalan Pantura
4.	Klangenan	Jalan toll
5.	Lemahabang	Jalan toll dan jalan pantura
6.	Mundu	Jalan toll dan Jalan pantura
7.	Jamblang	Jalan toll dan jalan pantura
8.	Wareng	Jalan toll dan jalan kereta api
9.	Pangenan	Jalan toll, jalan kereta api, dan jalan pantura
10.	Astanajapura	Jalan toll, jalan kereta api, dan jalan pantura
11.	Pabedilan	Jalan kereta api
12.	Karangsembung	Jalan toll dan jalan kereta api
13.	Plered	Jalan toll dan jalan kereta api
14.	Gempol	Jalan toll
15.	Waled	Jalan kereta api
16.	Palimanan	Jalan toll
17.	Talun	Jalan toll
18.	Pabuaran	Jalan toll dan jalan kereta api
19.	Ciledug	Jalan toll dan jalan kereta api
20.	Gebang	Jalan pantur

NO.	KECAMATAN	INFRASTRUKTUR
21.	Ciwaringin	Jalan toll
22.	Babakan	Jalan toll dan jalan kereta api
23.	Losari	Jalan toll dan jalan kereta api
24.	Gunungjati	Jalan kereta api

BAB X

PENUTUP

10.1. KESIMPULAN

Kesimpulan kajian peningkatan kapasitas desa dan pengembangan produk unggulan setiap desa akan dibagi menjadi dua kelompok, pertama terkait peningkatan kapasitas desa dan kedua pengembangan produk unggulan desa.

Kelompok Pertama, responden untuk aparatur pemerintah desa 50% menjabat sebagai Sekretaris Desa dan 14% Kuwu, 5% Kasi Pemerintah, dan lainnya Kasi dan Kasi serta Staf Desa. Ada 59% yang mempunyai masa kerja antara 1 hingga 10 Tahun tetapi ada 1 orang yang mempunyai masa kerja 50 tahun.

1. Untuk sub-kelompok pengetahuan: 95% aparatur pemdes sangat mampu dan cukup mengetahui tahapan dan jadwal perencanaan pembangunan desa. 2% menyatakan aparatur pemdes menyatakan belum pernah mendapat pelatihan penyusunan pemb, desa dan masih ada (1%) aparatur pemdes menyatakan belum pernah mendapat pelatihan penyusunan pembangunan desa dari Camat/Tim pembina. 75% aparatur pemdes pernah mengikuti bursa inovasi desa. 37% aparatur pemdes menyatakan APBDes telah mengakomodir Proguldes namun 26% aparatur pemdes menyatakan merencanakan Proguldes masuk dalam APBDes tahun anggaran depan. 30% aparatur pemdes menyatakan Proguldes dimasukkan dalam APBDes masih sebatas wacana.

2. Ada 47% responden yang menyatakan telah melakukan pelatihan pengembangan produksi, 13% melakukan bantuan permodalan, dan 9% telah melakukan bantuan pemasaran dan promosi di desa-desa.
3. Secara sikap, 99% responden menyatakan sangat dan cukup penting perencanaan pembangunan desa dan sangat dan cukup didukung oleh masyarakat. Hal ini terbukti tingkat kehadiran saat Musrenbangdes sebesar 91%. Namun hanya 20% responden yang menyatakan sangat mengakomodir hasil Musrenbangdes dalam RKPDesa yang terakomodir menjadi Proguldes. Hanya 4% responden yang belum pernah dapat pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan desa.
4. Evaluasi tingkat perkembangan desa. Ada 84% responden mengetahui arti kemajuan dan kemandirian desa melalui skor IDM (Indeks Desa Mandiri) namun 23% responden menyatakan akan mengadakan pelatihan evaluasi tingkat perkembangan desa pada tahun depan. Secara sikap, secara dominan (85%) responden sangat mengakomodir skor IDM dalam merencanakan pembangunan desa dan 91% responden menggunakan alat evaluasi untuk meningkatkan perkembangan perencanaan pembangunan desa. Ada 14% responden yang tidak mampu menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah desa karena 85% pernah mengikuti pelatihan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Kelompok kedua, secara kelompok produk unggulan desa ada 59% termasuk dalam sektor "Home Industry", 21% bergerak di sektor "Perdagangan", Sektor Pertanian 10% dan sektor "Peternakan" ada 3%, sektor "Jasa, 6%" bahkan lebih tinggi dari peternakan. Produk Unggulan Desa 60% dikelola secara "Perorangan" bahkan BUMDes dan UMKM jika digabung hanya ada 7%

responden yang angkanya lebih kecil dibanding dikelola secara kelompok (8%). Lebih dari separuh (55%) responden menjalankan bisnis antara 1 sampai 10 tahun.

5. 43% responden jenis produk unggulan desanya adalah “makanan”, diikuti “Kerajinan” sebesar 18%, Pertanian dan Peternakan jika digabung (13%) atau sama besa dengan “Produk untuk Bisnis Lain” 13%.
6. Dengan menggunakan analisis produk unggulan desa pendekatan inkubator, diperoleh kesimpulan sebagai berikut; Pada Kelompok indikator “Produk dapat dikembangkan oleh Masyarakat” berdasarkan data yang masuk sejumlah 65% dari 120 responden, terinformasikan bahwa 43% akan memperluas tempat usaha, 6% akan membuka cabang, 17% ingin meningkatkan keahlian, dan 2% menjawab lainnya. Artinya para pelaku usaha di desa-desa lokasi studi mempunyai keyakinan produk yang digeluti mereka mempunyai potensi besar untuk dikembangkan hal ini didukung oleh ada 57% responden yang meyakini produk dapat dikembangkan oleh masyarakat. Sedangkan pada kelompok indikator “Bernilai jual dan berdaya saing di pasar lokal dan regional” terinformasikan 43% responden menjalin kerjasama dengan tenaga terampil namun juga sebanyak 36% responden tidak menjalin kerjasama dengan tenaga terampil. Masih pada kelompok indikator ini, ada 64% responden yang menjalan bisnis tanpa menggunakan internet. Artinya pelaku-pelaku bisnis di desa perlu terus didorong untuk menggunakan teknologi agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan merekrut tenaga terampil agar produknya mempunyai daya saing lebih tinggi karena 86% responden menyatakan produk yang dihasilkan ramah lingkungan dan 72% responden menyatakan bahan baku termasuk ramah lingkungan.

7. Pada kelompok indikator “Produk dapat dikembangkan secara massif” hasil survey memperlihatkan 74% responden menyatakan adanya kendala dalam mengembangkan produk secara besar-besaran atau massif. Sementara itu menurut responden 62% menyatakan belum pernah mendapatkan pelatihan bagaimana menghasilkan produk secara massif. Pada kelompok indikator “Produk ramah lingkungan” terinformasikan 55% responden menyatakan “Tidak” dan “Tidak Tahu” produk yang dihasilkan mempunyai sertifikat ramah lingkungan dan 58% responden menyatakan belum pernah mendapat pelatihan tentang produk ramah lingkungan.
8. Keinginan adanya bantuan modal muncul di dua kelompok indikator “Produk dapat dikembangkan masyarakat” dan “produk dapat dikembangkan secara massif”. Untuk indikator pertama ada 17% responden menyatakan kurang modal dan menjadi 32% responden yang menyatakan kurang modal jika produknya dikembangkan secara besar-besaran. Hal ini didukung dengan hasil survey, jika akan mengembangkan produk secara besar-besaran pelaku bisnis lebih memilih ke Bank (27%) dibanding meminjam ke BUMDes (4%).
9. Melalui analisis produk unggulan desa pendekatan Klaster diperoleh kesimpulan sebagai berikut, sektor-sektor produk unggulan desa yang ada di 120 desa pada tahun 2019, masih 14% masih berada pada Klaster Sentra atau Klaster yang sangat tergantung oleh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Tradisional dan sangat tergantung dengan Pemerintah Daerah. Namun sudah ada 82% responden yang masuk dalam Klaster Pemula karena telah mulai melakukan kerjasama antar kegiatan.
10. Dengan menggunakan analisis produk unggulan desa pendekatan OVOP, dapat dikembangkan Pusat Oleh-oleh pada Desa Wisata dan Pusat Furniture di Rest

Area Jalan Toll yang melintas Kabupaten Cirebon sehingga berbagai produk unggulan desa diberbagai desa dapat dipasarkan secara besar-besaran atau masif.

11. Melalui analisis produk unggulan desa dengan pendekatan Model Kompetensi Inti ditemukan bahwa 63% responden menyatakan produk dihasilkan secara tradisional, 18% menggunakan kombinasi alat manual dan teknologi dan hanya 1% menggunakan teknologi tinggi.
12. Ada dua contoh desa berklasifikasi maju IDM yang dikelola dengan BUMDes dan potensial menjadi Desa Mandiri jika dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak luar.
13. Untuk menghasilkan IKS (Indeks Ketahanan Sosial) pada pengukuran IDM terdapat tiga kelompok skor yang dapat mendorong sebuah desa dapat meningkat klasifikasi pada era Digital Ekonomi saat ini yaitu Skor Sinyal di desa, Skor Internet fasilitas internet di kantor desa, dan Skor akses internet warga di desa.
14. Secara geografis desa-desa di Kabupaten Cirebon teruntungkan dengan adanya infrastruktur nasional pengembangan jalan toll, jalan pantura, dan jalan kereta api bahkan bandara. Dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Cirebon agar produk unggulan desa dapat ditampilkan di *show-room* milik Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui SKPD-SKPD terkait seperti Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Industri, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pertanian untuk bisa bekerjasama dengan Pengelola Rest-Area Jalan Toll, restorasi PT KAI, berbagai Supermarket disepanjang jalan pantura, dan Bandara sangat diperlukan agar Produk Unggulan Desa di Kabupaten Cirebon dapat lebih mensejahterakan masyarakat secara luas.

10.2. REKOMENDASI

1. Melalui Dinas Pemerintahan Desa atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, proses pemilihan kuwu atau aparaturnya pemerintah desa agar dihasilkan aparaturnya yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan pengabdian tinggi untuk Pemerintahan Kabupaten Cirebon agar desa-desa meningkat klasifikasinya sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun dan membawa kesejahteraan masyarakat secara luas.
2. Hampir separuh produk unggulan desa di Kabupaten Cirebon adalah makanan dan diikuti kerajinan. Namun belum ada yang dikelola dengan BUMDes atau UMKM. Pemerintahan Kabupaten Cirebon melalui Dinas Koperasi dan UKM sangat perlu mendorong para pengelola perorangan untuk berkembang melalui BUMDes.
3. SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mempunyai anggaran cukup besar untuk pelatihan sebaiknya terus mengadakan pelatihan terkait produk unggulan desa agar dapat berkembang secara massif karena 62% responden menyatakan belum pernah mendapat pelatihan pengembangan produk secara besar-besaran dan 90% produk unggulan desa hanya dipasarkan di pasar desa, kecamatan, dan kabupaten.
4. Tahap berikutnya ketika desa telah mempunyai produk unggulan desa agar menjadi berkembang secara massif diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga seperti tertuang dalam regulasi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Penanaman Modal di Daerah. Peran Dinas Penanaman Modal Daerah sangat diperlukan untuk lebih ramah peraturan terhadap investor-investor terkait produk unggulan desa.

5. Kabupaten Cirebon telah berhasil melahirkan Klasifikasi Desa Mandiri sebanyak 2 desa pada Tahun Anggaran 2019 yaitu Desa Jungjang dengan Nilai IDM 0,8194 dan Desa Cilengkrang dengan Nilai IDM 0,819. Melalui Badan Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah keberhasilan kedua desa tersebut perlu diapresiasi dalam bentuk dukungan replikasi keberhasilan untuk diterapkan di beberapa desa potensial agar kedepannya semakin banyak desa meningkat klasifikasinya.
6. Kabupaten Cirebon yang mempunyai banyak produk bernilai jual tinggi sehingga sangat perlu mengembangkan pemasaran melalui *internet* atau digitalisasi pemasaran, karena hasil survey memperlihatkan tidak ada satupun wirausaha produk unggulan desa yang telah memanfaatkan internet untuk memasarkan produk-produk unggulan desa. Padahal pasar global saat ini menyukai produk ramah lingkungan dimana berdasarkan hasil survey, 86% responden menyatakan produknya ramah lingkungan walaupun 58% responden menyatakan belum pernah mendapat pelatihan pengelolaan produk ramah lingkungan. Melalui Dinas Perdagangan dan Industri dan Dinas Komunikasi dan Informatika menggandeng kerjasama dengan berbagai penyedia *market-place* seperti Bukalapak atau Tokopedia untuk dapat memasarkan produk unggulan desa di Kabupaten Cirebon.
7. Camat dan Kuwu sangat disarankan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga agar produk unggulan desa dapat terus berkembang untuk mensejahterakan rakyat karena berdasarkan hasil survey 74% responden

menyatakan produk yang dihasilkan tidak mendapat bantuan dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan 60% responden menyatakan tidak melakukan kerjasama pengembangan produk dengan pihak ketiga.

8. Berkembangnya infrastruktur nasional di Kabupaten Cirebon dapat dimanfaatkan secara positif oleh para produsen produk unggulan desa untuk memasarkan produknya dengan membuka *show-room* di Rest -Area jalan toll, kerjasama sebagai pemasok restorasi PT KAI, bekerjasama dengan berbagai supermarket di jalan pantura untuk menampilkan produk unggulan desa di ruang supermarket, dan membuka *show-room* di Bandara Cakrabhuwana. Para produsen produk unggulan desa tentu saja tidak punya kemampuan untuk mengakses kerjasama-kerjasama itu, disinilah peran Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan produk unggulan desa melalui kerjasama lintas SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo 2011, Pembiayaan pembangunan daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta ISBN: 978-979-756-702-6

Andriati, Ratna Dewi, 2018. Penyiapan Kawasan Transmigrasi Berbasis Pengembangan Ekonomi Lokal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 28 Febuari 2018.

Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReD Post Press.hlm.32.

Arsyad, Lincolin, 2010, Ekonomi Pembangunan, STIM YKPN Yogyakarta

Azhar, Andi. 2015. "Euforia undang-undang desa: peluang atau ancaman?" Kompasiana. 2015.

Basri, C. 2014. "Desa belum siap kelola dana desa yang besar." Kementrian Keuangan. 2014.

Brodjonegoro, B.P.S. 2014. "Pemerintah tambah alokasi dana desa dalam APBN-P 2015." Kementrian Keuangan. 2014.

Boediono, 2013. Ekonomi Makro, BPFE UGM, Yogyakarta

Darmawansyah. (2003). Pengembangan Komoditi Unggulan Sebagai Basis Ekonomi Daerah. Bogor: Tesis S-2 Program Pasca Sarjana IPB.

Eko, Sutoro. 2014a. Desa membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

———. 2014b. Kedudukan dan kewenangan desa. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).

Faozi, C. 2015a. "Harap-harap cemas undang-undang desa." Kompasiana. 2015.

———. 2015b. "Undang-undang desa, apakah mimpi buruk bagi aparaturnya pemerintah desa?" Kompasiana. 2015.

Fakrullah, Zudan, dkk. 2004. Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan. Jakarta. CV. Cipruy.hlm.7

Furqani, Astri. 2010. "Pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good governance (studi pada pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)." UPN Jawa Timur.

Gustiawan. 2013. "Pengolahan data kependudukan: Menghasilkan laporan data penduduk, masuk, meninggal, lahir, pindah dan laporan umur." 2013.

Glasson, John. 1978. An introduction to regional planning : concepts, theory and practice. London: Hutchinson.

Hoesada, J. 2014. Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), KSAP. 2014.

Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan. 4ed. Salemba Empat.

Hayami dan Kikuchi. 1987. Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kelembagaan di Asia, Editor: Gunawan Wiradi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hanif, Nurcholis. 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta Penerbit Erlangga.hlm.82.

Ismadani, 2016. PNPM buka pendamping desa. Kompasiana 2016.

Iveta, Gabcanova. "Human Resources Key Performance Indicators". Journal of Competitiveness Vol. 4 Issue 1 (Maret 2012), pp. 117-128

James A.F. ,2006. Management. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc.hlm.43.

Juliantara, Dadang .2003. Pembahuruan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah. Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama.hlm.116.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013Medan: Bitra Indonesia,

Kuncoro, Mudrajad. 2002. Analisis Spasial dan Regional (Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia). Yogyakarta : AMP YKPN

Moeheriono, 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Mubyarto, 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian, Jakarta : Edisi Ke-tiga, LP3S.

Munir, R., & Fitanto, B. 2005. Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif: Masalah Kebijakan dan Panduan Pelaksanaan Kegiatan, Jakarta. Local Governance Support Program (LGSP)

Moon, H.C., & Cho, D.S. (2000). National Competitiveness: A Nine-Factor Approach and Its Empirical Application. Journal of International Business And Economy. Vol. 1(1): 17- 38.

Nadvi, K., & Barrientos, S. (2004). Industrial Clusters and poverty reduction, towards a methodology for poverty and social impact assessment of cluster development initiatives. UNIDO.

Ndraha, Taliziduhu. 1997. Peranan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Desa. Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta. Hlm. 12.

Pakpahan 1990 dalam Nasution 2002. Revleksi Diversikasi Dalam Teori Ekonomi dalam Suryana (penyunting) Diversifikasi Pertanian Dalam prospek mempercepat laju pembangunan nasional.Pustaka sinar harapan. Jakarta

Porter, M.E. 1990. The Competitive Advantage of Nation. Boston : Harvard Bussines Review

Porter, M.E. 1990. From Competitive Advantage to Corporate Strategy. Boston : Harvard Bussines Review

Porter, M.E. 1986. Competition in Global Industries. Boston : Harvard Bussines School Press

Potworowski, J.A. (2002). Creating and Growing Technology Clusters. Canada: NRC.

R. Bintoro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

Richardson, Harry W. 1991. Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional (Terjemahan Paul Sitohang) LPEEU, Jakarta.

Risadi, Aris Ahmad. 2015. Undang-Undang Desa: Harapan baru masyarakat desa. Kompasiana. 2015.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Citra Utama. Hlm 24.

Sudarsono H.2003. Krisis di Mata Para Presiden: Kaidah Berpikir Sistem Para Pemimpin Bangsa. Yogyakarta: Mata Bangsa

Sadono Sukirno, 2010. Mikroekonomi Teori Pengantar, Rajawali Press
ISBN: 979-421-412-4

Sumarti, T. dkk. (2008). Model Pemberdayaan Petani dalam Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera (Laporan Akhir). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, IPB. Bogor.

Soemarno, 2013. Model Rancang Bangun Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (Spaku) Pepaya. Bahan kajian MK. Landuse Planning & Land Development, PDIP. 71 hlm

Tarigan, Robinson. 2005. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

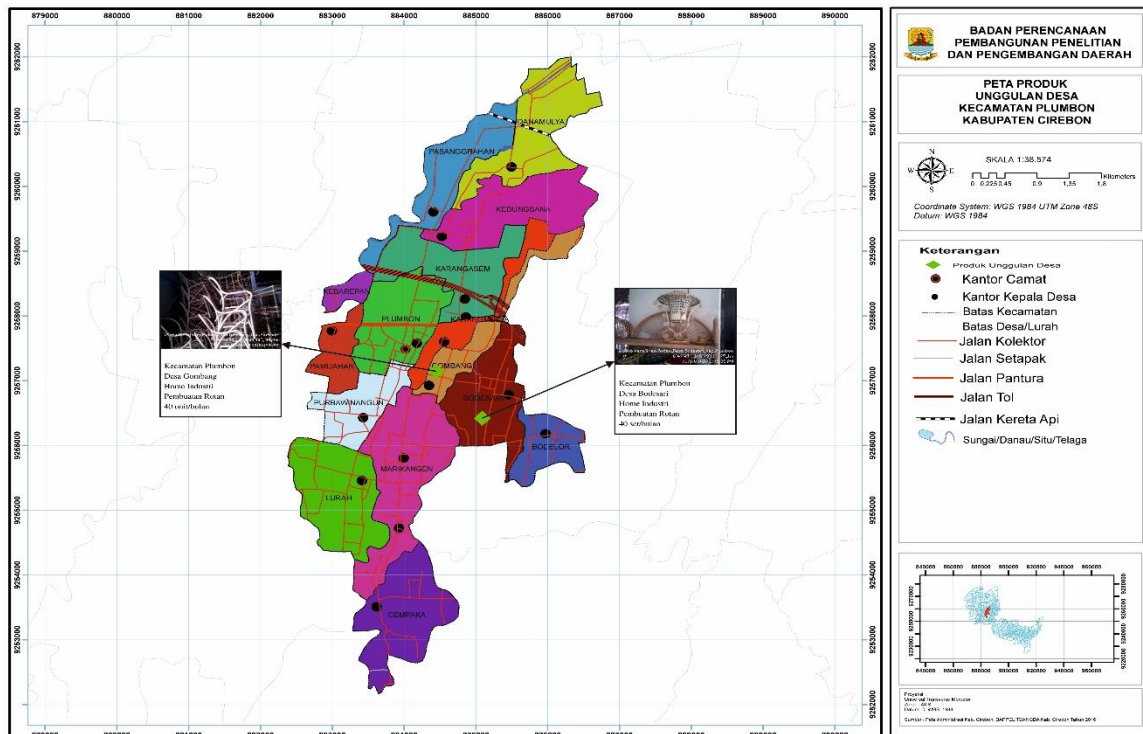
Todaro, Michael P. & Stephen C. Smith, 2008, Pembangunan Ekonomi (Jilid 1) Edisi Kesembilan, 648 halaman, Penerbit Erlangga

Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 3.

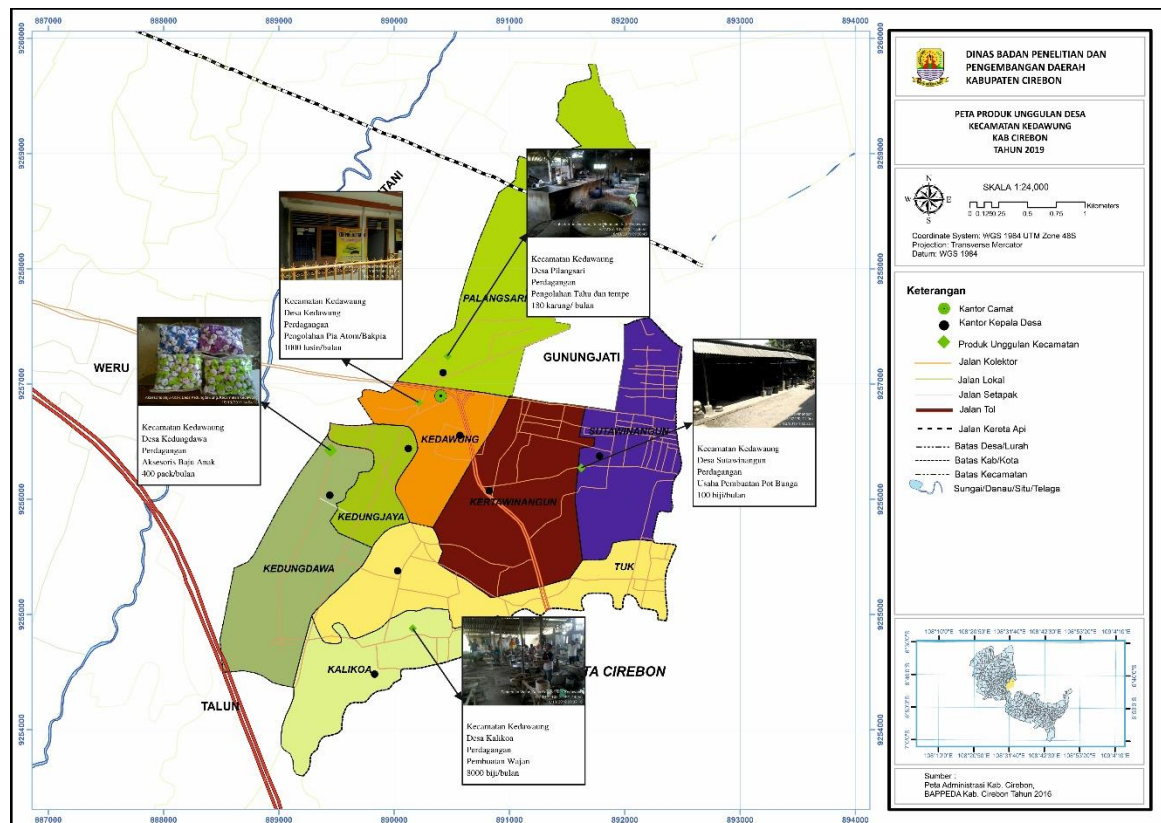
LAMPIRAN

1. ALBUM PETA POTENSI PRODUK UNGGULAN DESA

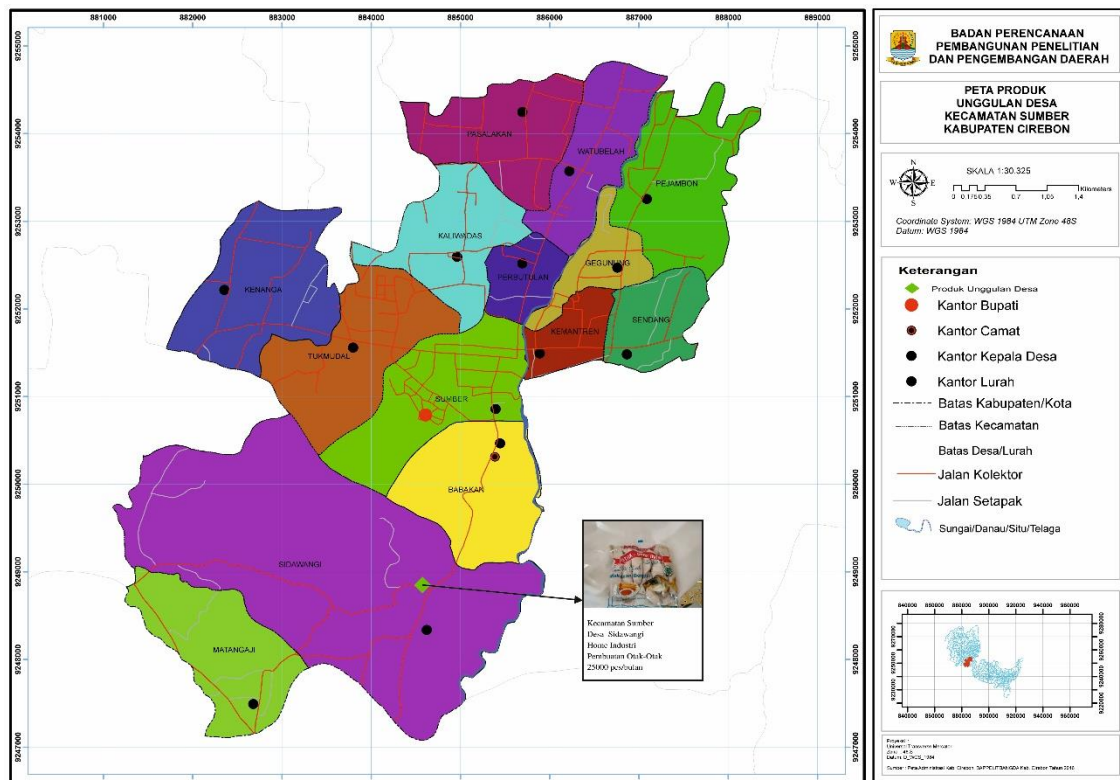
1. Kecamatan Plumbon



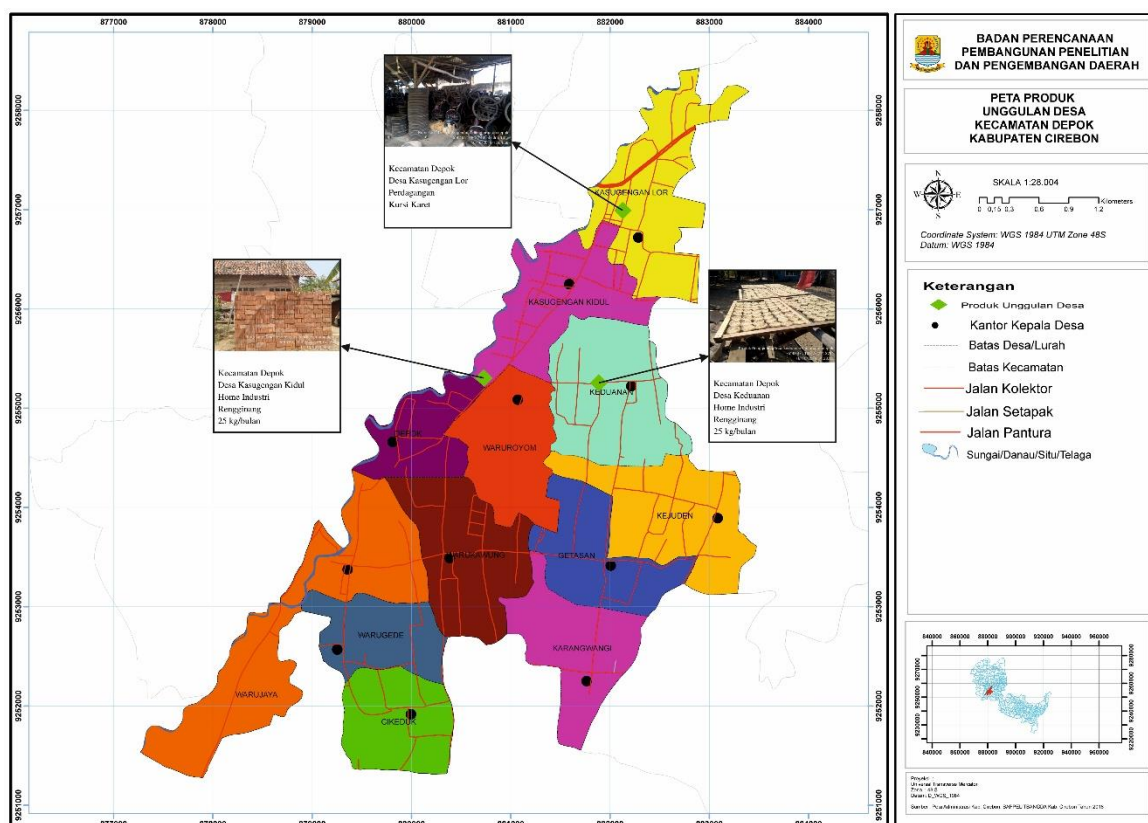
2. Kecamatan Kedawung



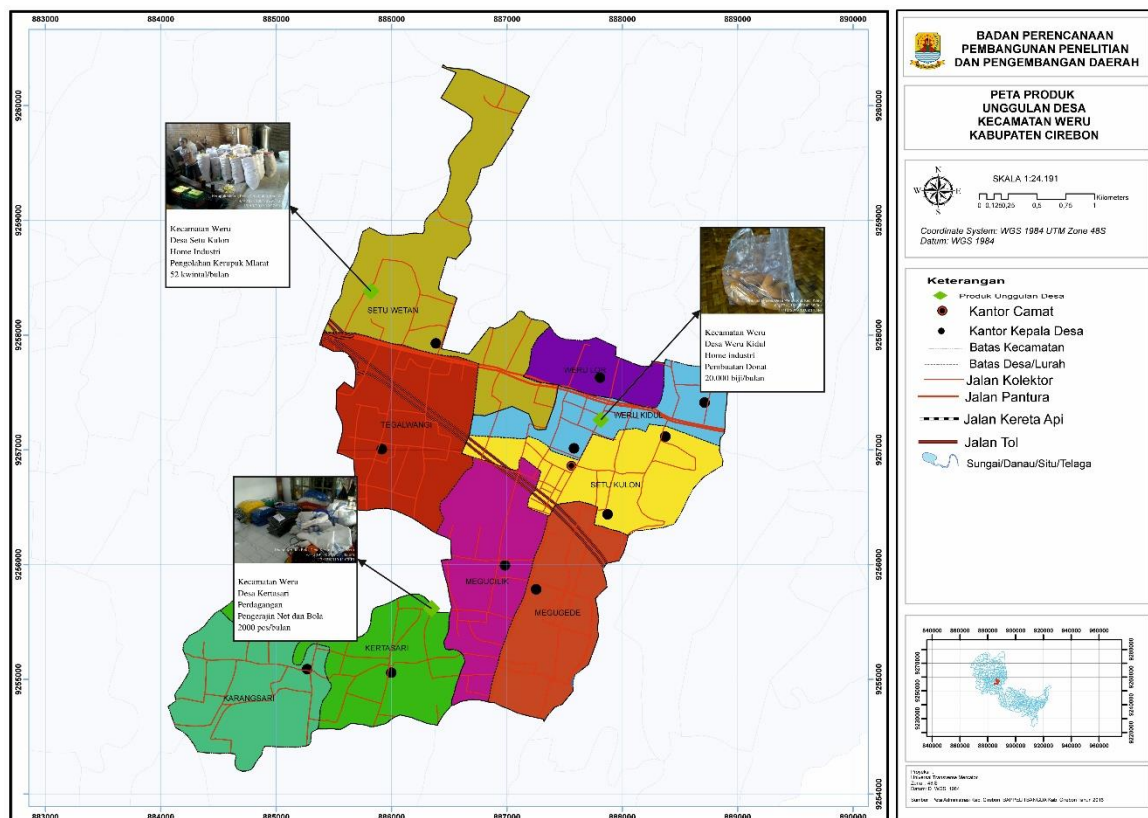
3. Kecamatan Sumber



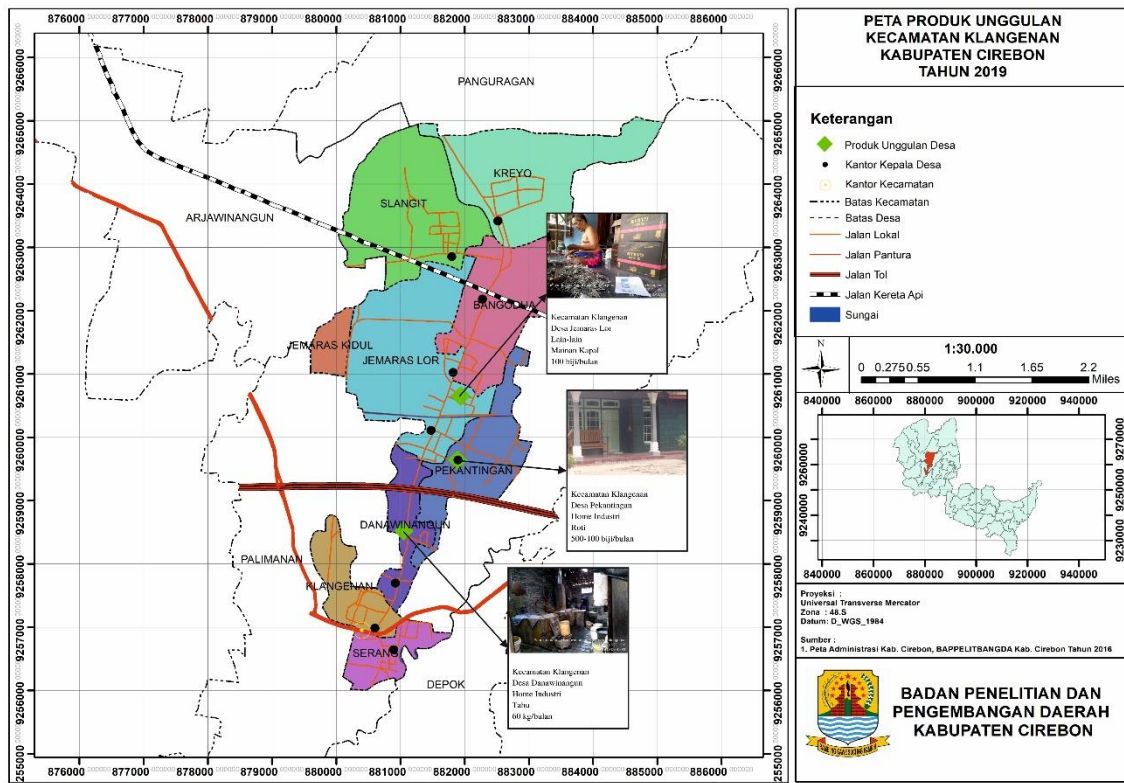
4. Kecamatan Depok



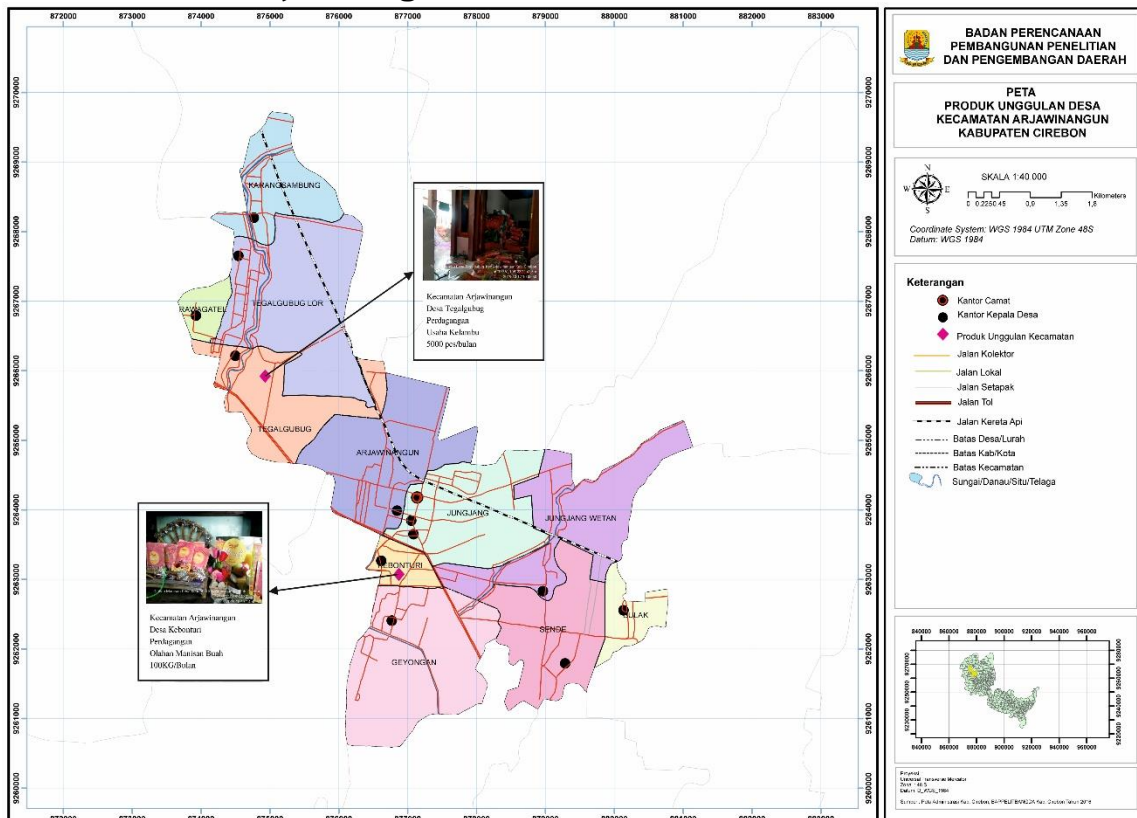
5. Kecamatan Weru



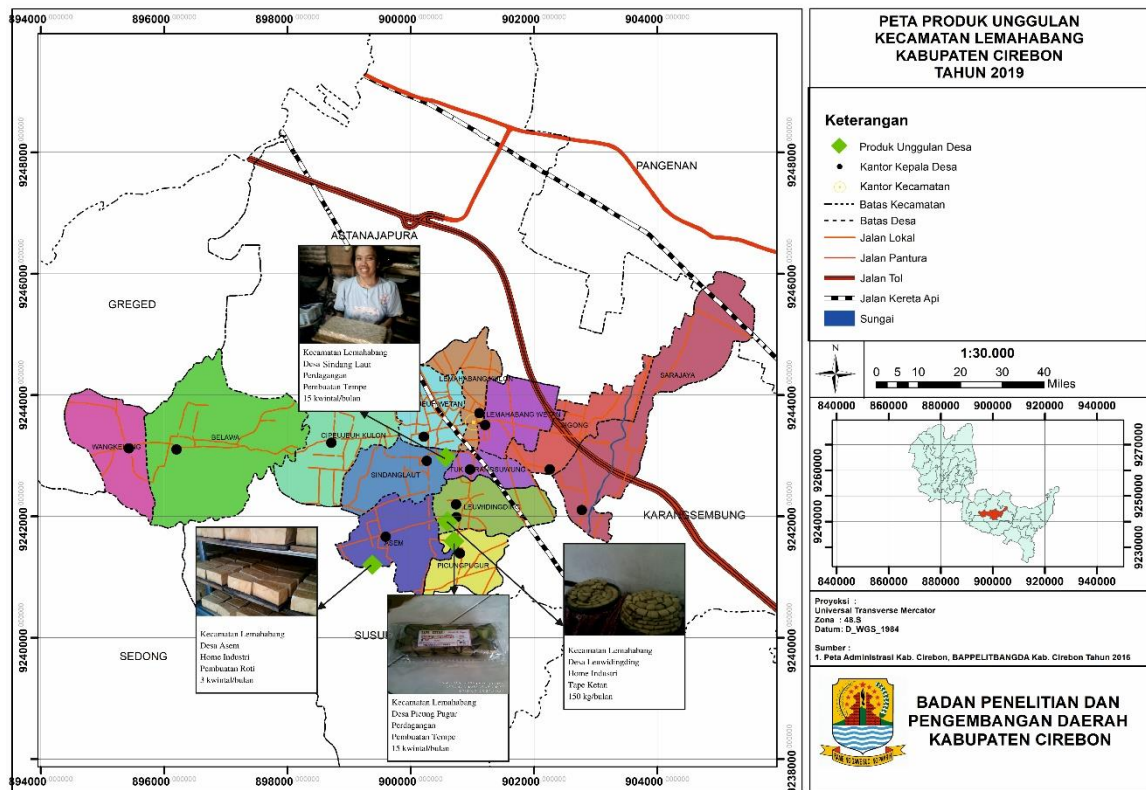
6. Kecamatan Klagenan



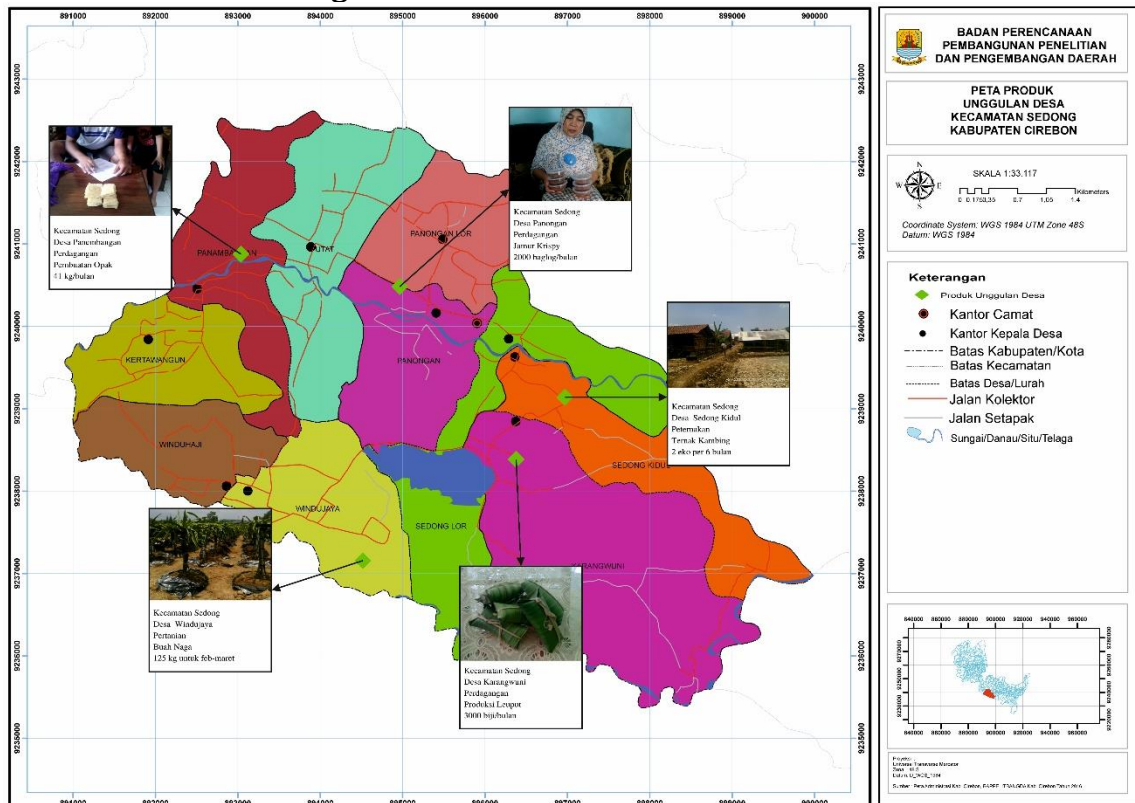
7. Kecamatan Arjawinangun



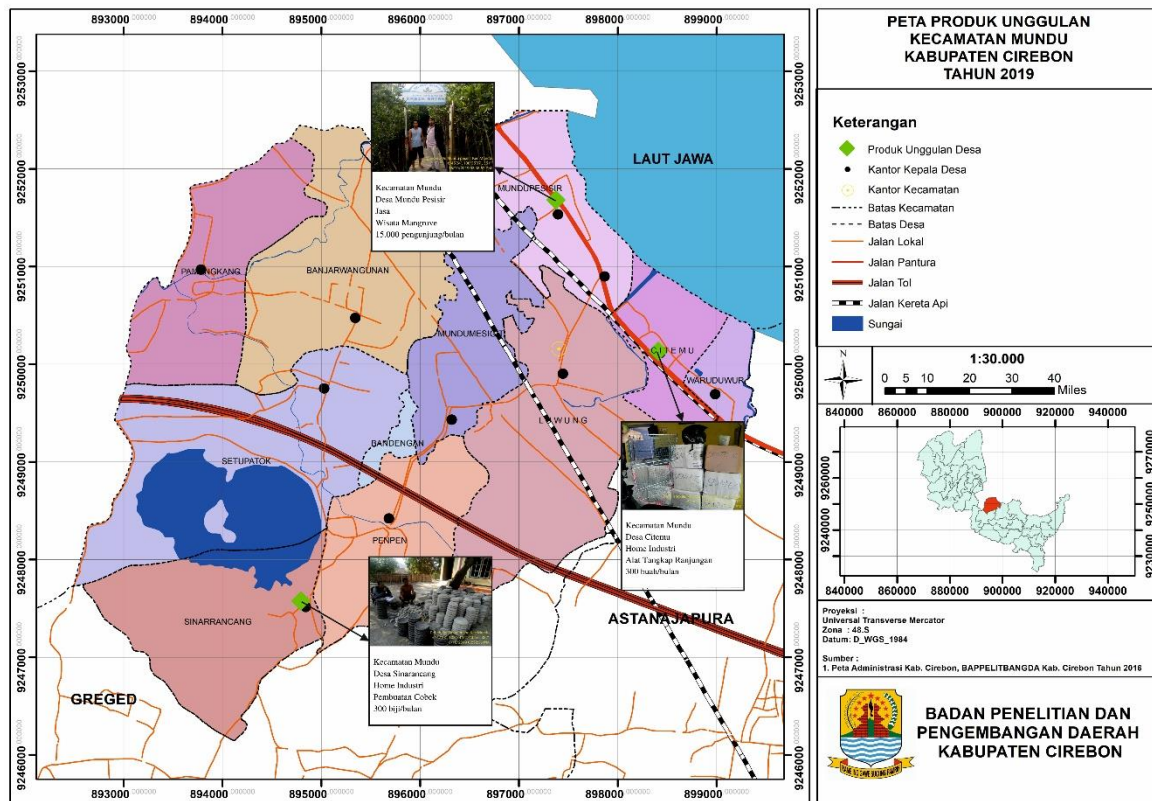
8. Kecamatan Lemahabang



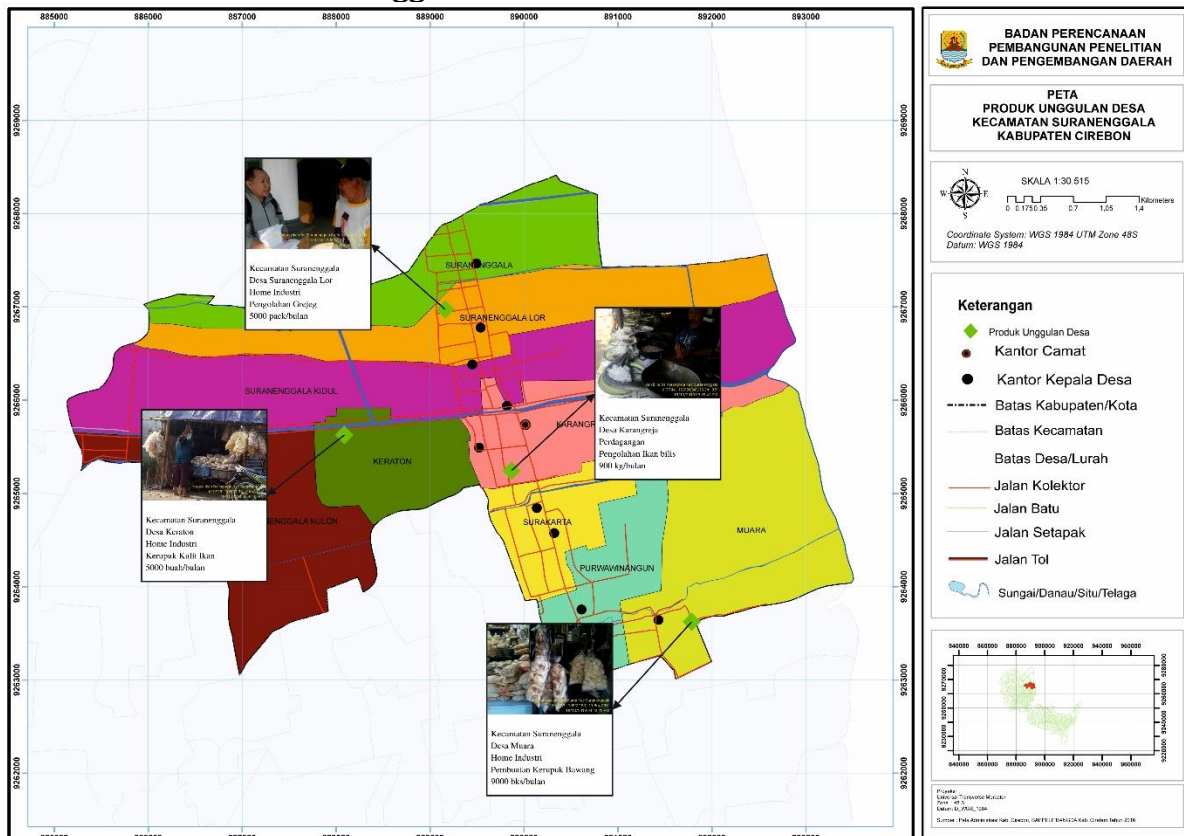
9. Kecamatan Sedong



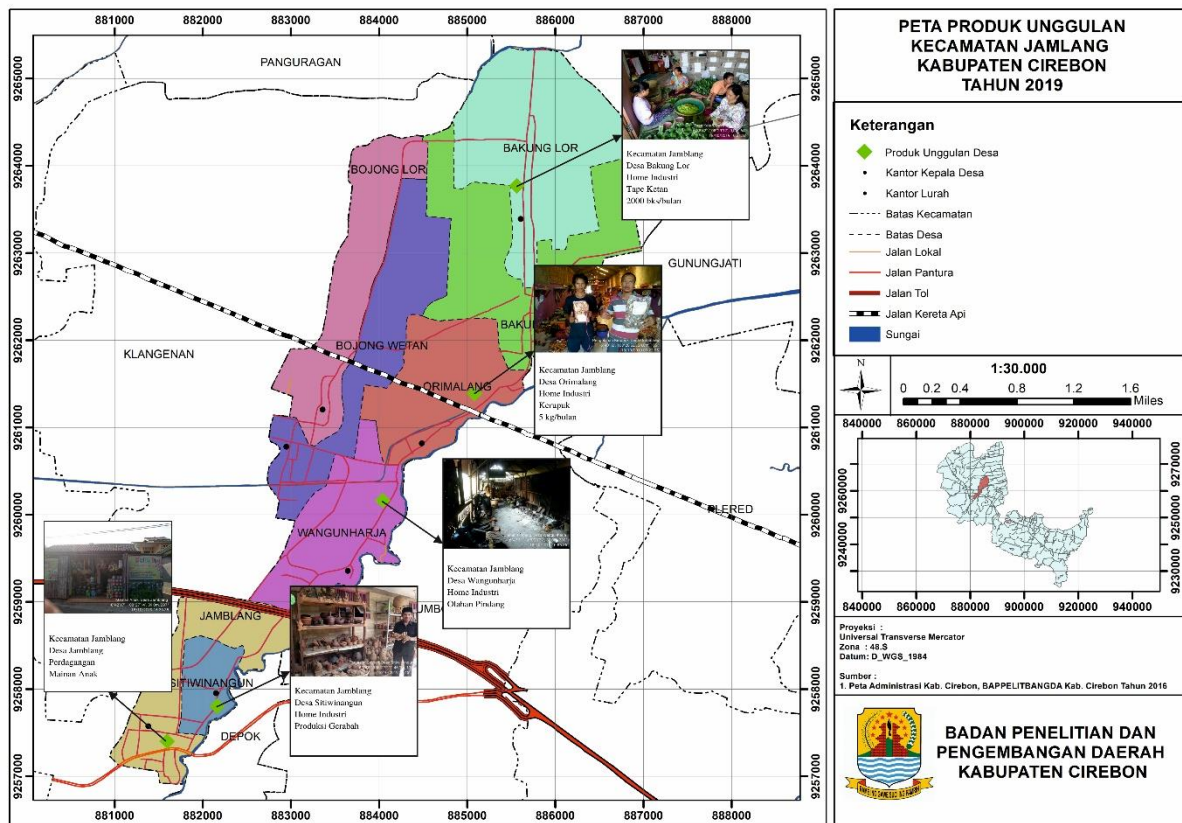
10. Kecamatan Mundu



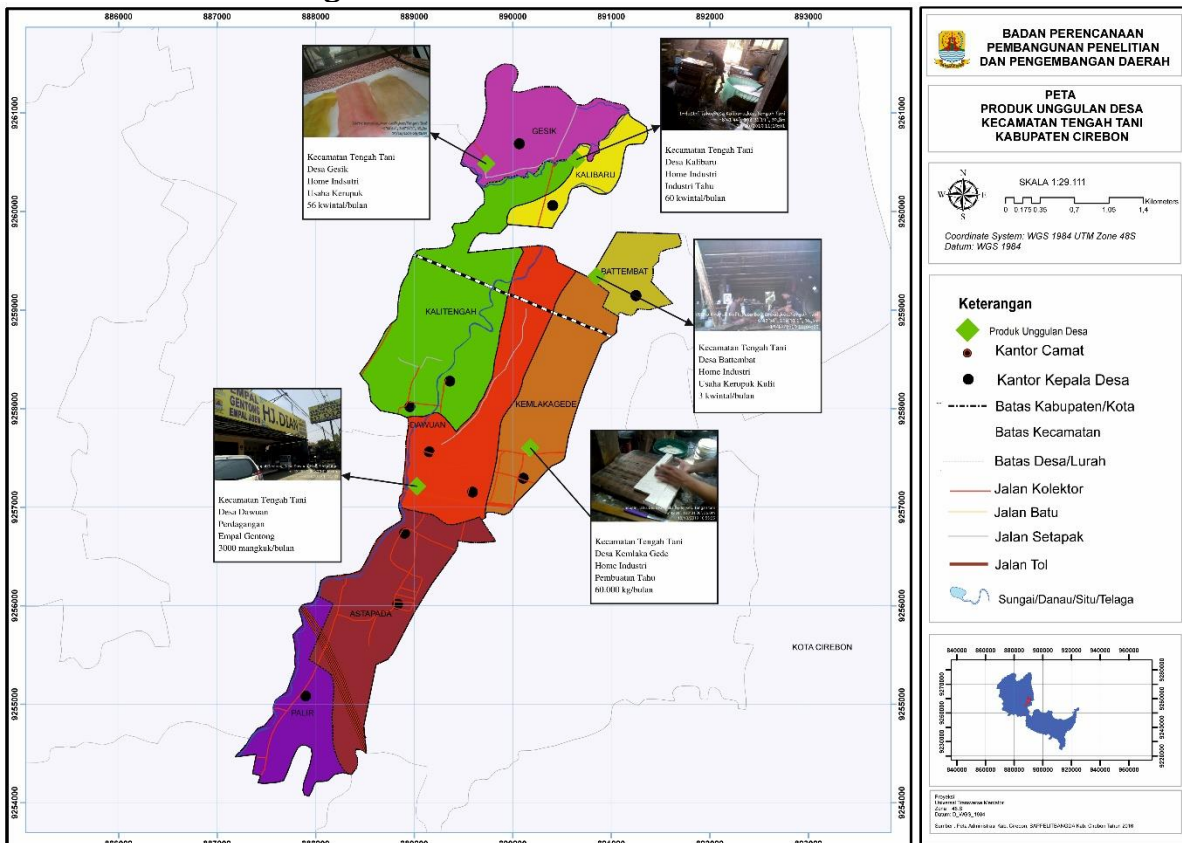
11. Kecamatan Suranenggala



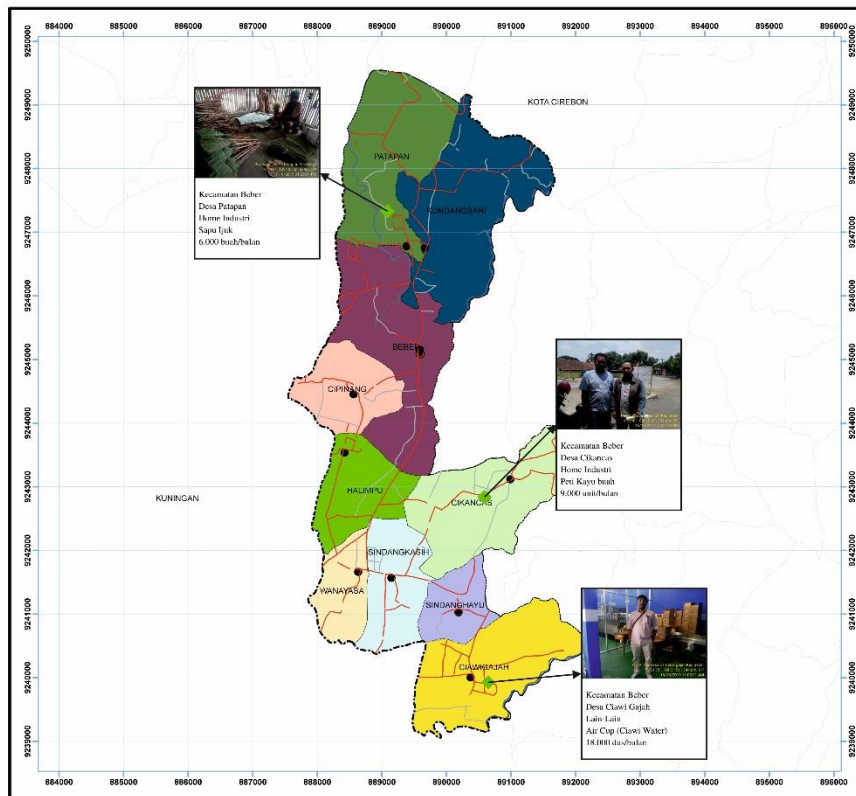
12. Kecamatan Jamblang



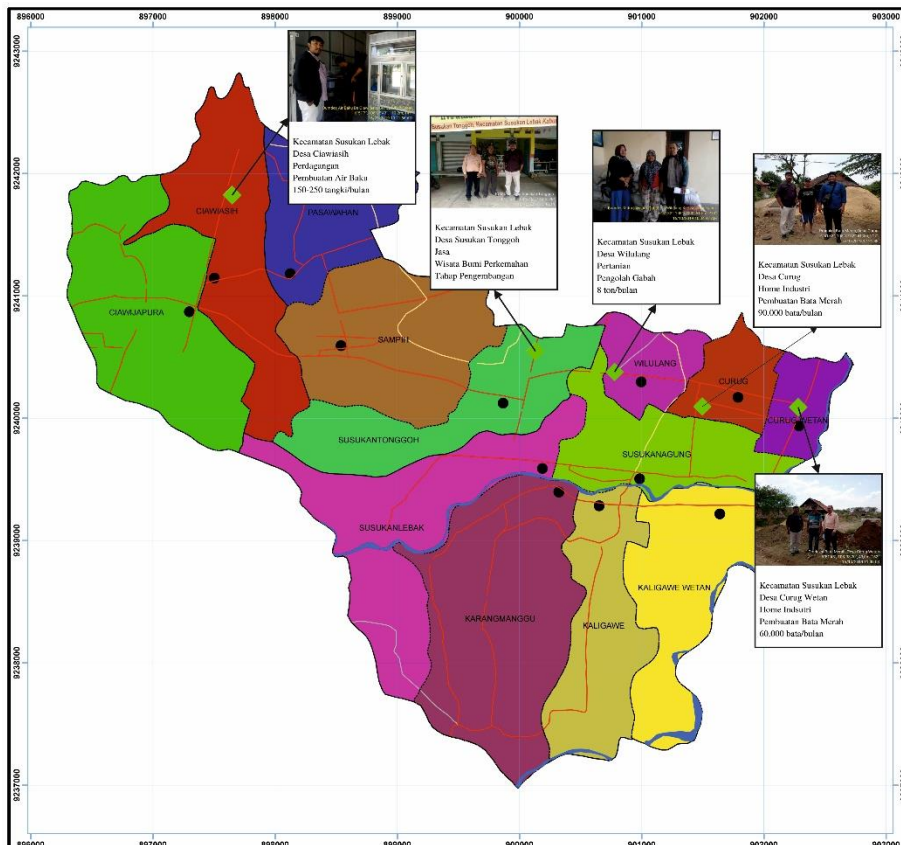
13. Kecamatan Tengah Tani



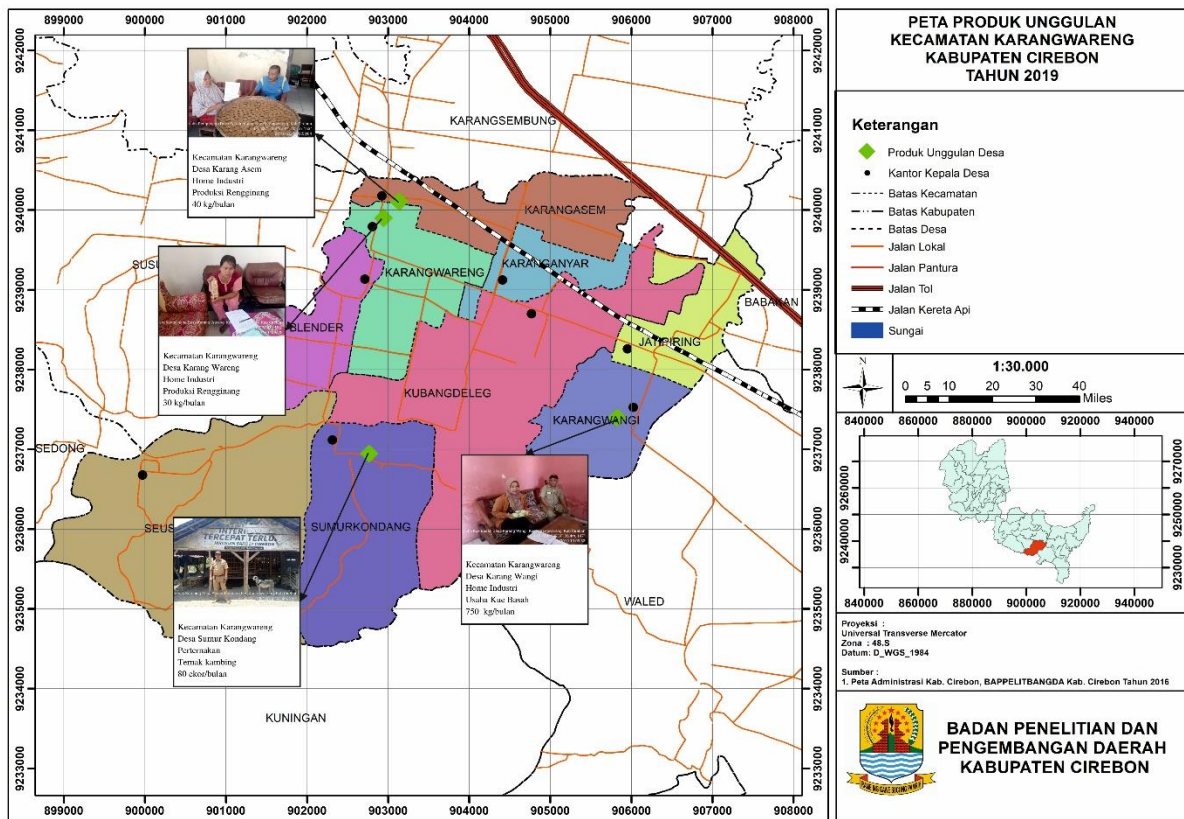
14. Kecamatan Beber



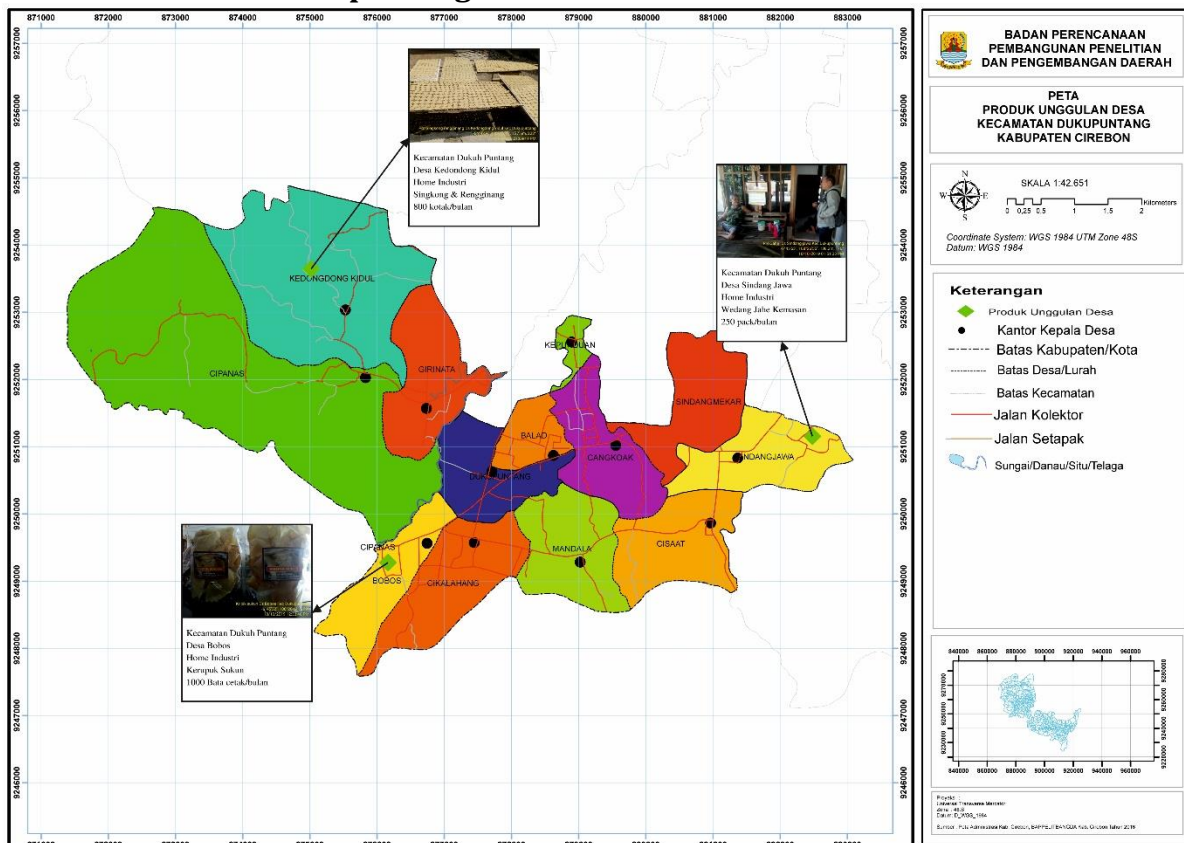
15. Kecamatan Susukan Lebak



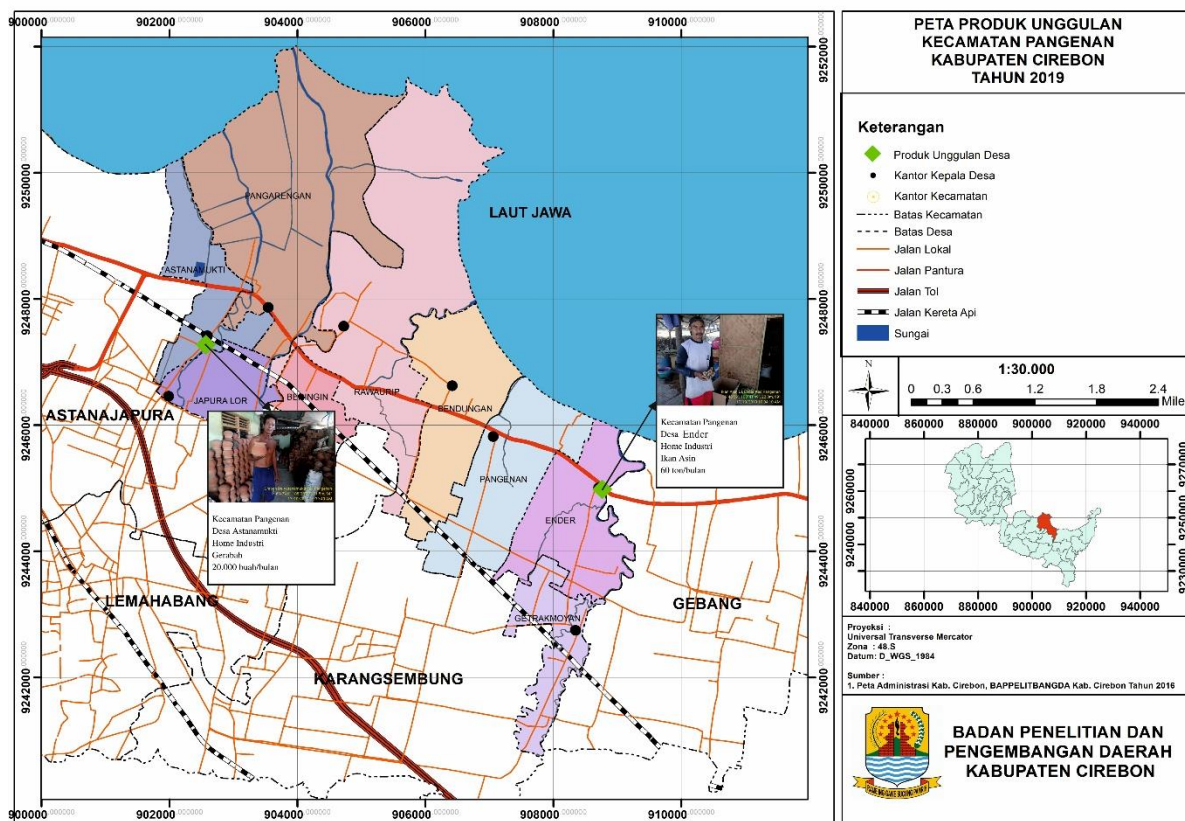
16. Kecamatan Karangwareng



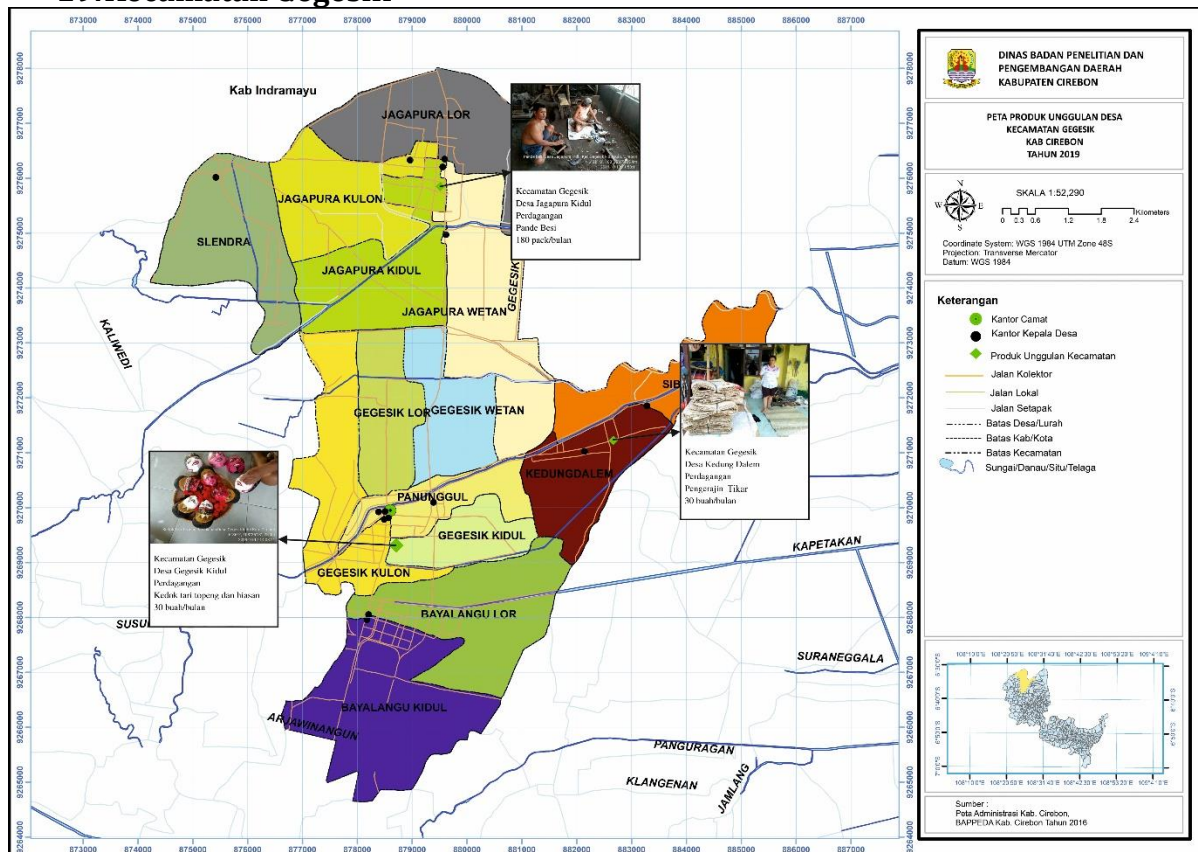
17. Kecamatan Dukupuntang



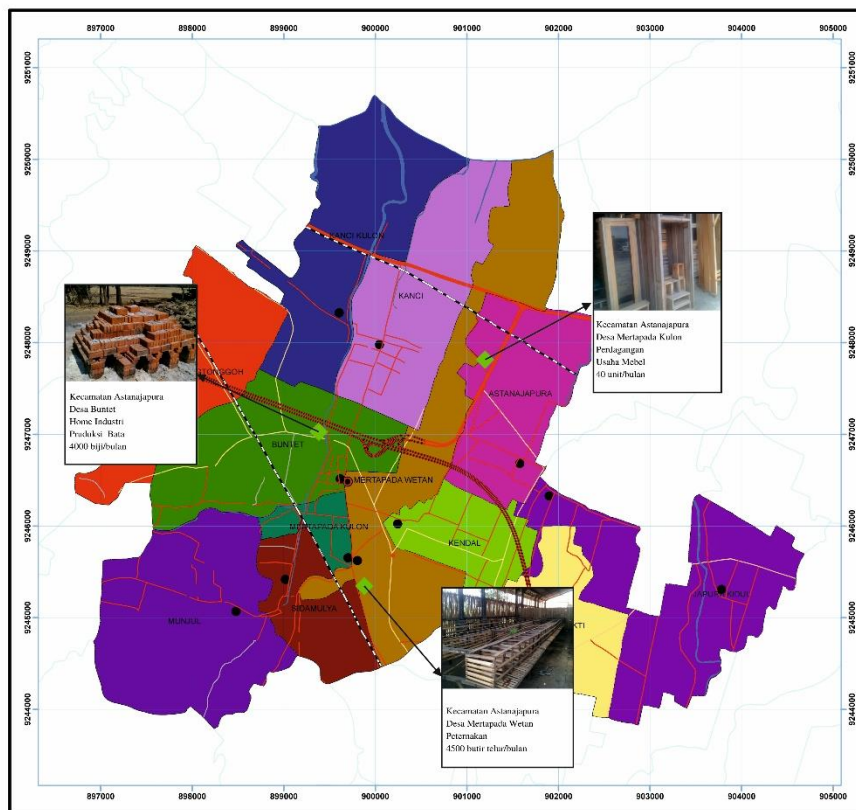
18. Kecamatan Pangenan



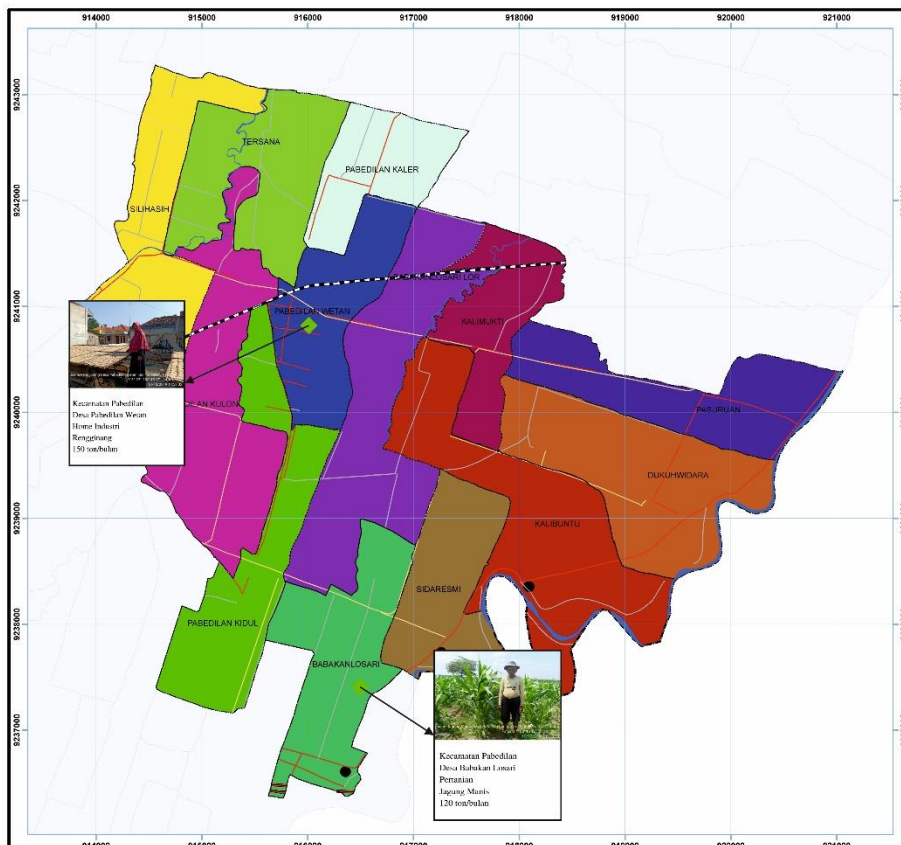
19. Kecamatan Gegesik



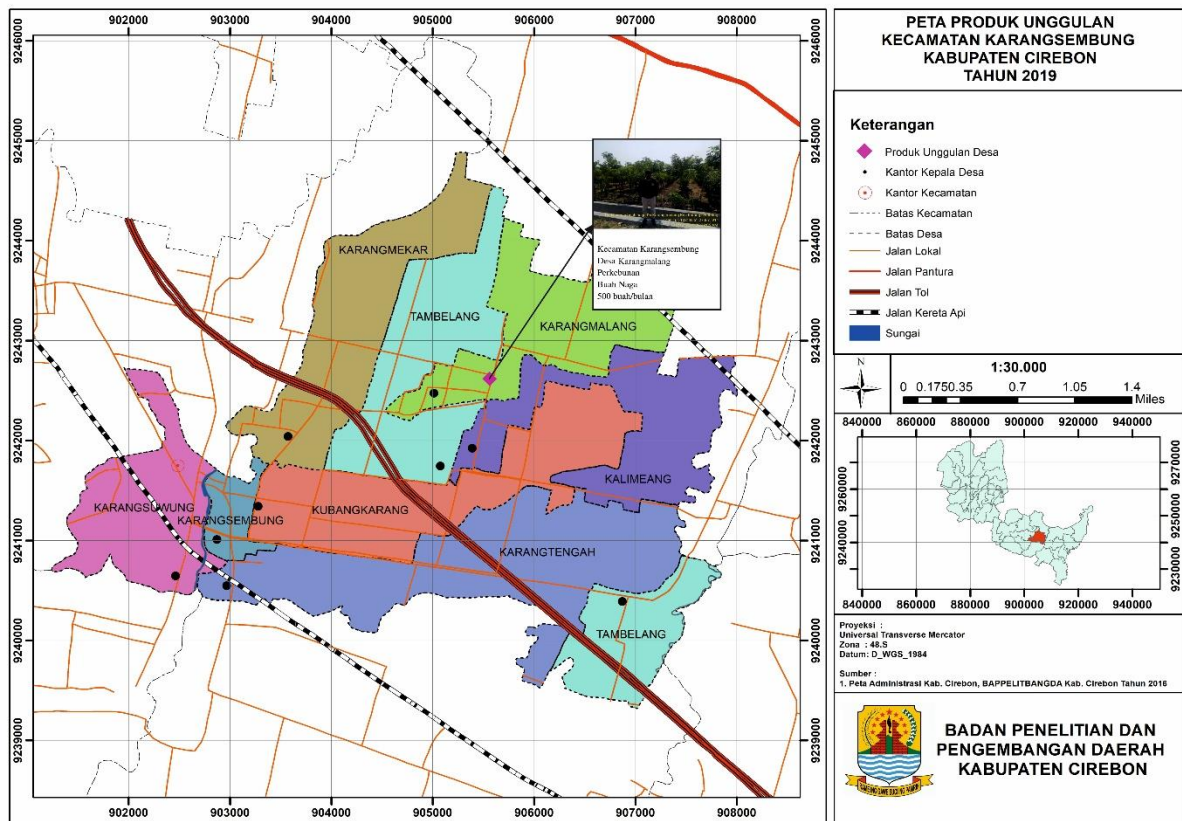
20. Kecamatan Astanajapura



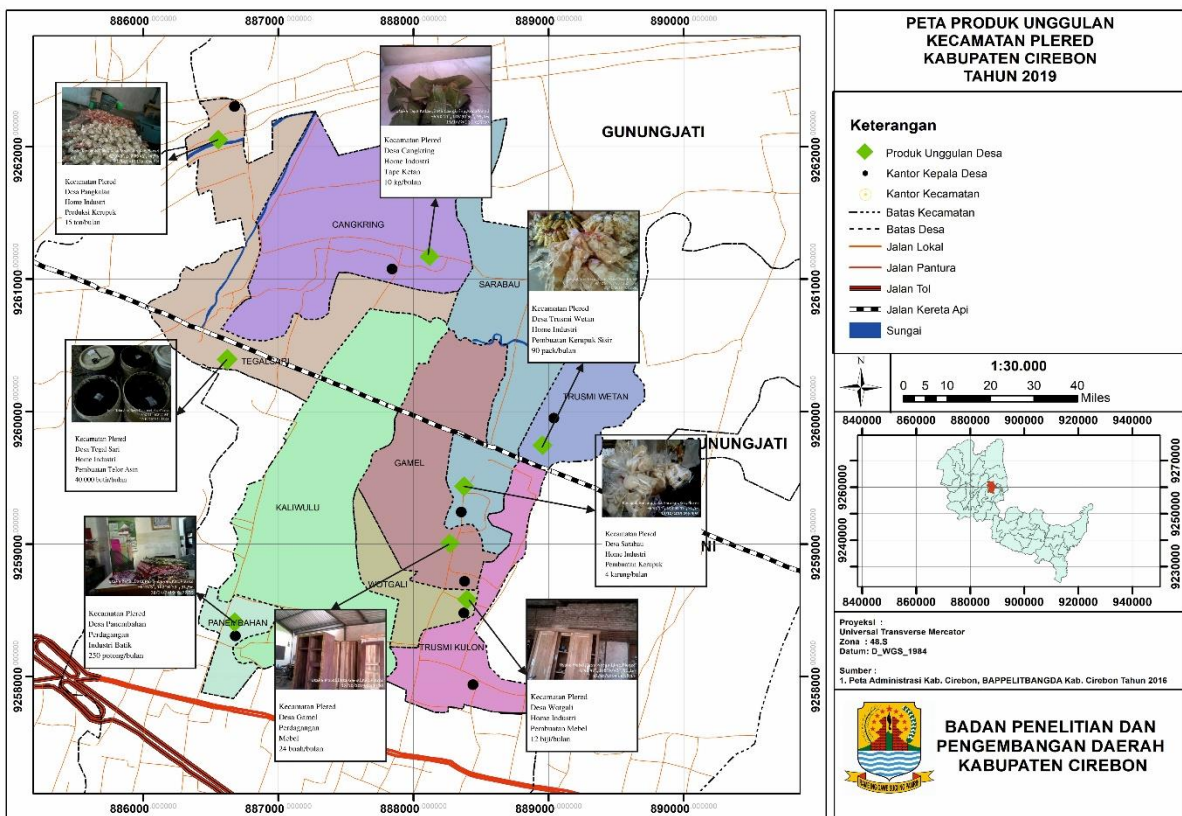
21. Kecamatan Pabedilan



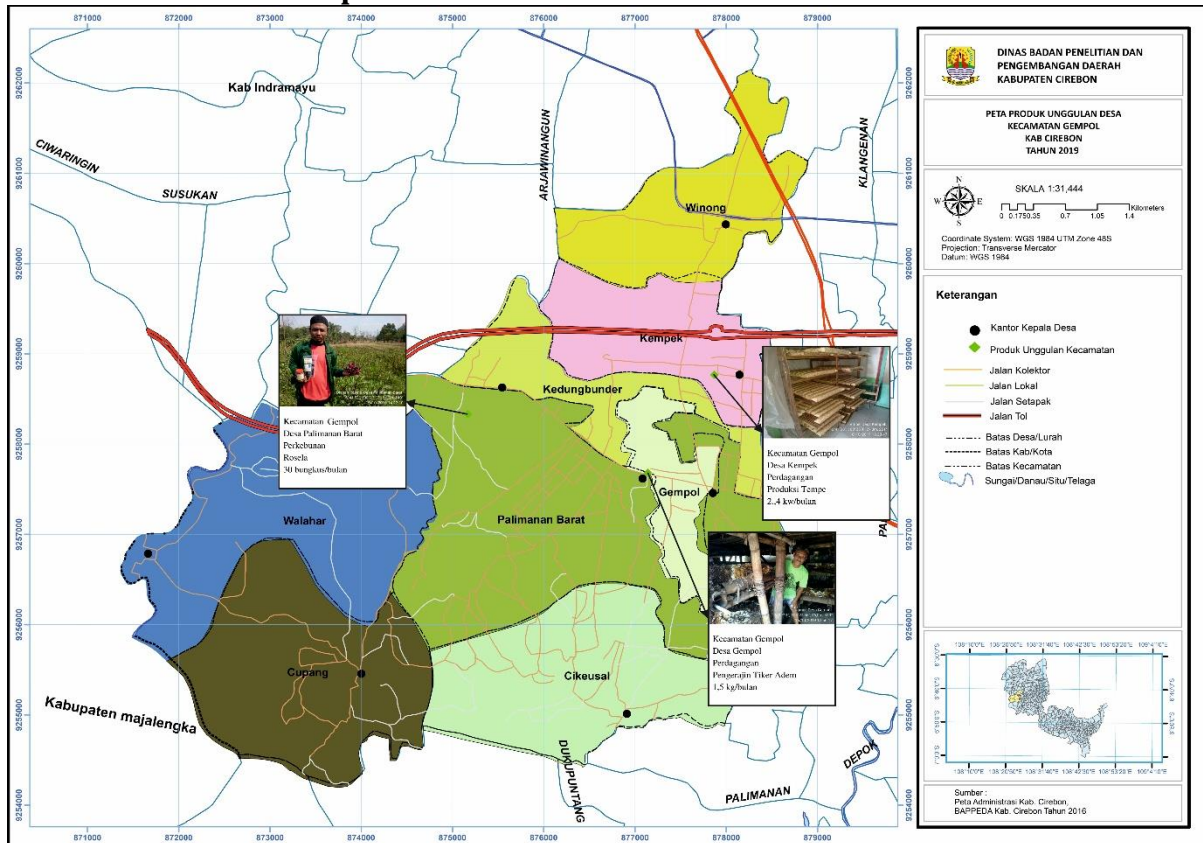
22. Kecamatan Karangsembung



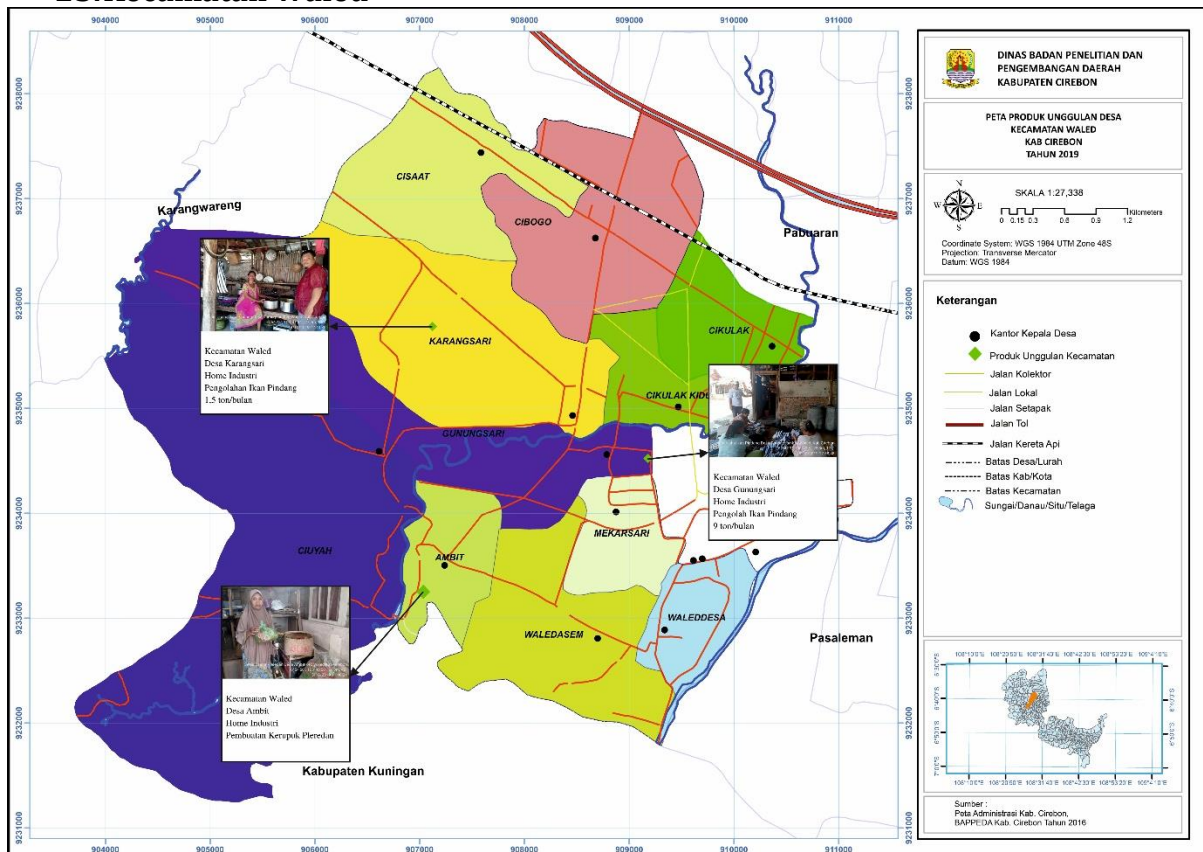
23. Kecamatan Plered



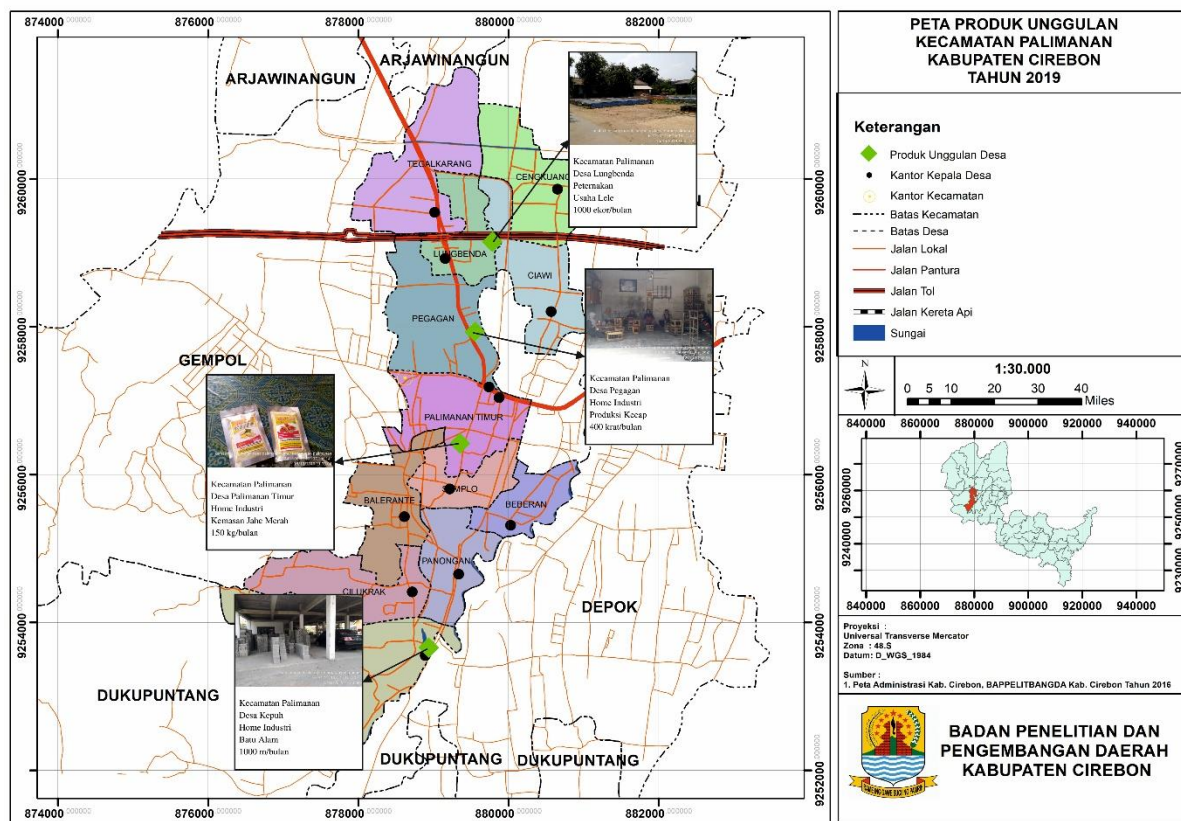
24. Kecamatan Gempol



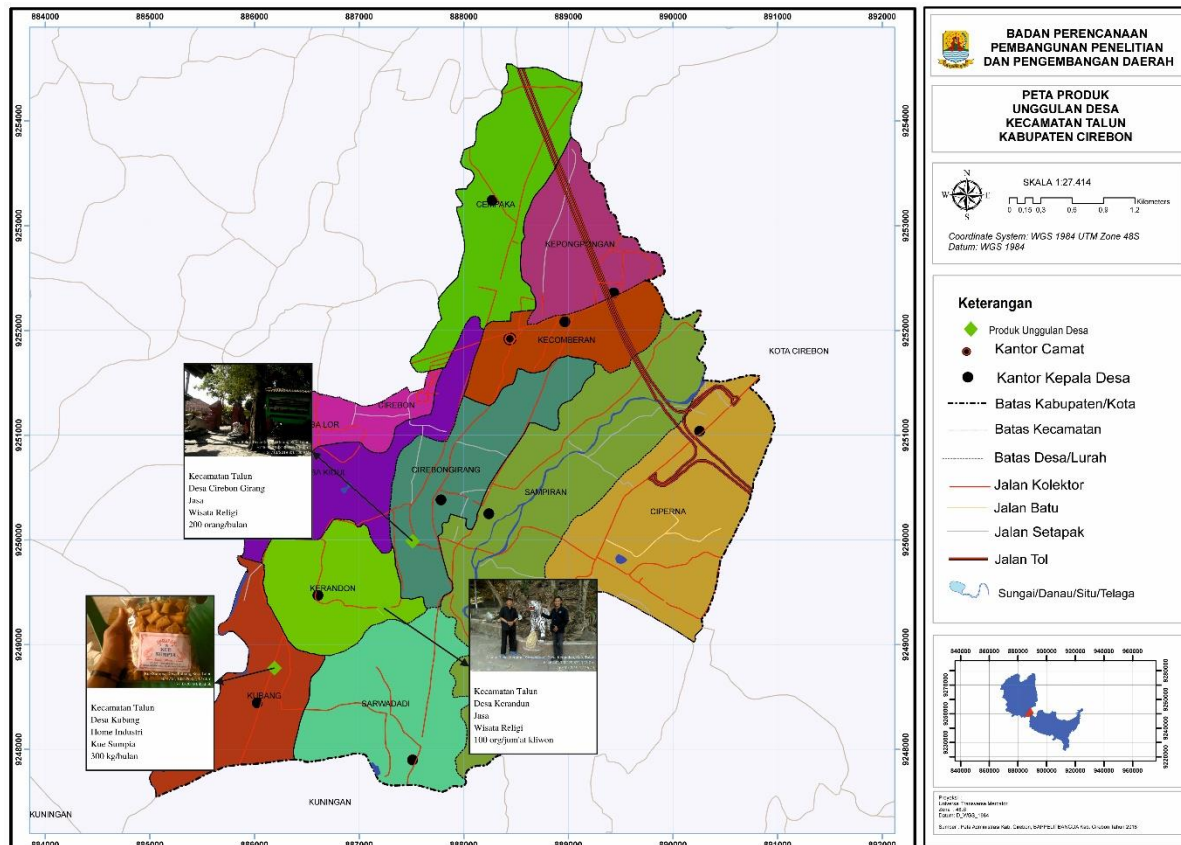
25. Kecamatan Waled



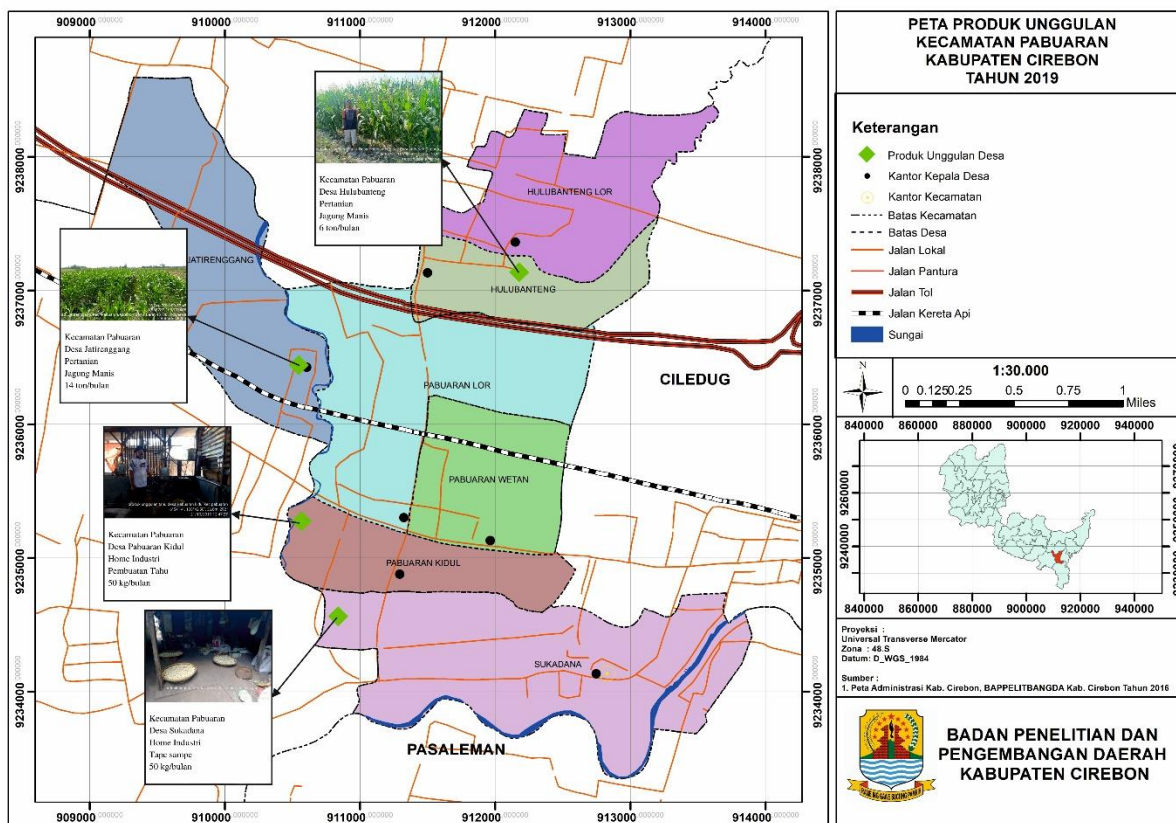
26. Kecamatan Palimanan



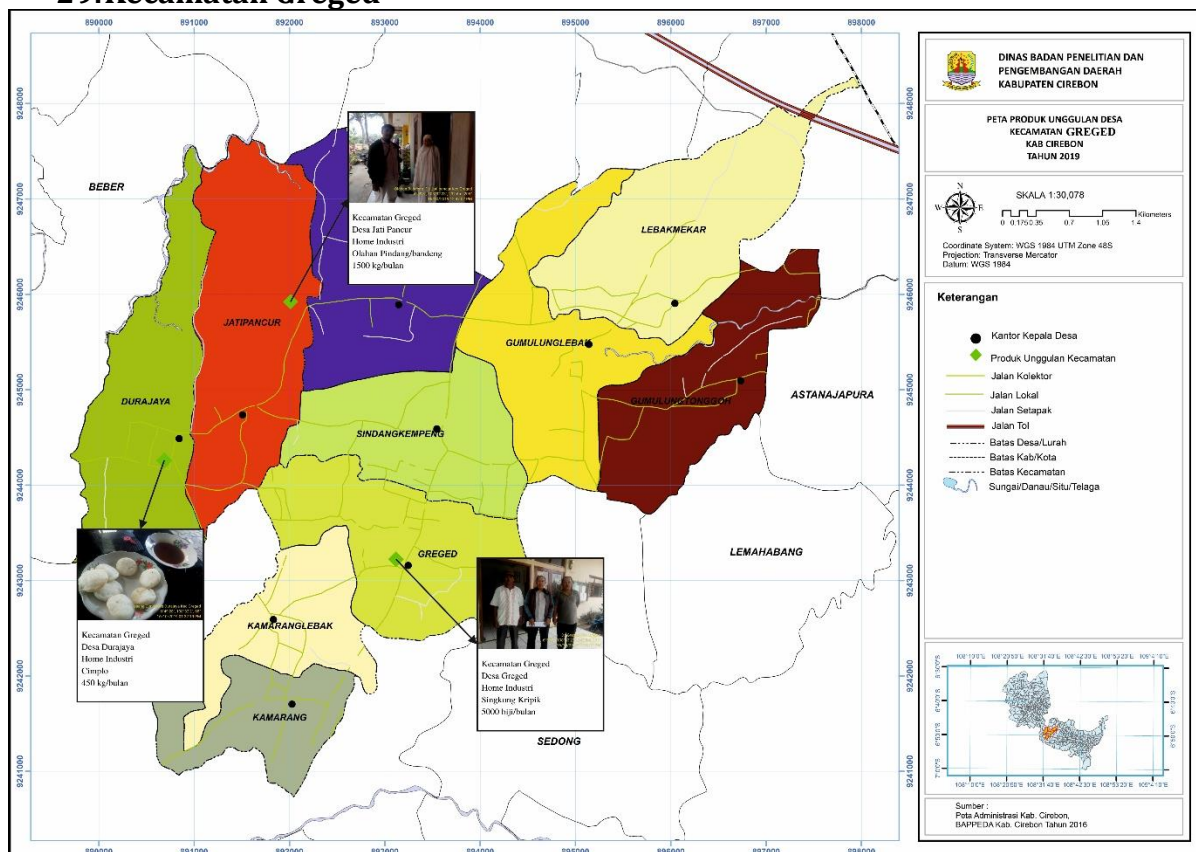
27. Kecamatan Talun



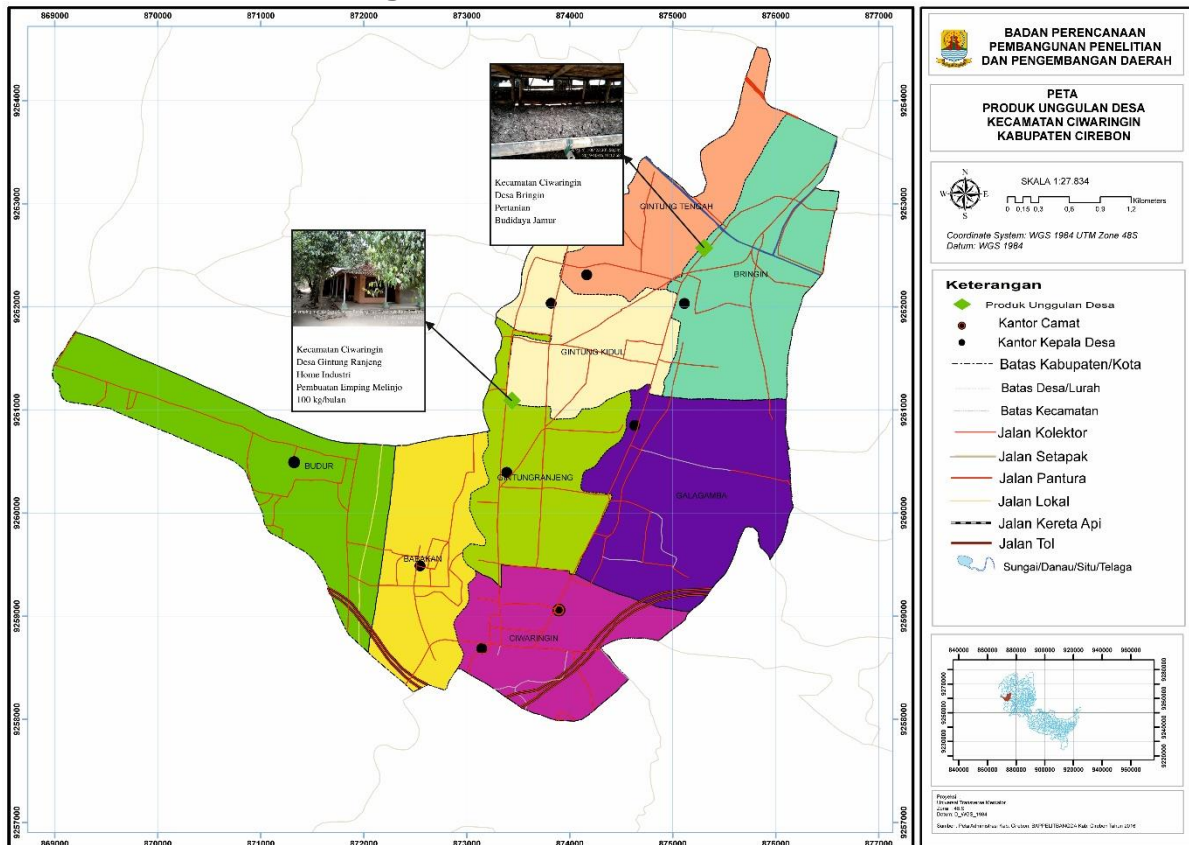
28. Kecamatan Pabuaran



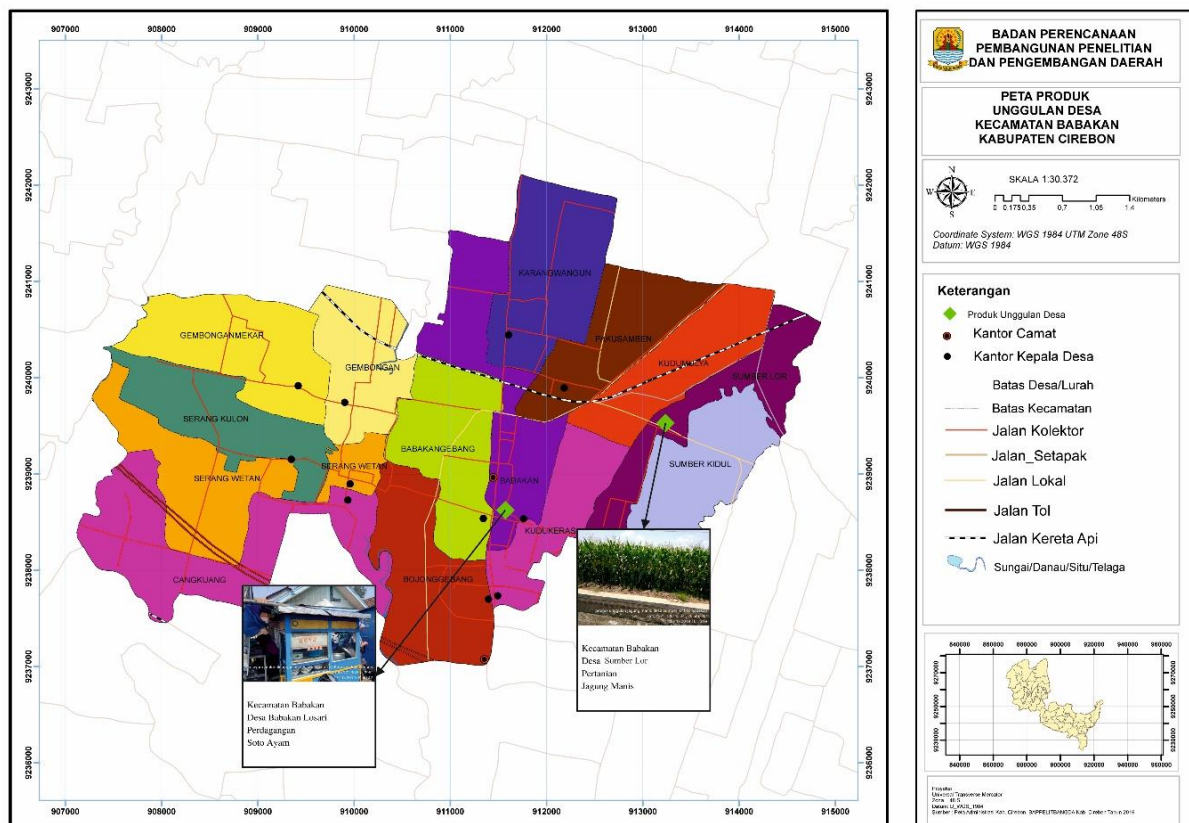
29. Kecamatan Greded



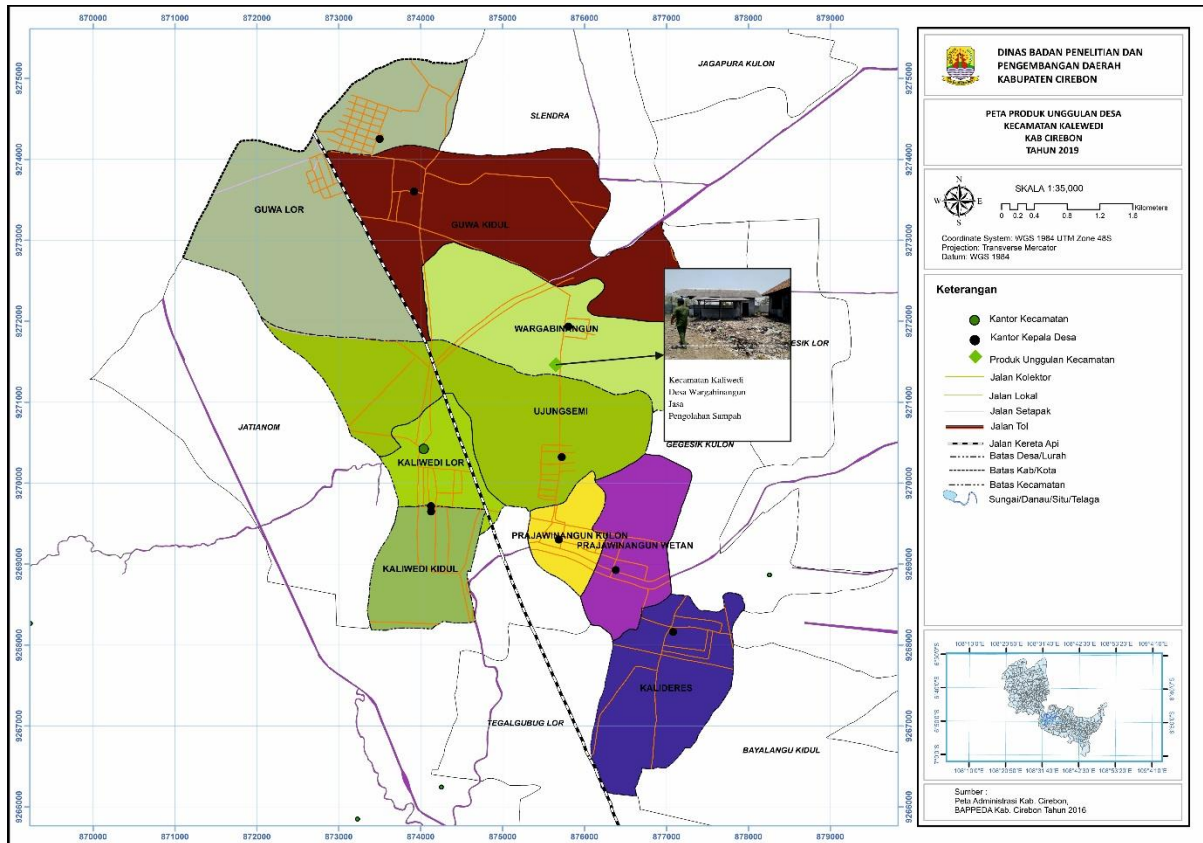
34. Kecamatan Ciwaringin



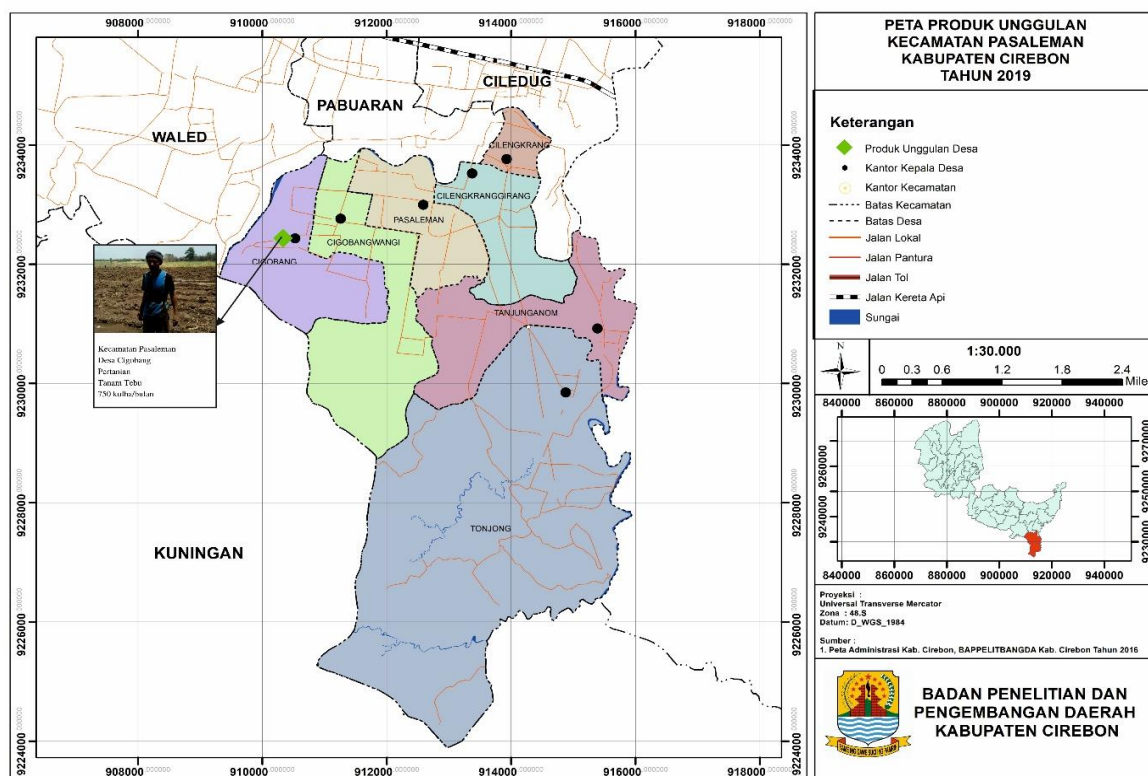
35. Kecamatan Babakan



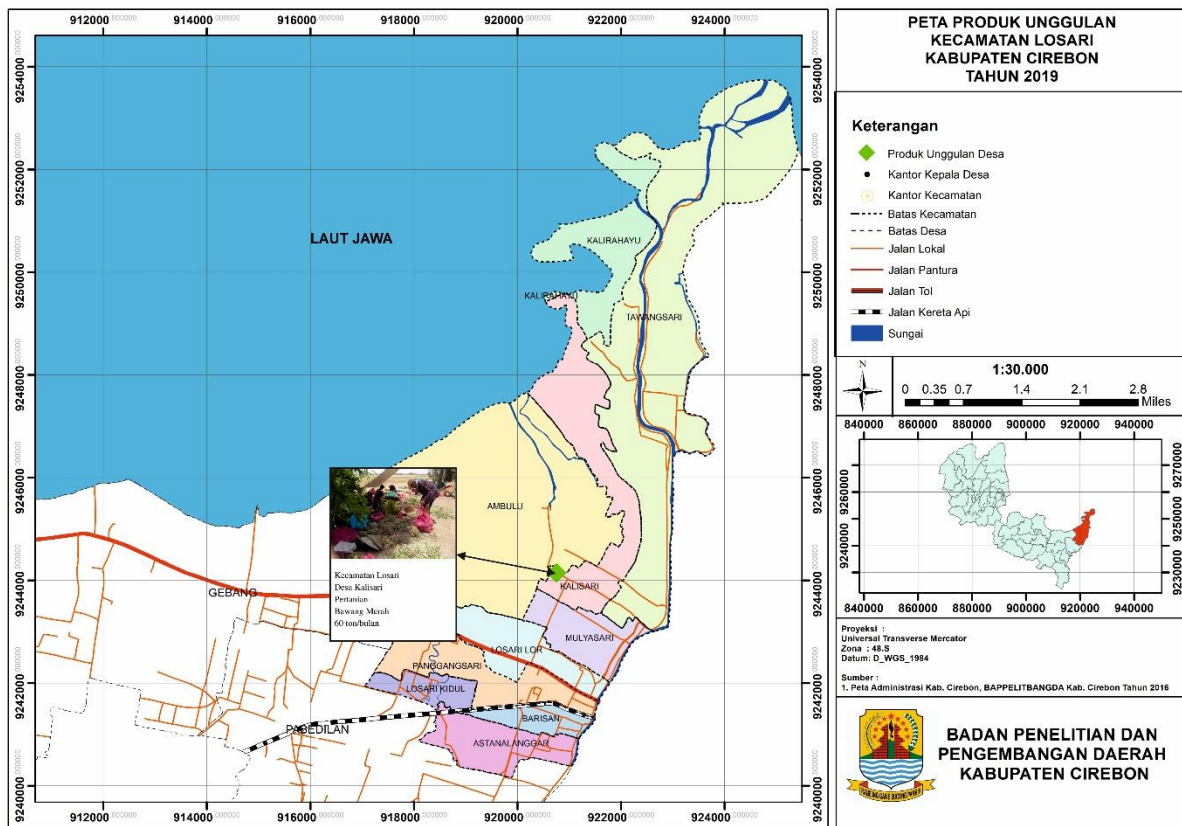
36. Kecamatan Kaliwedi



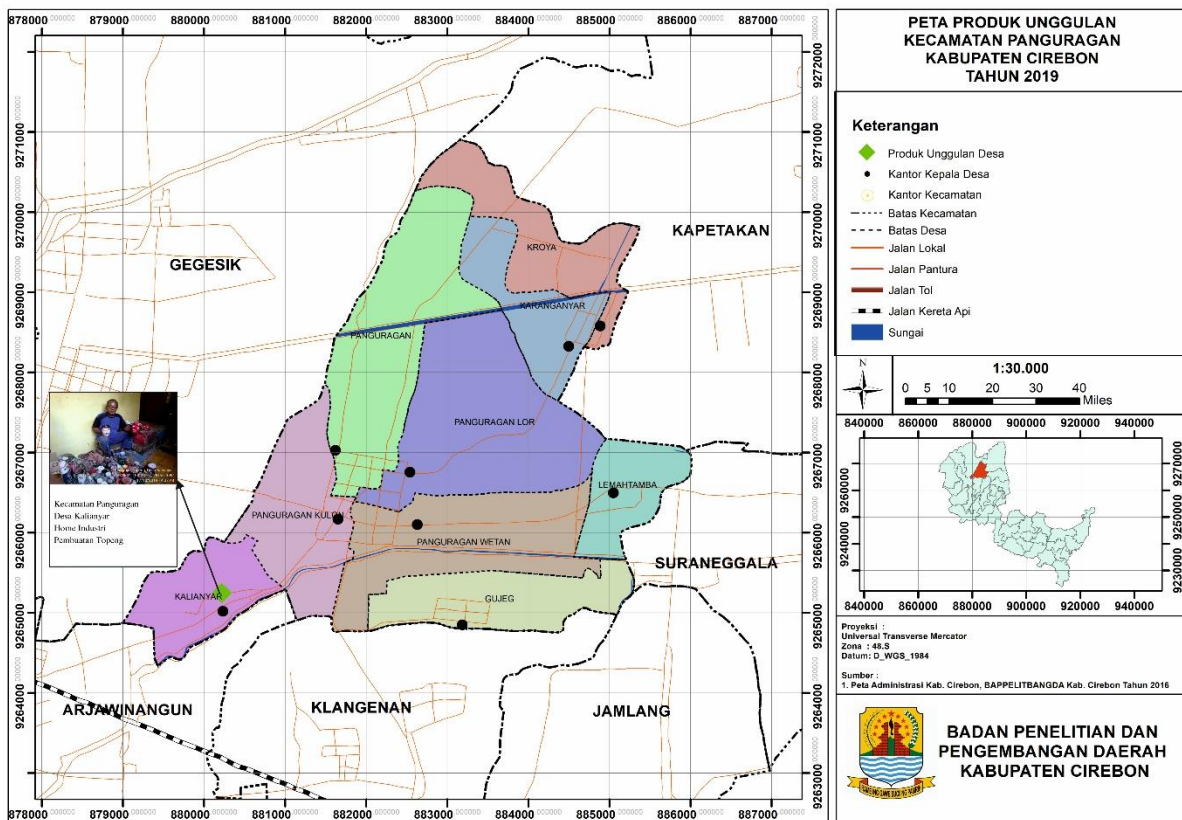
37. Kecamatan Pasaleman



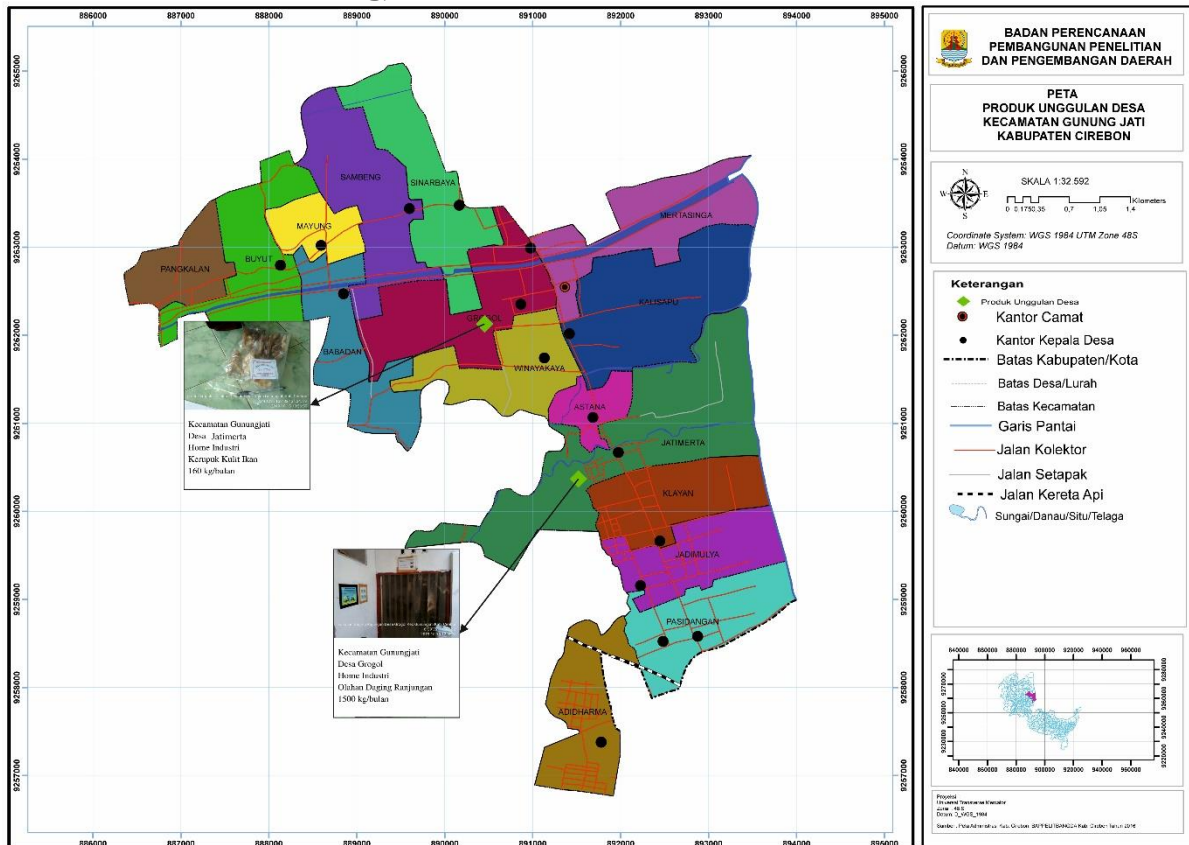
38.Kecamatan Losari



39.Kecamatan Panguragan



40. Kecamatan Gunungjati



2. PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

1. Kecamatan Arjawinangun, Desa Kebonturi



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN ARJAWINANGUN

Desa	: Kebonturi
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Pembuatan Kelambu
Lama Bisnis	: 9 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 100 kg
Pemasaran	: Online dan Bandung
No. Telp	: 089636533120
Pengelolaan	: Kelompok

1

2. Kecamatan Arjawinangun, Desa Tegalgubug



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN ARJAWINANGUN

Desa	: Tegalgubug
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Pembuatan Kelambu
Lama Bisnis	: 3 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 5.000 Pcs
Pemasaran	: Luar Jawa
No. Telp	: 081324991024
Pengelolaan	: Perorangan

2

3. Kecamatan Astanajapura, Desa Buntet



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN ASTANAJAPURA

Desa	: Buntet
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Batu Bata
Lama Bisnis	: 15 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 4.000 bata
Pemasaran	: Cirebon
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

3

4. Kecamatan Astanajapura, Desa Mertapada Kulon



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN ASTANAJAPURA

Desa	: Mertapada Kulon
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Mebel
Lama Bisnis	: 9 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 40 Unit
Pemasaran	: Kabupaten Cirebon
No. Telp	: 081220575358
Pengelolaan	: Perorangan

4

5. Kecamatan Astanajapura, Desa Mertapada Wetan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN ASTANAJAPURA

Desa	: Mertapada Wetan
Jenis Produk	: Perternakan
Produk Spesifik	: Ayam, Bebek, dan Lele
Lama Bisnis	: 2 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 4.500 Butir telur
Pemasaran	: Kecamatan
No. Telp	: 085295141572
Pengelolaan	: Perorangan

5

6. Kecamatan Babakan, Desa Babakan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN BABAKAN

Desa	: Babakan
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Soto Ayam
Lama Bisnis	: 50 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: -
Pemasaran	: -
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

6

7. Kecamatan Babakan, Desa Sumber Lor



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN BABAKAN

Desa	: Sumber Lor
Jenis Produk	: Pertanian
Produk Spesifik	: Jagung Manis
Lama Bisnis	: 15 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: -
Pemasaran	: Pasar Kecamatan
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

7

8. Kecamatan Beber, Desa Ciawi Gajah



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN BEBER

Desa	: Ciawi Gajah
Jenis Produk	: Lain-lain
Produk Spesifik	: Air Cup "Ciawi Water"
Lama Bisnis	: 1,5 Tahun
Jabatan	: Ketua BUMDes
Jumlah Produksi	: 18.000 Dus
Pemasaran	: Cirebon Barat dan Majalengka
No. Telp	: 081546405475
Pengelolaan	: BUMDes

8

9. Kecamatan Beber, Desa Cikancas



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN BEBER

Desa	: Cikancas
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Peti Kayu Buah
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: Ketua BPD
Jumlah Produksi	: 9000 biji
Pemasaran	: Desa sekitaran dan Kabupaten Cirebon
No. Telp	: 08112302005
Pengelolaan	: Perorangan

9

10. Kecamatan Beber, Desa Patapan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN BEBER

Desa	: Patapan
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Sapu Ijuk
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 6000 Buah
Pemasaran	: Bandung dan Cirebon
No. Telp	: 087847314445
Pengelolaan	: Perorangan

10

11. Kecamatan Ciledug, Desa Ciledug Lor



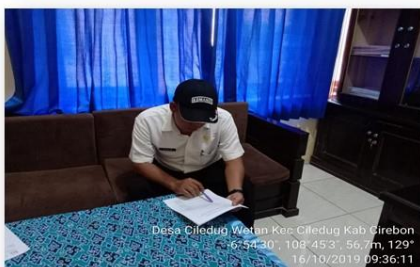
PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN CILEDUG

Desa	: Ciledug Lor
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Gerabah
Lama Bisnis	: 40 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 600 Gerabah
Pemasaran	: Daerah Kuningan
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

11

12. Kecamatan Ciledug, Desa Ciledug Wetan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN CILEDUG

Desa	: Ciledug Wetan
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kerupuk Baso
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 120 Kg
Pemasaran	: Pasar Desa
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

12

13. Kecamatan Ciledug, Desa Darmaguna



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN CILEDUG

Desa	: Darmaguna
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kerupuk Kentang Aci
Lama Bisnis	: 3 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 2.400Kg
Pemasaran	: Agen (Distributor)
No. Telp	: 085295199722
Pengelolaan	: Perorangan

13

14. Kecamatan Ciledug, Desa Tenjomaya



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN CILEDUG

Desa	: Tenjomaya
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kue Rendang
Lama Bisnis	: 23 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 90 Kg
Pemasaran	: Antar desa
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

14

15. Kecamatan Ciwaringin, Desa Bringin



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN CIWARINGIN

Desa	: Bringin
Jenis Produk	: Pertanian
Produk Spesifik	: Jamur
Lama Bisnis	: 1 Tahun
Jabatan	: Pegawai
Jumlah Produksi	: -
Pemasaran	: Pengepul (distributor)
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

15

16. Kecamatan Ciwaringin, Desa Gintung Ranjeng



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN CIWARINGIN

Desa	: Gintung Ranjeng
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Rengginang
Lama Bisnis	: 40 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 100 Kg
Pemasaran	: Toko Sendiri
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

16

17. Kecamatan Depok, Desa Kasugengan Kidul



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN DEPOK

Desa	: Kasugengan Kidul
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Batu Bata
Lama Bisnis	: 6 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 500 Bata
Pemasaran	: Desa
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

17

18. Kecamatan Depok, Desa Kasugengan Lor



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN DEPOK

Desa	: Kasugengan Lor
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Kursi Karet
Lama Bisnis	: 8 Tahun
Jabatan	: Pegawai
Jumlah Produksi	: -
Pemasaran	: Solo dan Sumatera
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

18

19. Kecamatan Depok, Desa Kaduanan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN DEPOK

Desa	: Kaduanan
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Rengginang
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 25 Kg
Pemasaran	: Toko Sendiri
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

19

20. Kecamatan Dukuhpuntang, Desa Bobos



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN DUKUHPUNTANG

Desa	: Bobos
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kripik Sukun dan Bata Ekspose
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Pengelola
Jumlah Produksi	: 1000 Bata Cetak
Pemasaran	: Cirebon, Indramayu, dan Kuningan
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

20

21. Kecamatan Dukuhpuntang, Desa Kedondong Kidul



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN DUKUHPUNTANG

Desa	: Kedondong Kidul
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Singkong & Rengginang
Lama Bisnis	: 8 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 800 Kotak
Pemasaran	: Cirebon, Majalengka, dan Kuningan
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

21

22. Kecamatan Dukuhpuntang, Desa Sindang Jawa



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN DUKUHPUNTANG

Desa	: Sindang Jawa
Jenis Produk	: Lain-lain
Produk Spesifik	: Wedang Jahe Kemasan
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Pengelola
Jumlah Produksi	: 250 Pack
Pemasaran	: Cirebon dan Kuningan
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

22

23. Kecamatan Gebang, Desa Gebang Kulon



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN GEBANG

Desa	: Gebang Kulon
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Garam Krosok
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: -
Pemasaran	: Pasar Kecamatan
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

23

24. Kecamatan Gegesik, Desa Gegesik Kidul



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN GEGESIK

Desa	: Gegesik Kidul
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Topeng
Lama Bisnis	: 27 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 30 Biji
Pemasaran	: Bandung, Jakarta dan Cirebon
No. Telp	: 081324991024
Pengelolaan	: Perorangan

24

25. Kecamatan Gegesik, Desa Jagapura Kidul



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN GEGESIK

Desa	: Jagapura Kidul
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Pandai Besi
Lama Bisnis	: 30 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 180 Unit
Pemasaran	: Pasar Cirebon
No. Telp	: 085224997145
Pengelolaan	: Perorangan

25

26. Kecamatan Gegesik, Desa Kedungdalem



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN GEGESIK

Desa	: Kedungdalem
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Pembuatan Tikar
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 3.000 Pcs
Pemasaran	: Cirebon
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

26

27. Kecamatan Gempol, Desa Gempol



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN GEMPOL

Desa	: Gempol
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Jamur
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 1,5 Kg
Pemasaran	: Luar Daerah
No. Telp	: 089661922710
Pengelolaan	: Kelompok

27

28. Kecamatan Gempol, Desa Kempek



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN GEMPOL

Desa	: Kempek
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Tempe
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 2,4 Kwintal
Pemasaran	: Lokat dan antar desa
No. Telp	: 081222374468
Pengelolaan	: Perorangan

28

29. Kecamatan Gempol, Desa Palimanan Barat



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN GEMPOL

Desa	: Palimanan Barat
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Rosela
Lama Bisnis	: 6 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 300 Pcs
Pemasaran	: Kecamatan
No. Telp	: 081312134209/083824923141
Pengelolaan	: UMKM

29

30. Kecamatan Greged, Desa Durajaya



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN GREGED

Desa	: Durajaya
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Cimplo
Lama Bisnis	: 30 Tahun
Jabatan	: 450 Kg
Jumlah Produksi	: Pemilik Usaha
Pemasaran	: Desa Sekitar
No. Telp	: 082318302972
Pengelolaan	: Perorangan

30

31. Kecamatan Greged, Desa Greged



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN GREGED

Desa	: Greged
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Keripik Singkong
Lama Bisnis	: >20 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 5000 Biji
Pemasaran	: Cirebon dan desa sekitarnya
No. Telp	: 087829750111
Pengelolaan	: Perorangan

31

32. Kecamatan Greged, Desa Jati Pancur



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN GREGED

Desa	: Jati Pancur
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Olahan Pindang
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 1500 Kg
Pemasaran	: Cirebon dan Kuningan
No. Telp	: 085224144670
Pengelolaan	: Perorangan

32

33. Kecamatan Gunungjati, Desa Grogol



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN GUNUNGJATI

Desa	: Grogol
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kupasan Daging Rajungan
Lama Bisnis	: 4 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 1.500 Kg
Pemasaran	: Lokal, Pemasang, dan Gesik
No. Telp	: 087728898586
Pengelolaan	: Perorangan

33

34. Kecamatan Gunungjati, Desa Jatimerta



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN GUNUNGJATI

Desa	: Jatimerta
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kerupuk Kulit Ikan
Lama Bisnis	: 15 Tahun
Jabatan	: Pemilik usaha
Jumlah Produksi	: 160 Kg
Pemasaran	: Lokal, Gebang, dan Sumber
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

34

35. Kecamatan Jamblang, Desa Bakung Lor



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN JAMBLANG

Desa	: Bakung Lor
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Tape Keta
Lama Bisnis	: 25 Tahun
Jabatan	: Pegawai
Jumlah Produksi	: 2.000 Pcs
Pemasaran	: Desa
No. Telp	: 082119600903
Pengelolaan	: Perorangan

35

36. Kecamatan Jamblang, Desa Jamblang



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN JAMBLANG

Desa	: Jamblang
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Mainan Anak
Lama Bisnis	: 6 Tahun
Jabatan	: Penjaga Toko
Jumlah Produksi	: -
Pemasaran	: Toko
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

36

37. Kecamatan Jamblang, Desa Orimalang



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN JAMBLANG

Desa	: Orimalang
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Pengolahan Kerupuk
Lama Bisnis	: 9 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 5 Kg
Pemasaran	: Luar Daerah
No. Telp	: 0812114313939
Pengelolaan	: Perorangan

37

38. Kecamatan Jamblang, Desa Sitiwinangun



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN JAMBLANG

Desa	: Sitiwinangun
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Gerabah
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: -
Pemasaran	: Luar Kota
No. Telp	: 081320510521
Pengelolaan	: Perorangan

38

39. Kecamatan Jamblang, Desa Wangunharja



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN JAMBLANG

Desa	: Wangunharja
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Olahan Pindang
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: -
Pemasaran	: Pengepul
No. Telp	: 082315559699
Pengelolaan	: Perorangan

39

40. Kecamatan Kaliwedi, Desa Wargabinangun



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KALIWEDI

Desa	: Wargabinangun
Jenis Produk	: Jasa
Produk Spesifik	: Pengolahan Sampah
Lama Bisnis	: 3 Tahun
Jabatan	: Pengelola
Jumlah Produksi	: -
Pemasaran	: Desa
No. Telp	: -
Pengelolaan	: UMKM

40

41. Kecamatan Kapetakan, Desa Bungko



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KAPETAKAN

Desa	: Bungko
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Garam Krosok
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Pengelola
Jumlah Produksi	: 24.000 Kg
Pemasaran	: Pengepul
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Kelompok

41

42. Kecamatan Kapetakan, Desa Pegangan Kidul



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KAPETAKAN

Desa	: Pegagan Kidul
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Pembuatan Jendela
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 200 Unit
Pemasaran	: Pesanan
No. Telp	: 081322047946
Pengelolaan	: Perorangan

42

43. Kecamatan Kapetakan, Desa Pegangan Lor



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KAPETAKAN

Desa	: Pegangan Lor
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Garam Krosok
Lama Bisnis	: 9 Tahun
Jabatan	: Pemilik Lahan
Jumlah Produksi	: 24.000 Kg
Pemasaran	: Pengepul
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Kelompok

43

44. Kecamatan Karangsembung, Desa Karangmalang



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KARANGSEMBUNG

Desa	: Karangmalang
Jenis Produk	: Pertanian
Produk Spesifik	: Buah Naga
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Pengelola
Jumlah Produksi	: 500 Buah
Pemasaran	: Desa sekitar dan Cirebon Timur
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Kelompok

44

45. Kecamatan Karangwareng, Desa Karangasem



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KARANGWARENG

Desa : Karangasem
 Jenis Produk : Home Industry
 Produk Spesifik : Rengginang
 Lama Bisnis : 10 Tahun
 Jabatan : Pemilik Usaha
 Jumlah Produksi : 40 Kg
 Pemasaran : Warung
 No. Telp : 081313261581
 Pengelolaan : Perorangan

45

46. Kecamatan Karangwareng, Desa Karangwangi



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KARANGWARENG

Desa : Karangwangi
 Jenis Produk : Usaha Kue Basah
 Produk Spesifik : Home Industry
 Lama Bisnis : 5 Tahun
 Jabatan : Pemilik Usaha
 Jumlah Produksi : 750 Kg
 Pemasaran : Pasar dan diluar Kabupaten
 No. Telp : 081312416901
 Pengelolaan : Perorangan

46

47. Kecamatan Karangwareng, Desa Karangwareng



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KARANGWARENG

Desa	: Karangwareng
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Rengginang
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 30 Kg
Pemasaran	: Pasar
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

47

48. Kecamatan Karangwareng, Desa Sumur Kondang



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KARANGWARENG

Desa	: Sumur Kondang
Jenis Produk	: Perternakan
Produk Spesifik	: Kambing
Lama Bisnis	: 8 Tahun
Jabatan	: Peternak
Jumlah Produksi	: 80 Ekor
Pemasaran	: Pasar Hewan
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

48

49. Kecamatan Kedawung, Desa Kalikoa



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KEDAWUNG

Desa	: Kalikoa
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Wajan
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 8.000 Biji
Pemasaran	: Kabupaten Cirebon
No. Telp	: 08122484954
Pengelolaan	: Perorangan

49

50. Kecamatan Kedawung, Desa Kedawung



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KEDAWUNG

Desa	: Kedawung
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Pia Atom atau Bakpia
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 1000 Lusin
Pemasaran	: Sekitaran desa
No. Telp	: 085224535194
Pengelolaan	: Perorangan

50

51. Kecamatan Kedawung, Desa Kedungdawa



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KEDAWUNG

Desa	: Kedungdawa
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Aksesoris Baju Anak
Lama Bisnis	: 25 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 400 Pack
Pemasaran	: Jakarta dan Tegal
No. Telp	: 081222182950
Pengelolaan	: UMKM

51

52. Kecamatan Kedawung, Desa Pilangsari



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KEDAWUNG

Desa	: Pilangsari
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Tempe dan Tahu
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 80 Karung
Pemasaran	: Sekitaran Desa
No. Telp	: 087881744078
Pengelolaan	: Perorangan

52

53. Kecamatan Kedawung, Desa Sutawinangun



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KEDAWUNG

Desa	: Sutawinangun
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Pot Tanaman Hias
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 100 unit
Pemasaran	: Dirumah dan tetangga
No. Telp	: 082118909990
Pengelolaan	: Perorangan

53

54. Kecamatan Klagenan, Danawinangun



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KLAGENAN

Desa	: Danawinangun
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Tahu
Lama Bisnis	: 8 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 60 Kg
Pemasaran	: Pasar Lokal
No. Telp	: 085295495574
Pengelolaan	: Perorangan

54

55. Kecamatan Klagenan, Desa Jemaras Lor



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KLAGENAN

Desa	: Jemaras Lor
Jenis Produk	: Lain-lain
Produk Spesifik	: Mainan Kapal
Lama Bisnis	: 39 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 1.000 Biji
Pemasaran	: Pasar, Kalimantan, dan Malaysia
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

55

56. Kecamatan Klagenan, Desa Pekantingan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN KLAGENAN

Desa	: Pekantingan
Jenis Produk	: Home Indsutry
Produk Spesifik	: Roti
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 50-100 Pcs
Pemasaran	: Desa
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

56

57. Kecamatan Lemahabang, Desa Asem



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN LEMAHABANG

Desa	: Asem
Jenis Produk	: Home Indsutry
Produk Spesifik	: Roti
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Pegawai
Jumlah Produksi	: 3 Kwintal
Pemasaran	: Kecamatan
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

57

58. Kecamatan Lemahabang, Desa Leuwidingding



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN LEMAHABANG

Desa	: Leuwidingding
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Tape Ketan
Lama Bisnis	: 32 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 150 Kg
Pemasaran	: Pasar Desa
No. Telp	: 081241607049
Pengelolaan	: Perorangan

58

59. Kecamatan Lemahabang, Desa Picung Pugur



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN LEMAHABANG

Desa	: Picung Pugur
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Tape Ketan
Lama Bisnis	: 25 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 1 Kwintal
Pemasaran	: Pasar Lokal
No. Telp	: 085324178663
Pengelolaan	: Perorangan

59

60. Kecamatan Lemahabang, Desa Sindang Laut



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN LEMAHABANG

Desa	: Sindang Laut
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Tempe
Lama Bisnis	: 26 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 1,5 Kwintal
Pemasaran	: Pasar Lokal
No. Telp	: 089507779235
Pengelolaan	: Perorangan

60

61. Kecamatan Losari, Desa Kalisari



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN LOSARI

Desa	: Kalisari
Jenis Produk	: Pertanian
Produk Spesifik	: Bawang
Lama Bisnis	: 8 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 60 Ton
Pemasaran	: Jakarta, Losari, dan Cirebon
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

61

62. Kecamatan Mundu, Desa Citemu



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN MUNDU

Desa	: Citemu
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Alat Tangkap Rajungan
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 300 Buah
Pemasaran	: Indramayu dan Tegal
No. Telp	: 08976537979
Pengelolaan	: Perorangan

62

63. Kecamatan Mundu, Desa Mundu Pesisir



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN MUNDU

Desa	: Mundu Pesisir
Jenis Produk	: Jasa
Produk Spesifik	: Wisata Mangrove
Lama Bisnis	: 2 Tahun
Jabatan	: Ketua Kelompok
Jumlah Produksi	: 15.000 Pengunjung
Pemasaran	: Cirebon dan Luar Provinsi
No. Telp	: 085324060473
Pengelolaan	: Kelompok

63

64. Kecamatan Mundu, Desa Sinarancang



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN MUNDU

Desa	: Sinarancang
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Pembuatan CObek
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 3000 Biji
Pemasaran	: Jakarta, Tangerang dan Bandung
No. Telp	: 085213445558
Pengelolaan	: Perorangan

64

65. Kecamatan Pabedilan, Desa Babakan Losari



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PABEDILAN

Desa	: Babakan Losari
Jenis Produk	: Pertanian
Produk Spesifik	: Jagung Manis
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: -
Pemasaran	: Pasar Kecamatan
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

65

66. Kecamatan Pabedilan, Desa Pabedilan Wetan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PABEDILAN

Desa	: Pabedilan Wetan
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Rengginang
Lama Bisnis	: 25 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 1,5 ton
Pemasaran	: Pasar Desa
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

66

67. Kecamatan Pabuaran, Desa Hulubanteng



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PABUARAN

Desa	: Hulubanteng
Jenis Produk	: Pertanian
Produk Spesifik	: Jagung Manis
Lama Bisnis	: 15 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 6 Ton
Pemasaran	: Pasa Induk Jakarta
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

67

68. Kecamatan Pabuaran, Desa Jatirenggang



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PABUARAN

Desa	: Jatirenggang
Jenis Produk	: Pertanian
Produk Spesifik	: Jagung Manis
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 14 Ton
Pemasaran	: Cibitung
No. Telp	: 085314419452
Pengelolaan	: Perorangan

68

69. Kecamatan Pabuaran, Desa Pabuaran Kidul



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PABUARAN

Desa	: Pabuaran Kidul
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Pengolahan Tahu
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 50 Kg
Pemasaran	: Pasar Desa
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

69

70. Kecamatan Pabuaran, Desa Sukadana



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PABUARAN

Desa	: Sukadana
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Tape Sampe
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 50 Kg
Pemasaran	: Pasar Kecamatan
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

70

71. Kecamatan Palimanan, Desa Kepuh



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PALIMANAN

Desa	: Kepuh
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Batu Alam
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 1.000m
Pemasaran	: Jakarta dan Yogyakarta
No. Telp	: 08122406027
Pengelolaan	: Perorangan

71

72. Kecamatan Palimanan, Desa Lungbenda



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PALIMANAN

Desa	: Lungbenda
Jenis Produk	: Perternakan
Produk Spesifik	: Lele Sangkuriang
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Ketua Kelompok
Jumlah Produksi	: 1.000 Ekor
Pemasaran	: -
No. Telp	: 081313248847
Pengelolaan	: Kelompok

72

73. Kecamatan Palimanan, Desa Palimanan Timur



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PALIMANAN

Desa	: Palimanan Timur
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kemasan Jahe Merah
Lama Bisnis	: 6 Tahun
Jabatan	: Anggota Rukun Lestari
Jumlah Produksi	: 150 Kg
Pemasaran	: Galeri, Pasar, dan Bazar
No. Telp	: 081932148720
Pengelolaan	: Kelompok

73

74. Kecamatan Palimanan, Desa Pegangan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PALIMANAN

Desa	: Pegangan
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kecap Lombok
Lama Bisnis	: 13 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 4.000 Krat
Pemasaran	: Wilayah 3 Cirebon
No. Telp	: 081313126663
Pengelolaan	: Perorangan

74

75. Kecamatan Pangenan, Desa Astanamukti



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PANGENAN

Desa	: Astanamukti
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Gerabah
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 20.000 Buah
Pemasaran	: Kabupaten Cirebon
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

75

76. Kecamatan Pangenan, Desa Ender



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PANGENAN

Desa	: Ender
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Ikan Asin
Lama Bisnis	: 25 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 60 Ton
Pemasaran	: Kuningan
No. Telp	: 0812220442999
Pengelolaan	: Perorangan

76

77. Kecamatan Panguragan, Desa Kalianyar



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PANGURAGAN

Desa	: Kalianyar
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Topeng
Lama Bisnis	: 26 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: -
Pemasaran	: Toko
No. Telp	: 081220605303
Pengelolaan	: Perorangan

77

78. Kecamatan Pasaleman, Desa Tanjung Anom

PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PASALEMAN

Desa	: Tanjung Anom
Jenis Produk	: Pertanian
Produk Spesifik	: Tebu
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Petani
Jumlah Produksi	: 600 Kwintal
Pemasaran	: Masyarakat dan agen (distributor)
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

78

79. Kecamatan Pasaleman, Desa Cigobang



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PASALEMAN

Desa	: Cigobang
Jenis Produk	: Pertanian
Produk Spesifik	: Tebu
Lama Bisnis	: 30 Tahun
Jabatan	: Petani
Jumlah Produksi	: 750 Kwintal
Pemasaran	: Pabrik Gula
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Kelompok

79

80. Kecamatan Plered, Desa Cangkring



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PLERED

Desa	: Cangkring
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Tape Ketan
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 10 Kg
Pemasaran	: Cirebon
No. Telp	: 082127373230
Pengelolaan	: Perorangan

80

81. Kecamatan Plered, Desa Gamel



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PLERED

Desa	: Gamel
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Mebel
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 24 Biji
Pemasaran	: Cirebon dan Luar Cirebon
No. Telp	: 08122193316
Pengelolaan	: Perorangan

81

82. Kecamatan Plered, Desa Panembahan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PLERED

Desa	: Panembahan
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kerajinan Batik
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 250 Potong
Pemasaran	: Cirebon dan Luar Cirebon
No. Telp	: 081222020305
Pengelolaan	: Perorangan

82

83. Kecamatan Plered, Desa Pangkalan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PLERED

Desa	: Pangkalan
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Pengolahan Kerupuk
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 1,5 Ton
Pemasaran	: Cirebon dan Luar Cirebon
No. Telp	: 082318576000
Pengelolaan	: Perorangan

83

84. Kecamatan Plered, Desa Sarabau



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PLERED

Desa	: Sarabau
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Pembuatan Kerupuk
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 4 Karung
Pemasaran	: Cirebon
No. Telp	: 082316563916
Pengelolaan	: Perorangan

84

85. Kecamatan Plered, Desa Tegalsari



Desa Tegalsari, Kec. Plered
-6°42'2", 108°29'39", 50.1m
21/10/2019 11:21:30 AM



Usaha Telor Asin, Desa Tegalsari, Kec. Plered
-6°42'11", 108°29'54"
17/10/2019 14:18:03

PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PLERED

Desa	: Tegalsari
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Telor Asin
Lama Bisnis	: 50 Tahun
Jabatan	: Pengelola
Jumlah Produksi	: 40.000 Butir
Pemasaran	: Cirebon
No. Telp	: 08324799907
Pengelolaan	: Kelompok

85

86. Kecamatan Plered, Desa Trusmi Wetan



Desa Trusmi Wetan, Kec. Plered
-6°42'1", 108°30'45", 33.0m
18/10/2019 1:29:54 PM



Kerupuk Sisir, Desa Trusmi Wetan, Kec. Plered
-6°42'6", 108°30'46", 27.0m
21/10/2019 10:09:08

PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PLERED

Desa	: Trusmi Wetan
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kerupuk Sisir
Lama Bisnis	: 23 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 90 Pack
Pemasaran	: Distributor
No. Telp	: 085221922177
Pengelolaan	: Perorangan

86

87. Kecamatan Plered, Desa Wotgali



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PLERED

Desa	: Wotgali
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Mebel
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 12 Biji
Pemasaran	: Cirebon
No. Telp	: 082127410070
Pengelolaan	: Perorangan

87

88. Kecamatan Plumbon, Desa Bodesari



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PLUMBON

Desa	: Bodesari
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Rotan
Lama Bisnis	: 70 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 40 Set
Pemasaran	: Ditempat dan diluar kota
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

88

89. Kecamatan Plumbon, Desa Gombang



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN PLUMBON

Desa	: Gombang
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Rotan
Lama Bisnis	: 28 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 400 Unit
Pemasaran	: Sesuai Pesanan
No. Telp	: 085221308000
Pengelolaan	: Perorangan

89

90. Kecamatan Sedong, Desa Karangwuni



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SEDONG

Desa	: Karangwuni
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Leuput
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: IRT (Ibu Rumah Tangga)
Jumlah Produksi	: 3.000 Biji
Pemasaran	: Luar Kecamatan
No. Telp	: 0831322124428
Pengelolaan	: Perorangan

90

91. Kecamatan Sedong, Desa Panambangan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SEDONG

Desa	: Panambangan
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Opak
Lama Bisnis	: 21 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 41 Kg
Pemasaran	: Kecamatan
No. Telp	: 08567814737
Pengelolaan	: Perorangan

91

92. Kecamatan Sedong, Desa Panongan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SEDONG

Desa	: Panongan
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Jamur Krispy
Lama Bisnis	: 6 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 2.000 Baglog
Pemasaran	: Pasar Lokal
No. Telp	: 085321008127
Pengelolaan	: Perorangan

92

93. Kecamatan Sedong, Desa Sedong Kidul



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SEDONG

Desa	: Sedong Kidul
Jenis Produk	: Peternakan
Produk Spesifik	: Kambing
Lama Bisnis	: 1 Tahun
Jabatan	: Kelompok
Jumlah Produksi	: 2 ekor/6 bulan
Pemasaran	: Pasar Desa
No. Telp	: 081380876616
Pengelolaan	: Kelompok

93

94. Kecamatan Sedong, Desa Windujaya



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SEDONG

Desa	: Windujaya
Jenis Produk	: Pertanian
Produk Spesifik	: Buah Naga
Lama Bisnis	: 4 Tahun
Jabatan	: Sekertaris TPP
Jumlah Produksi	: 125 Kg
Pemasaran	: Desa
No. Telp	: 08199851727
Pengelolaan	: Kelompok

94

95. Kecamatan Sumber, Desa Sidawangi



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SUMBER

Desa	: Sidawangi
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Otak-otak
Lama Bisnis	: 12 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 25.000 Pcs
Pemasaran	: Cirebon
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

95

96. Kecamatan Suranenggala, Desa Karangreja



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SURANENGGALA

Desa	: Karangreja
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Ikan Bilis & Ikan laut lain
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Pedagan Ikan
Jumlah Produksi	: 900 Kg
Pemasaran	: Pasar desa dan Kecamatan
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

96

97. Kecamatan Suranenggala, Desa Keraton



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SURANENGGALA

Desa	: Keraton
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kerupuk Kulit Ikan
Lama Bisnis	: >10 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 5000 pcs
Pemasaran	: Pasar desa Kabupaten Cirebon, Indramayu
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

97

98. Kecamatan Suranenggala, Desa Muara



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SURANENGGALA

Desa	: Muara
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kerupuk Bawang
Lama Bisnis	: 7 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 9000 pcs
Pemasaran	: Pasar desa Kabupaten Cirebon
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

98

99. Kecamatan Suranenggala, Desa Suranenggala Lor



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SURANENGGALA

Desa	: Suranenggala Lor
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Grejeg Udang
Lama Bisnis	: 10 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 5000 pack
Pemasaran	: Cirebon, Indramayu, Jakarta
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

99

100. Kecamatan Susukan, desa Kejiwan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SUSUKAN

Desa	: Kejiwan
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Mainan Anak
Lama Bisnis	: 4 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 300-500 Pcs
Pemasaran	: Luar Daerah
No. Telp	: 089623920454
Pengelolaan	: Perorangan

100

101. Kecamatan Susukan, Desa Luwung Kencana



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SUSUKAN

Desa	: Luwung Kencana
Jenis Produk	: Pertanian
Produk Spesifik	: Jamur Merang
Lama Bisnis	: 7 Tahun
Jabatan	: Petani
Jumlah Produksi	: 2 Kwintal
Pemasaran	: Luar Daerah
No. Telp	: 087829511288
Pengelolaan	: Perorangan

101

102. Kecamatan Susukan, Desa Susukan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SUSUKAN

Desa	: Susukan
Jenis Produk	: Jasa
Produk Spesifik	: Konveksi
Lama Bisnis	: 4 Tahun
Jabatan	: Penjahit
Jumlah Produksi	: Tak menentu
Pemasaran	: Pengepul atau pemasok
No. Telp	: 089515552415
Pengelolaan	: Perorangan

102

103. Kecamatan Susukan Lebak, Desa Ciawi Asih



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SUSUKAN LEBAK

Desa	: Ciawi Asih
Jenis Produk	: Perdagangan
Produk Spesifik	: Air Baku
Lama Bisnis	: 1 Tahun
Jabatan	: Ketua BUMDes
Jumlah Produksi	: 150-250 Tangki
Pemasaran	: Pasar desa sekitar
No. Telp	: 08122105415
Pengelolaan	: BUMDes

103

104. Kecamatan Susukan Lebak, Desa Curug



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SUSUKAN LEBAK

Desa	: Curug
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Bata Merah
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 90.000 Bata
Pemasaran	: Kuningan dan Cirebon
No. Telp	: 081324276072
Pengelolaan	: Perorangan

104

105. Kecamatan Susukan Lebak, Desa Curug Wetan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SUSUKAN LEBAK

Desa	: Curug Wetan
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Bata Merah
Lama Bisnis	: 15 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 60.000 Bata
Pemasaran	: Kuningan, Cirebon dan Banjarharjo
No. Telp	: 085321281331
Pengelolaan	: Perorangan

105

106. Kecamatan Susukan Lebak, Desa Susukan Tonggoh



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SUSUKAN LEBAK

Desa	: Susuka Tonggoh
Jenis Produk	: Jasa
Produk Spesifik	: Bumi Perkemahan
Lama Bisnis	: 2 Tahun
Jabatan	: Ketua BUMDes
Jumlah Produksi	: Tahap Pengembangan
Pemasaran	: -
No. Telp	: 08521065000
Pengelolaan	: BUMDes

106

107. Kecamatan Susukan Lebal, Desa Wilulang



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN SUSUKAN LEBAK

Desa : Wilulang
 Jenis Produk : Pertanian
 Produk Spesifik : Gabah
 Lama Bisnis : 2 Tahun
 Jabatan : Ketua BUMDes
 Jumlah Produksi : 8 Ton
 Pemasaran : Desa Sekitar
 No. Telp : 0896664210450
 Pengelolaan : BUMDes

107

108. Kecamatan Talun, Desa Cirebon Girang



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN TALUN

Desa : Cirebon Girang
 Jenis Produk : Jasa
 Produk Spesifik : Wisata Religi
 Lama Bisnis : -
 Jabatan : Kelompok
 Jumlah Produksi : 200 Orang
 Pemasaran : -
 No. Telp : 08122463752
 Pengelolaan : BUMDes

108

109. Kecamatan Talun, Desa Kerandon



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN TALUN

Desa	: Kerandon
Jenis Produk	: Jasa
Produk Spesifik	: Wisata Religi
Lama Bisnis	: 80 Tahun
Jabatan	: Kelompok
Jumlah Produksi	: 100 Orang (Jum'at Kliwon)
Pemasaran	: -
No. Telp	: 081218263017
Pengelolaan	: Kelompok

109

110. Kecamatan Talun, Desa Kubang



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN TALUN

Desa	: Kubang
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kue Sumpia
Lama Bisnis	: 5 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 300 Kg
Pemasaran	: Pasar Kabupaten Cirebon
No. Telp	: 082129339325
Pengelolaan	: Perorangan

110

111. Kecamatan Tengahtani, Desa Batembat



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN TENGAHTANI

Desa	: Batembat
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Pengolahan Kerupuk Kulit
Lama Bisnis	: 19 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 3 Kwintal
Pemasaran	: Cirebon
No. Telp	: 082130031888
Pengelolaan	: Perorangan

111

112. Kecamatan Tengahtani, Desa Dawuan



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN TENGAHTANI

Desa	: Dawuan
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Empal Gentong
Lama Bisnis	: 6 Tahun
Jabatan	: Pegawai
Jumlah Produksi	: 3000 Mangkok
Pemasaran	: -
No. Telp	: 081222561319
Pengelolaan	: Perorangan

112

113. Kecamatan Tengahtani, Desa Gesik



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN TENGAHTANI

Desa	: Gesik
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Pengolahan Kerupuk
Lama Bisnis	: 39 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 56 Kwintal
Pemasaran	: Pengepul mengambil (distributor)
No. Telp	: 087879655977
Pengelolaan	: Perorangan

113

114. Kecamatan Tengahtani, Desa Kalibaru



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN TENGAHTANI

Desa	: Kalibaru
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Pengolahan Tahu
Lama Bisnis	: 9 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 60 Kwintal
Pemasaran	: Cirebon
No. Telp	: 081312221608
Pengelolaan	: Perorangan

114

115. Kecamatan Tengahtani, Desa Kemlaka Gede



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN TENGAHTANI

Desa	: Kemlaka Gede
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Pengolahan Tahu
Lama Bisnis	: 30 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 6000 Kg
Pemasaran	: Desa dan Kecamatan
No. Telp	: 082127546511
Pengelolaan	: Perorangan

115

116. Kecamatan Waled, Desa Ambit



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN WALED

Desa	: Ambit
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kerupuk Pleredan
Lama Bisnis	: -
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 1 Ton
Pemasaran	: Lokal dan antar desa
No. Telp	: 083154637264
Pengelolaan	: Perorangan

116

117. Kecamatan Waled, Desa Gunungsari



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN WALED

Desa	: Gunungsari
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Ikan Pindang
Lama Bisnis	: 20 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 9 Ton
Pemasaran	: Majalengka
No. Telp	: 082120940513
Pengelolaan	: Perorangan

117

118. Kecamatan Waled, Desa Karangsari



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN WALED

Desa	: Karangsari
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Ikan Pindang
Lama Bisnis	: 15 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 1,5 Ton
Pemasaran	: Keliling
No. Telp	: -
Pengelolaan	: Perorangan

118

119. Kecamatan Weru, Desa Kertasari



Desa Kertasari, Kec. Weru
-6°43'36", 108°29'26", 49.0m
17/10/2019 10:43:56 AM



Usaha Net dan Bola, Desa Kertasari, Kec. Weru
-6°43'19", 108°29'37", 42.0m
17/10/2019 11:03:13

PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN WERU

Desa	: Kertasari
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Net dan Bola
Lama Bisnis	: 15 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 2.000 Pcs
Pemasaran	: Keluar Kota
No. Telp	: 081324900110
Pengelolaan	: UMKM

119

120. Kecamatan Weru, Desa Setu Kulon



Desa Setu Kulon, Kec. Weru
-6°42'51", 108°30'27", 28.0m
21/10/2019 10:21:30



Kerupuk Mlarat, Desa Setu Kulon, Kec. Weru
-6°42'53", 108°30'29", 43.0m
19/10/2019 10:27:59 AM

PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN WERU

Desa	: Setu Kulon
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Kerupuk Mlarat
Lama Bisnis	: 3 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 52 Kwintal
Pemasaran	: Pasar Kabupaten Cirebon
No. Telp	: 085294312921
Pengelolaan	: Perorangan

120

121. Kecamatan Weru, Desa Weru Kidul



PROFIL PRODUK UNGGULAN DESA

PROGULDES KECAMATAN WERU

Desa	: Weru Kidul
Jenis Produk	: Home Industry
Produk Spesifik	: Donat dan Kue Pisang
Lama Bisnis	: 2 Tahun
Jabatan	: Pemilik Usaha
Jumlah Produksi	: 20.000 Biji
Pemasaran	: Pasar Kabupaten Cirebon
No. Telp	: 08966060792
Pengelolaan	: Perorangan

121